



LAPORAN KEGIATAN PENELITIAN

MASTER PLAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN PESISIR BARAT

LABUHAN JUKUNG-KIRUI





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Gedung Rektorat Lantai 5, Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 705173, Fax. (0721) 773798, e-mail : lppm@kpa.unila.ac.id
www.lppm.unila.ac.id

SURAT KETERANGAN
Nomor: ~~340~~ 2/UN26.21/PM/2020

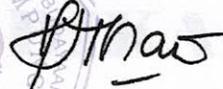
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung,
menerangkan dibawah ini :

Nama : Dr. Erlina Rufaidah, S.E., M.Si.
NIP : 195808281986012001
Jabatan : Dosen FKIP Unila

Bahwa Dosen tersebut benar, melaksanakan kegiatan Penelitian dengan judul "**Kajian Akademis Master Plan Pendidikan Dasar di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017**".

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 12 Mei 2020
Ketua LPPM Unila,


Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, DEA.
NIP 196505101993032008

Tembusan :
Dekan FKIP Unila

Dok.titik/surat ket/v/20



LAPORAN
KEGIATAN PENELITIAN MASTER
PLAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN PESISIR BARAT

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG
DAN
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya lah kami dapat menyelesaikan “ Master Plan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017” dengan baik tanpa ada halangan yang berarti.

Laporan ini dapat diselesaikan dengan maksimal berkat adanya kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak utamanya kepada Bapak Bupati Pesisir Barat dan kepada semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu kami sampaikan banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada segenap pihak yang telah berkontribusi secara maksimal dalam penyelesaian proposal ini.

Kami mengharapkan tanggapan dan saran dari semua pihak demi perbaikan master plan ini. Dengan master plan ini kami berharap dapat membantu pemerintah dalam merancang pendidikan yang sesuai dengan keadaan dan tuntutan zaman terlebih di era globalisasi seperti saat ini demi terwujudnya kecerdasan SDM yang berdaya saing dan berkualitas. Semoga *Master Plan* ini dapat berguna dan bermanfaat untuk masyarakat luas.

Bandar Lampung, Desember 2017

Tim Peneliti





DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
I LATAR BELAKANG	3
II MAKSUD DAN TUJUAN	5
III DESKRIPSI KEGIATAN	6
A. Jenis Kegiatan	6
B. Deskripsi/ Uraian Singkat Kegiatan	6
C. Urgensi Penelitian	7
D. Output Kegiatan	8
E. Metode Kegiatan	8
F. Jadwal Kegiatan	12
G. Rencana Anggaran Biaya	12
H. Tim Peneliti dan Uraian Job Deskripsi	16
I. Sumber Pendanaan	17
J. Pengesahan	
IV ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA	
V PENUTUP	
VI DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	





LAPORAN
MASTER PLAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KABUPATEN PESISIR BARAT
TAHUN 2017

I. LATAR BELAKANG

Pentingnya pendidikan tercermin dalam UUD 1945, yang mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Lebih lanjut, Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pengertian pendidikan yang tertuang dalam Undang-Undang Sisdiknas tersebut menjelaskan bahwa pendidikan sebagai proses yang di dalamnya seseorang belajar untuk mengetahui, mengembangkan kemampuan, sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya untuk menyesuaikan dengan lingkungan di mana dia hidup. Dengan kata lain, pendidikan merupakan suatu proses, ada hubungan antara pendidik dan peserta didik, serta memiliki tujuan, reorganisasi dan rekonstruksi





(penyusunan kembali) pengalaman yang bertujuan menambah efisiensi individu dalam interaksinya dengan lingkungan.

Pendidikan merupakan wahana terbentuknya masyarakat madani yang dapat membangun dan meningkatkan martabat bangsa. Pendidikan juga merupakan salah satu bentuk investasi manusia yang dapat meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Kyridis, et al. (2011: 3) mengungkapkan bahwa "*...For many years the belief that education can increase social equality and promote social justice, has been predominant.*" Melalui pendidikan, transformasi kehidupan sosial dan ekonomi akan membaik, dengan asumsi bahwa melalui pendidikan seyogyanya peradaban manusia terbentuk sedemikian rupa karena ia merupakan salah satu kebutuhan dasar yang sangat penting dalam mencapai kesejahteraan hidup. Proses pendidikan menjadi bagian yang tidak terpisahkan atau bagian integral dari pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai subjek sekaligus objek pembangunan. Dengan demikian, pendidikan harus mampu melahirkan SDM yang berkualitas dan tidak menjadi beban pembangunan dan masyarakat, yaitu SDM yang menjadi sumber kekuatan atau sumber penggerak (*driving forces*) bagi seluruh proses pembangunan dan kehidupan masyarakat.

Undang-Undang lebih lanjut menyatakan bahwa "jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah jenis pendidikan formal untuk peserta didik usia 7 sampai 18 tahun dan merupakan persyaratan dasar bagi





pendidikan yang lebih tinggi". Jika usia anak pada saat masuk sekolah menengah pertama, merujuk pada definisi pendidikan menengah dalam Undang-Undang tersebut, berarti pengertian sekolah menengah pertama dapat dikatakan sebagai institusi pendidikan yang menyelenggarakan proses pendidikan Menengah Pertama selama masa tiga tahun yang ditujukan bagi anak usia 12-15 tahun. Batasan usia 12-15 tahun inilah yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian.

Dengan terpenuhinya pendidikan Sekolah Menengah Pertama, maka anak belajar untuk berinteraksi dan menjalin hubungan yang lebih luas dengan orang lain yang baru dikenalnya. Eka Ihsanudin (2010) dan Suharjo (2006) memiliki kesamaan pandangan bahwa pendidikan mampu menuntun pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, bakat dan minat siswa, memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan sikap dasar dalam membentuk warga negara yang baik serta memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap dasar bekerja di masyarakat. Disamping itu, pendidikan Sekolah Menengah Pertama juga dapat mendorong siswa terampil untuk hidup di masyarakat dan dapat mengembangkan diri sesuai dengan asas pendidikan seumur hidup. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang bermanfaat bagi siswa sesuai dengan tingkat perkembangannya. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi anak yang diperlukan





untuk hidup dalam masyarakat. Selain itu, pendidikan Sekolah Menengah Pertama bertujuan mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan tingkat menengah atas.

Mengingat pentingnya peran keberhasilan pendidikan Sekolah Menengah Pertama dalam upaya mencerdaskan kehidupan masyarakat sebagaimana diamanahkan dalam Undang-undang Dasar 1945, maka dipandang perlu untuk mengkaji secara akademis sebuah *Master Plan* pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang efektif dan efisien untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya dalam dunia pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. *Master Plan* pendidikan Sekolah Menengah Pertama ini akan menjadi peta perkembangan pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat dalam menyongsong Generasi Emas penerus bangsa seperti halnya yang telah dijadikan tujuan utama oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan *Master Plan* Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pesisir Barat ini memiliki tujuan sebagai berikut.

- 1) Memetakan program pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pesisir Barat.
- 2) Mendeskripsikan potensi dan tantangan program pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pesisir Barat.





- 3) Memberikan gambaran prioritas pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat.
- 4) Memberikan rambu-rambu tahapan strategis dalam penyusunan program pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat.

III. DESKRIPSI KEGIATAN

A. JENIS KEGIATAN

Jenis kegiatan penelitian ini adalah *master Plan* Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Pesisir Barat. *Master Plan* tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan dan pelaksanaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pesisir Barat.

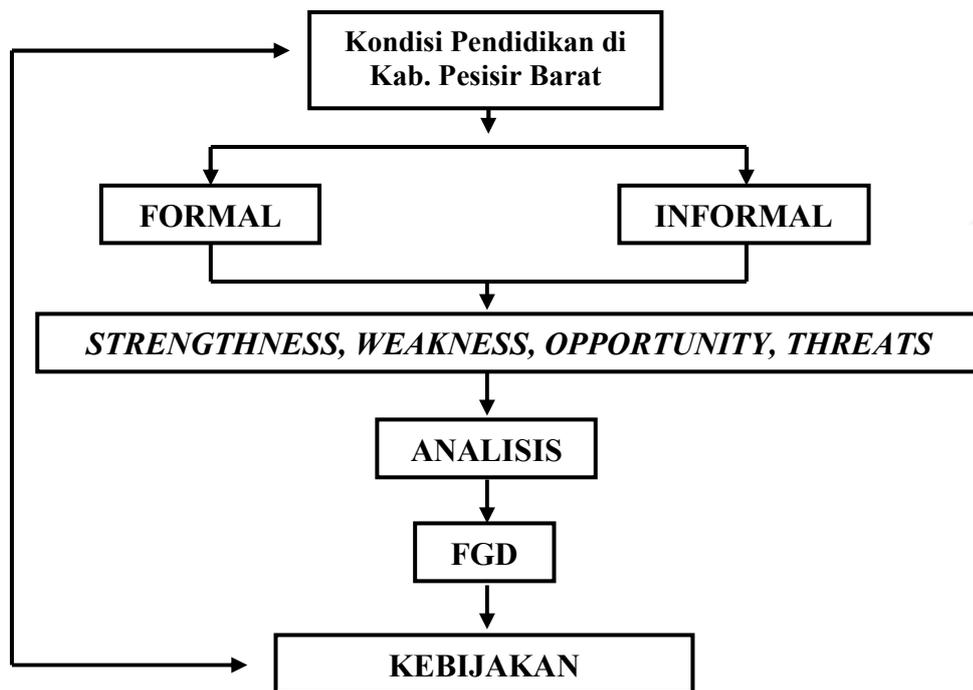
B. DESKRIPSI / URAIAN SINGKAT KEGIATAN

Kajian Akademis *Master Plan* Pendidikan Sekolah Menengah Pertama ini merupakan sebuah kegiatan penelitian yang dilaksanakan sebagai bentuk komitmen pemerintah dan akademisi dalam membangun iklim akademik yang baik di Kabupaten Pesisir Barat. Selain itu juga ruang lingkup kegiatan *Master Plan* Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pesisir Barat ini meliputi:

1. Identifikasi potensi dan permasalahan bidang pendidikan.
2. Analisis kondisi *existing* dan analisis proyeksi (peluang, ancaman, tantangan dan keberhasilan), pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pesisir Barat.



Kegiatan ini juga bertujuan untuk memperoleh proyeksi perencanaan program/ kebijakan ke depan dengan melakukan analisis data sekunder dan primer dengan pendekatan metode kuantitatif maupun kualitatif yang diperoleh di wilayah kajian. Merumuskan metode dan kebijakan strategis dalam pemecahan masalah yang menjadi acuan pengembangan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pesisir Barat ke depan. Untuk lebih memudahkan dalam memahami kerangka pikir dan dalam rangka mewujudkan pendidikan bermutu dapat dilihat pada diagram berikut :





C. URGENSI KEGIATAN/ PENELITIAN

Urgensi dari *Master Plan* Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pesisir Barat ini adalah agar para pemangku kepentingan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama memiliki landasan yang kuat secara akademis yang dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan serta dapat mengetahui sejauh mana program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama telah berjalan. Sehingga pemerintah daerah dapat mempertimbangkan hasil *master plan* sebagai salah satu solusi alternatif untuk terus meningkatkan mutu pendidikan khususnya di jenjang Dasar. Apabila itu semua dapat berjalan dengan baik maka lulusan yang dihasilkan akan memiliki kompetensi yang memadai dan kualifikasi yang bermutu. Dengan demikian mutu Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Pesisir Barat akan dapat bersaing di tingkat lokal maupun nasional dan tidak menutup kemungkinan sampai pada level internasional.

D. OUTPUT KEGIATAN

Output/ luaran dari *Master Plan* Pendidikan Sekolah Menengah Pertama ini akan memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat sebagai berikut.

- a) Sebagai peta pembangunan Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pesisir Barat.
- b) Sebagai dasar menyusun kebijakan dalam bidang pendidikan.
- c) Sebagai *entry point* implementasi *good governance* di Kabupaten





Pesisir Barat.

- d) Sebagai deskriptor pola pembangunan pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat.

E. METODE KEGIATAN

Kegiatan penyusunan *Master Plan* Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pesisir Barat ini terdiri dari empat tahap, yakni pengumpulan data, penghimpunan data, analisa data, dan penyimpulan hasil kajian yang akhirnya bermuara pada perumusan kebijakan strategis dalam rangka rekomendasi *Master Plan* Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pesisir Barat.

Penggunaan metode dalam *Master Plan* Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pesisir Barat tahun 2017 ini adalah dengan menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif. Penggabungan kedua metode ini dimaksudkan adanya cek dan ricek atas data hasil analisis kuantitatif kemudian dikonfersikan dengan data yang diperoleh dari hasil analisis kualitatif sehingga memperoleh generalisasi yang objektif dan rasional yang berpengaruh terhadap pengambilan langkah-langkah strategis yang tepat untuk menanggulangi berbagai fenomena pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pesisir Barat.

- a) Populasi dan Sampel





Populasi penelitian ini adalah seluruh sistem pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pesisir Barat. Sampel merupakan sebagian dari populasi yang dikenai langsung oleh suatu penelitian (Hadi, 2000). Senada dengan itu Arikunto (1996) mengemukakan bahwa sampel adalah wakil populasi yang diteliti. Hadi (2000) mengemukakan bahwa ada tiga hal yang sangat menentukan representativitas sampel, yaitu:

1. Kerangka sampel harus berisi semua ciri yang relevan dengan masalah-masalah yang diteliti
2. Besaran sampel. Sampel yang terlalu sedikit kurang mewakili populasi, dan sampel yang terlalu banyak memberatkan penelitian. Besar sampel akan turut ditentukan oleh pertimbangan dan hambatan-hambatan praktis seperti waktu, biaya, alat dan tenaga
3. Teknik pengambilan sampel.

Ada dua teknik pengambilan sampel yang sering dilakukan, yaitu: (a) *random sampling*, yakni tiap individu/satuan dalam populasi mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel, dan juga memakai *twostage random sampling*, dan (b) non *random sampling*, yakni tidak semua individu dalam populasi mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel.





Teknik dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive random sampling*. Menurut Hadi (2000), teknik *purposive random sampling* adalah pemilihan sekelompok subjek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Adapun langkah-langkah untuk mengambil subjek yang menjadi sampel ini dilakukan dengan cara:

1. Menentukan satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di setiap kabupaten/kota yang akan dijadikan wilayah kajian.
2. Menentukan objek yang menjadi responden/sasaran kajian dalam penelitian ini.

b) Metode Pengumpulan Data

Master Plan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pesisir Barat ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan metodologi kajian deskriptif analitik melalui serangkaian data dan informasi penting berkaitan dengan *Master Plan* Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pesisir Barat. Jenis data dalam kajian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer kajian terkait dengan data-data yang terfokus pada informasi mengenai kondisi pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pesisir Barat saat ini serta berbagai faktor penunjang dan berbagai faktor yang menjadi kendala upaya perumusan *Master Plan* Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pesisir Barat.



Sedangkan data sekundernya adalah berupa data atau informasi pendukung yang dapat dijadikan sebagai pengayaan materi atau fokus kajian.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut: pengumpulan data primer dikumpulkan melalui *survey* lapangan. Data Primer diperoleh dengan cara mengumpulkan data secara langsung kepada beberapa dinas instansi terkait di wilayah Kabupaten Pesisir Barat. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui pengumpulan data yang terdapat pada buku, laporan-laporan, jurnal ilmiah ataupun sumber kepustakaan lainnya yang diperoleh dari instansi terkait maupun sumber pustaka lainnya. Data primer dalam hal ini diperlukan untuk mendalami problematika pendidikan hingga mendapatkan langkah solutif yang terbaik dalam kerangka menyusun Rencana Induk Pembangunan (RIP) bidang pendidikan. Ringkasnya, teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Observasi atau pengamatan langsung

Melalui teknik ini, peneliti mampu mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, terutama dalam menggambarkan gambaran umum dari objek yang diteliti, sekaligus sebagai sarana untuk melakukan studi selanjutnya dengan wawancara.





2. Wawancara

Untuk menunjang data yang diperoleh melalui observasi dan pendalaman materi, maka teknik selanjutnya yang akan digunakan adalah wawancara terbuka.

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini diperlukan dalam upaya memberikan rujukan (*reference*) teoritis dan konseptual "*framework*" bagi keseluruhan proses studi ini, mulai dari perencanaan, pelaksanaan pengumpulan data sampai dengan analisis datanya.

Sesuai dengan teknik pengumpulan data yang direncanakan di atas, maka dalam studi ini akan disusun pedoman studi yang berupa instrumen studi dalam menjaga agar proses pengumpulan datanya berjalan dengan baik. Instrumen tersebut antara lain:

1. Materi observasi (digunakan pada saat melakukan pengamatan langsung)
2. Daftar pertanyaan (digunakan pada saat melakukan wawancara dengan subjek studi di lokasi)
3. Materi studi kepustakaan (digunakan selama proses studi, mulai dari perencanaan sampai dengan kegiatan selesai)

c) Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan adalah *form* klasifikasi data, *Microsoft*





Excel, dan program SPSS.

F. JADWAL KEGIATAN

Adapun waktu pelaksanaan kegiatan Kajian Mutu Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2017 adalah selama 3 (tiga) bulan kalender.

No.	Nama Kegiatan	Oktober				November				Desember			
		Minggu ke-											
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Perencanaan dan penyusunan proposal	■	■	■									
2.	Pengurusan izin administrasi penelitian				■								
3.	Observasi lokasi penelitian				■	■							
4.	Pengumpulan data					■	■	■	■				
5.	Pelaksanaan penelitian									■	■	■	■
6.	Analisis data											■	■
7.	Penyusunan dan presentasi laporan akhir penelitian												■

G. RENCANA ANGGARAN BIAYA

Kegiatan Penyusunan *Master Plan* Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 menganggarkan biaya sebesar Rp. 200.000.000,- dengan rincian sebagai berikut.





I. Biaya Gaji dan Upah

No	Uraian	Vol			Satuan	Harga Satuan	Jumlah
A Tenaga Ahli							
1	Ketua Peneliti	1	x	90	OH	Rp. 150.000	Rp. 13.500.000
2	Anggota Peneliti	4	x	90	OH	Rp. 120.000	Rp. 43.200.000
Sub jumlah A							Rp. 56.700.000
B Tenaga Pendukung							
1	Surveyor	2	x	90	OH	Rp. 100.000	Rp. 18.000.000
2	Penghimpun Data	1	x	90	OH	Rp. 70.000	Rp. 6.300.000
3	Pengolah Data	1	x	90	OH	Rp. 70.000	Rp. 6.300.000
4	Pencari Data	1	x	90	OH	Rp. 70.000	Rp. 6.300.000
5	Operator Komputer	1	x	90	OH	Rp. 70.000	Rp. 6.300.000
Sub jumlah B							Rp. 43.200.000
Sub total I							Rp. 99.900.000

II. Survei Lapang I (4 hari)

No	Uraian	Vol			Satuan	Harga Satuan	Jumlah
A Akomodasi							
1	Sewa mobil	1	x	4	BH	Rp. 500.000	Rp. 2.000.000
2	Penginapan	6	x	3	KH	Rp. 350.000	Rp. 6.300.000
B Konsumsi							
1	Makan (3 x 1 hari)	11	x	12	OK	Rp. 30.000	Rp. 3.960.000
Sub Total II							Rp.16.220.000





III. Survei Lapang II dan Pengumpulan Data (5 hari)

No	Uraian	Vol			Satuan	Harga Satuan	Jumlah
A Akomodasi							
1	Sewa mobil	3	x	5	BH	Rp. 500.000	Rp. 7.500.000
2	Penginapan	6	x	5	KH	Rp. 350.000	Rp. 10.500.000
B Konsumsi							
1	Makan (3 x 1 hari)	11	x	15	OK	Rp. 30.000	Rp. 4.950.000
C Penggandaan Kuesioner							
1	Fotocopy	600	x	5	EL	Rp. 250	Rp. 750.000
Sub Total III							Rp. 28.650.000

IV. Penyusunan Draft Laporan Akhir Kegiatan (6 hari)

No	Uraian	Vol			Satuan	Harga Satuan	Jumlah
A Akomodasi							
1	Sewa mobil	3	x	6	BH	Rp. 500.000	Rp. 9.000.000
2	Penginapan	3	x	5	KH	Rp. 350.000	Rp. 5.250.000
B Konsumsi							
1	Makan (3 x 1 hari)	11	x	18	OK	Rp. 25.000	Rp. 4.950.000
C Penggandaan Kuesioner							
1	Fotocopy	15	x	180	EL	Rp. 250	Rp. 675.000
Sub Total IV							Rp. 24.825.000





V. Presentasi Laporan Akhir Kegiatan (2 hari)

No	Uraian	Vol			Satuan	Harga Satuan	Jumlah
A Akomodasi							
1	Sewa mobil	3	X	2	BH	Rp. 500.000	Rp. 3.000.000
2	Penginapan	3	X	2	KH	Rp. 350.000	Rp. 2.100.000
B Konsumsi							
1	Makan (3 x 1 hari)	25	X	6	OK	Rp. 30.000	Rp. 4.500.000
2	Snack	25	X	6	OK	Rp. 15.000	Rp. 750.000
C Penggandaan Materi							
1	Fotocopy	25	X	10	EL	Rp. 250	Rp. 62.500
Sub Total V							Rp. 14.912.500

VI. Diskusi dan Pelaporan

VI a. Diskusi Internal Tim

No	Uraian	Vol			Satuan	Harga Satuan	Jumlah
A Konsumsi							
1	Makan	11	X	10	OK	Rp. 30.000	Rp. 3.300.000
2	Snack	11	X	20	OK	Rp. 15.000	Rp. 3.300.000

VI b. Konsinyasi Penyusunan Laporan Kemajuan

No	Uraian	Vol			Satuan	Harga Satuan	Jumlah
A Konsumsi							
1	Makan	25	X	3	OK	Rp. 30.000	Rp. 2.250.000
2	Snack	25	X	4	OK	Rp. 15.000	Rp. 1.500.000

VI c. Konsinyasi Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan

No	Uraian	Vol			Satuan	Harga Satuan	Jumlah
A Konsumsi							
1	Makan	25	X	3	OK	Rp. 30.000	Rp. 2.250.000
2	Snack	25	X	6	OK	Rp. 15.000	Rp. 2.250.000
B Penggandaan Laporan Akhir Kegiatan							
1	Fotocopy dan penjilidan	10	X	1	BK	Rp. 50.000	Rp. 500.000





2	Tempat CD dan CD	10	X	1	BK	Rp. 3.250	Rp. 32.500
3	Burning	10	X	1	BK	Rp. 3.000	Rp. 30.000
4	Materai 6000	10	X	1	BK	Rp. 8.000	Rp. 80.000
Sub Total VI							Rp. 15.492.500

TOTAL I + II + III + IV + V + VI	Rp. 200.000.000
---	------------------------

VII. TIM PENELITI DAN URAIAN JOB DESKRIPSI

Susunan Tim Kerja

No	Keahlian	Pendidikan	Nama
Tenaga Ahli			
1	Ketua Tim Peneliti	S3	Dr. Erlina Rufaidah, S.E, M.Si.
2	Ahli Teknologi Pendidikan	S2	Budi Kadaryanto, S.Pd, M.A.
3	Ahli Manajemen Pendidikan	S3	Prof. Dr. H. Bujang Rahman, M.Si.
4	Ahli Kurikulum	S3	Dr. Abdurrahman, M.Si.
5	Ahli Psikologi Pendidikan	S3	Diah Utaminingsih, S.Psi, M.A, Psi.
Tenaga Pendukung			
1	Surveyor	Sarjana	1. Deris Astriawan, S.Pd. 2. Dedi Hardiansyah
2	Penghimpun Data	Sarjana	1. Ghea Chandra, S. S.Pd 2. Efvingga Fasya Jaya Sp
3	Pengolah Data	Sarjana	1. Emi Rodhiyatun, S.Pd 2. Afdi Rasyid Ikhprastyo
4	Pencari Data	Sarjana	1. Tyas Abror Huda, S.Pd 2. Nun Adiyah
5	Operator Komputer	Sarjana	1. Rohmad Wahyudi 2. Noviea Setyowati

Job Description:

1. Ketua Tim Peneliti

Ketua tim peneliti bertugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian yang





dilakukan dan ikut mengusahakan serta mengendalikan administrasi sumberdaya yang diperlukan.

2. Anggota

- a. membantu ketua tim peneliti dalam melaksanakan tugas terkait penelitian, bertanggung jawab terhadap seluruh pemasukan dan pengeluaran dana yang terkait dengan kegiatan penelitian, membuat laporan keuangan dan membuat estimasi anggaran keuangan kegiatan penelitian.
- b. membantu terlaksananya penelitian, baik itu dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan laporan akhir.
- c. membantu ketua tim peneliti dalam melaksanakan tugas terkait penelitian, penyusunan laporan serta kegiatan yang berhubungan dengan kesekretariatan.

3. Tenaga Pendukung

Tenaga pendukung bertugas membantu kegiatan penelitian, mengikuti instruksi dari ketua peneliti dan ikut dalam kegiatan dilapangan

VIII. SUMBER PENDANAAN

Sumber dana untuk pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah - Perubahan (APBD-P) Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2017 dengan pagu anggaran sebesar Rp 200.000.000,00.



IX. PELAPORAN

Jenis laporan yang harus diserahkan kepada pemilik pekerjaan terdiri dari :

a) Laporan Pendahuluan (*Inception Report*)

Laporan ini terdiri dari metodologi, rencana kerja rinci, dan rencana mobilisasi personil dan peralatan.

b) Laporan Kemajuan (*Interim Report*)

Laporan ini berisikan hasil dari kegiatan pengumpulan data dan informasi serta masukan dari para pakar dan hasil wawancara mendalam yang dilaksanakan yang selanjutnya disusun dalam suatu buku laporan kemajuan pekerjaan dan telah didiskusikan dengan tim asistensi serta rencana kerja selanjutnya.

c) Draft Laporan Akhir (*Draft Final Report*)

Laporan ini merupakan konsep laporan lengkap dari proses keseluruhan *Master Plan* Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pesisir Barat, serta sebagai bahan diskusi draft laporan akhir.

d) Laporan Akhir (*Final Report*)

Laporan ini sebagai hasil final dari seluruh proses pekerjaan perencanaan yang disempurnakan dari serangkaian diskusi.



IV ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA PENELITIAN

A. Hasil Belajar

1. Permasalahan sikap Siswa yang Terjadi di Sekolah

No	Permasalahan Sikap	Tidak Pernah		Jarang		Sering		Selalu	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	Mencontek	12	7%	29	0%	15	0%	0	0%
2	Berbohong	11	21%	37	0%	8	0%	0	0%
3	Membolos	21	21%	31	2%	4	0%	0	0%
4	Tidak Mengerjakan Tugas	13	18%	31	0%	12	0%	0	0%
5	Terlibat Perkelahian	23	18%	20	0%	12	0%	1	0%
6	Terlibat Tindakan Kriminal	43	25%	3	0%	10	0%	0	0%
7	Minum Minuman Keras	39	20%	7	0%	10	0%	0	0%
8	Merokok	29	43%	13	0%	14	0%	0	0%
9	Vandalisme	23	32%	22	2%	11	0%	0	0%
10	Menyalahkan Orang Lain	11	36%	21	0%	24	0%	0	0%
11	Tidak Mau Minta Maaf	10	16%	27	2%	18	0%	1	0%
12	Terlambat Masuk Sekolah	13	16%	23	0%	20	0%	0	0%
13	Tidak Sopan	23	20%	23	0%	9	0%	1	0%
14	Merendahkan Pendapat Orang Lain	20	20%	27	5%	9	0%	0	0%
15	Malas Menulis	14	27%	31	2%	11	0%	0	0%
16	Malas Membaca	15	27%	27	2%	11	0%	3	0%
17	Tidak Berani Memukakan Pendapat	22	11%	18	4%	15	0%	1	0%
18	Tidak Percaya diri	23	14%	17	2%	15	0%	1	0%
19	Mudah Putus Asa	30	14%	18	0%	6	0%	2	0%
20	Kesulitan Berbicara dengan Orang Lain	29	9%	18	0%	8	0%	1	0%
21	Tidak Sportif	27	13%	21	2%	8	0%	0	0%
22	Mudah Mengeluh	18	14%	33	0%	5	0%	0	0%
23	Tidak taat menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing	18	5%	30	0%	7	0%	1	0%
24	Tidak berdoa sebelum dan setelah melakukan aktivitas	21	5%	27	0%	8	0%	0	0%
25	Menggunakan kata-kata kotor saat berbicara	19	4%	34	2%	3	0%	0	0%
26	Berpakaian kurang sopan	25	9%	28	2%	3	0%	0	0%

27	Tidak mengucapkan salam saat masuk kelas	25	7%	28	0%	2	0%	1	0%
28	Menertawakan teman yang sedang kesusahan/terkena musibah	15	38%	35	2%	5	0%	1	0%
29	Menjauhi teman yang berbeda secara fisik, suku, ras atau agama	21	43%	31	2%	4	0%	0	0%
30	Menyerobot saat memakai fasilitas umum	15	45%	19	4%	21	0%	1	0%
31	Menghindari kerjabakti	13	32%	18	0%	24	0%	1	0%
32	Membuang sampah sembarangan	9	34%	20	0%	25	0%	2	0%
33	Menggunakan air dan listrik dengan boros	15	0%	23	0%	18	0%	0	0%
34	Merusak tanaman	15	0%	22	0%	19	0%	0	0%

NO	Sikap Siswa	Jumlah	Persentase
1	Tidak Pernah Melakukan Hal yang Negatif	639	35%
2	Jarang Melakukan Hal yang Negatif	840	43%
3	Sering Melakukan Hal yang Negatif	409	21%
4	Selalu Melakukan Hal yang Negatif	18	1%

1. Dari data di atas sikap siswa yang terjadi di sekolah menengah pertama di Kabupaten Pesisir Barat terdapat 35% siswa-siswa disekolah menengah pertama tidak Pernah melakukan atau mempunyai sikap yang bermasalah menurut norma yang berlaku.
2. Siswa di kabupaten pesisir barat jarang melakukan tindakan yang melanggar norma atau perraturan disekolah sebanyak 43%
3. Siswa yang sering melakakukan pelanggaran norma dan peraturan disekolah dinilai cukup tinggi dengan perolehan nilai 20% yang menurut tim peneliti perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui seberapa banyak pelanggaran yang dilakukan siswa, jenis-jenis pelanggaran yang



dilakukan dan factor-faktor yang mempengaruhi siswa dalam melakukan pelanggaran tersebut.

4. Siswa yang selalu melakukan pelanggaran norma dan peraturan disekolah berada kategori yang sangat rendah, hanya 1%.

2. Tindakan Kekerasan di Sekolah

No	Tindakan Kekerasan	Oleh Guru		Oleh Teman	
		Σ	%	Σ	%
1	Fisik				
	a. Tidak Pernah	35	63%	14	25%
	b. Jarang	21	38%	41	73%
	c. Sering	0	0%	1	2%
	d. Selalu	0	0%	0	0%
2	Psikis (Verbal)				
	a. Tidak Pernah	22	39%	35	63%
	b. Jarang	34	61%	20	36%
	c. Sering	0	0%	1	2%
	d. Selalu	0	0%	0	0%

1. Tabel Diatas menggambarkan bahwa tindakan kekerasan secara fisik yang diterima siswa lebih banyak dilakukan oleh teman sendiri dari pada dilakukan oleh guru, dengan persentase perolehan 2%.
2. Tindakan kekerasan secara psikis dalam bentuk verbal yang diterima oleh siswa dalam kategori sering yang bersumber dari *peer group* sebanyak 2%, dilakukan oleh oleh guru dengan presentase 0%.

3. Capaian Keterampilan Siswa

No	Keterampilan	Tidak Mampu		Kurang Mampu		Mampu		Sangat Mampu	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%





1	Menyampaikan ide dan pendapat secara santun dan mudah dipahami	1	2%	11	20%	43	77%	1	2%
2	Menyimak informasi secara tepat dan menyampaikan kembali dengan kalimat sendiri	0	0%	31	55%	24	43%	1	2%
3	Membaca cepat dan membuat rangkuman dari informasi tertulis	2	4%	31	55%	22	39%	1	2%
4	Melakukan telaah secara kritis terhadap teks atau buku	5	9%	24	43%	26	46%	1	2%
5	Membuat karya tulis dengan deskripsi yang berkesinambungan dan mudah dipahami	9	16%	30	54%	17	30%	0	0%
6	Melakukan pengamatan dengan bimbingan dan petunjuk yang jelas dari guru	3	5%	18	32%	35	63%	0	0%
7	Bertanya dengan kritis	5	9%	29	52%	21	38%	1	2%
8	Mengumpulkan informasi dan melakukan analisis dari berbagai sumber	3	5%	35	63%	18	32%	0	0%
9	Meniru karya orang lain	6	11%	20	36%	30	54%	0	0%
10	Memodifikasi karya orang lain	4	7%	23	41%	29	52%	0	0%
11	Membuat kreasi sendiri sesuai dengan fasilitas yang tersedia	3	5%	23	41%	28	50%	2	4%
12	Menulis dalam bahasa dan gaya sendiri	3	5%	20	36%	32	57%	1	2%

1. Table tersebut menerangkan bahwa keterampilan siswa mempunyai kemampuan menyampaikan ide dan pendapat secara santun dan mudah dipahami dengan prosentase tertinggi 77%
2. Keterampilan siswa mempunyai kemampuan menyimak informasi secara tepat dan menyampaikan kembali dengan kalimat sendiri dalam kategori kurang mampu nssbnayak 55%





3. Tabel tersebut menerangkan bahwa keterampilan siswa mempunyai kemampuan membaca cepat dan membuat rangkuman dari informasi tertulis, tertinggi dalam kategori kurang mampu sebanyak 55%
4. Keterampilan siswa mempunyai kemampuan melakukan telaah secara kritis terhadap teks atau buku, tertinggi pada kategori mampu 46 %. Sedangkan dalam karegori kurang mampu 43%. Ada selisih tipis antara kategori mampu dan kurang mampu.
5. Keterampilan siswa mempunyai kemampuan melakukan membuat karya tulis dengan deskripsi yang berkesinambungan dan mudah dipahami memiliki kategori tertinggi kurang mampu sebanyak 54%
6. Keterampilan siswa mempunyai kemampuan melakukan pengamatan dengan bimbingan dan petunjuk yang jelas dari guru memiliki kategori tertinggi yaitu kategori mampun sebanyak 64%
7. Table tersebut menerangkan bahwa keterampilan siswa mempunyai kemampuan bertanya dengan kritis dalam kategori kurang mampu sebanyak 52%
8. Keterampilan siswa mempunyai kemampuan melakukan mengumpulkan informasi dan melakukan analisis dari berbagai sumber memiliki kategori tertinggi dalam kategori kurang mampu sebanyak 63%
9. Keterampilan siswa mempunyai kemampuan melakukan meniru karya orang lain memiliki kategori tertinggi dalam kategori mampu sebanyak 52%



10. Table tersebut menerangkan bahwa keterampilan memodifikasi karya orang lain memiliki kategori tertinggi dalam kategori mampu sebanyak 52%
11. Pada tabel menggambarkan bahwa siswa mempunyai keterampilan untuk membuat kreasi sendiri sesuai dengan fasilitas yang tersedia memiliki kategori tertinggi dalam kategori mampu sebanyak 50%
12. Pada tabel menggambarkan bahwa siswa mempunyai keterampilan untuk menulis dalam bahasa dan gaya sendiri memiliki kategori tertinggi dalam kategori mampu sebanyak 57%

4. Kemahiran menggunakan Sumber Informasi

	Sumber Informasi	Tidak Mampu		Kurang Mampu		Mampu		Sangat Mampu	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	Buku teks	2	4%	28	50%	22	39%	4	7%
2	Buku selain buku teks	4	7%	29	52%	23	41%	0	0%
3	Media massa seperti majalah, koran dan lainnya	5	9%	34	61%	17	30%	0	0%
4	Internet	38	68%	13	23%	5	9%	0	0%

Dari hasil analisis data diatas yang disajikan dalam bentuk table dapat dilihat bahwa :

1. Kemahiran siswa dalam menggunakan buku teks sebagai sumber informasi untuk belajar pada kategori kurang mampu menduduki prosentasi paling tinggi yaitu sebanyak 50%. Hal ini memperlihatkan kondisi yang cukup memprihatinkan dikarenakan siswa pada kategori sangat mampu memnggunakan buku teks sebagai sumber informasi





hanya sebesar 7 % dan mampu 39%. Prosentase kurang mampu masih lebih besar dari pada prosentase mampu dan sangat mampu.

2. Kemahiran siswa dalam penggunaan buku selain buku teks sebagai sumber informasi pada kategori kurang mampu menduduki prosentasi tertinggi sebanyak 52%. Kategori mampu 41% dan sangat mampu 0%. Kondisi ini memperlihatkan ketrampilan siswa dalam menggunakan sarana dan prasarana lain selain buku teks dalam kategori rendah dan perlu adanya sosialisasi kepada siswa mengenai sumber-sumber belajar yang lain
3. Kemahiran siswa dalam menggunakan media massa sebagai sumber informasi pada kategori kurang mampu sebanyak 61%, diantaranya koran dan majalah. Kondisi ini menggambarkan bagaimana siswa kurang dapat memanfaatkan sumber media yang tersedia di lingkungan sosial.
4. Kemahiran siswa dalam menggunakan internet sebagai sumber informasi pada kategori tidak mampu sebanyak 68% dan kurang mampu sebanyak 23%. Kategori mampu hanya 9% dan sangat mampu tidak ada sama sekali (0%). Hasil ini memperlihatkan bagaimana siswa di daerah pesisir barat masih rendah ketrampilannya dalam menggunakan IT sebagai sarana informasi yang sangat penting. Perlu adanya sisipan ketrampilan yang berkaitan dengan bidang IT yang diberikan di sekolah agar siswa dapat mengikuti perkembangan jaman dan tidak tertinggal dalam penggunaan teknologi sebagai salah satu ketrampilan yang sangat diperlukan dalam dunia kerja.



5. Kemahiran siswa di sekolah anda dalam menggunakan teknologi untuk belajar

No	Teknologi	Tidak Mampu		Kurang Mampu		Mampu		Sangat Mampu	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	komputer	21	38%	31	55%	4	7%	0	0%
2	Hanphone	10	18%	25	45%	16	29%	5	9%
3	Internet	37	66%	12	21%	4	7%	3	5%

Dari hasil analisis data diatas yang disajikan dalam bentuk table dapat dideskripsikan data secara spesifik sebagai berikut:

1. Kemahiran siswa di sekolah dalam menggunakan teknologi untuk belajar dalam jenis komputer, 55 % berada dalam kategori kurang mampu, tidak mampu sebanyak 38%
2. Kemahiran siswa di sekolah dalam menggunakan teknologi untuk belajar dalam jenis Hanphone, 45 % berada dalam kategori kurang mampu, mampu sebanyak 29%
3. Kemahiran siswa di sekolah dalam menggunakan teknologi untuk belajar dalam jenis internet, 66 % berada dalam kategori tidak mampu, kurang mampu sebanyak 21%

Berdasarkan data diatas terdapat korelasi dengan data pada kemahiran menggunakan sumber informasi



6. Kemandirian siswa di sekolah anda dalam bekerjasama untuk aktifitas belajar/kesiswaan

No	Aktivitas	Tidak Mampu		Kurang Mampu		Mampu		Sangat Mampu	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	Aktivitas dalam kelas seperti membersihkan kelas	0	0%	2	4%	41	73%	13	23%
2	Aktivitas luar kelas seperti perlombaan, perayaan dan lainnya	0	0%	11	20%	39	70%	6	11%
3	Organisasi kesiswaan dan/atau kepanitiaan	2	4%	20	36%	33	59%	1	2%
4	Penyelesaian tugas belajar	0	0%	8	14%	38	68%	10	18%

Dari hasil analisis data diatas yang disajikan dalam bentuk table dapat dideskripsikan data secara spesifik sebagai berikut:

1. Aktivitas dalam kelas seperti membersihkan kelas peringkat tertinggi terdapat pada kriteria mampu sebanyak 73% dan kategori sangat mampu sebesar 23%
2. Aktivitas luar kelas seperti perlombaan, perayaan dan lainnya peringkat tertinggi terdapat pada kriteria mampu sebanyak 70% dan kategori kurang mampu sebesar 20%
3. Organisasi kesiswaan dan/atau kepanitiaan, kategori mampu memperoleh presentase sebanyak 59% dan kurang mampu sebanyak 36%
4. Penyelesaian tugas belajar, perolehan tertinggi pada kategori mampu sebanyak 68% dan kategori sangat mampu 18%



7. Prestasi siswa/kelompok di sekolah anda atas pengetahuan yang dimiliki

No	Tingkat	Jarang Sekali		Jarang		Cukup		Sering	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	Tingkat Kabupaten	5	9%	23	41%	26	46%	2	4%
2	Tingkat Propinsi	18	32%	25	45%	13	23%	0	0%
3	Tingkat Nasional	23	41%	27	48%	6	11%	0	0%
4	Tingkat Internasional	26	46%	23	41%	7	13%	0	0%

Dari hasil analisis data diatas yang disajikan dalam bentuk table dapat dideskripsikan data secara spesifik sebagai berikut:

1. untuk tingkat Kabupaten didapatkan nilai 46% pada kategori Cukup dan 41% pada kategori Jarang.
2. tingkat propinsi diperoleh prestasi dalam pengetahuan sebanyak 45% pada kategori Jarang dan 32% pada kategori jarang sekali. Hai ini menandakan bahwa hanya sedikit siswa yang memiliki prestasi ditingkat propinsi
3. tingkat Nasional diperoleh prestasi dalam pengetahuan sebanyak 48% pada kategori Jarang dan 41% pada kategori jarang sekali. Hai ini menandakan bahwa hanya sedikit siswa yang memiliki prestasi ditingkat nasional
4. tingkat internasional diperoleh prestasi dalam pengetahuan sebanyak 41% pada kategori Jarang dan 46% pada kategori jarang sekali. Hai ini menandakan bahwa hanya sedikit siswa yang memiliki prestasi ditingkat internasional





Prestasi siswa/kelompok di sekolah anda atas karya yang dihasilkan seperti mesin, lukisan, prakarya dan lainnya

No	Tingkat	Jarang Sekali		Jarang		Cukup		Sering	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	Tingkat Kabupaten	21	38%	24	43%	11	20%	0	0%
2	Tingkat Propinsi	32	57%	19	34%	5	9%	0	0%
3	Tingkat Nasional	43	77%	13	23%	0	0%	0	0%
4	Tingkat Internasional	47	84%	9	16%	0	0%	0	0%

Dari hasil analisis data diatas yang disajikan dalam bentuk table dapat dideskripsikan data secara spesifik sebagai berikut:

1. untuk tingkat Kabupaten didapatkan nilai 43% pada kategori jarang dan 38% pada kategori Jarang sekali.
2. tingkat propinsi diperoleh prestasi dalam karya yang dihasilkan sebanyak 57% pada kategori Jarang sekali dan 34% pada kategori jarang. Hai ini menandakan bahwa hanya sedikit siswa yang memiliki prestasi ditingkat propinsi
3. tingkat Nasional diperoleh prestasi dalam karya yang dihasilkan sebanyak 77% pada kategori Jarang sekali dan 23% pada kategori jarang. Hai ini menandakan bahwa hanya sedikit siswa yang memiliki prestasi ditingkat nasional
4. tingkat internasional diperoleh prestasi dalam karya yang dihasilkan sebanyak 16% pada kategori Jarang dan 84% pada kategori Jarang sekali. Hai ini menandakan bahwa tidak ada siswa yang memiliki prestasi ditingkat internasional



9. Prestasi siswa/kelompok di sekolah anda atas ketrampilan yang ditunjukkan seperti debat, menyanyi, olahraga dan lainnya

No	Tingkat	Jarang Sekali		Jarang		Cukup		Sering	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	Tingkat Kabupaten	29	52%	9	16%	15	27%	3	5%
2	Tingkat Propinsi	21	38%	10	18%	25	45%	0	0%
3	Tingkat Nasional	45	80%	10	18%	1	2%	0	0%
4	Tingkat Internasional	26	46%	9	16%	21	38%	0	0%

Dari hasil analisis data diatas yang disajikan dalam bentuk table dapat dideskripsikan data secara spesifik sebagai berikut:

1. untuk tingkat Kabupaten didapatkan nilai 52% pada kategori jarang sekali dan 27% pada kategori cukup.
2. tingkat propinsi diperoleh prestasi dalam ketrampilan yang ditunjukkan seperti debat, menyanyi, olahraga dan lainnya dihasilkan sebanyak 45% pada kategori cukup dan 38% pada kategori jarang sekali. Hai ini menandakan bahwa hanya sedikit siswa yang memiliki prestasi ditingkat propinsi
3. tingkat Nasional diperoleh prestasi dalam ketrampilan yang ditunjukkan seperti debat, menyanyi, olahraga dan lainnya dihasilkan sebanyak 80% pada kategori Jarang sekali dan 18% pada kategori jarang. Hai ini menandakan bahwa hanya sedikit siswa yang memiliki prestasi ditingkat nasional



4. tingkat internasional diperoleh prestasi dalam ketrampilan yang ditunjukkan seperti debat, menyanyi, olahraga dan lainnya dihasilkan sebanyak 46% pada kategori Jarang sekali dan 38% pada kategori cukup. Hal ini menandakan bahwa tidak ada siswa yang memiliki prestasi ditingkat internasional

10. Kerangka dasar penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di sekolah anda

No	Komponen	Ada		Tidak Ada	
		Σ	%	Σ	%
1	Visi	55	98%	1	2%
2	Misi	55	98%	1	2%
3	Tujuan	54	96%	2	4%
4	Muatan Kurikuler	55	98%	1	2%
5	Beban Belajar Siswa dan Guru	54	96%	2	4%
6	Kalender Pendidikan	48	86%	8	14%
7	Silabus	49	88%	7	13%

Pada table diatas dapat dilihat bahwa sekolah menengah pertama di Kabupaten Pesisir Barat sudah sebagian besar memiliki kerangka dasar penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dengan rata-rata sebesar 94% pada ketujuh komponen.

11. Kegiatan pengembangan diri ekstrakurikuler yang disediakan oleh sekolah anda

No	Komponen	Wajib		Pilihan		Tidak Ada	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	Kepramukaan	31	55%	25	45%	0	0%



2	Latihan Kepemimpinan Siswa	44	79%	12	21%	0	0%
3	Palang Merah Remaja	36	64%	20	36%	0	0%
4	Usaha Kesehatan Sekolah	29	52%	27	48%	0	0%
5	Pasukan Pengibar Bendera	36	64%	20	36%	0	0%
6	Pengembangan Bakat Olahraga	25	45%	31	55%	0	0%
7	Seni Dan Budaya	24	43%	32	57%	0	0%
8	Pencinta Alam	45	80%	11	20%	0	0%
9	Jurnalistik	39	70%	17	30%	0	0%
10	Teater	34	61%	22	39%	0	0%
11	Lainnya	36	64%	20	36%	0	0%

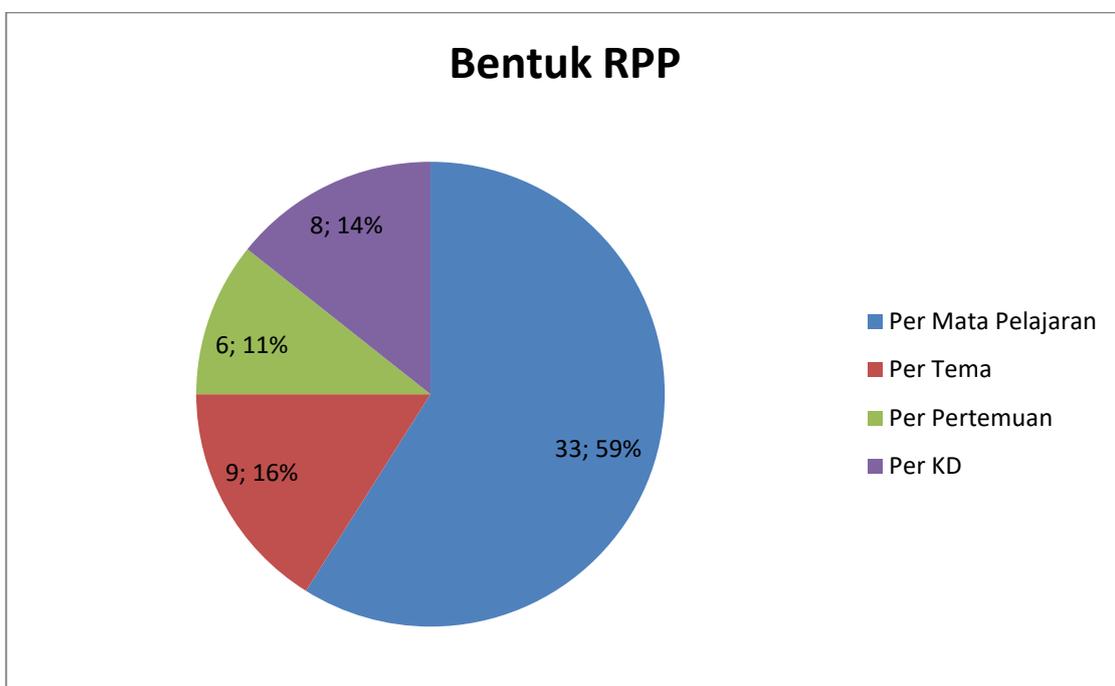
Pada Tabel tersebut menggambarkan bahwa semua sekolah di kabupaten Pesisir Barat telah melaksanakan kegiatan pengembangan diri ekstrakurikuler baik sebagai ekstrakurikuler yang diwajibkan maupun pilihan. Adapun perbandingannya adalah dengan rata-rata 62% wajib dan 38% pilihan.



B. Proses Pembelajaran

Proses Pembelajaran

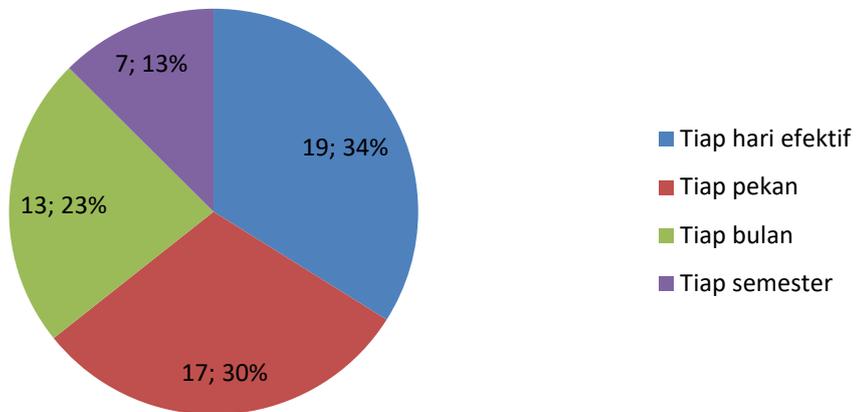
Hasil kuisisioner yang diberikan kepada responden menunjukkan bahwa sebagian besar guru-guru menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dalam bentuk paket-paket per mata pelajaran, yakni sebanyak 33,59%. Secara rinci ditampilkan oleh Diagram 1.



Waktu pelaksanaan pemeriksaan oleh kepala sekolah terhadap RPP yang dibuat oleh para responden bervariasi. Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan, RPP yang telah disusun diperiksa oleh kepala sekolah ditunjukkan oleh Diagram 2.



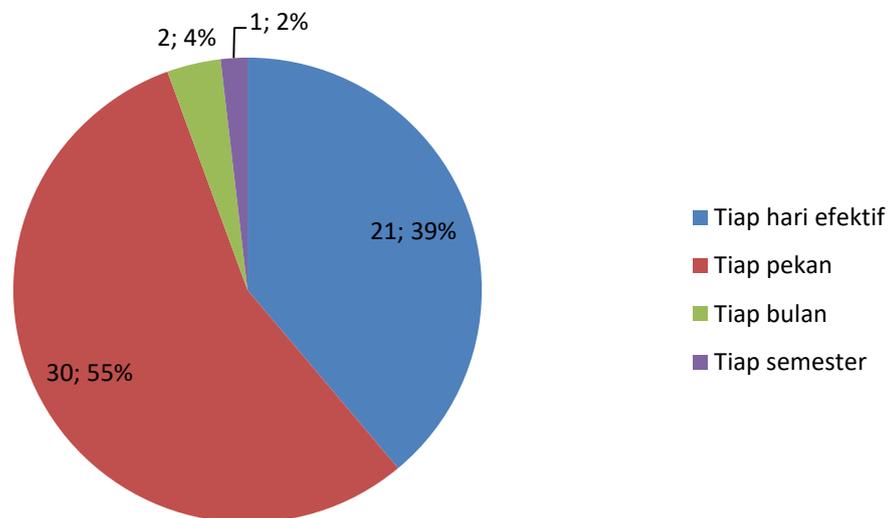
Waktu Pemeriksaan RPP Oleh Kepala Sekolah



Sedangkan pemeriksaan oleh pengawas sekolah digambarkan oleh Diagram

3

Waktu Pemeriksaan RPP Oleh Pengawas



Tahapan penyusunan RPP yang dilakukan sesuai dengan kaidah adalah sebagai berikut.

1. Pemetaan KI-KD dalam dan lintas mapel
2. Penyesuaian antara KI-KD dengan indikator



3. Penyesuaian antara indikator dengan materi
4. Penyesuaian antara indikator, materi dengan langkah pembelajaran

Diagram 4 pada penyusunan RPP yang dilakukan oleh responden menunjukkan bahwa sebagian besar responden sudah melaksanakan pemetaan KI-KD dalam dan lintas mapel

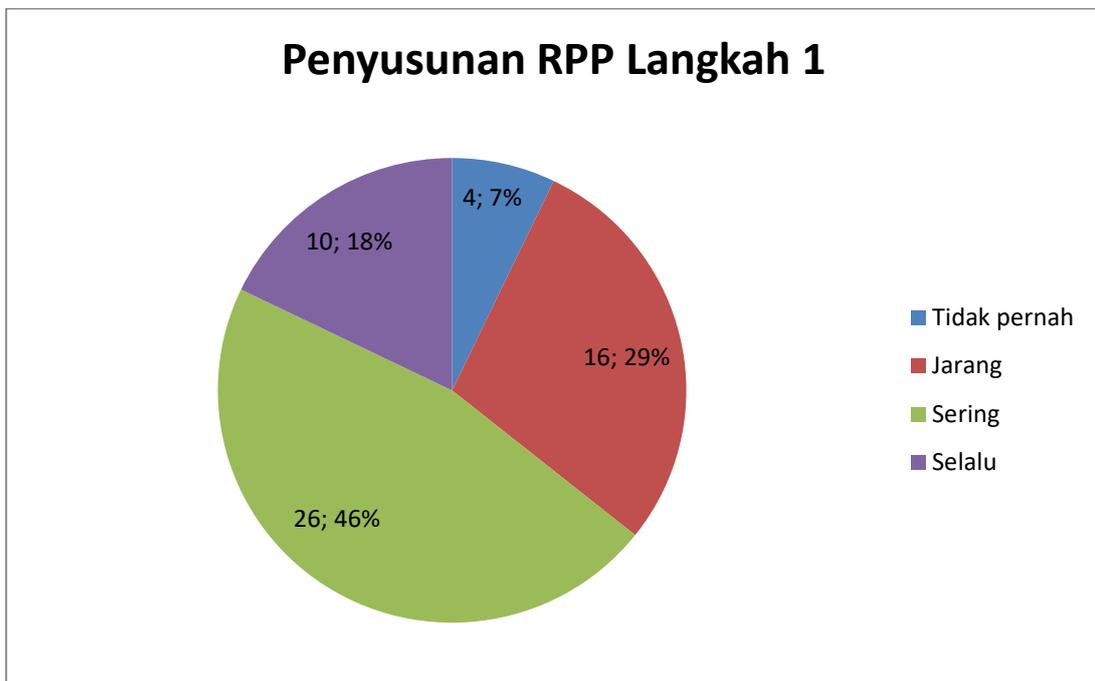


Diagram 5 pada penyusunan RPP yang dilakukan oleh responden menunjukkan bahwa sebagian besar responden sudah melaksanakan penyesuaian antara KI-KD dengan indikator.



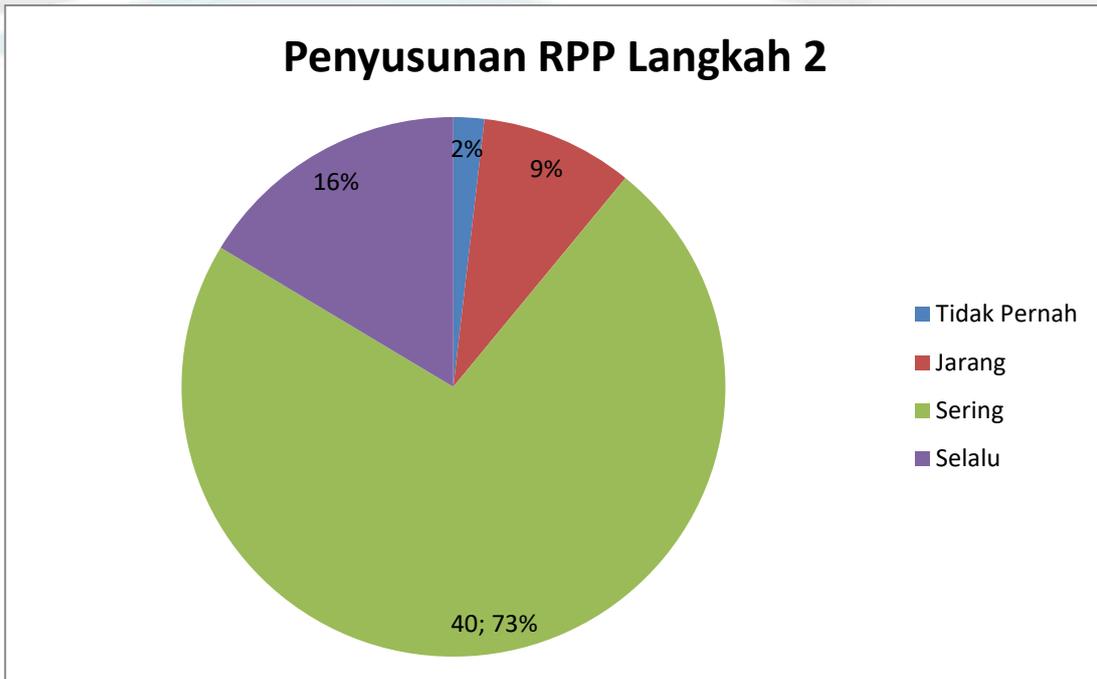


Diagram 6 pada penyusunan RPP yang dilakukan oleh responden menunjukkan bahwa sebagian besar responden sudah melaksanakan penyesuaian antara indikator dengan materi.

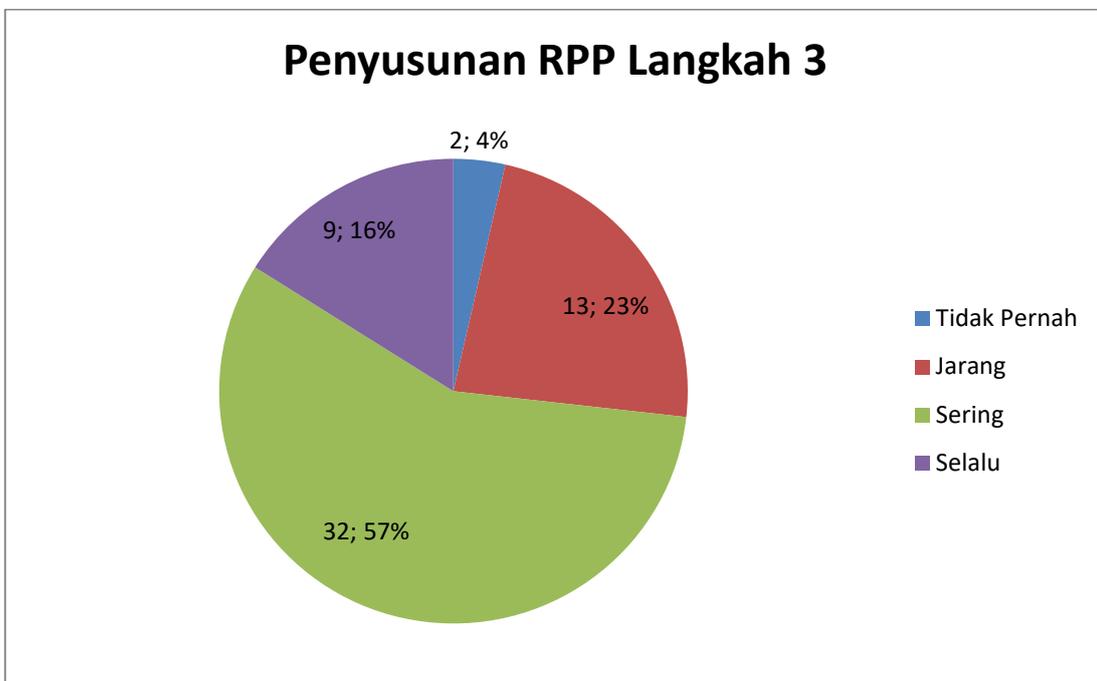
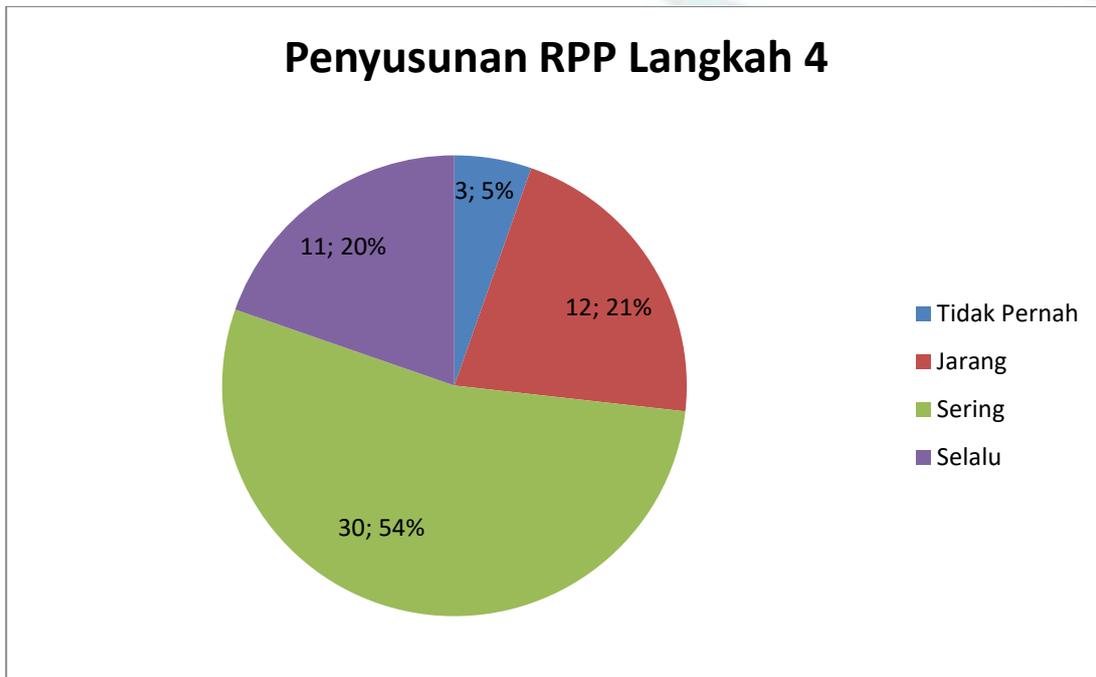


Diagram 7 pada penyusunan RPP yang dilakukan oleh responden menunjukkan bahwa sebagian besar responden sudah melaksanakan



penyesuaian antara indikator, materi dengan langkah pembelajaran.

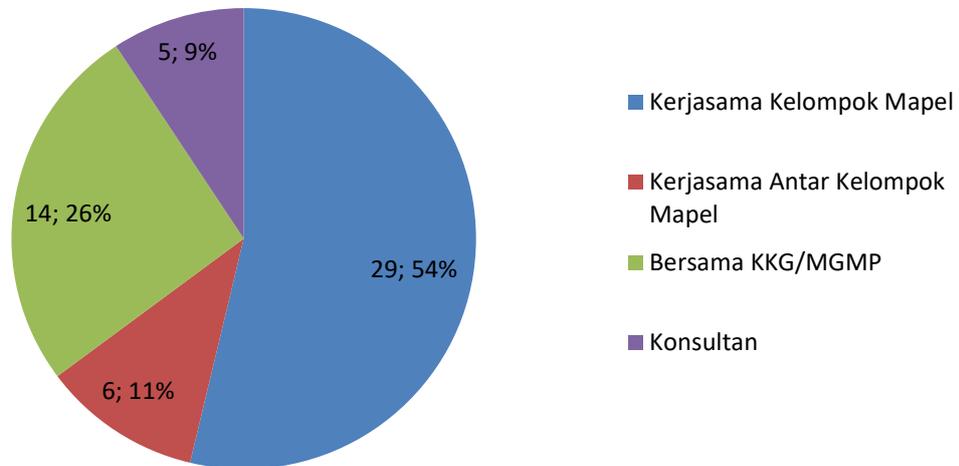


Berdasarkan data-data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden sudah melaksanakan langkah-langkah penyusunan RPP sesuai dengan kaidah.

Pola penyusunan RPP yang dilakukan oleh responden di sekolah paling banyak dalam bentuk kerja sama kelompok mapel. Lalu tidak responden yang menyusun RPP secara individu. Hal ini membuktikan bahwa responden menyadari bahwa penyusunan RPP memerlukan masukan dan evaluasi dari guru lain. Sehingga RPP yang disusun layak untuk diterapkan dalam pembelajaran. Diagram 8 menunjukkan pola penyusunan RPP yang dilakukan oleh responden.



Pola Penyusunan RPP



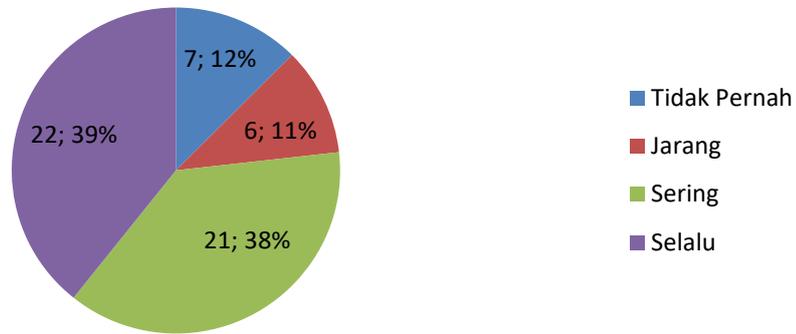
Saat melaksanakan pembelajaran, guru pada dasarnya melaksanakan 3 aktivitas utama, yakni membuka pembelajaran, melaksanakan aktivitas ini, dan menutup pembelajaran. Pada aktivitas membuka pembelajaran, responden melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Mengajak siswa melaksanakan piket secara bergantian

Berdasarkan data yang didapatkan, sebagian besar responden mengajak siswa mereka untuk melaksanakan piket secara bergantian. Diagram 9 menunjukkan frekuensi responden dalam mengajak siswa melaksanakan piket secara bergantian.



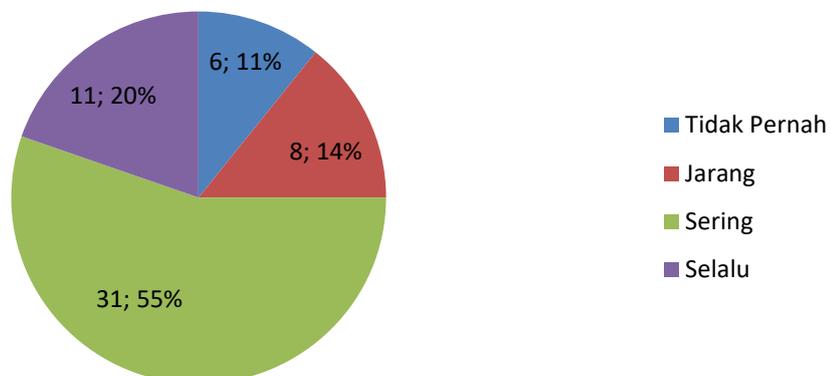
Pembukaan Pembelajaran 1



- Melakukan olah fisik sebelum memulai hari pembelajaran pada hari-hari tertentu bersama siswa

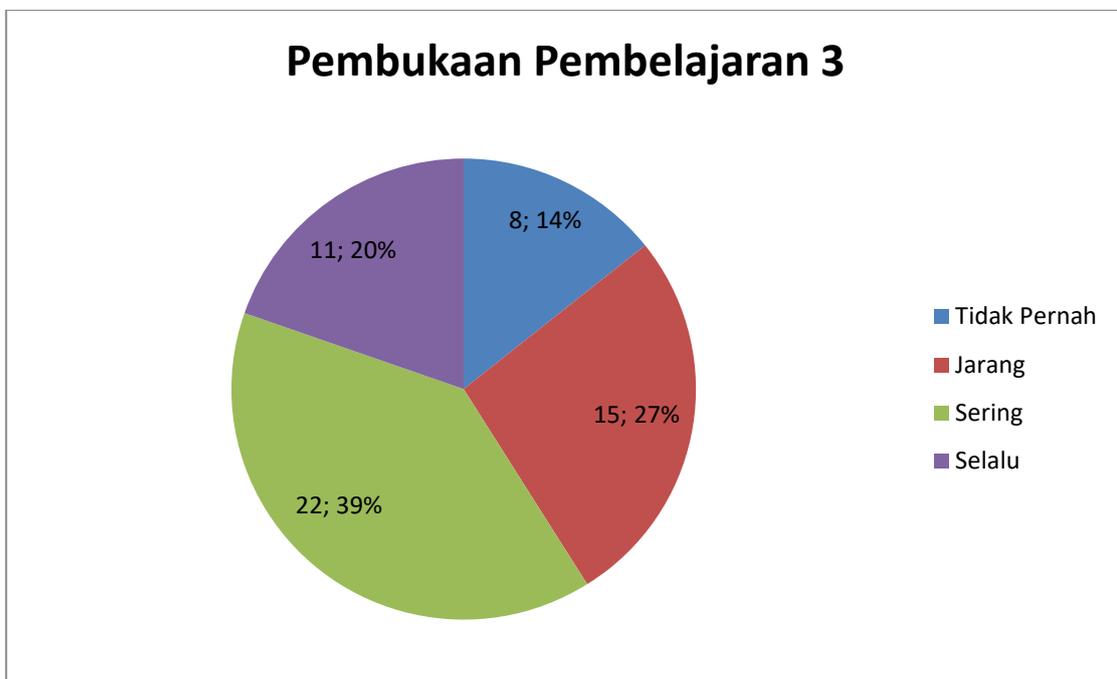
Berdasarkan data yang didapatkan, sebagian besar responden melakukan olah fisik sebelum memulai hari pembelajaran pada hari-hari tertentu bersama siswa mereka. Diagram 10 menunjukkan frekuensi responden dalam melakukan olah fisik sebelum memulai hari pembelajaran pada hari-hari tertentu bersama siswa.

Pembukaan Pembelajaran 2



3. Melakukan kegiatan positif secara rutin sesuai dengan potensi dan hobi yang dimiliki siswa

Berdasarkan data yang didapatkan, sebagian besar responden melakukan kegiatan positif secara rutin sesuai dengan potensi dan hobi yang dimiliki siswa. Diagram 11 menunjukkan frekuensi responden dalam melakukan kegiatan positif secara rutin sesuai dengan potensi dan hobi yang dimiliki siswa

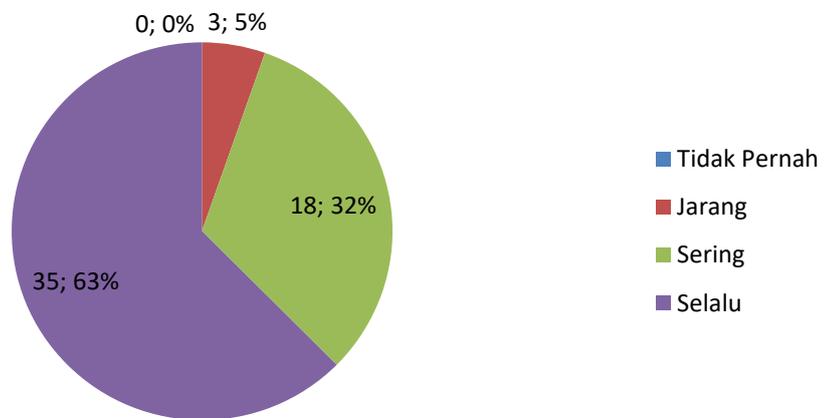


4. Meminta seorang siswa memimpin salam hormat kepada guru

Berdasarkan data yang didapatkan, sebagian besar responden meminta seorang siswa memimpin salam hormat kepada guru. Diagram 12 menunjukkan frekuensi responden dalam meminta seorang siswa memimpin salam hormat kepada guru



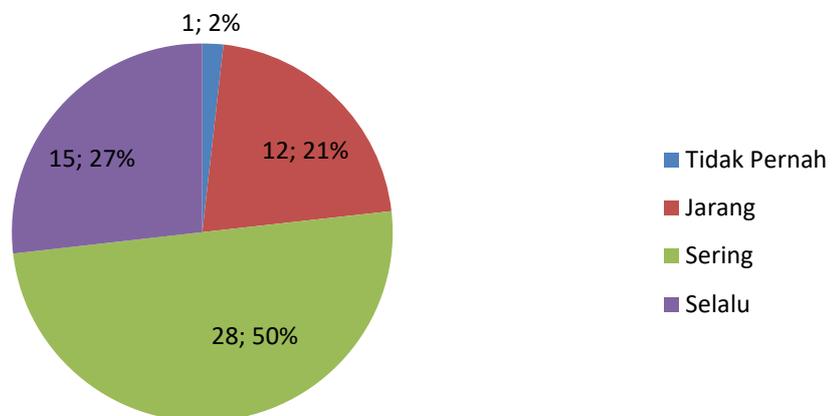
Pembukaan Pembelajaran 4



5. Mengajak siswa membaca buku selain buku mata pelajaran selama 15 menit setiap hari

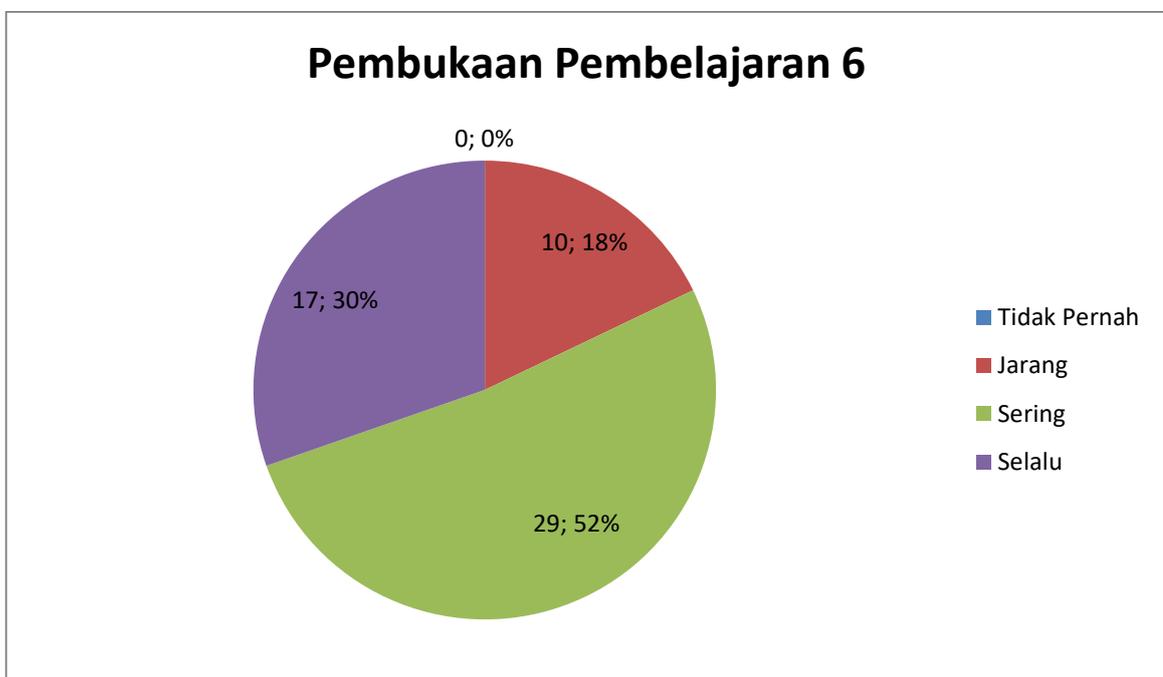
Berdasarkan data yang didapatkan, sebagian besar responden mengajak siswa membaca buku selain buku mata pelajaran selama 15 menit setiap hari. Diagram 13 menunjukkan frekuensi responden dalam mengajak siswa membaca buku selain buku mata pelajaran selama 15 menit setiap hari

Pembukaan Pembelajaran 5



6. Menganjurkan siswa menabung dalam berbagai bentuk (buku tabungan, celengan, dan lainnya)

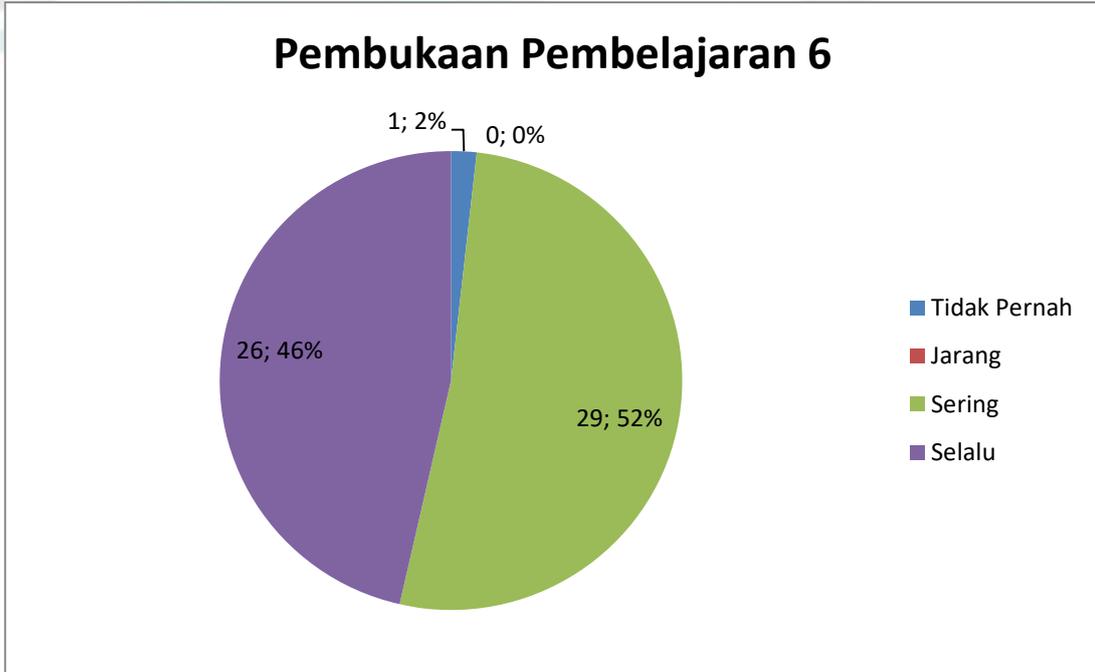
Berdasarkan data yang didapatkan, sebagian besar responden menganjurkan siswa menabung dalam berbagai bentuk (buku tabungan, celengan, dan lainnya). Diagram 14 menunjukkan frekuensi responden dalam menganjurkan siswa menabung dalam berbagai bentuk (buku tabungan, celengan, dan lainnya)



7. Menyesuaikan pengaturan tempat duduk siswa dan sumber daya lain yang sesuai

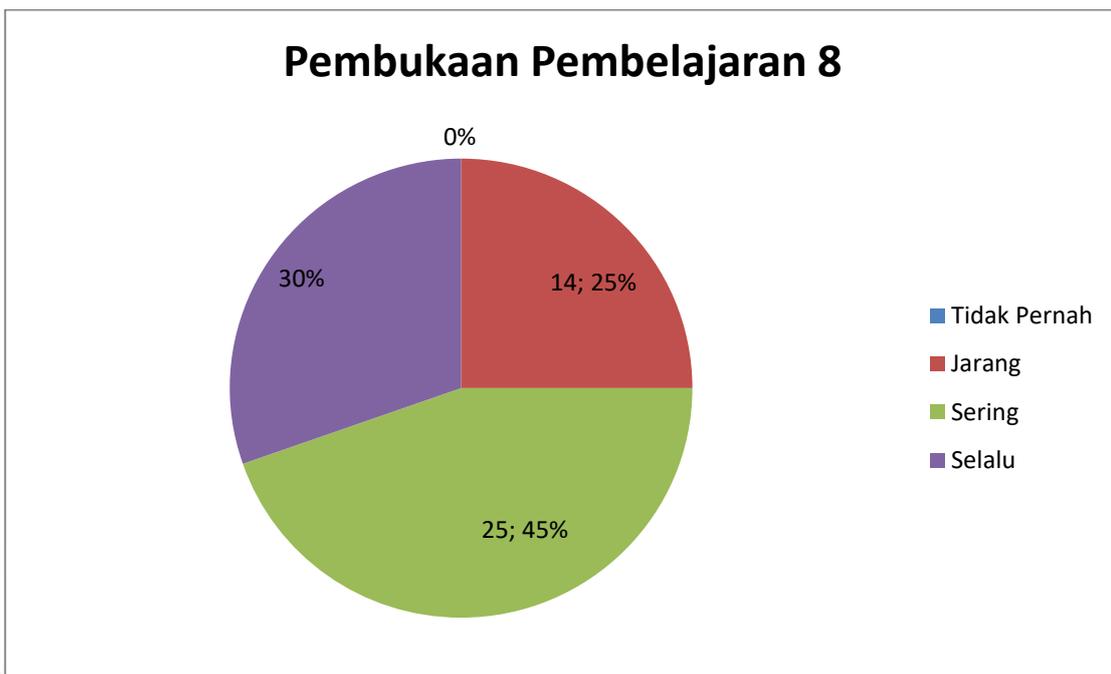
Berdasarkan data yang didapatkan, sebagian besar responden menyesuaikan pengaturan tempat duduk siswa dan sumber daya lain yang sesuai Diagram 15 menunjukkan frekuensi responden dalam menganjurkan siswa menyesuaikan pengaturan tempat duduk siswa dan sumber daya lain yang sesuai





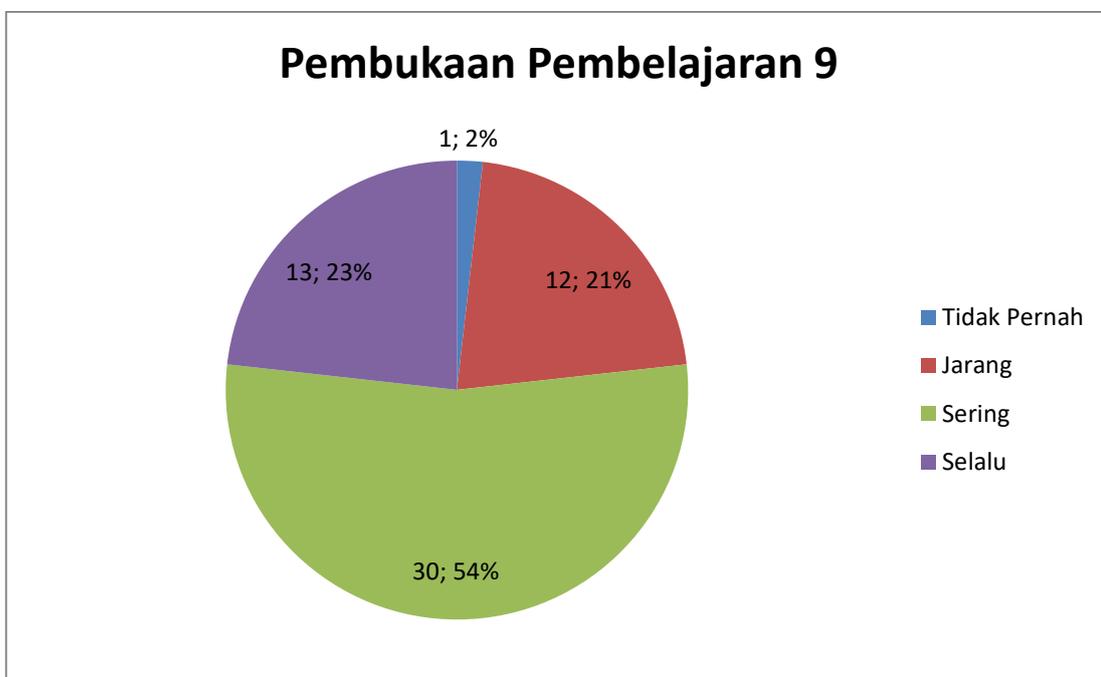
8. Memulai proses pembelajaran sesuai waktu yang dijadwalkan

Berdasarkan data yang didapatkan, sebagian besar responden memulai proses pembelajaran sesuai waktu yang dijadwalkan. Diagram 16 menunjukkan frekuensi responden dalam memulai proses pembelajaran sesuai waktu yang dijadwalkan.



9. Menjelaskan silabus mata pelajaran pada tiap awal semester kepada siswa

Berdasarkan data yang didapatkan, sebagian besar responden Menjelaskan silabus mata pelajaran pada tiap awal semester kepada siswa. Diagram 17 menunjukkan frekuensi responden dalam menjelaskan silabus mata pelajaran pada tiap awal semester kepada siswa.

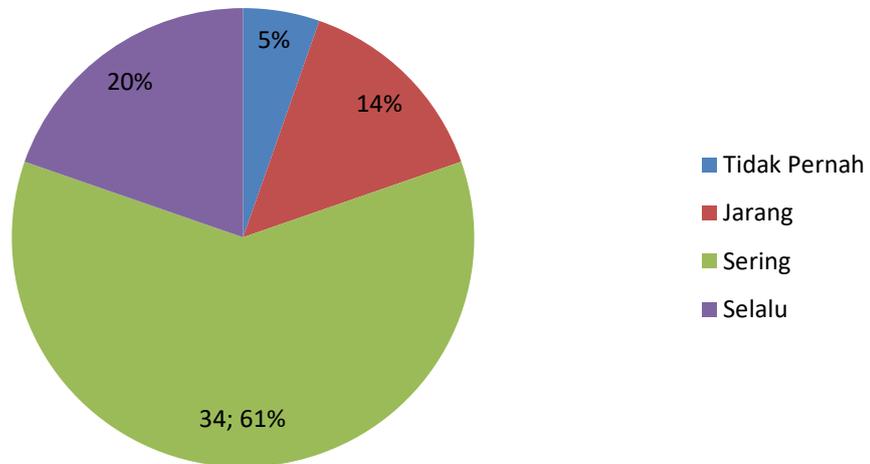


10. Menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan sesuai silabus

Berdasarkan data yang didapatkan, sebagian besar responden menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan sesuai silabus. Diagram 18 menunjukkan frekuensi responden dalam menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan sesuai silabus



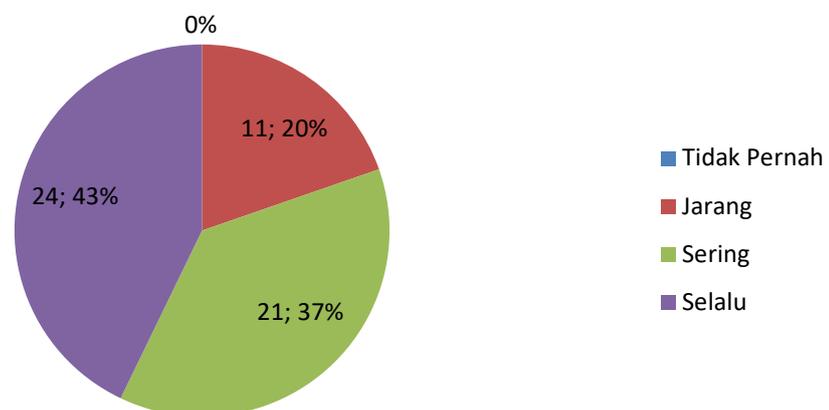
Pembukaan Pembelajaran 10



11. Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai

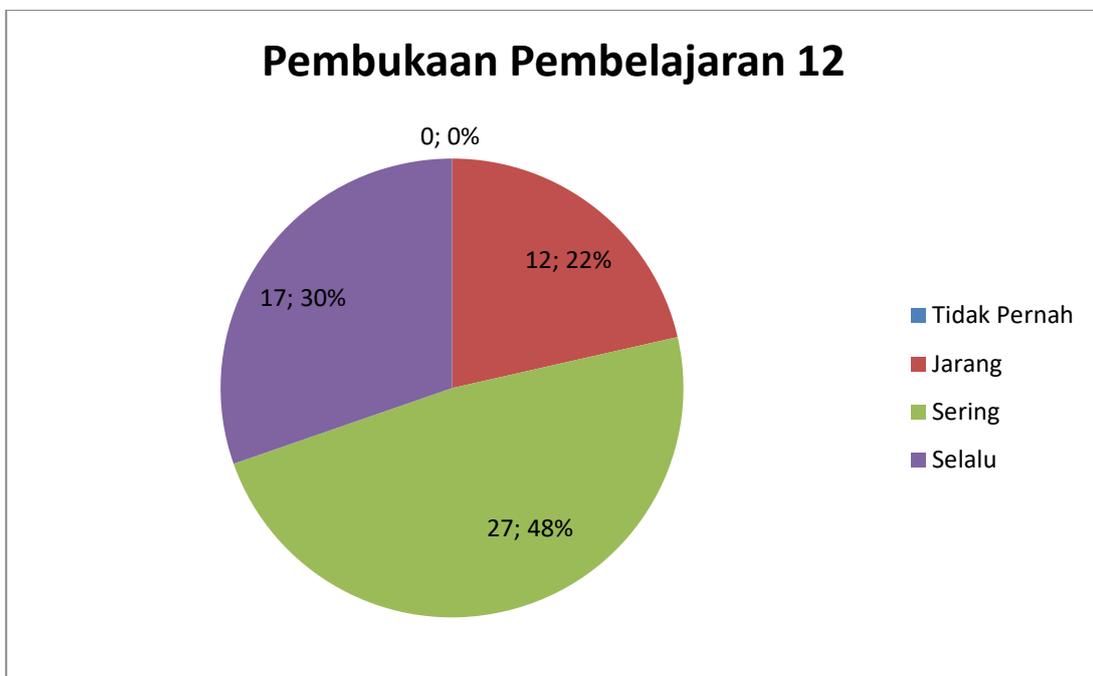
Berdasarkan data yang didapatkan, sebagian besar responden menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Diagram 19 menunjukkan frekuensi responden dalam menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai

Pembukaan Pembelajaran 11



12. Mendiskusikan kompetensi sebelumnya berkaitan dengan kompetensi yang akan dipelajari dan dikembangkan

Berdasarkan data yang didapatkan, sebagian besar responden mendiskusikan kompetensi sebelumnya berkaitan dengan kompetensi yang akan dipelajari dan dikembangkan. Diagram 20 menunjukkan frekuensi responden dalam mendiskusikan kompetensi sebelumnya berkaitan dengan kompetensi yang akan dipelajari dan dikembangkan

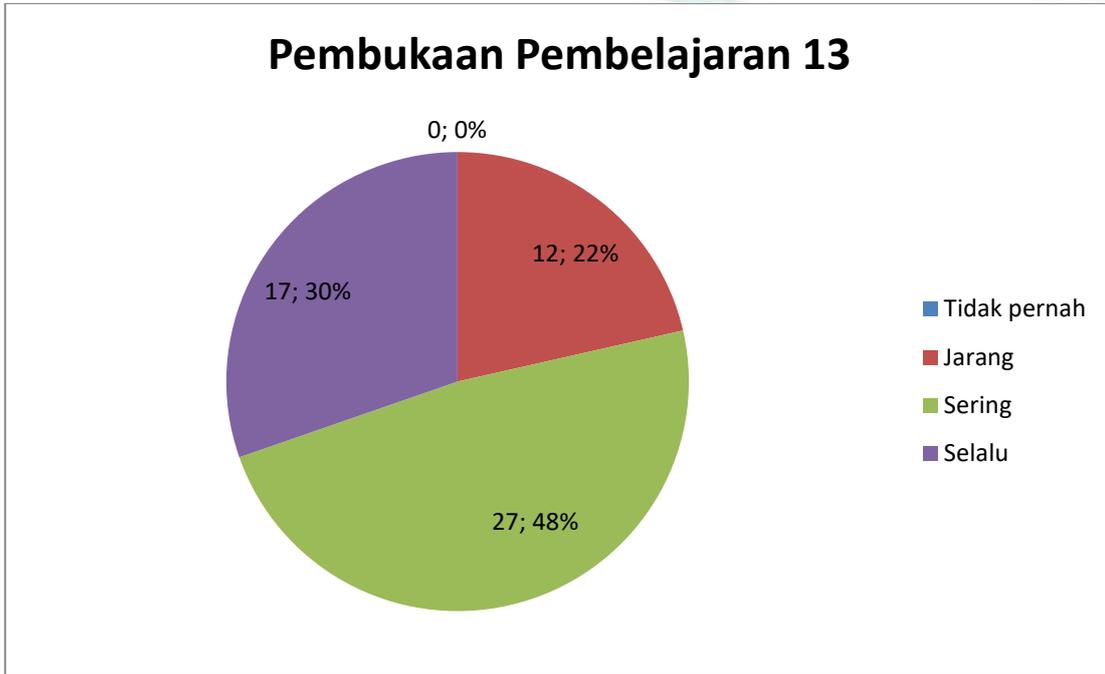


13. Memotivasi siswa untuk mengaplikasikan kompetensi yang akan dicapai dalam kehidupan sehari-hari

Berdasarkan data yang didapatkan, sebagian besar responden memotivasi siswa untuk mengaplikasikan kompetensi yang akan dicapai dalam kehidupan sehari-hari. Diagram 21 menunjukkan frekuensi responden dalam memotivasi siswa untuk mengaplikasikan kompetensi yang akan dicapai

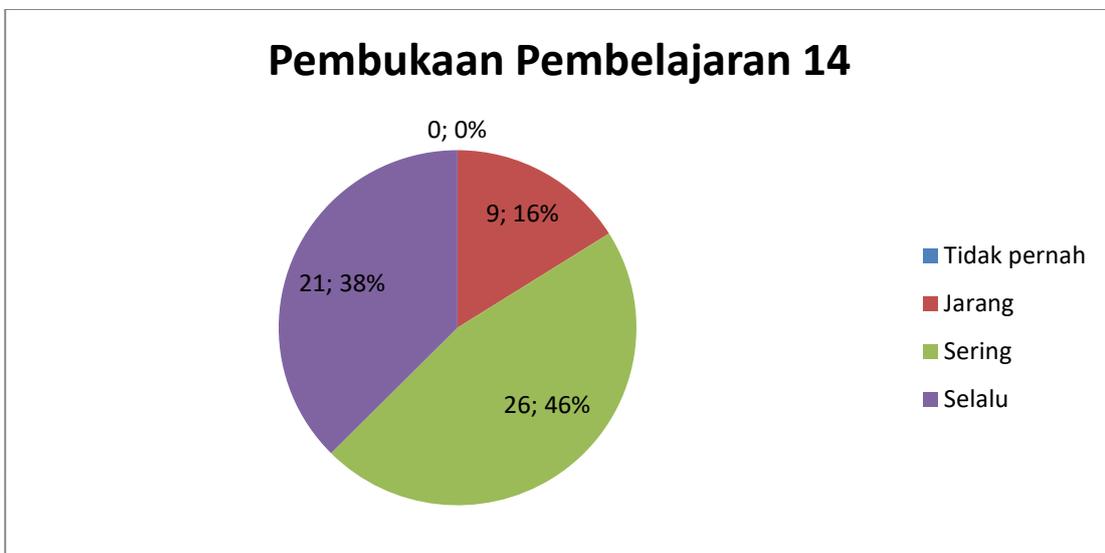


dalam kehidupan sehari-hari



14. Menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan

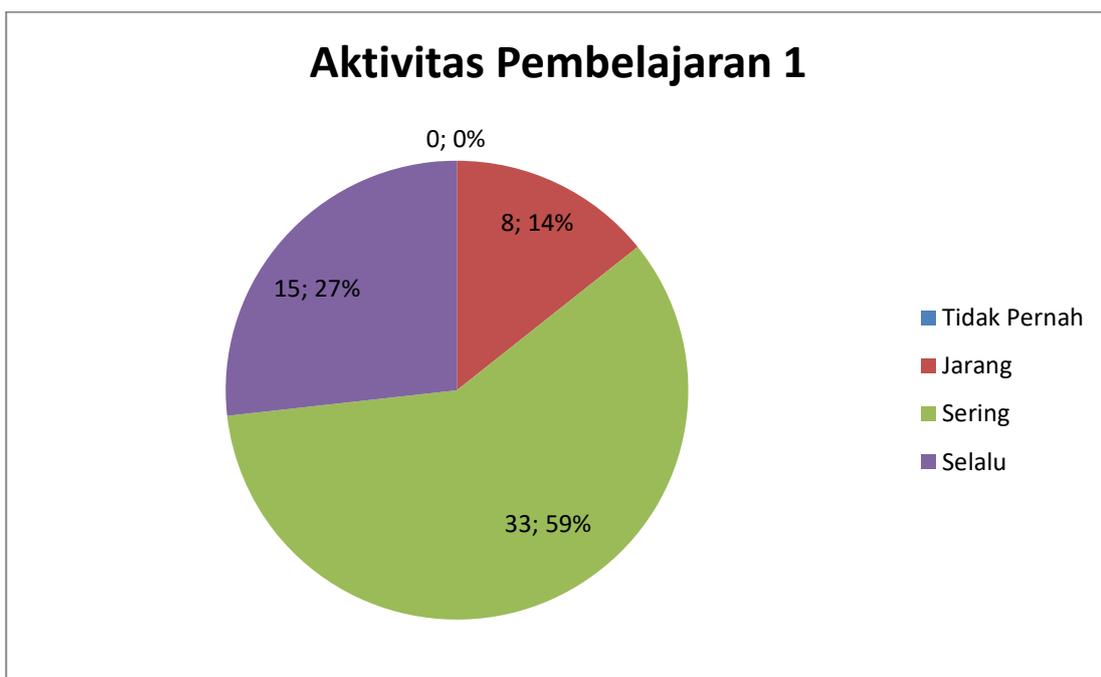
Berdasarkan data yang didapatkan, sebagian besar responden menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. Diagram 22 menunjukkan frekuensi responden dalam menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan



Aktivitas pembelajaran selanjutnya adalah aktivitas inti. Langkah-langkah yang dilakukan oleh responden adalah sebagai berikut.

1. Mengajak siswa untuk mengamati atau melakukan identifikasi

Berdasarkan data yang didapatkan, sebagian besar responden mengajak siswa untuk mengamati atau melakukan identifikasi. Diagram 23 menunjukkan frekuensi responden dalam mengajak siswa untuk mengamati atau melakukan identifikasi.



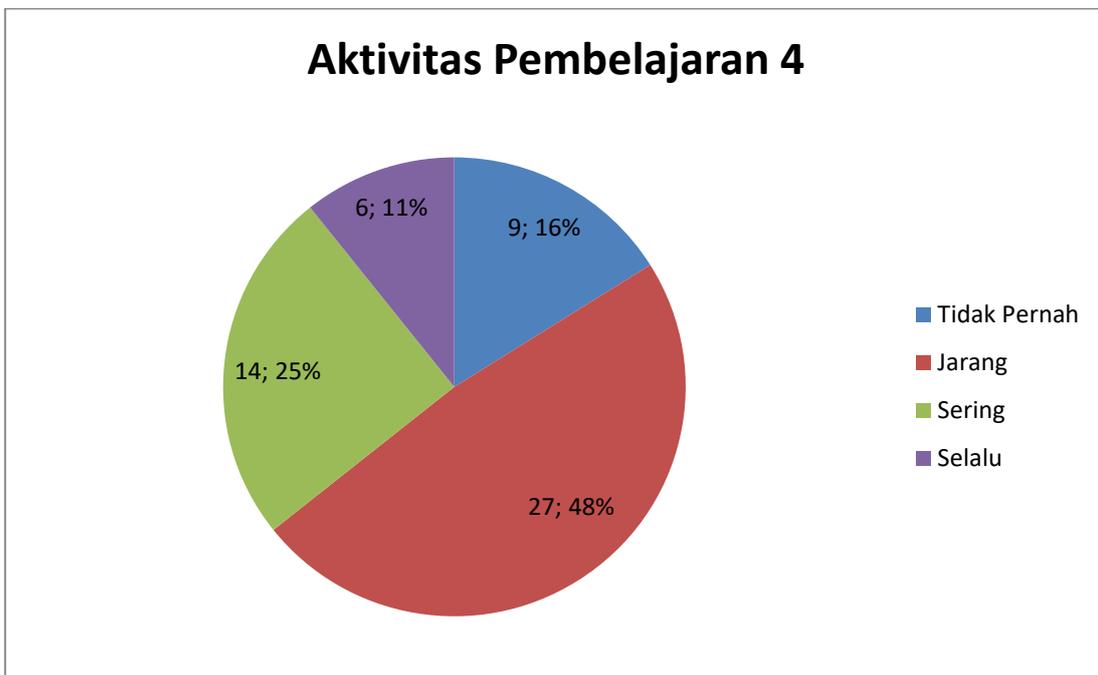
2. Mengajukan masalah yang akan dipecahkan

Berdasarkan data yang didapatkan, sebagian besar responden mengajukan masalah yang akan dipecahkan. Diagram 24 menunjukkan frekuensi responden dalam mengajukan masalah yang akan dipecahkan



4. Membantu siswa untuk menjelaskan dan membagi tugas yang akan dilakukan

Berdasarkan data yang didapatkan, sebagian besar responden membantu siswa untuk menjelaskan dan membagi tugas yang akan dilakukan. Diagram 26 menunjukkan frekuensi responden dalam membantu siswa untuk menjelaskan dan membagi tugas yang akan dilakukan

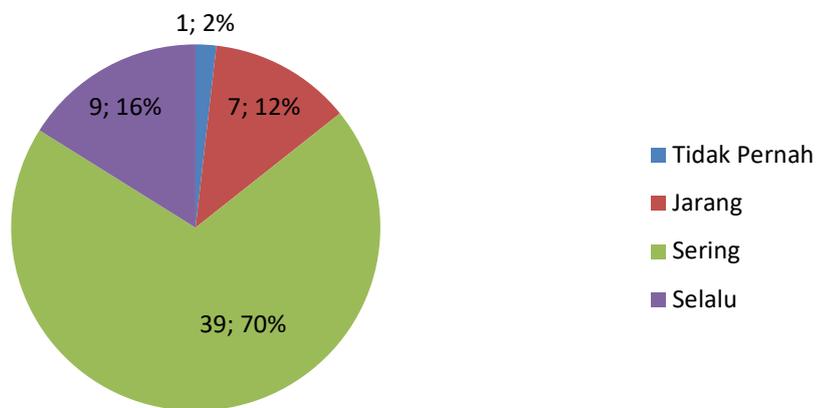


5. Memperagakan ketrampilan atau menyajikan informasi tahap demi tahap

Berdasarkan data yang didapatkan, sebagian besar responden Memperagakan ketrampilan atau menyajikan informasi tahap demi tahap. Diagram 27 menunjukkan frekuensi responden dalam memperagakan ketrampilan atau menyajikan informasi tahap demi tahap.



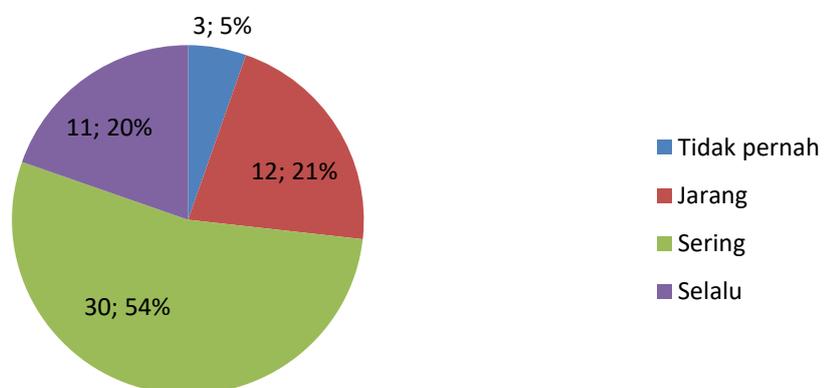
Aktivitas Pembelajaran 5



6. Mendorong siswa untuk bertanya dan menyampaikan pendapat

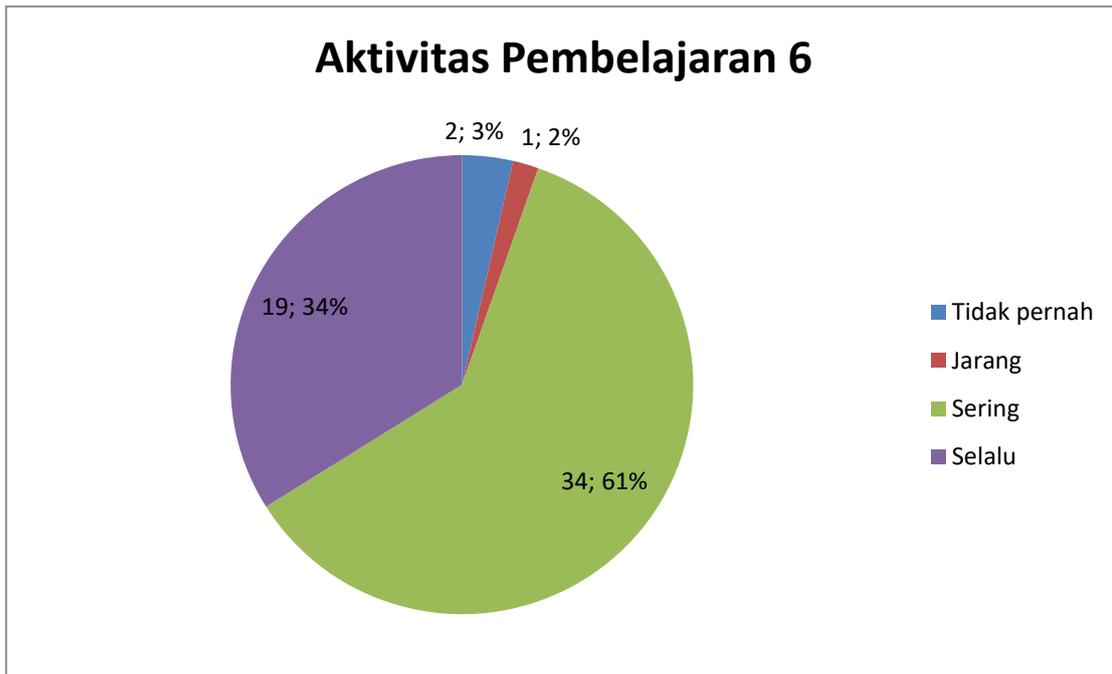
Berdasarkan data yang didapatkan, sebagian besar responden mendorong siswa untuk bertanya dan menyampaikan pendapat. Diagram 28 menunjukkan frekuensi responden dalam mendorong siswa untuk bertanya dan menyampaikan pendapat.

Aktivitas Pembelajaran 6



7. Memberikan latihan terbimbing

Berdasarkan data yang didapatkan, sebagian besar responden memberikan latihan terbimbing. Diagram 29 menunjukkan frekuensi responden dalam Memberikan latihan terbimbing.

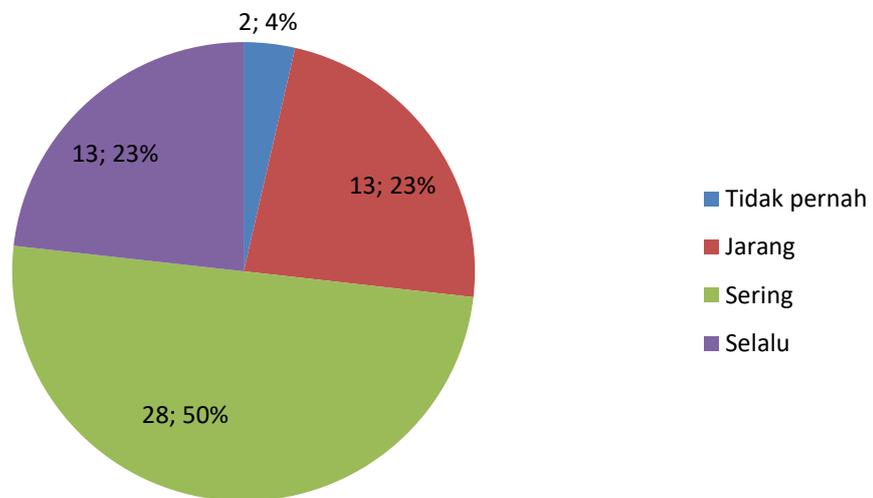


8. Memeriksa dan memberikan masukan terhadap kemampuan siswa

Berdasarkan data yang didapatkan, sebagian besar responden memeriksa dan memberikan masukan terhadap kemampuan siswa. Diagram 30 menunjukkan frekuensi responden dalam memeriksa dan memberikan masukan terhadap kemampuan siswa



Aktivitas Pembelajaran 8

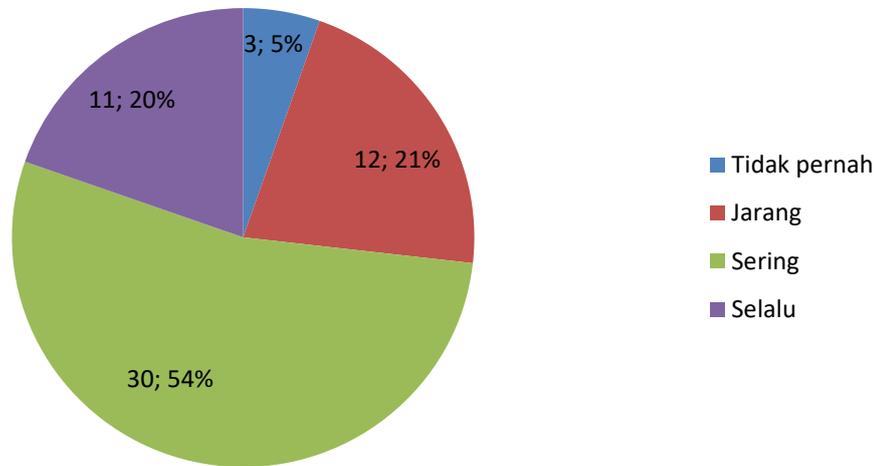


9. Mempersiapkan latihan kepada siswa untuk menerapkan konsep yang dipelajari pada kehidupan sehari-hari

Berdasarkan data yang didapatkan, sebagian besar responden mempersiapkan latihan kepada siswa untuk menerapkan konsep yang dipelajari pada kehidupan sehari-hari. Diagram 31 menunjukkan frekuensi responden dalam mempersiapkan latihan kepada siswa untuk menerapkan konsep yang dipelajari pada kehidupan sehari-hari



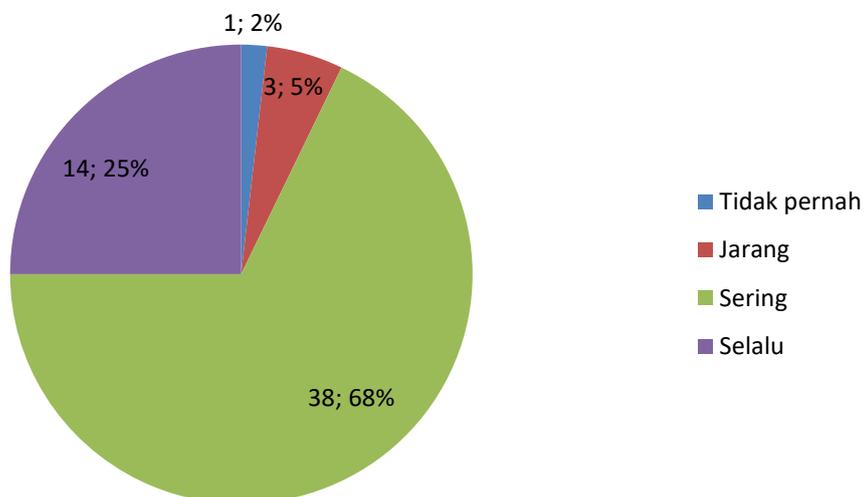
Aktivitas Pembelajaran 9



10. Membantu siswa membentuk kelompok

Berdasarkan data yang didapatkan, sebagian besar responden membantu siswa membentuk kelompok. Diagram 32 menunjukkan frekuensi responden dalam membantu siswa membentuk kelompok.

Aktivitas Pembelajaran 10



11. Membimbing kelompok-kelompok belajar saat mengerjakan tugas

Berdasarkan data yang didapatkan, sebagian besar responden membimbing kelompok-kelompok belajar saat mengerjakan tugas. Diagram 33 menunjukkan frekuensi responden dalam membimbing kelompok-kelompok belajar saat mengerjakan tugas.

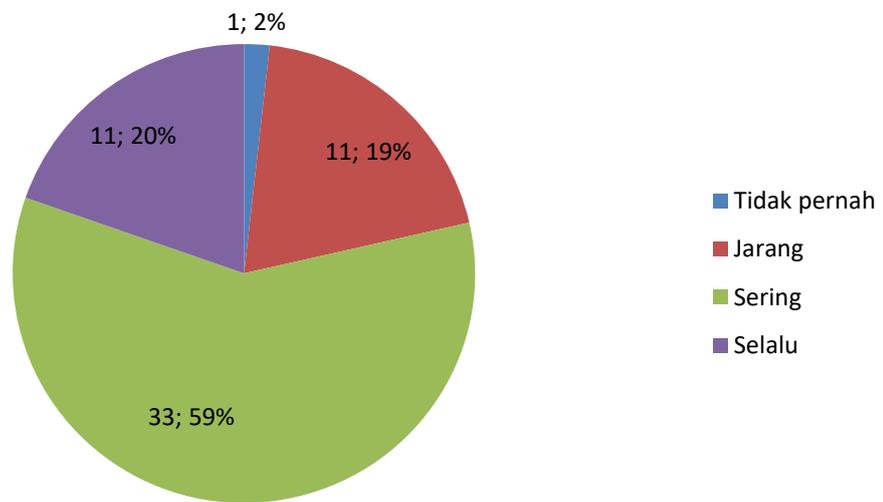


12. Mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai

Berdasarkan data yang didapatkan, sebagian besar responden mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai. Diagram 34 menunjukkan frekuensi responden dalam mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai.



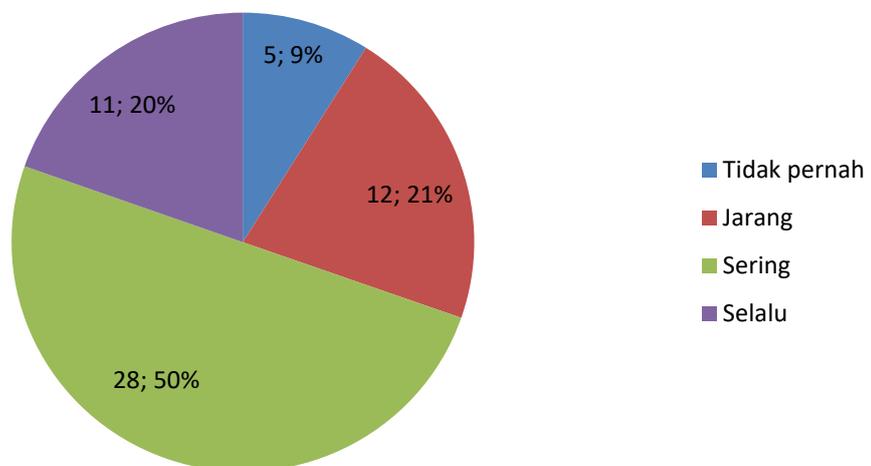
Aktivitas Pembelajaran 12



13. Mendorong siswa melaksanakan eksperimen

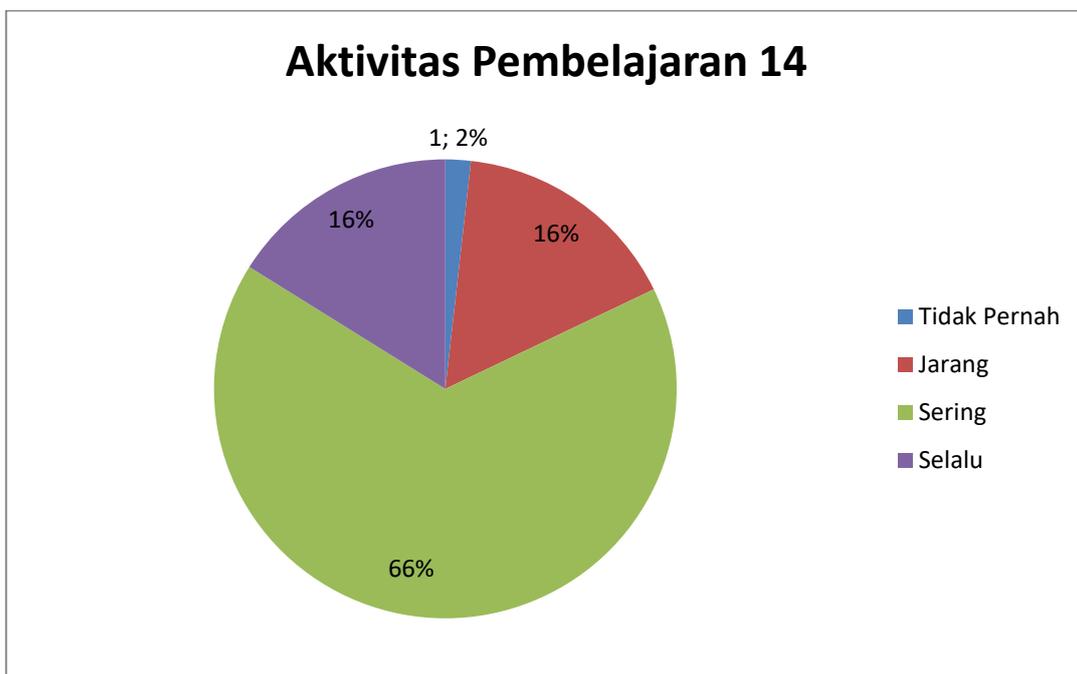
Berdasarkan data yang didapatkan, sebagian besar responden mendorong siswa melaksanakan eksperimen. Diagram 35 menunjukkan frekuensi responden dalam mendorong siswa untuk mendorong siswa melaksanakan eksperimen.

Aktivitas Pembelajaran 13



14. Mendorong siswa untuk mendapat penjelasan pemecahan masalah

Berdasarkan data yang didapatkan, sebagian besar responden mendorong siswa untuk mendapat penjelasan pemecahan masalah. Diagram 36 menunjukkan frekuensi responden dalam mendorong siswa untuk mendapat penjelasan pemecahan masalah

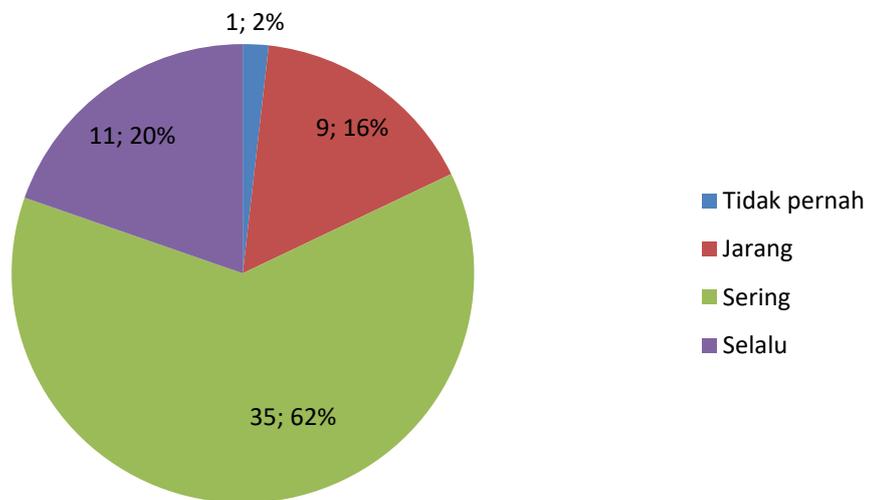


15. Mendorong siswa untuk memanfaatkan sumber belajar yang ada di sekolah maupun di luar sekolah

Berdasarkan data yang didapatkan, sebagian besar responden mendorong siswa untuk memanfaatkan sumber belajar yang ada di sekolah maupun di luar sekolah. Diagram 37 menunjukkan frekuensi responden dalam mendorong siswa untuk memanfaatkan sumber belajar yang ada di sekolah maupun di luar sekolah



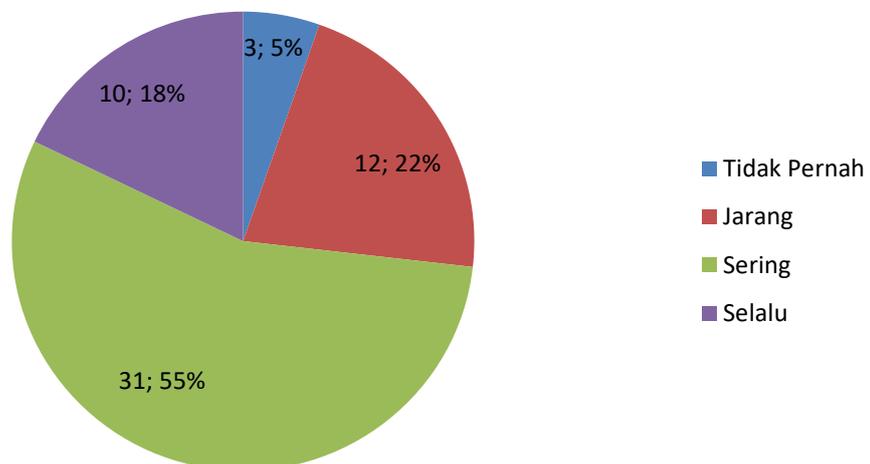
Aktivitas Pembelajaran 15



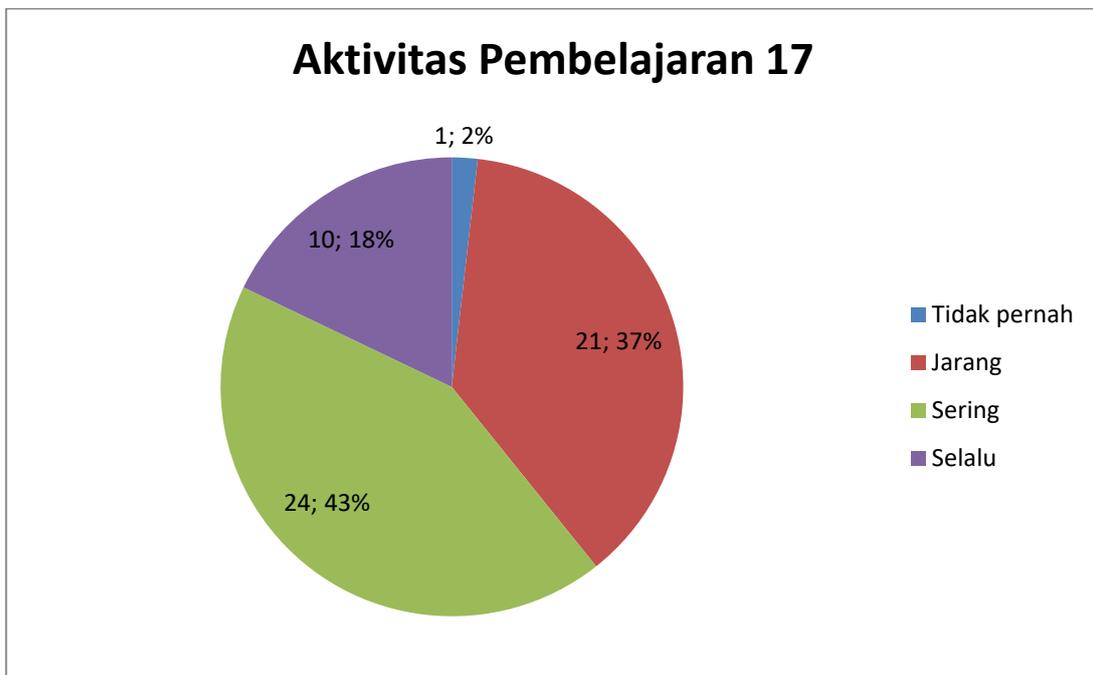
16. Mendorong siswa untuk memanfaatkan nara sumber yang ada di luar sekolah

Berdasarkan data yang didapatkan, sebagian besar responden mendorong siswa untuk memanfaatkan nara sumber yang ada di luar sekolah. Diagram 38 menunjukkan frekuensi responden dalam mendorong siswa untuk memanfaatkan nara sumber yang ada di luar sekolah

Aktivitas Pembelajaran 16



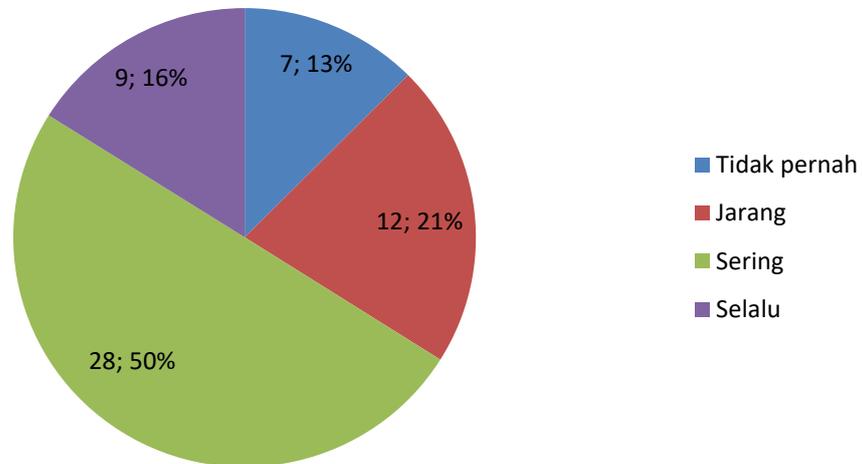
17. Memotivasi siswa untuk mengasosiasi (menalar) dan menyimpulkan
 Berdasarkan data yang didapatkan, sebagian besar responden memotivasi siswa untuk mengasosiasi (menalar) dan menyimpulkan. Diagram 39 menunjukkan frekuensi responden dalam Memotivasi siswa untuk mengasosiasi (menalar) dan menyimpulkan



18. Membantu siswa dalam merencanakan karya yang sesuai
 Berdasarkan data yang didapatkan, sebagian besar responden membantu siswa dalam merencanakan karya yang sesuai. Diagram 40 menunjukkan frekuensi responden dalam membantu siswa dalam merencanakan karya yang sesuai.



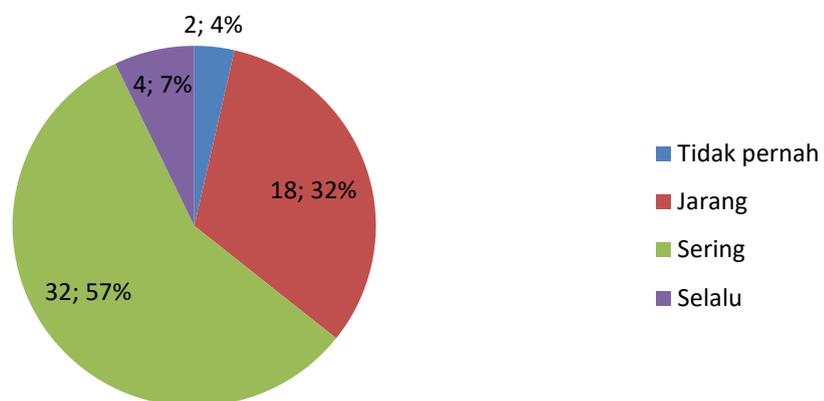
Aktivitas Pembelajaran 18



19. Membantu siswa dalam menyiapkan karya yang sesuai

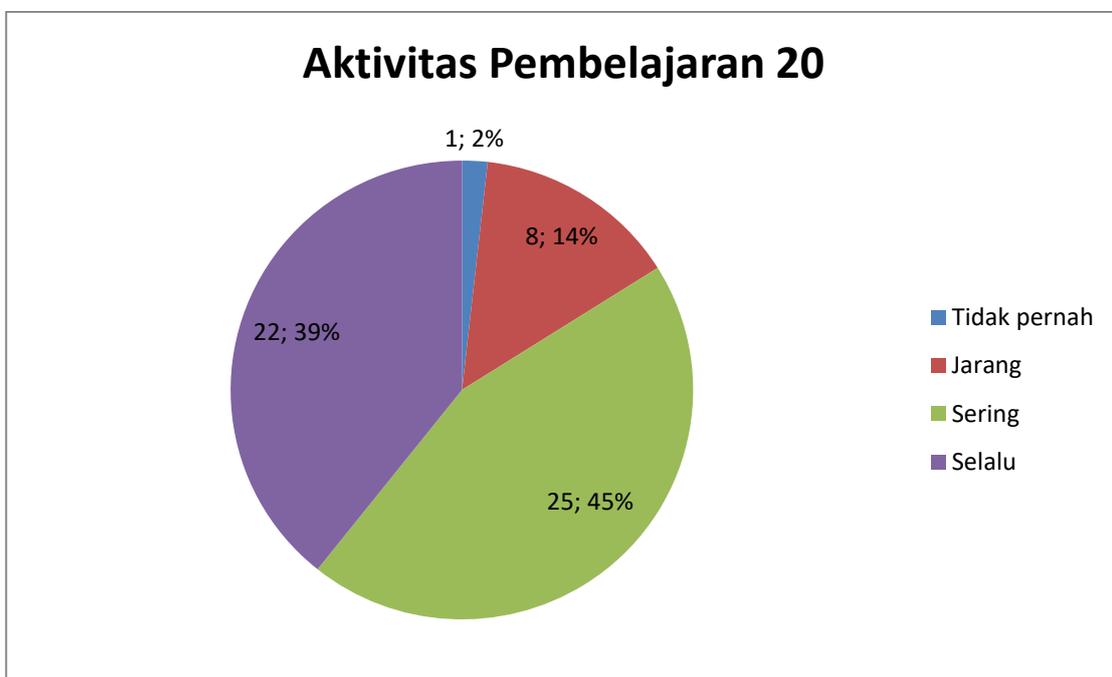
Berdasarkan data yang didapatkan, sebagian besar responden membantu siswa dalam menyiapkan karya yang sesuai. Diagram 41 menunjukkan frekuensi responden dalam membantu siswa dalam merencanakan karya yang sesuai.

Aktivitas Pembelajaran 19



20. Membantu siswa melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka

Berdasarkan data yang didapatkan, sebagian besar responden membantu siswa melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka. Diagram 42 menunjukkan frekuensi responden dalam membantu siswa melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka.

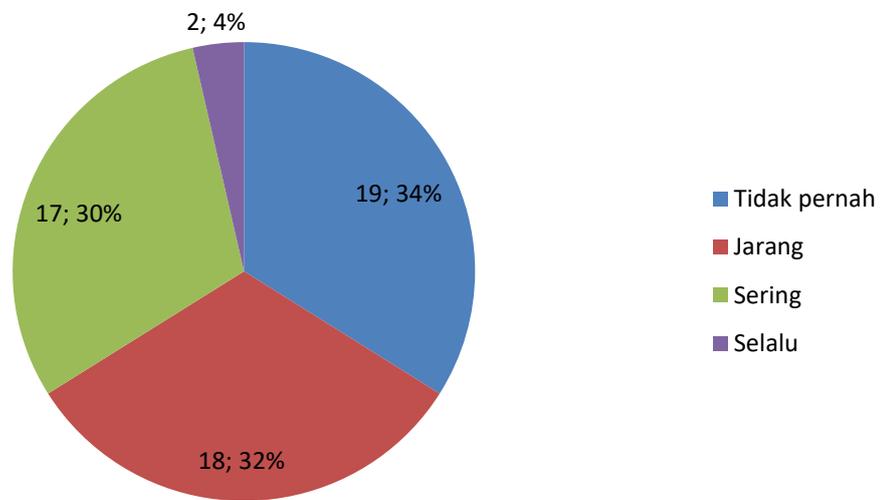


21. Mendorong siswa untuk menghargai pendapat orang lain

Berdasarkan data yang didapatkan, sebagian besar responden tidak mendorong siswa untuk menghargai pendapat orang lain. Diagram 43 menunjukkan frekuensi responden dalam mendorong siswa untuk menghargai pendapat orang lain.



Aktivitas Pembelajaran 21

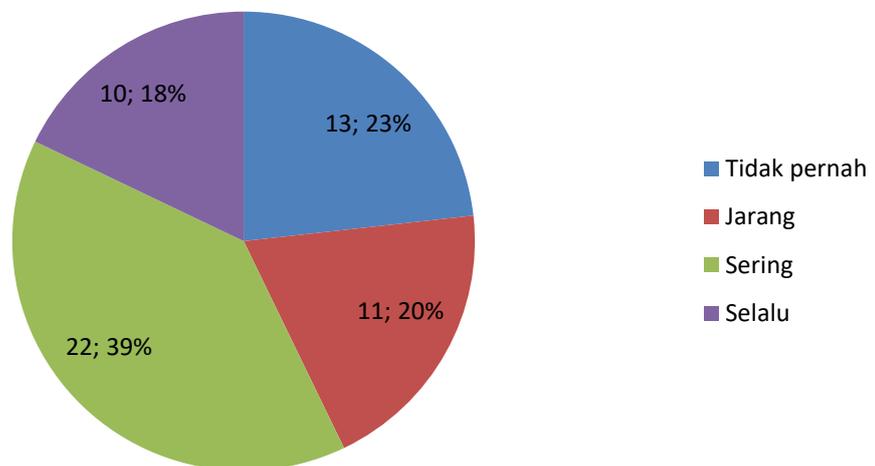


Penggunaan media yang dilakukan sekolah oleh responden bervariasi sebagai berikut

1. Audio : Kaset audio, siaran radio, CD, telepon

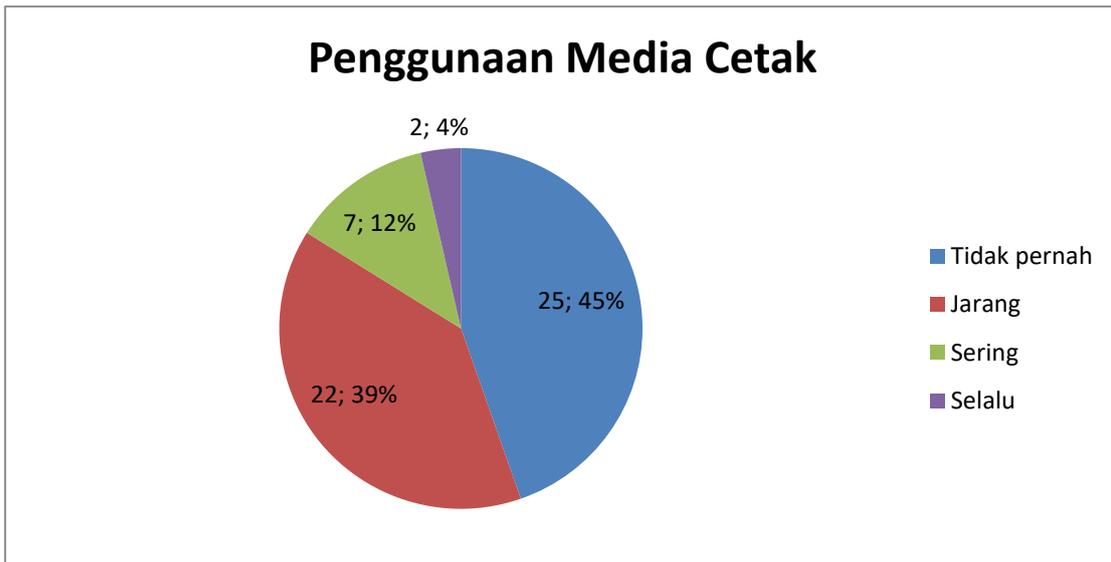
Diagram 42 menunjukkan frekuensi responden dalam menggunakan media pembelajaran berbentuk audio

Penggunaan Media Audio



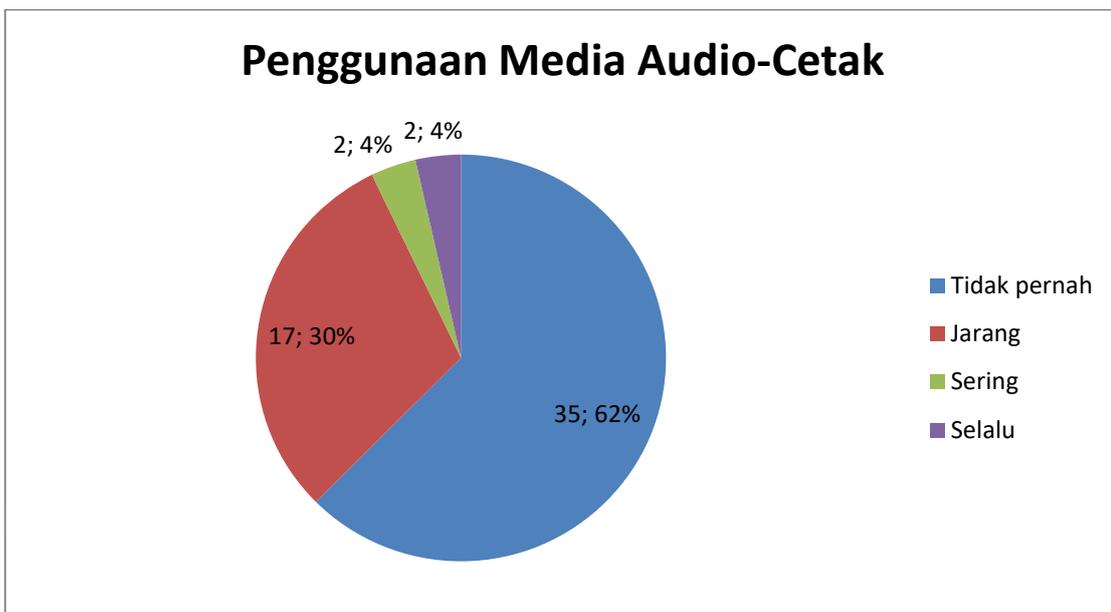
2. Cetak : Buku pelajaran, modul, brosur, leaflet, gambar

Diagram 43 menunjukkan frekuensi responden dalam menggunakan media pembelajaran berbentuk cetak.



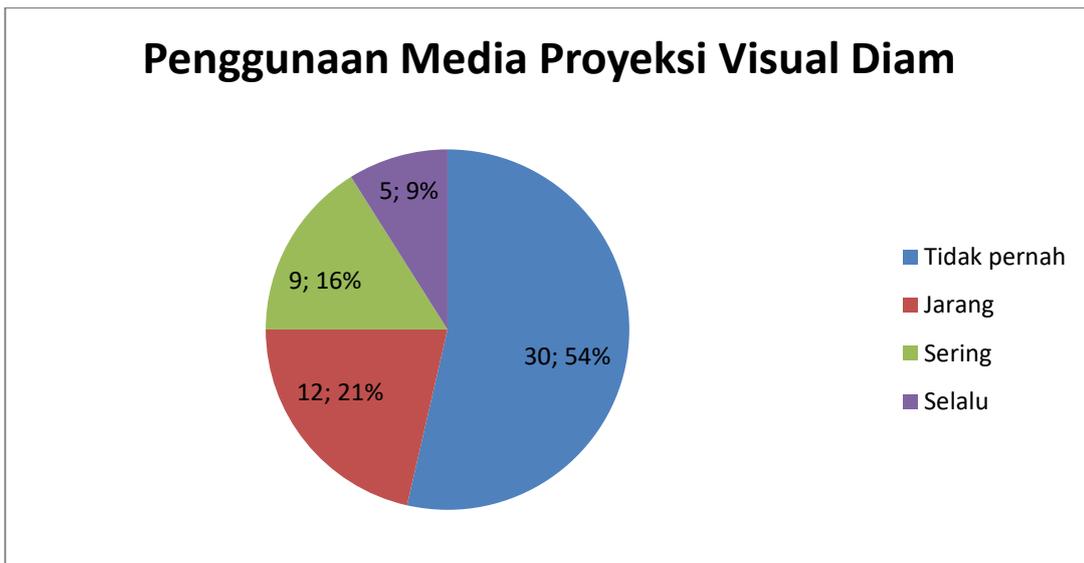
3. Audio-cetak : Kaset audio yang dilengkapi bahan tertulis

Diagram 44 menunjukkan frekuensi responden dalam menggunakan media pembelajaran berbentuk audio-cetak



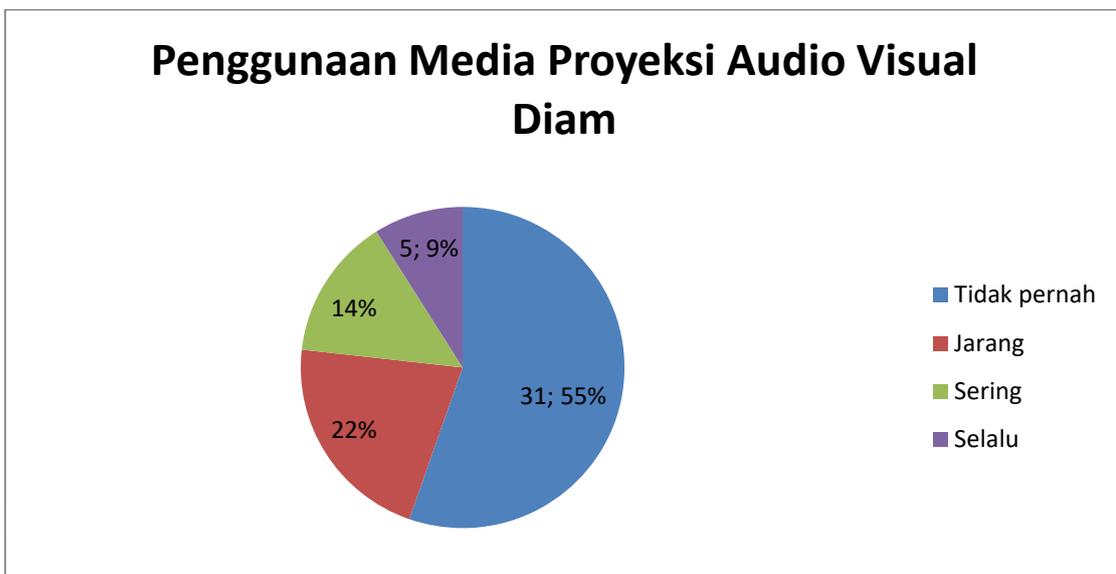
4. Proyeksi visual diam : Overhead transparansi (OHT), Film bingkai (slide)

Diagram 45 menunjukkan frekuensi responden dalam menggunakan media pembelajaran berbentuk proyeksi visual diam



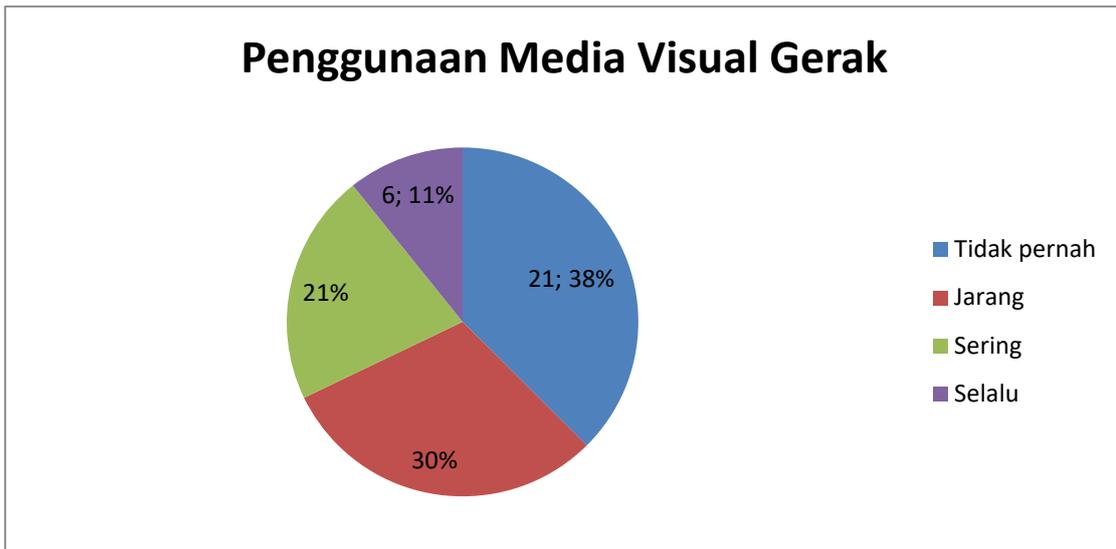
5. Proyeksi audio visual diam : Film bingkai (slide) bersuara

Diagram 46 menunjukkan frekuensi responden dalam menggunakan media pembelajaran berbentuk proyeksi audio visual diam.



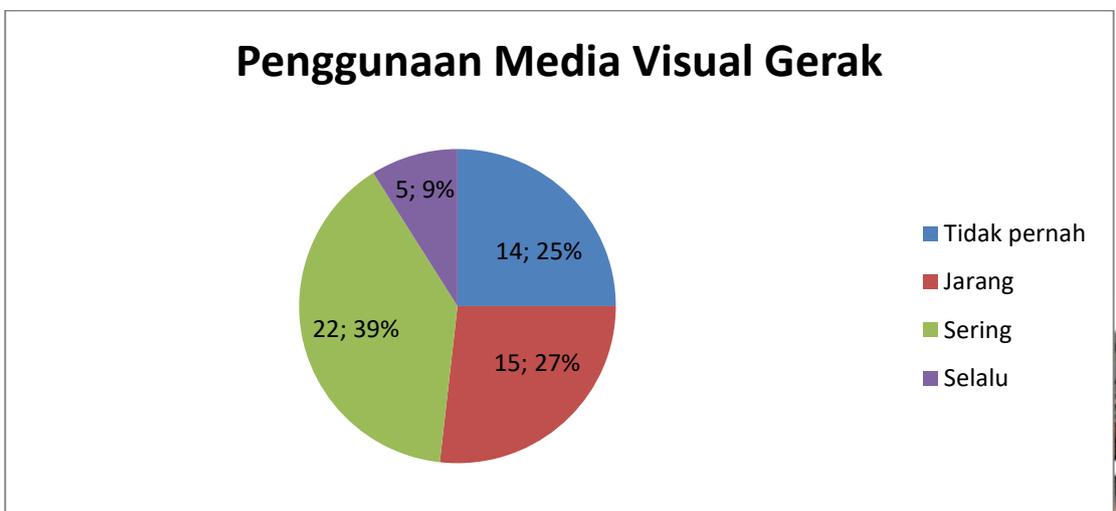
6. Visual gerak : Film bisu

Diagram 47 menunjukkan frekuensi responden dalam menggunakan media pembelajaran berbentuk visual gerak.



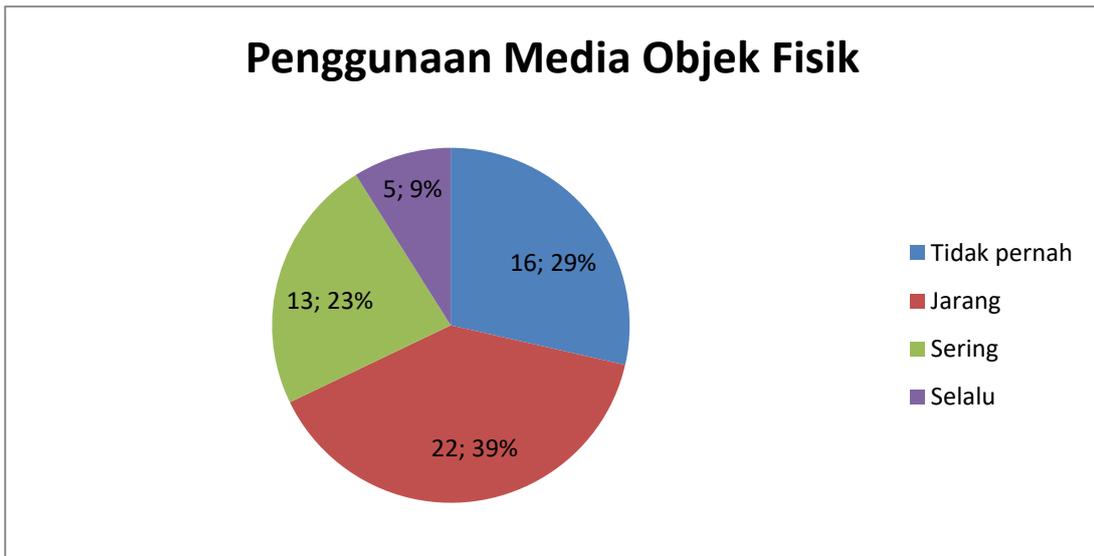
7. Audio visual gerak : Audio Visual gerak, film gerak bersuara, video/VCD, televise

Diagram 48 menunjukkan frekuensi responden dalam menggunakan media pembelajaran berbentuk audio visual gerak.



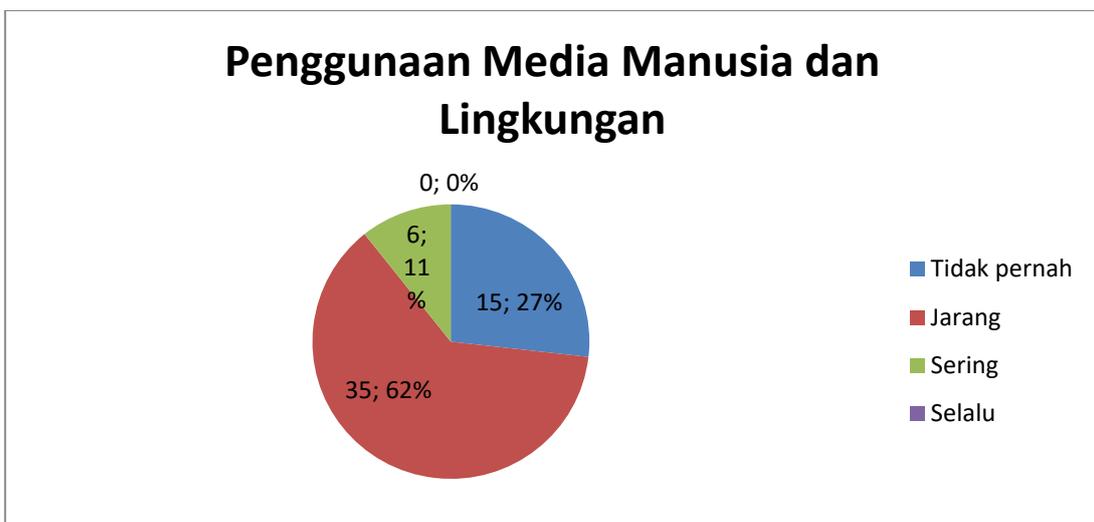
8. Objek fisik : Benda nyata, model, specimen

Diagram 48 menunjukkan frekuensi responden dalam menggunakan media pembelajaran berbentuk objek fisik.



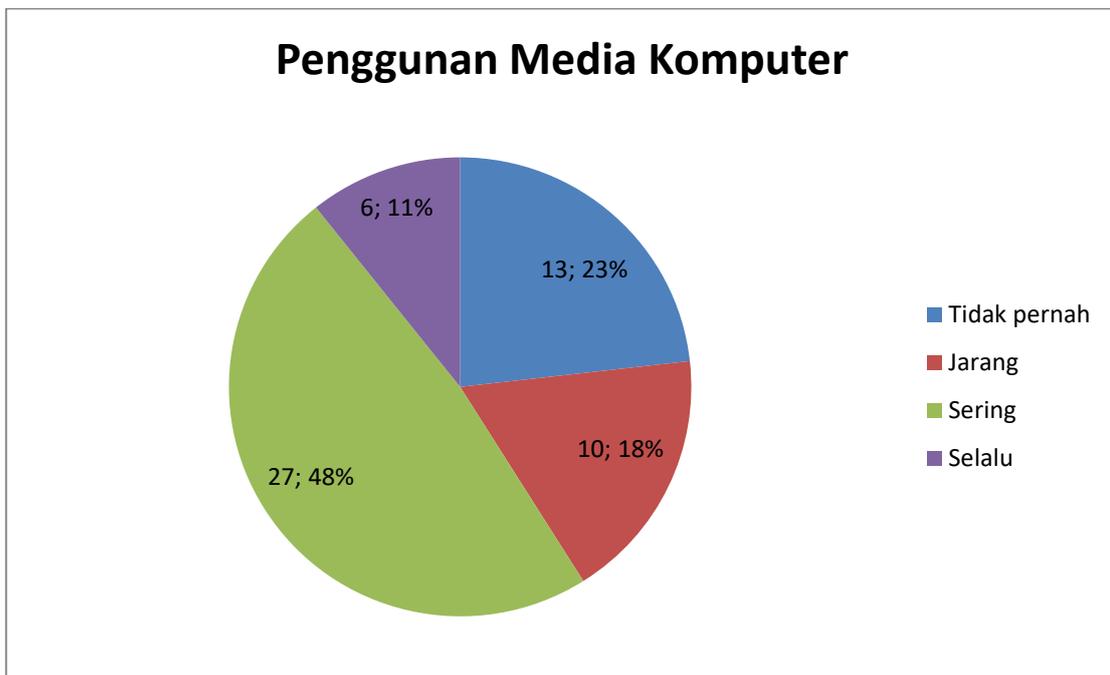
9. Manusia dan lingkungan : Guru, Pustakawan, Laboran

Diagram 49 menunjukkan frekuensi responden dalam menggunakan media pembelajaran berbentuk manusia dan lingkungan.



10. Komputer : CAI (dengan bantuan computer) dan CBI (menggunakan computer)

Diagram 50 menunjukkan frekuensi responden dalam menggunakan media pembelajaran berbentuk komputer



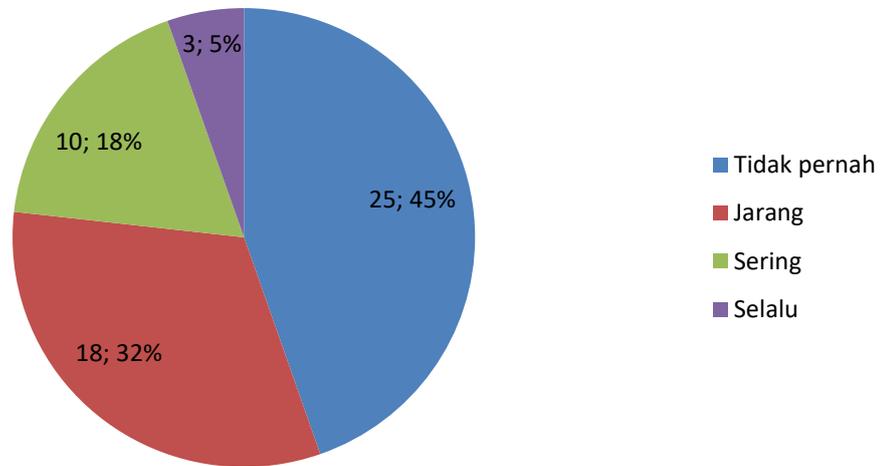
Berdasarkan data yang didapatkan, responden menggunakan sumber belajar sebagai berikut.

1. Sumber belajar cetak: buku, majalah, ensiklopedi, brosur, koran, poster, dan denah

Diagram 51 menunjukkan frekuensi responden dalam menggunakan sumber pembelajaran cetak



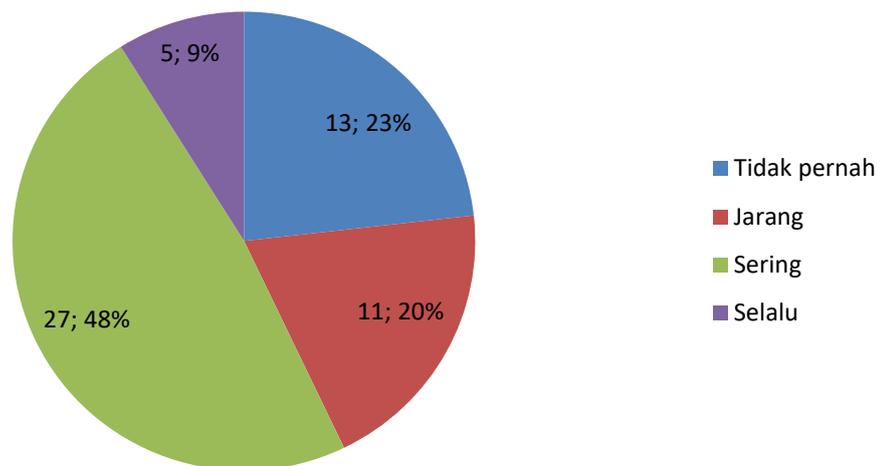
Penggunaan Sumber Belajar Cetak



2. Sumber belajar non cetak: film, slide, video, model, boneka, dan audio kaset.

Diagram 52 menunjukkan frekuensi responden dalam menggunakan sumber pembelajaran non cetak

Penggunaan Sumber Belajar Non-Cetak



3. Sumber belajar yang berupa fasilitas: auditorium, perpustakaan, studio dan lapangan olahraga.

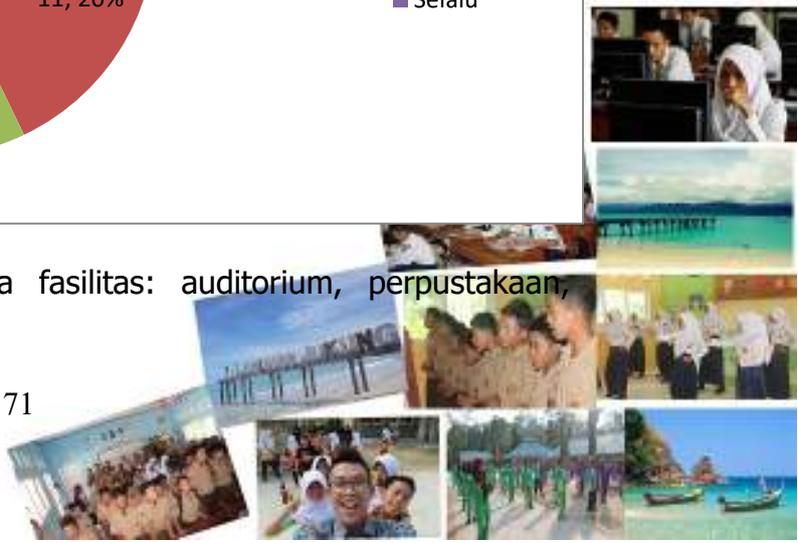
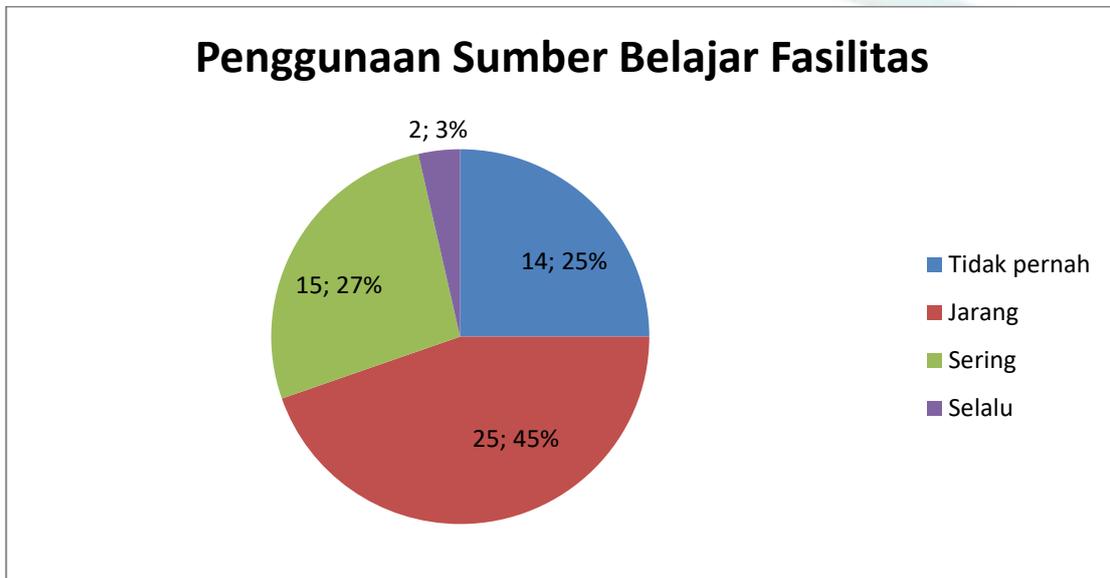
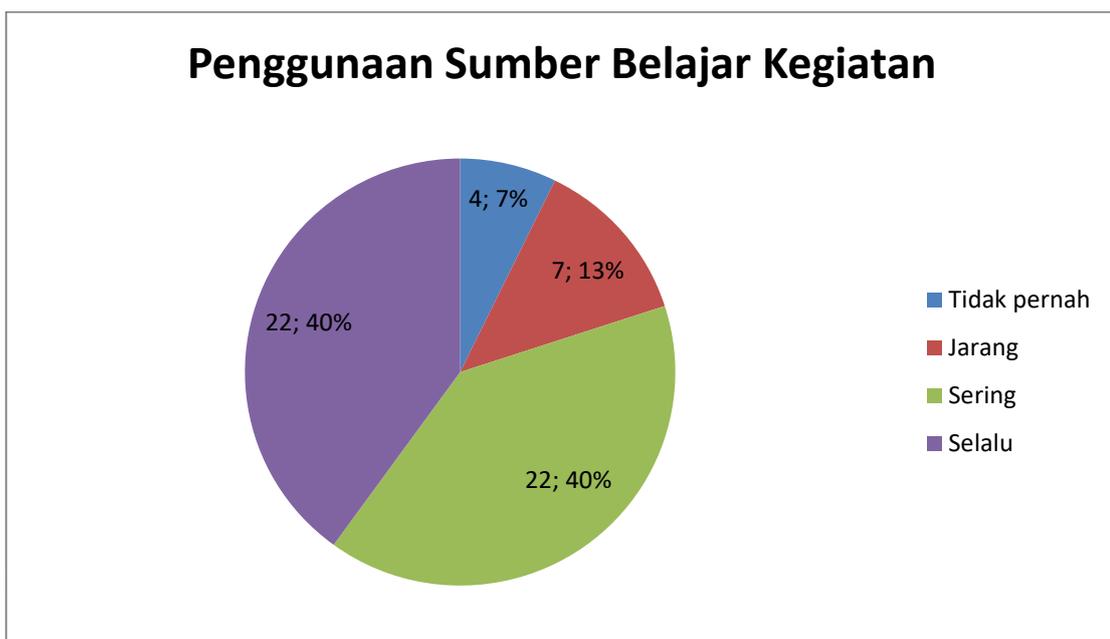


Diagram 53 menunjukkan frekuensi responden dalam menggunakan sumber pembelajaran berupa fasilitas



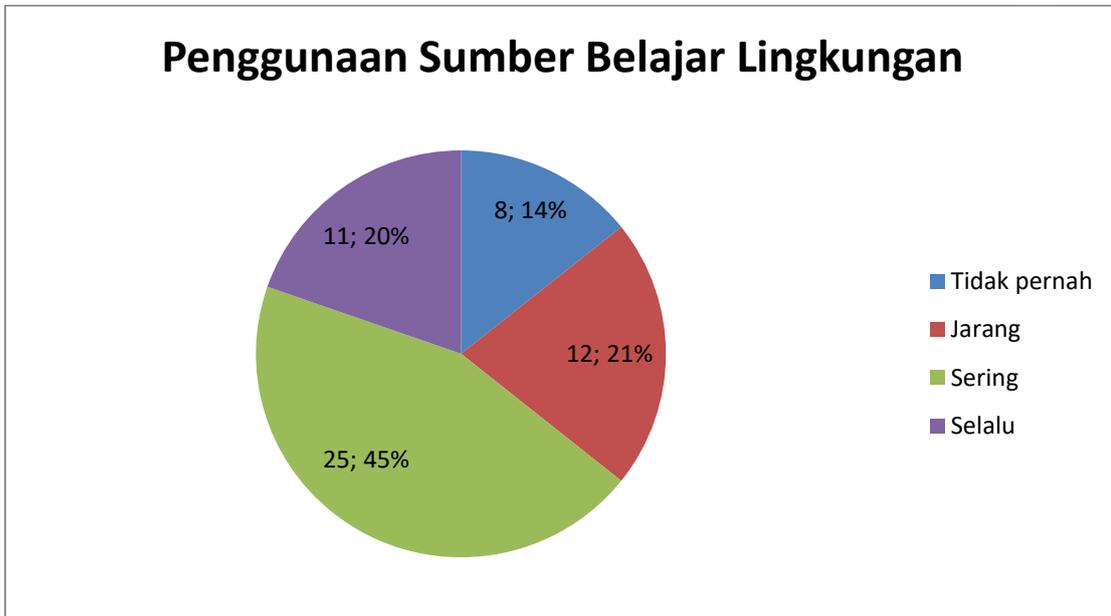
4. Sumber belajar yang berupa kegiatan: wawancara, kerja kelompok, observasi, simulasi, dan permainan.

Diagram 54 menunjukkan frekuensi responden dalam menggunakan sumber pembelajaran berupa kegiatan



5. Sumber belajar yang berupa lingkungan : taman dan terminal.

Diagram 55 menunjukkan frekuensi responden dalam menggunakan sumber pembelajaran berupa lingkungan

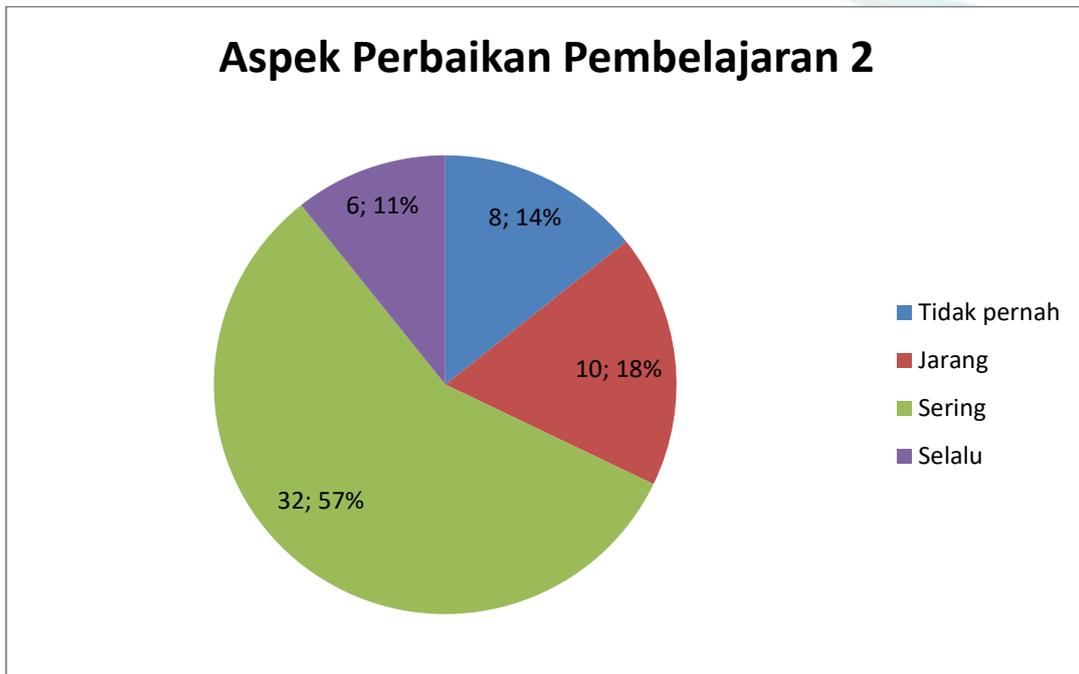


Dalam pelaksanaan pembelajaran, responden melakukan perbaikan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Aspek-aspek yang dilakukan dalam memperbaiki pembelajaran adalah sebagai berikut.

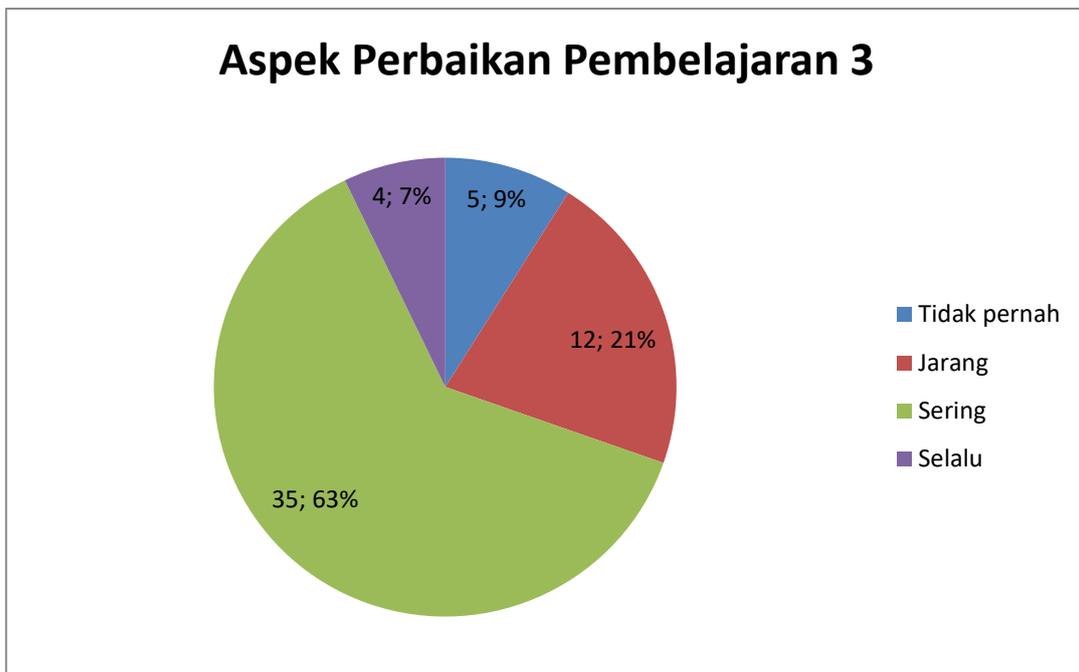
1. Melakukan remedial untuk peserta didik yang belum tuntas belajar



- Melakukan pengayaan untuk peserta didik yang sudah tuntas belajar lebih dulu



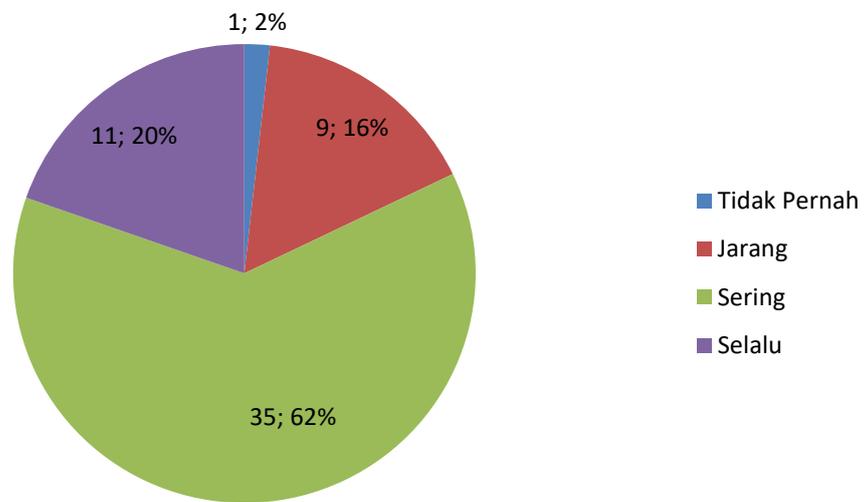
- Melakukan refleksi dan umpan balik terhadap proses pembelajaran dan memperbaiki pembelajaran



- Menganalisis daya serap peserta didik dan memperbaiki pembelajaran

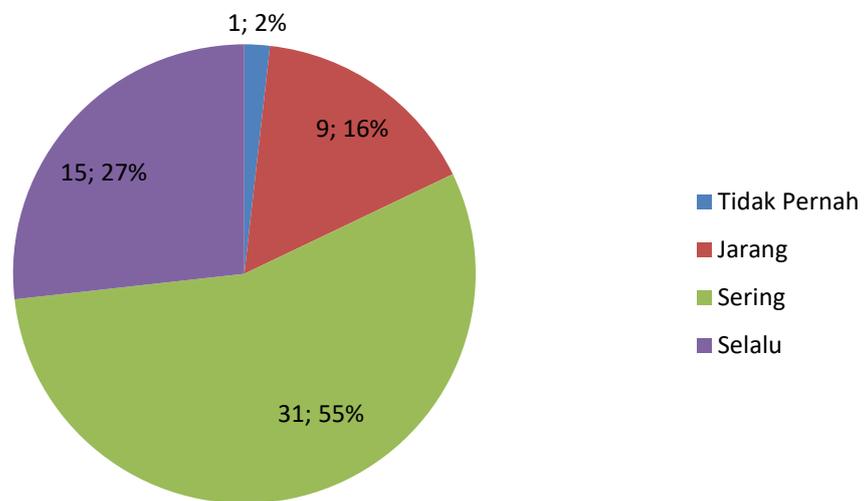


Aspek Perbaikan Pembelajaran 4



5. Mengecek gaya belajar peserta didik dan menyesuaikan pembelajaran

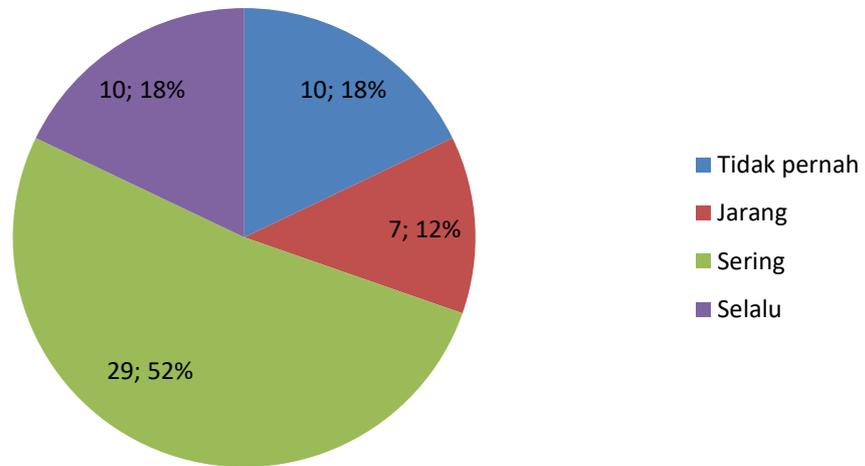
Aspek Perbaikan Pembelajaran 5



6. Menyesuaikan materi pelajaran dengan kecepatan dan kemampuan belajar siswa

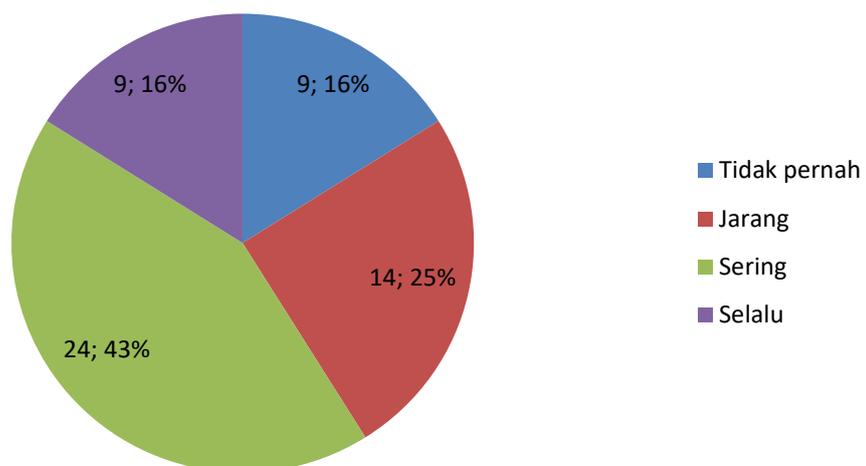


Aspek Perbaikan Pembelajaran 6



7. Mempersiapkan pembelajaran yang lebih baik melalui KKG/MGMP/komunikasi sejawat

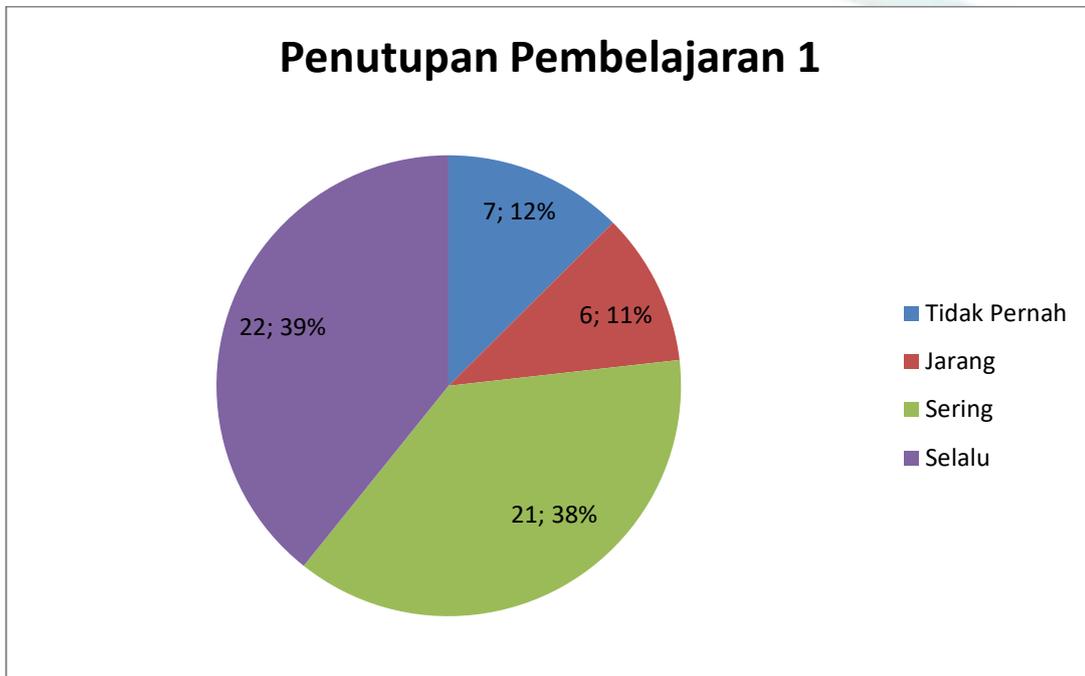
Aspek Perbaikan Pembelajaran 7



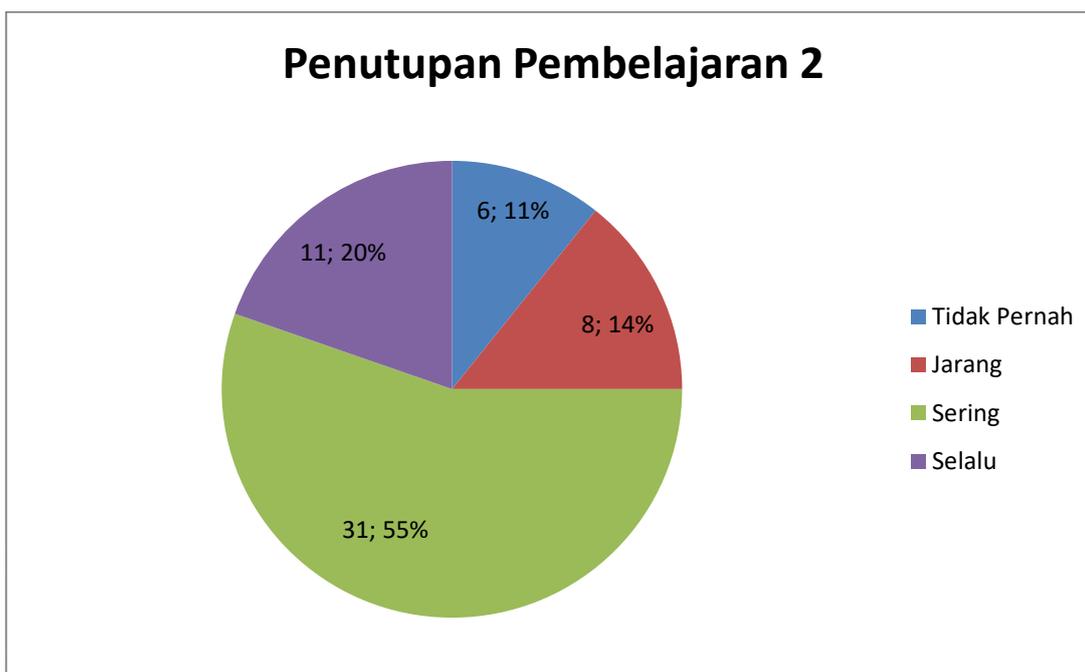
Pada aktivitas menutup pembelajaran, responden melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut.



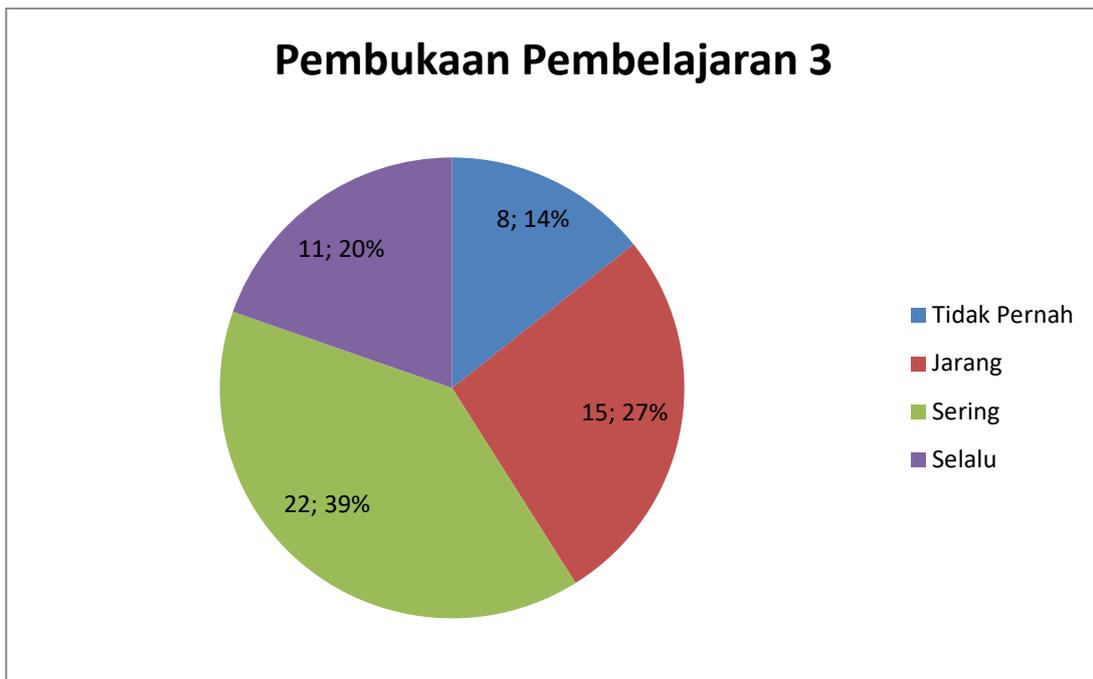
1. Melakukan refleksi atau evaluasi bersama siswa terhadap penyelidikan mereka



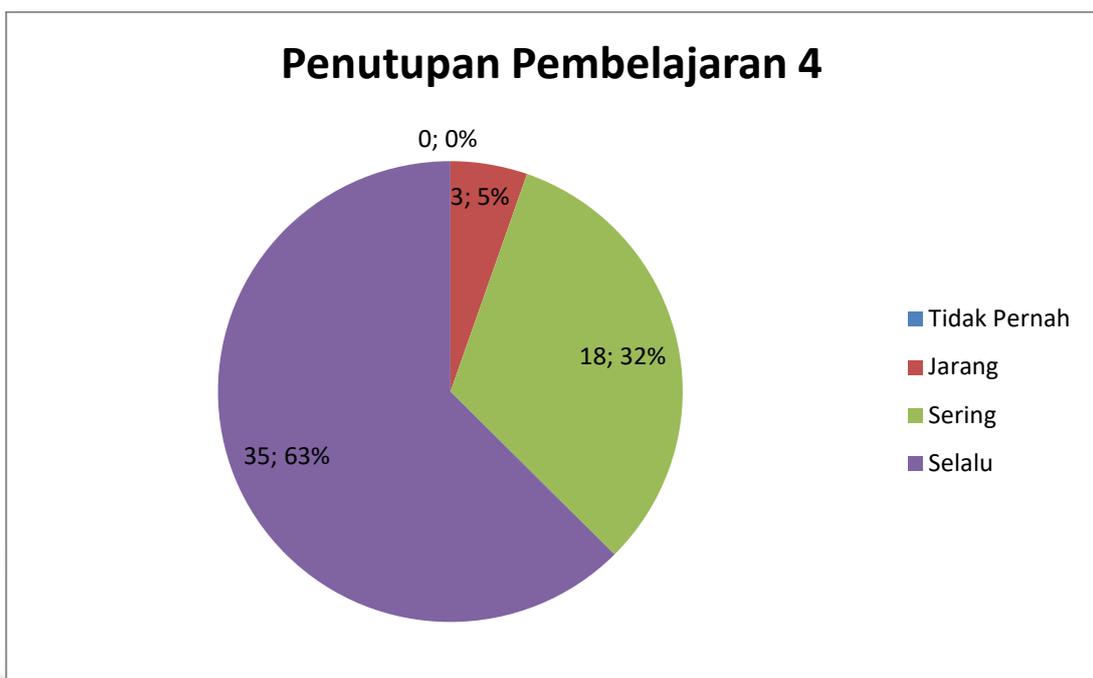
2. Mengevaluasi seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh bersama siswa



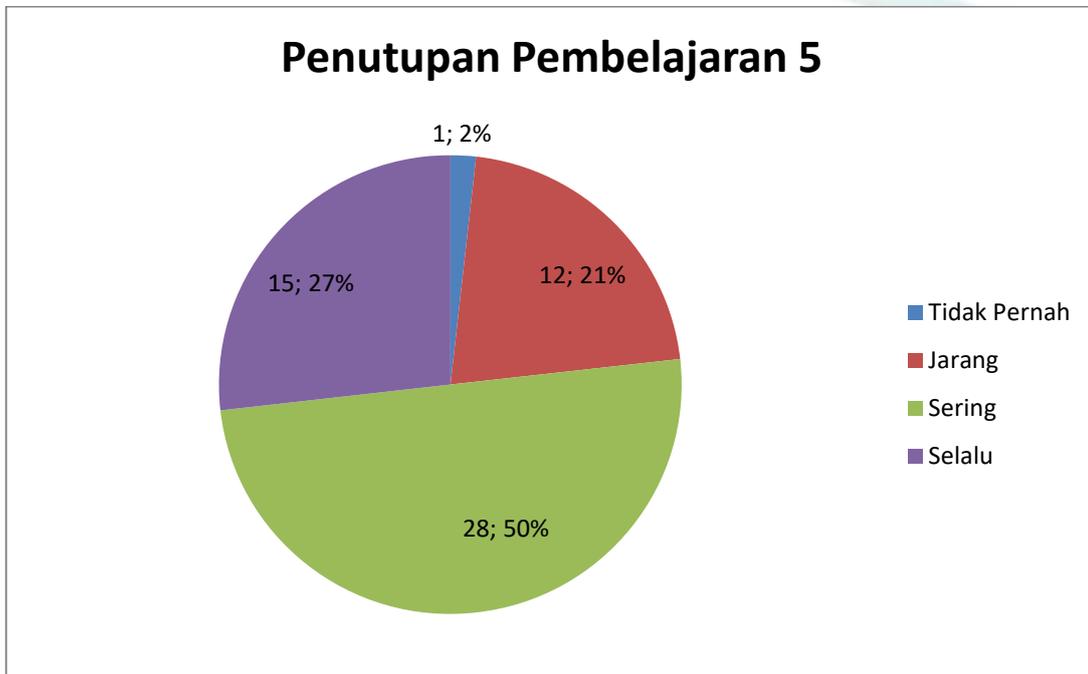
3. Memberi penghargaan atas upaya atau hasil belajar individu maupun kelompok



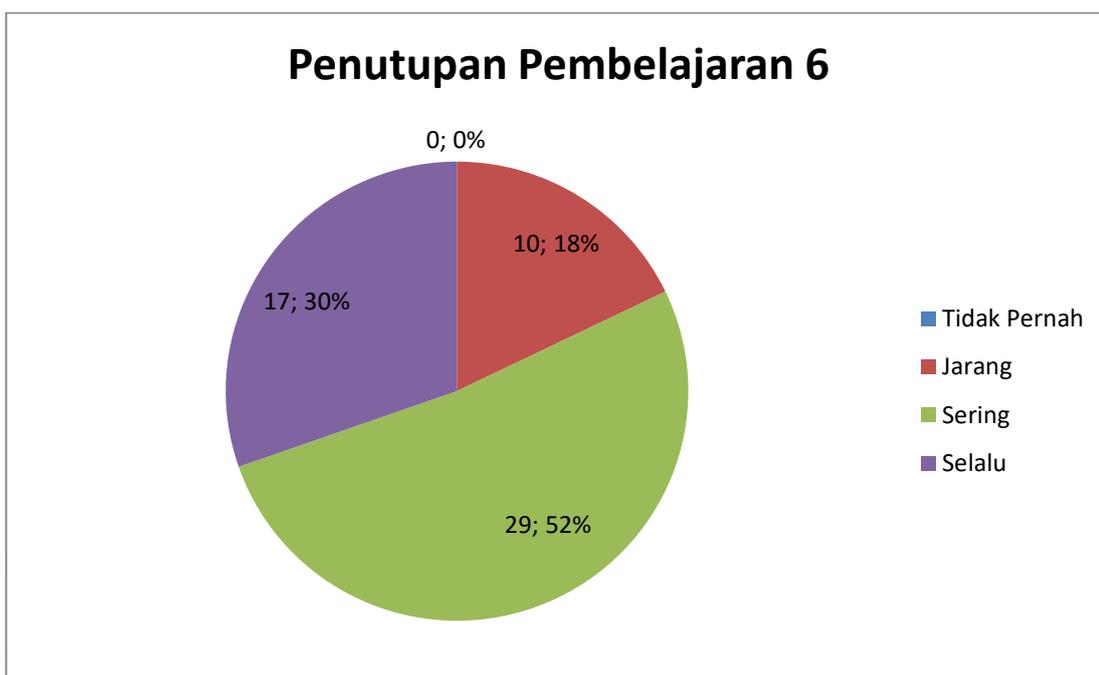
4. Membantu siswa menemukan manfaat dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung



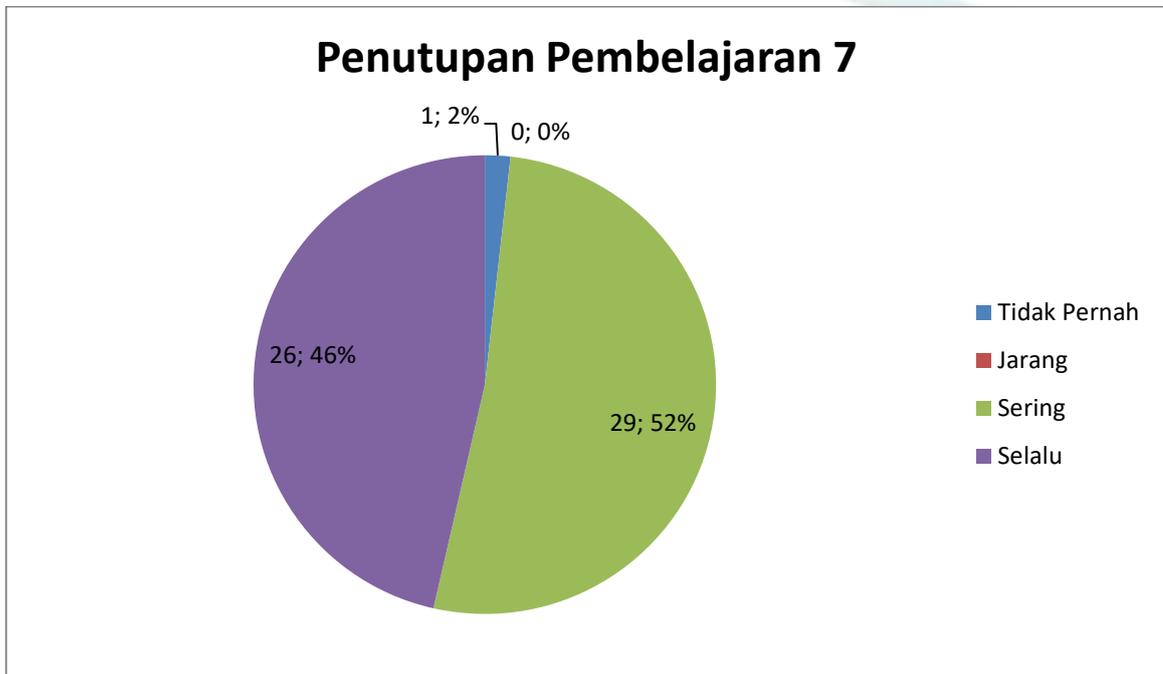
5. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran



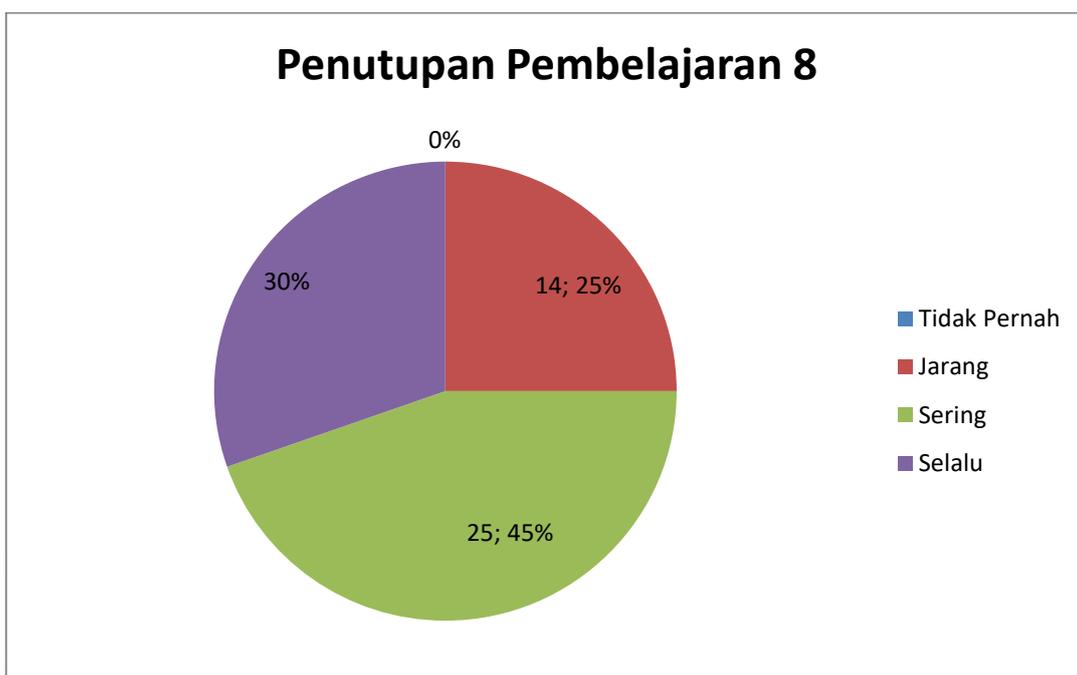
6. Melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun kelompok



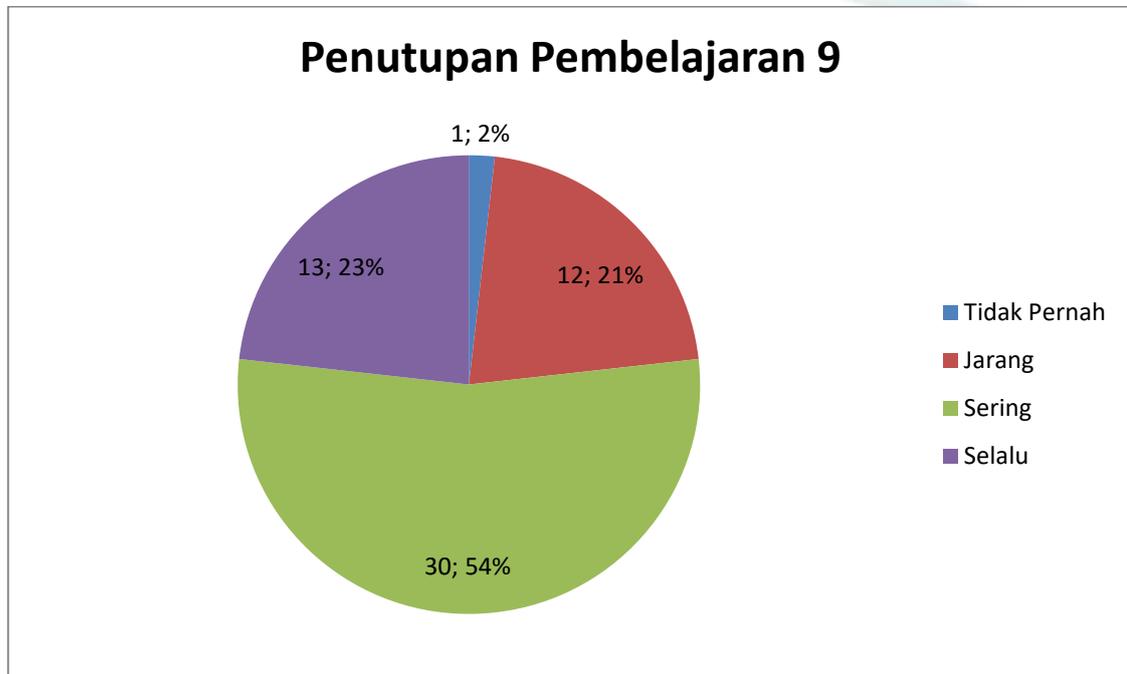
7. Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya



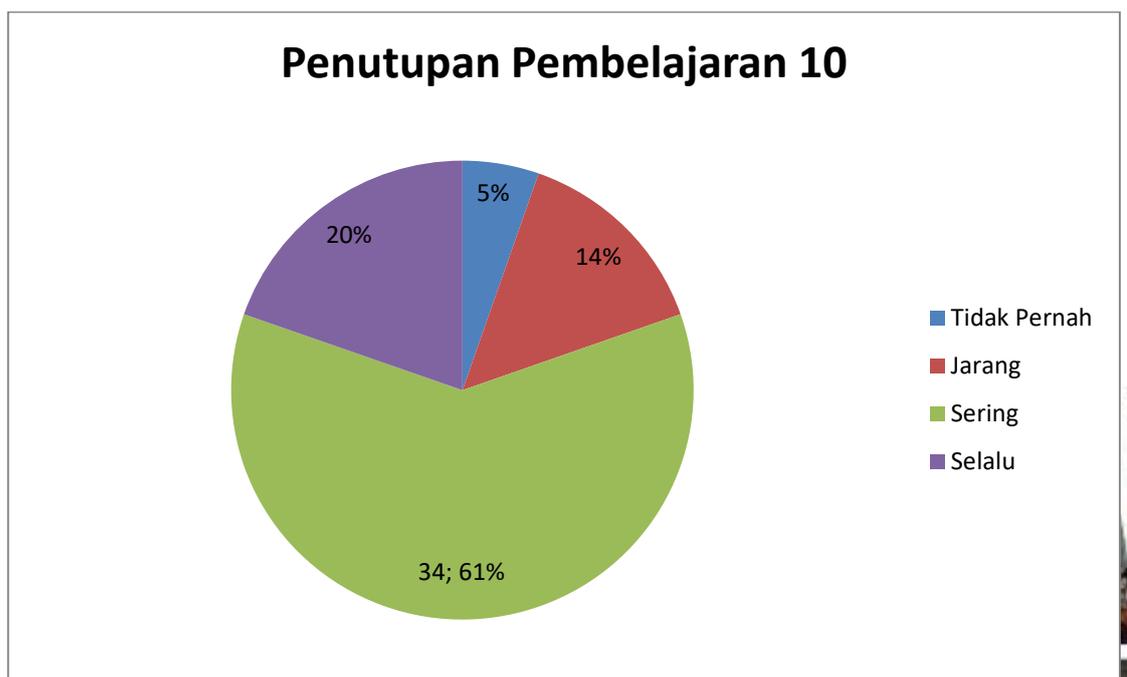
8. Menyanyikan Indonesia Raya/lagu wajib/terkini yang menggambarkan patriotisme dan cinta tanah air



9. Mengajak berdoa bersama sesuai dengan keyakinan masing-masing



10. Mengakhiri proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang dijadwalkan



C. Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. Kondisi Lahan Sekolah

No	Tingkat Pemenuhan	0		< 50%		51-85%		>85%		Total	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
1.	Terhindar Dari Potensi Bahaya	6	11%	18	32%	28	50%	4	7%	56	100%
2.	Tersedia akses keselamatan	7	13%	22	39%	23	41%	4	7%	56	100%
3.	Terhindar dari pencemaran air	7	13%	14	25%	29	52%	6	11%	56	100%
4.	Terhindar dari kebisingan	5	9%	13	23%	31	55%	7	13%	56	100%
5.	Terhindar dari pencemaran udara	5	9%	16	29%	27	48%	8	14%	56	100%

Berdasarkan data yang di kumpulkan kondisi lahan sekolah adalah sebagai berikut :

1. Sebagian besar kondisi lahan sekolah sudah terhindar dari potensi bahaya terlihat dari presentase yang lebih besar di tingkat pemenuhan lebih dari 85% hanya sebanyak 7% namun sekolah yang sudah memenuhi tingkat pemenuhan 51-85% mencapai 50% hal ini lebih besar di bandingkan dengan tingkat pemenuhan di bawah 50% yang hanya sebesar 32% dan yang tidak memiliki tingkat pemenuhan sebesar 11%.
2. Pada aspek Ketersedian akses keselamatan, Sebagian besar kondisi lahan sekolah sudah memenuhi tingkat pemenuhan 51-85% mencapai 41% hal ini lebih besar di bandingkan dengan tingkat pemenuhan di bawah 50% yang hanya sebesar 22% dan yang tidak memiliki tingkat pemenuhan sebesar 11%.



3. Sebagian besar kondisi lahan sekolah sudah terhindar dari pencemaran air dapat dilihat dari presentase yang lebih besar di tingkat pemenuhan 51-85% yang mencapai 52% hal ini lebih besar di bandingkan dengan tingkat pemenuhan di bawah 50% yang hanya sebesar 25% dan yang tidak memiliki tingkat pemenuhan sebesar 13%.
4. Kondisi lahan sekolah sudah terhindar dari kebisingan lebih besar Dapat di lihat dari tingkat pemenuhan 51-85% yang mencapai 55% hal ini lebih besar di bandingkan dengan tingkat pemenuhan di bawah 50% yang hanya sebesar 29% dan yang tidak memiliki tingkat pemenuhan sebesar 16%.
5. Pada aspek terhindar dari pencemaran udara, Sebagian besar kondisi lahan sekolah sudah memenuhi tingkat pemenuhan 51-85% mencapai 48% hal ini lebih besar di bandingkan dengan tingkat pemenuhan di bawah 50% yang hanya sebesar 29% dan yang tidak memiliki tingkat pemenuhan sebesar 16%.



2. Kondisi Bangunan Sekolah dari Segi Keselamatan

No	Tingkat Pemenuhan	0		< 50%		51-85%		>85%		Total	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%		
1.	Konstruksi stabil	6	11%	14	25%	30	54%	6	11%	56	100%
2.	Konstruksi kukuh	6	11%	10	18%	34	61%	6	11%	56	100%
3.	Perangkat penanggul kebakaran	21	38%	16	29%	18	32%	1	2%	56	100%
4.	Fasilitas ramah anak	10	18%	14	25%	28	50%	4	7%	56	100%
5.	Penangkal petir	19	34%	20	36%	13	23%	4	7%	56	100%

Berdasarkan data yang di kumpulkan kondisi bangunan sekolah adalah sebagai berikut :

- Sebagian besar kondisi bangunan sekolah dari segi kestabilan konstruksi sudah cukup baik terlihat dari presentase yang lebih besar ditingkat pemenuhan 51-85% yang mencapai 54% hal ini lebih besar di bandingkan dengan tingkat pemenuhan di bawah 50% yang hanya sebesar 25% dan yang tidak memiliki tingkat pemenuhan sebesar 11%.
- Kondisi bangunan sekolah dari segi keselamatan sudah memiliki konstruksi yang kukuh ini dapat dilihat dari tingkat pemenuhan 51-85% yang mencapai 61% hal ini lebih besar dibandingkan dengan



tingkat pemenuhan di bawah 50% yang hanya sebesar 10% dan yang tidak memiliki tingkat pemenuhan sebesar 11%.

3. Pada aspek ketersediaan perangkat penanggulangan kebakaran, Sebagian besar kondisi bangunan sekolah dari segi keselamatan tidak memenuhi tingkat pemenuhan dapat dilihat dari sebanyak 29% sekolah yang tidak memiliki perangkat penanggulangan kebakaran hal ini lebih besar di bandingkan dengan tingkat pemenuhan 51-85% ataupun diatas 85% yang hanya 32% dan 2% sehingga perlu perhatian.
4. Pada aspek fasilitas yang ramah anak, sebagian besar kondisi bangunan sekolah dari segi keselamatan sudah memenuhi tingkat pemenuhan 51-85% mencapai 50% hal ini lebih besar di bandingkan dengan tingkat pemenuhan di bawah 50% yang hanya sebesar 14% dan yang tidak memiliki tingkat pemenuhan sebesar 10%.
5. Sebagian besar kondisi bangunan sekolah dari segi keselamatan tidak memiliki penangkal petir dapat dilihat dari presentase yang lebih besar di yang tingkat pemenuhan dibawah 50% yang mencapai 36% dan yang tidak memenuhi tingkat pemenuhan sebesar 34% hal ini lebih besar dibandingkan dengan tingkat pemenuhan 50-85% yang hanya sebesar 23% dan yang tidak memiliki tingkat pemenuhan sebesar 7%.



3. Kondisi bangunan sekolah dari segi kesehatan

No	Tingkat Pemenuhan	0		< 50%		51-85%		>85%		Total	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%		
1.	Ventilasi udara	4	7%	10	18%	34	61%	8	14%	56	100%
2.	Pencahayaan	3	5%	16	29%	27	48%	10	18%	56	100%
3.	Sanitasi	2	4%	18	32%	31	55%	5	9%	56	100%
4.	Tempat sampah	1	2%	23	41%	27	48%	5	9%	56	100%
5.	Bahan bangunan yang aman	5	9%	22	39%	25	45%	4	7%	56	100%

Berdasarkan data yang di kumpulkan kondisi bangunan sekolah dari segi kesehatan sekolah adalah sebagai berikut :

- Sebagian besar kondisi bangunan sekolah dari segi kesehatan, ventilasi udara sudah cukup baik terlihat dari presentase yang lebih besar ditingkat pemenuhan lebih dari 85% hanya sebanyak 14% namun sekolah yang sudah memenuhi tingkat pemenuhan 51-85% mencapai 61% hal ini lebih besar di bandingkan dengan tingkat pemenuhan di bawah 50% yang hanya sebesar 18% dan yang tidak memiliki tingkat pemenuhan sebesar 7%.
- Pada aspek pencahayaan, Sebagian besar kondisi bangunan sekolah dari segi kesehatan, sudah sudah baik dapat dilihat sudah memenuhi tingkat pemenuhan 51-85% mencapai 55% hal ini lebih besar di bandingkan dengan tingkat pemenuhan di bawah 50% yang hanya sebesar 32% dan yang tidak memiliki tingkat pemenuhan sebesar 4%.



3. Sebagian besar kondisi bangunan sekolah dari segi kesehatan, dari segi sanitasi sekolah sudah baik terlihat dari tingkat pemenuhan 51-85% yang mencapai 52% hal ini lebih besar di dibandingkan dengan tingkat pemenuhan di bawah 50% yang hanya sebesar 25% dan yang tidak memiliki tingkat pemenuhan sebesar 13%.
4. Kondisi bangunan sekolah dari segi kesehatan pada ketersediaan sampah sekolah sudah baik ini dapat dilihat dari tingkat pemenuhan 51-85% yang mencapai 48% hal ini lebih besar di dibandingkan dengan tingkat pemenuhan di bawah 50% yang hanya sebesar 41% dan yang tidak memiliki tingkat pemenuhan sebesar 2%.
5. Pada aspek bahan bangunan yang aman, Sebagian besar kondisi bangunan sekolah dari segi kesehatan sudah memenuhi tingkat pemenuhan 51-85% mencapai 45% hal ini lebih besar di dibandingkan dengan tingkat pemenuhan di bawah 50% yang hanya sebesar 39% dan yang tidak memiliki tingkat pemenuhan sebesar 9%.

4. Periode pelaksanaan pemeliharaan bangunan sekolah

No	Waktu Pemeliharaan	<5 Tahun		5 Tahun		6 Tahun		7 Tahun		>7 Tahun		Total	
1.	Pengecatan ulang	0	0%	7	13%	9	16%	40	71%	0	0%	56	100%
2.	Perbaikan jendela dan pintu	0	0%	12	21%	7	13%	37	66%	0	0%	56	100%
3.	Perbaikan lantai	2	4%	9	16%	16	29%	29	52%	0	0%	56	100%
4.	Perbaikan penutup atap	2	4%	15	27%	14	25%	25	45%	0	0%	56	100%



5.	Perbaikan plafon	2	4%	9	16%	14	25%	31	55%	0	0%	56	100%
6.	Perbaikan instalasi air	1	2%	1	2%	2	4%	52	93%	0	0%	56	100%
7.	Perbaikan listrik	0	0%	9	16%	9	16%	38	68%	0	0%	56	100%

Berdasarkan data yang di kumpulkan periode pelaksanaan pemeliharaan bangunan sekolah adalah sebagai berikut :

1. Sebagian besar periode pelaksanaan pemeliharaan bangunan sekolah, periode pengecatan ulang dilaksanakan terlalu lama terlihat dari presentase yang lebih besar di pelaksanaan dengan periode 7 tahun yang sebanyak 71% hal ini lebih besar di dibandingkan dengan periode 5 tahun yang hanya sebesar 13%.
2. Pada aspek perbaikan jendela dan pintu, sebagian besar periode pelaksanaan pemeliharaan bangunan dilaksanakan terlalu lama terlihat dari presentase yang lebih besar di pelaksanaan dengan periode 7 tahun yang sebanyak 52% hal ini lebih besar di dibandingkan dengan periode 5 tahun yang hanya sebesar 21%.
3. Sebagian besar periode pelaksanaan pemeliharaan bangunan sekolah, dalam perbaikan lantai dilaksanakan terlalu lama terlihat dari presentase yang lebih besar di pelaksanaan dengan periode 7 tahun yang sebanyak 66% hal ini lebih besar di dibandingkan dengan periode 6 tahun yang sebesar 29% ataupun periode 5 tahun yang hanya sebesar 16%.
4. Periode pelaksanaan pemeliharaan bangunan sekolah, dalam Perbaikan penutup atap sebagian besar dilaksanakan terlalu lama





terlihat dari presentase yang lebih besar di pelaksanaan dengan periode 7 tahun yang sebanyak 45% hal ini lebih besar di bandingkan dengan periode 6 tahun yang sebesar 25% ataupun periode 5 tahun yang hanya sebesar 27%.

5. Pada aspek perbaikan plafon, sebagian besar periode pelaksanaan pemeliharaan bangunan sekolah dilaksanakan terlalu lama ini dapat dilihat dari presentase yang lebih besar di pelaksanaan dengan periode 7 tahun yang sebanyak 55% hal ini lebih besar di bandingkan dengan periode 6 tahun yang sebesar 25% ataupun periode 5 tahun yang hanya sebesar 16%.
6. Sebagian besar periode pelaksanaan pemeliharaan bangunan sekolah, perbaikan instalasi air dilaksanakan terlalu lama terlihat dari presentase yang lebih besar di pelaksanaan dengan periode 7 tahun yang sebanyak 93% hal ini lebih besar di bandingkan dengan periode 6 tahun sebesar 4%, 5 tahun sebesar 2%, ataupun kurang dari 5 tahun yang hanya sebesar 2%.
7. Pada aspek Perbaikan listrik, sebagian besar periode pelaksanaan pemeliharaan bangunan sekolah dilaksanakan terlalu lama ini dapat dilihat dari presentase yang lebih besar di pelaksanaan dengan periode 7 tahun yang sebanyak 68% hal ini lebih besar di bandingkan dengan periode 6 tahun sebesar 16%, ataupun periode 5 tahun yang hanya sebesar 16%.



5. Kondisi sarana pendukung proses pembelajaran sekolah

No	Tingkat Pemenuhan	0		< 50%		51-85%		>85%		Total	
1.	Ruang sirkulasi terawat dengan baik, bersih dan nyaman	7	13%	10	18%	33	59%	6	11%	56	100%
2.	Area baca yang nyaman di ruang sirkulasi	7	13%	8	14%	38	68%	3	5%	56	100%
3.	Ruang UKS memiliki informasi tentang kesehatan	8	14%	20	36%	26	46%	2	4%	56	100%
4.	Ruangan kantin bersih	7	13%	20	36%	27	48%	2	4%	56	100%
5.	Ruangan kantin memiliki sanitasi yang baik	10	18%	20	36%	25	45%	1	2%	56	100%
6.	Kantin menyediakan makanan yang sehat dan bergizi	3	5%	19	34%	31	55%	3	5%	56	100%
7.	Kantin memiliki informasi tentang gizi seimbang/makanan sehat	4	7%	24	43%	25	45%	3	5%	56	100%
8.	Tempat parkir memiliki sistem pengamanan	9	16%	23	41%	23	41%	1	2%	56	100%
9.	Terdapat rambu-rambu parkir dalam tempat parkir	19	34%	19	34%	17	30%	1	2%	56	100%
10.	Memiliki petugas khusus untuk menjaga tempat parkir	25	45%	17	30%	13	23%	1	2%	56	100%

Berdasarkan data yang di kumpulkan kondisi sarana pendukung proses pembelajaran sekolah adalah sebagai berikut :

1. Sebagian besar kondisi sarana pendukung proses pembelajaran sekolah dari segi ruang sirkulasi terawat dengan baik, bersih dan nyaman cukup baik terlihat dari presentase yang lebih besar ditingkat pemenuhan 51-85% yang mencapai 59% dan lebih dari 85% sebesar 11% hal ini lebih besar di bandingkan dengan tingkat pemenuhan di



bawah 50% yang hanya sebesar 18% dan yang tidak memiliki tingkat pemenuhan sebesar 13%.

2. Kondisi sarana pendukung proses pembelajaran sekolah dari segi area baca yang nyaman di ruang sirkulasi sudah cukup dapat dilihat dari tingkat pemenuhan 51-85% yang mencapai 68% dan lebih dari 85% sebesar 5% hal ini lebih besar dibandingkan dengan tingkat pemenuhan di bawah 50% yang hanya sebesar 14% dan yang tidak memiliki tingkat pemenuhan sebesar 13%.
3. Ruang UKS memiliki informasi tentang kesehatan pada Kondisi sarana pendukung proses pembelajaran sekolah sudah cukup dapat dilihat dari tingkat pemenuhan 51-85% yang mencapai 46% dan hal ini lebih besar dibandingkan dengan tingkat pemenuhan di bawah 50% yang hanya sebesar 36% dan yang tidak memiliki tingkat pemenuhan sebesar 14%.
4. Pada aspek ruangan kantin bersih, Sebagian besar kondisi sarana pendukung proses pembelajaran sekolah dari sudah cukup ini dapat dilihat dari sebanyak 48% sekolah sudah memenuhi pemenuhan 51-85% hal ini lebih besar di bandingkan dengan tingkat pemenuhan di bawah 50% yang hanya sebesar 36% dan yang tidak memiliki tingkat pemenuhan sebesar 13%.
5. Keadaan ruangan kantin memiliki sanitasi yang baik, kondisi sarana pendukung proses pembelajaran sekolah sebagian besar sudah baik terlihat yang sudah memenuhi tingkat pemenuhan 51-85% mencapai 45% hal ini lebih besar di bandingkan dengan tingkat pemenuhan di



bawah 50% yang hanya sebesar 34% dan yang tidak memiliki tingkat pemenuhan sebesar 5%.

6. Sebagian besar kondisi sarana pendukung proses pembelajaran sekolah dari segi Kantin menyediakan makanan yang sehat dan bergizi sudah cukup ini dapat dilihat dari presentase yang lebih besar di yang tingkat pemenuhan 50-85% yang sebesar 55% dan pemenuhan di bawah 50% yang hanya sebesar 19% dan yang tidak memiliki tingkat pemenuhan sebesar 5%.
7. Kondisi kantin memiliki informasi tentang gizi seimbang/makanan sehat sudah baik dimana sebagian besar tingkat pemenuhan 51-85% yang sebesar 45% hal ini lebih besar di dibandingkan dengan tingkat pemenuhan di bawah 50% yang hanya sebesar 43% dan yang tidak memiliki tingkat pemenuhan sebesar 7%.
8. Ruang UKS memiliki informasi tentang kesehatan pada Kondisi sarana pendukung proses pembelajaran sekolah sudah cukup dapat dilihat dari tingkat pemenuhan 51-85% yang mencapai 46% dan hal ini lebih besar dibandingkan dengan tingkat pemenuhan di bawah 50% yang hanya sebesar 36% dan yang tidak memiliki tingkat pemenuhan sebesar 14%.
9. Adanya tempat parkir memiliki sistem pengamanan pada Kondisi sarana pendukung proses pembelajaran sekolah sudah cukup ini dapat dilihat dari tingkat pemenuhan 51-85% yang mencapai 41% dan hal ini lebih besar dibandingkan dengan tingkat pemenuhan di





bawah 50% yang hanya sebesar 41% dan yang tidak memiliki tingkat pemenuhan sebesar 16%.

10. Memiliki petugas khusus untuk menjaga tempat parkir pada Kondisi sarana pendukung proses pembelajaran sekolah sebagian besar tidak memenuhi tingkat pemenuhan dapat dilihat dari sebanyak 45% sekolah dan dibawah 50% sebesar 30% hal ini lebih besar di bandingkan dengan tingkat pemenuhan 51-85% ataupun diatas 85% yang hanya 23% dan 2% sehingga perlu perhatian.

V. PENUTUP

Hasil penelitian ini menjadi bagian dari pertimbangan penyusunan master plan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pesisir Barat. Ada beberapa aspek pendidikan yang menjad perhatian utama dalam penyusunan dokume master plan ini. Aspek-aspek tersebut seperti data pendidikan yang ada, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, sarana dan prasarana, data pendidikan dari kementerian pendidikan dan kebudayaan dan pihak-pihak yang memberikan informasi pendukung dalam memetakan pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. (1996). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. 2002. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Cahyono, J. S. B. (2006). *Gaya Hidup & Penyakit Modern*. Kanisius.

Hadi, S. (2000). *Metodologi research 3*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Ikhsanudin, Eka. (2010). *Tren Pendidikan Masa Depan*.
<http://www.ekaikhsanudin.net/2015/01/trend-pendidikan-di-masa-depan.html> diakses pada tanggal 18 Maret 2015.





Kyridis, A., Tsakiridou, H., Zagkos, C., Koutouzis, M., & Tziamtzi, C. (2011). Educational Inequalities and School Dropout in Greece. *International Journal of Education*, 3(2), E11.

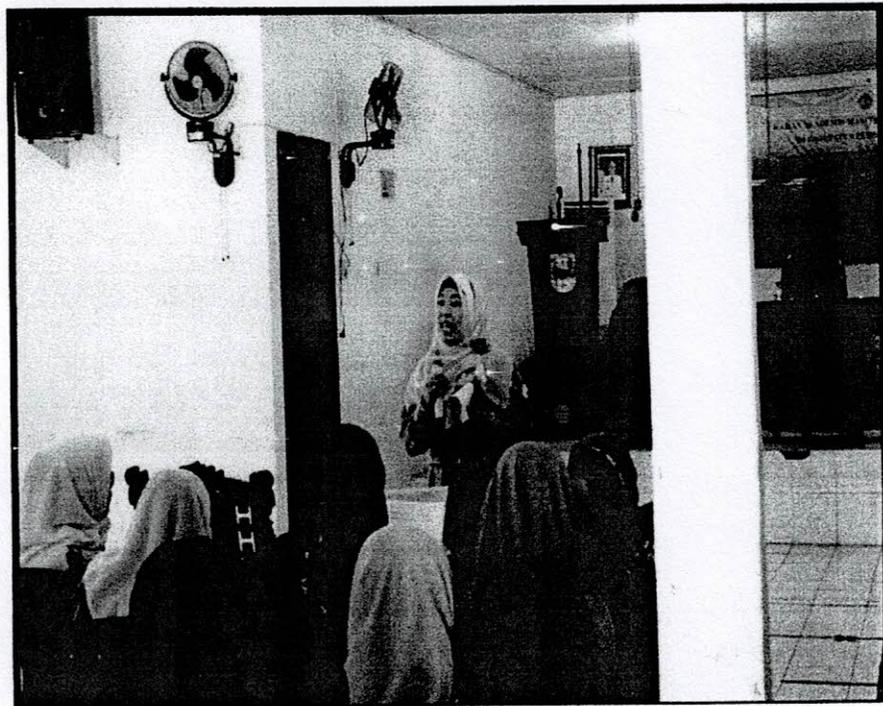
Undang Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS). Jakarta: Sinar Grafika.



LAMPIRAN FOTO KEGIATAN



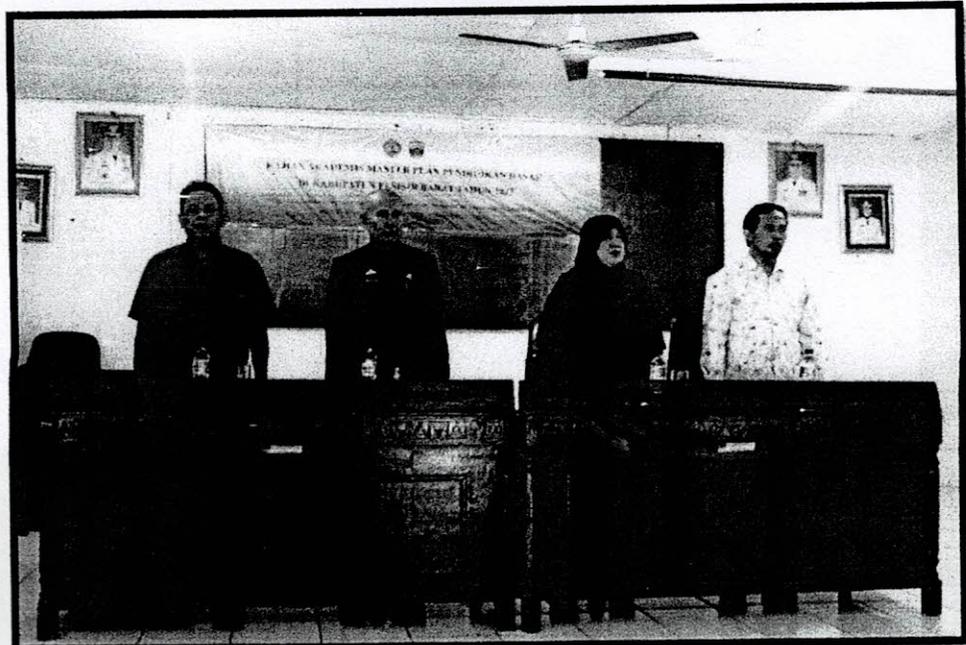
PENGARAHAN KEGIATAN FGD OLEH ANGGOTA TIM PENELITIAN



PENGARAHAN KEGIATAN FGD OLEH ANGGOTA TIM PENELITIAN



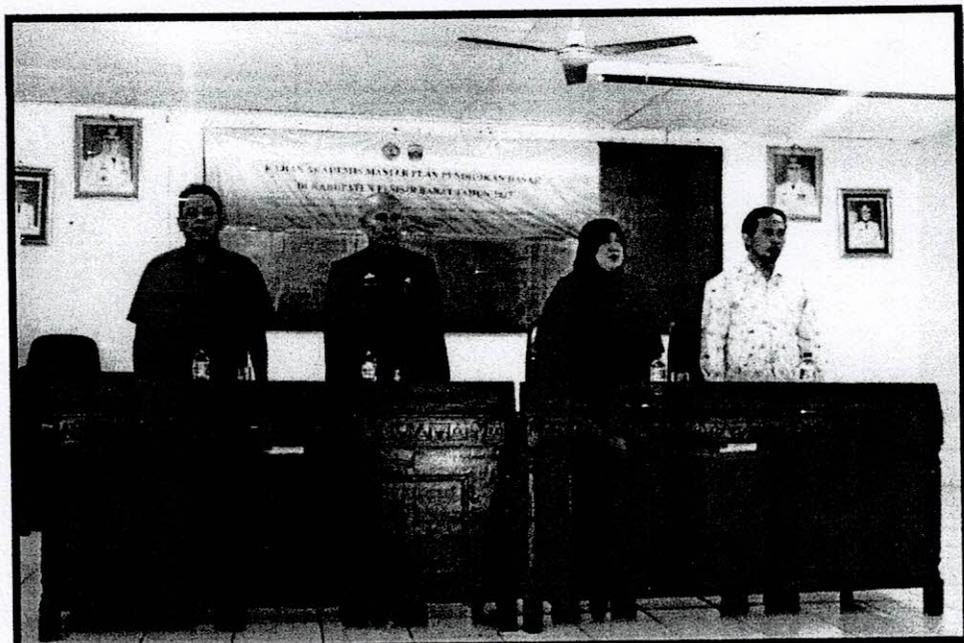
PESERTA FGD



WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK DAN KERJASAMA, KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PESISIR BARAT, KETUA TIM PENELITI, DAN ANGGOTA TIM PENELITI



PESERTA FGD



WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK DAN KERJASAMA, KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PESISIR BARAT, KETUA TIM PENELITIAN, DAN ANGGOTA TIM PENELITIAN



SAMBUTAN OLEH WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK DAN
KERTASAMA



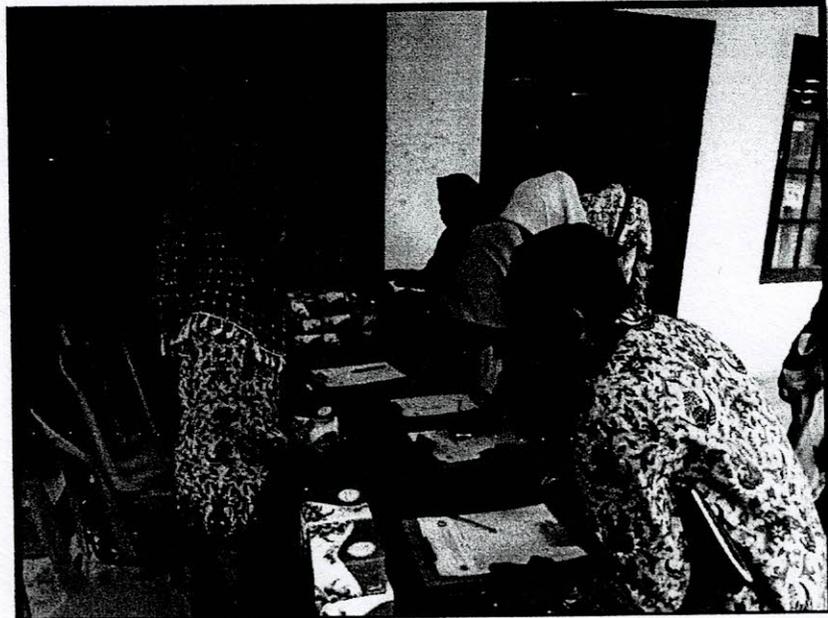
PEMBACAAN DOA OLEH PANITIA FGD



MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA



SAMBUTAN PEMBUKAAN OLEH KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PESISIR BARAT



KEGIATAN PRESENSI PESERTA FGD



PEMBUKAAN FGD OLEH PANITIA FGD





AUDIENSI TIM PENELITIAN DENGAN WAKIL BUPATI PESISIR
BARAT



PERSIAPAN FGD OLEH TIM PENELITIAN

LAMPIRAN

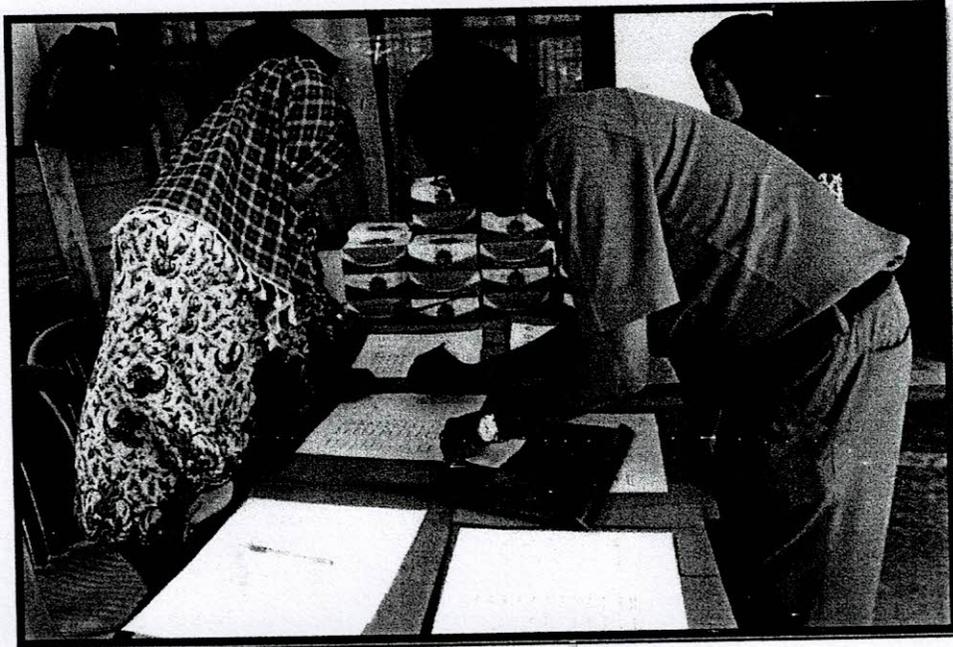
DOKUMENTASI KEGIATAN



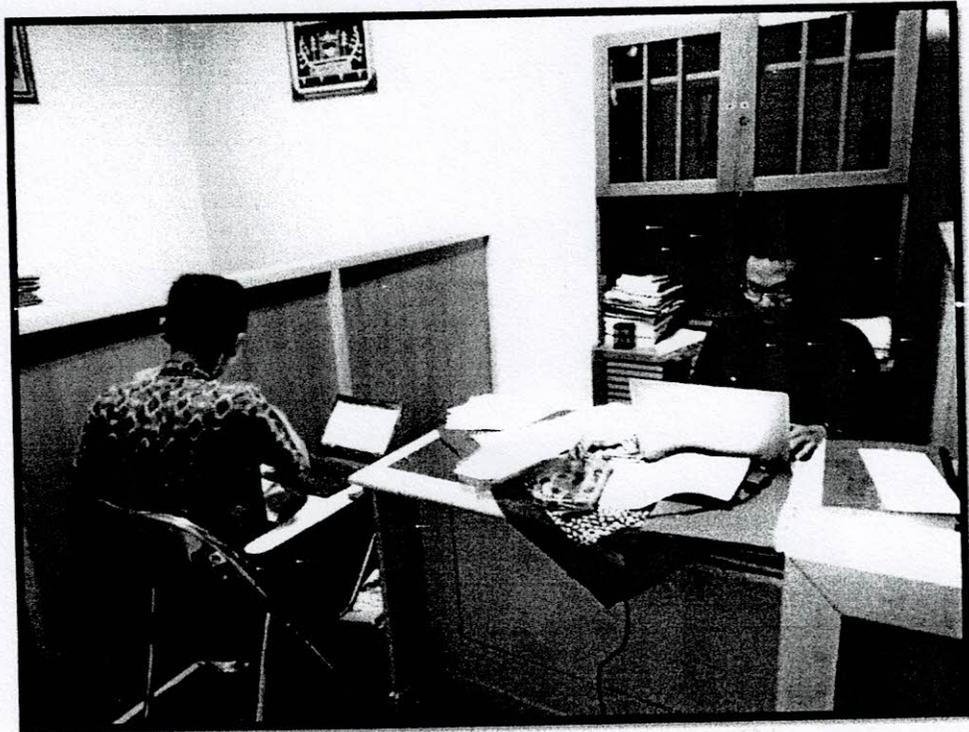
PERSIAPAN PEMBERANGKATAN



**SERAH TERIMA REKOMENDASI DARI KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPADA TIM PENILITI**



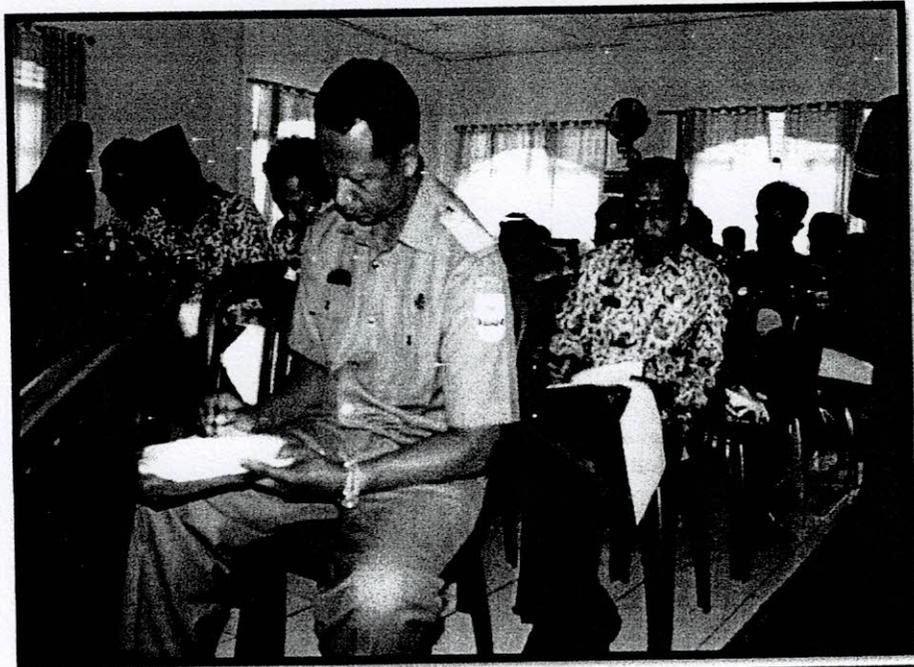
SERAH TERIMA BIAYA TRANSPORTASI



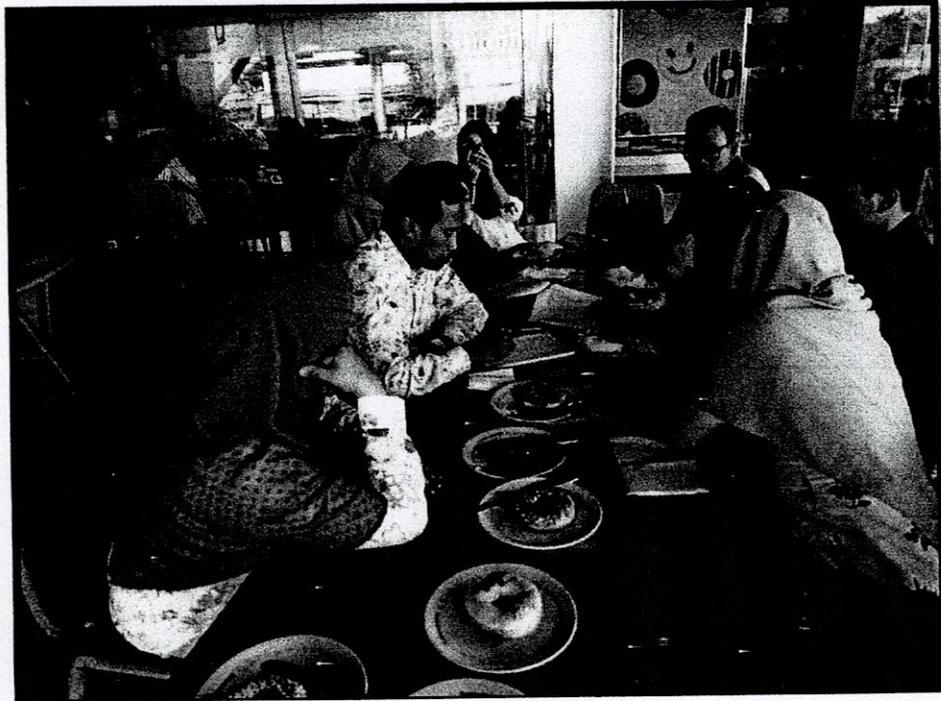
PROSES PENGINPUTAN DATA



PENGISIAN INSTRUMEN OLEH PESERTA FGD



PENGISIAN INSTRUMEN OLEH PESERTA FGD



DISKUSI INTERNAL TIM



KONSINYASI PENYUSUNAN LAPORAN



KONSINYASI PENYUSUNAN LAPORAN KEMAJUAN



PENYUSUNAN LAPORAN AKHIR

LAMPIRAN SURAT MENYURAT



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jln. Prof. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Tlp/Fax(0721) 704 624



Nomor : 9185/UN26/3/PL/2017

Bandar Lampung, 18 Desember 2017

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Pembuatan Undangan FGD

Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Di

Kel. Ps. Krui, Pesisir Tengah, Pesisir Barat, Lampung 34874, Indonesia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengusulkan permohonan pembuatan undangan dalam kegiatan FGD (*Forum Group Discussion*) pada kegiatan penelitian Tim Peneliti Universitas Lampung dengan judul: Kajian Akademis Master Plan Pendidikan Dasar di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017.

Adapun rincian kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

Nama Kegiatan : FGD (*Forum Group Discussion*)
Tanggal Kegiatan : 19 Desember 2017
Tempat Kegiatan : Gedung Dharma Wanita
Waktu Kegiatan : 09.00 – selesai

Demikian permohonan ini kami sampaikan agar dapat di pertimbangkan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik

dan Kerja Sama,



rahman, M.Si.

NIP 19681210 199303 1 002



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln. Prof. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Tlp/Fax(0721) 704 624



Nomor : 9185/UN26/3/PL/2017
Lampiran : 1 Bundel Poposal Penelitian
Perihal : Permohonan Rekomendasi

Bandar Lampung, 11 Desember 2017

Yth.
Bupati Kabupaten Pesisir Barat Lampung
C.q Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Di

Kel.Ps. Krui, Pesisir Tengah, Pesisir Barat,
Lampung 34874, Indonesia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami mengusulkan Surat Izin Rekomendasi Penelitian kepada Bapak Bupati, yang di usulkan oleh Ketua Tim,

Nama : Dr. Erlina Rufaidah, S.E., M.Si.

NIP : 19580828 198601 2 001

Judul Proposal : Kajian Akademis Master Plan Pendidikan Dasar di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017

Bersama ini kami mengusulkan Surat Permohonan Rekomendasi dalam rangka pencairan dana hibah Tahun Anggaran 2017. Demikian permohonan ini kami sampaikan agar dapat di pertimbangkan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik

dan Kerja Sama,



Dr. Abdurrahman, M.Si.

NIP. 19681210 199303 1 002



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln. Prof. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Tlp/Fax(0721) 704 624



Nomor : 9185/UN26/3/PL/2017
Lampiran : 1 Bundel Poposal Penelitian
Perihal : Permohonan Pencairan Dana Hibah

Bandar Lampung, 12 Desember 2017

Yth.
Bupati Kabupaten Pesisir Barat Lampung
C.q Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Di

Kel.Ps. Krui, Pesisir Tengah, Pesisir Barat,
Lampung 34874, Indonesia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami mengusulkan Surat Permohonan Pencairan Dana Hibah kepada Bapak Bupati, yang di usulkan oleh Ketua Tim,

Nama : Dr. Erlina Rufaidah, S.E., M.Si.

NIP : 19580828 198601 2 001

Judul Proposal : Kajian Akademis Master Plan Pendidikan Dasar di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017

Bersama ini kami mengusulkan Permohonan Pencairan Dana Hibah kepada Bapak Bupati dalam rangka pelaksanaan penelitian diatas.. Demikian permohonan ini kami sampaikan agar dapat di pertimbangkan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kerja Sama,

Dr. Abdurrahman, M.Si.
NIP 19681210 199303 1 002



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln. Prof. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Tlp/Fax(0721) 704 624



Nomor : 9185/UN26/3/PL/2017
Lampiran : 1 Bundel Poposal Penelitian
Perihal : Permohonan Pencairan Dana Hibah

Bandar Lampung, 12 Desember 2017

Yth.
Bupati Kabupaten Pesisir Barat Lampung
C.q Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Di

Kel.Ps. Krui, Pesisir Tengah, Pesisir Barat,
Lampung 34874, Indonesia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami mengusulkan Surat Permohonan Pencairan Dana Hibah kepada Bapak Bupati, yang di usulkan oleh Ketua Tim,

Nama : Dr. Erlina Rufaidah, S.E., M.Si.

NIP : 19580828 198601 2 001

Judul Proposal : Kajian Akademis Master Plan Pendidikan Dasar di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017

Bersama ini kami mengusulkan Permohonan Pencairan Dana Hibah kepada Bapak Bupati dalam rangka pelaksanaan penelitian diatas.. Demikian permohonan ini kami sampaikan agar dapat di pertimbangkan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kerja Sama,

Dr. Abdurrahman, M.Si.
NIP 19681210 199303 1 002



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln. Prof. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Tlp/Fax(0721) 704 624



Nomor : 9192/UN26/3/PL/2017
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Peserta FGD

Bandar Lampung, 16 Desember 2017

Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Di

Kel. Ps. Krui, Pesisir Tengah, Pesisir Barat, Lampung 34874, Indonesia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengusulkan permohonan peserta dalam kegiatan FGD (*Forum Group Discussion*) dalam kegiatan penelitian Tim Penelitian Universitas Lampung dengan judul: Kajian Akademis Master Plan Pendidikan Dasar di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017.

Adapun peserta yang dibutuhkan sebagai perwakilan masing-masing kecamatan yaitu sebagai berikut:

1. Perwakilan Dinas Pendidikan
2. Perwakilan MKKS SMP
3. Kepala Sekolah
4. Pengawas Sekolah
5. Tim Pengembangan Sekolah
6. Perwakilan Komite

Demikian permohonan ini kami sampaikan agar dapat di pertimbangkan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kerja Sama,





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Gedong Meneng - Bandar Lampung Tel/Fax: (0721) 704624



Nomor : 3083A/UN26/3/DT/2017

23 Maret 2017

Lampiran : 1 (satu) Bundel Proposal

Perihal : **Proposal Penelitian**

Kepada Yth.

Bupati Kabupaten Pesisir Barat

di

Kel. Ps. Krui, Pesisir Tengah, Pesisir Barat,
Lampung 34874, Indonesia

Bersama ini kami mengusulkan Proposal Penelitian Tahun 2017 kepada Bapak Bupati, yang diusulkan oleh Ketua Tim,

Nama : Dr. Erlina Rufaidah, S.E., M.Si.

NIP : 19580828 198601 2 001

Judul Proposal : Penyusunan Buku Master Plan Pendidikan Dasar Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017

Demikian permohonan kami agar dapat dipertimbangkan. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Dekan.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kerja Sama



Dr. Abdurrahman, M.Si.

NIP 19681210 199303 1 002

Tembusan :

1. Dekan FKIP Universitas Lampung (sebagai laporan).
2. Ketua Jurusan Pendidikan IPS FKIP Universitas Lampung.

LAMPIRAN DAFTAR HADIR



DAFTAR HADIR PESERTA FGD

NO	NAMA	JABATAN	ASAL SEKOLAH	TANDA TANGAN
1	HALIKTI	Kep SD.	SD/2 P. Kruis	
2	Hj. MASOKWATI	Kep SD	SDN Suka Bera	
3	KARMIZAR	Kep. SMP.	SMPN 3 Ngabre	
4	Faizal Rohim	Wakasek	SMPN 1 Pds. Terengganu	
5	REZA WAHYUDI	KA.SMP	SMPN 1 BENGKUNAT	
6	YULIAN.	Kep SD.	SDN. Sukamiri	
7	Alsi / Hual	Ks SD	SDN 1 Kib Beka	
8	FAUZI	KS SD	SDN WAY NIKER	
9	Rohmat	Bendahara	SDN Ujung Pandang	
10	SRI SUSANFI	Buru.	SD.N. Keluaran	



DAFTAR HADIR PESERTA FGD

NO	NAMA	JABATAN	ASAL SEKOLAH	TANDA TANGAN
1	RASID WAHYONU	ICS.	SMPN 2 LEMUNG	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				



DAFTAR HADIR PESERTA FGD

NO	NAMA	JABATAN	ASAL SEKOLAH	TANDA TANGAN
1	ERKHA ILIATI	BENDAHARA	SDIT ALMAH DHURI	
2	LINSIDA	KOP- SEK	SDN SUKAMAJU	
3	Zainani	KOP- SEK	SDN I N.R	
4	Zahir	KIP- SEK	SDN I. P's	
5	Yusirman	Kep SMP N/1 WAYKOS	SMP N/1 WE	
6	FAHRURRAZI	DEP SEK	SDN 2 PUSUKUS MALAY	
7	SAMSUNDAHARI	Kep SEK	SDN 1 MUG	
8	Arwani	Kep. Sek	SDN. Pt. Rindu	
9	Annurba	Kep sek	SMP N/2 NGANTAR	
10	M. Hafid	KIP- SEK	SDN. 1- Sumber rejo	



DAFTAR HADIR PESERTA FGD

NO	NAMA	JABATAN	ASAL SEKOLAH	TANDA TANGAN
1	SULWITO	Kasak	SMPN 3 Mei	
2	TAMBAT ARAFIR	Kepsek.	SDN. Pengg V	
3	MAULAZI.	KEPSEK	SDN. P. BAKAM	
4	RENI SUSANTI. S.pd	GURU	SD Mervyanang	
5	SUMOHRI. S.pd	KEPSEK	SEKOLAH KAM PULUS JAWA	
6	MARUHTI. S.pd	GURU	SDN 4 PS KUMI.	
7	ROHIM	KEP SEK	SMP IT AL-IRSYAD	
8	MURTI RYANID	REP SEK	SDN LABUH AN PIPISANG	
9	IRHAM S.pd MM	KEP SEK	SDN I Way Sindi	
10	HERMANS AFIKAI	kep sek	SDN 2 P. Penengahan	



DAFTAR HADIR PESERTA FGD

NO	NAMA	JABATAN	ASAL SEKOLAH	TANDA TANGAN
1	ABDUL MUTHOLIB	Kep Sek.	SD. Muhammadiyah	
2	HERNIAWATI	KEP SEK	SDN I GAL K. TIMOR	
3	ARIA LUTFI	KEP SEK	SDN PENINGGARA K TENGAH	
4	Mrs. INDARIS INDRIGINTA. W.	Kep Sek	SMP N 1 NGAMBUR	
5	Hj. Zahrotun	Kep Sek	SDN 2 WAY SUT	
6	ELI GOSI	Kep Sek	SMP N 2 P. BUKIT	
7	Selamat, SP	Kep Sek	SDN. HENI MANDAK	
8	NETTY YUNIATHA.S.PA	K3S	SDN WALUR	
9	CIK MINAR.	Kep. Sek.	SDN. WAYNAPAL	
10	ZAKARIA.	K3S.	SDN 2. P. BUKIT	



DAFTAR HADIR PESERTA FGD

NO	NAMA	JABATAN	ASAL SEKOLAH	TANDA TANGAN
1	FUHRUDDIN	KEP SEK	SDN KOTABARANG	
2	FADATURRAHMAD.	Kep. SD.	SDN. 1 WAMUK	
3	NAPELAM	Kep sek	SDN 2 BT RAKA	
4	AZIZ	Kep sek	SDN PASUR P. PRANG	
5	AGUS WASTIANA	KEP SEK	SDN P D ULU	
6	RIFKA NINGAH	KEP SEK	SDN 1 KAWI PELAYAN	
7	MARKONI	KEP SEK	SDN P. 1. KP	
8v	PITAMI ARSYAD	Kep sek.	SDN 2 WAMUK.	
v 9	Sugeng Santoso	Kabeh	SDN 1 Lemay	
v 10	Amang	- u -	SDN 1 P. 1. KP	



DAFTAR HADIR PESERTA FGD

NO	NAMA	JABATAN	ASAL SEKOLAH	TANDA TANGAN
1	YUHITA	STAF	SMA Negeri DISDIKBUD	Yuh.
2	SEGA SELVIANA, S.Pd	STAF	SMA Disdikbud	Am-
3	SEFTY GOESTIRA, S.Pd.	STAF	DISDIKBUD	Sft
4	SEPTI ROSANA	STAF	DISDIKBUD	Sf
5	AMNAH BAETY	Guru.	SDN. PAHMUNG AN	Am
6	MURPANDI	KEPSEK	SDN SPS KARI	Mur
7	ZUDRAN	Guru	SDN 3 Wafendi Wafendi	Zud
8	E. RATNAWATI	KEP. SEK	SDN. 2 PD. HIGA PARDA HABA	E.R
9	KARLEMA.	KEP SEL	SDN 2 GUNUNG	Kar
10	WIZKAR	Kep Sck.	SDN WAYREDAK	Wiz



INSTRUMEN PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN DASAR

**Dalam Kerangka Penyusunan
Master Plan Pendidikan Dasar Kabupaten Pesisir Barat**

**TIM PENYUSUN
Dr. Erlina Rupaidah, M.Si, dkk.**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
2017**

A. HASIL BELAJAR

1. Permasalahan sikap siswa yang terjadi di sekolah anda

Arti angka adalah 1 tidak pernah; 2 jarang; 3 sering; 4 selalu

No	Permasalahan Sikap	Frekuensi			
1	Mencontek atau menyalin pekerjaan teman	1	2	3	4
2	Berbohong	1	2	3	4
3	Membolos	1	2	3	4
4	Tidak mengerjakan tugas yang diberikan	1	2	3	4
5	Terlibat perkelahian antar siswa dan atau antar sekolah dan atau antar	1	2	3	4
6	Terlibat tindak kriminal seperti narkoba, pornografi atau pornoaksi	1	2	3	4
7	Minum minuman keras	1	2	3	4
8	Merokok	1	2	3	4
9	Vandalisme (merusak barang tanpa seizin pemilik)	1	2	3	4
10	Menyalahkan orang lain	1	2	3	4
11	Tidak mau meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan	1	2	3	4
12	Terlambat masuk sekolah	1	2	3	4
13	Berlaku tidak sopan kepada orang yang lebih tua	1	2	3	4
14	Merendahkan pendapat orang lain	1	2	3	4
15	Malas menulis seperti buku, puisi, artikel dan lainnya	1	2	3	4
16	Malas membaca	1	2	3	4
17	Tidak berani mengemukakan pendapat	1	2	3	4
18	Tidak percaya diri tampil di depan umum	1	2	3	4
19	Mudah putus asa	1	2	3	4
20	Kesulitan dalam berbicara dengan orang lain	1	2	3	4
21	Tidak sportif	1	2	3	4
22	Mudah mengeluh	1	2	3	4
23	Tidak taat menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing	1	2	3	4
24	Tidak berdoa sebelum dan setelah melakukan aktivitas	1	2	3	4
25	Menggunakan kata-kata kotor saat berbicara	1	2	3	4
26	Berpakaian kurang sopan	1	2	3	4
27	Tidak mengucapkan salam saat masuk kelas	1	2	3	4
28	Menertawakan teman yang sedang kesusahan/terkena musibah	1	2	3	4
29	Menjauhi teman yang berbeda secara fisik, suku, ras atau agama	1	2	3	4
30	Menyerobot saat memakai fasilitas umum	1	2	3	4
31	Menghindari kerjabakti	1	2	3	4
32	Membuang sampah sembarangan	1	2	3	4
33	Menggunakan air dan listrik dengan boros	1	2	3	4
34	Merusak tanaman	1	2	3	4

2. Tindak kekerasan yang terjadi di sekolah anda

Petunjuk arti angka adalah 1 tidak pernah; 2 jarang; 3 sering; 4 selalu

No	Kekerasan	Oleh Guru				Oleh Teman			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1	Menyakiti fisik	1	2	3	4	1	2	3	4
2	Menyakiti secara verbal/perasaan/psikis	1	2	3	4	1	2	3	4

Petunjuk untuk nomor 3 - 6,

Arti angka adalah 1 tidak mampu; 2 kurang mampu; 3 mampu; 4 sangat mampu

3. Capaian ketrampilan siswa di sekolah anda

No	Keterampilan	Tingkat Kemampuan			
		1	2	3	4
1	Menyampaikan ide dan pendapat secara santun dan mudah	1	2	3	4
2	Menyimak informasi secara tepat dan menyampaikan kembali dengan kalimat sendiri	1	2	3	4
3	Membaca cepat dan membuat rangkuman dari informasi tertulis	1	2	3	4
4	Melakukan telaah secara kritis terhadap teks atau buku	1	2	3	4
5	Membuat karya tulis dengan deskripsi yang berkesinambungan dan mudah dipahami	1	2	3	4
6	Melakukan pengamatan dengan bimbingan dan petunjuk yang jelas dari guru	1	2	3	4
7	Bertanya dengan kritis	1	2	3	4
8	Mengumpulkan informasi dan melakukan analisis dari berbagai	1	2	3	4
9	Meniru karya orang lain	1	2	3	4
10	Memodifikasi karya orang lain	1	2	3	4
11	Membuat kreasi sendiri sesuai dengan fasilitas yang tersedia	1	2	3	4
12	Menulis dalam bahasa dan gaya sendiri	1	2	3	4

4. Kemahiran siswa di sekolah anda dalam menggunakan berbagai sumber informasi untuk belajar

No	Sumber Informasi	Tingkat Kemampuan			
		1	2	3	4
1	Buku teks	1	2	3	4
2	Buku selain buku teks	1	2	3	4
3	Media massa seperti majalah, koran dan lainnya	1	2	3	4
4	Internet	1	2	3	4

5. Kemahiran siswa di sekolah anda dalam menggunakan teknologi untuk belajar

No	Teknologi	Tingkat Kemampuan			
		1	2	3	4
1	Komputer	1	2	3	4
2	Handphone	1	2	3	4
3	Internet	1	2	3	4

6. Kemandirian siswa di sekolah anda dalam bekerjasama untuk aktifitas belajar/kesiswaan

No	Aktivitas	Tingkat Kemampuan			
		1	2	3	4
1	Aktivitas dalam kelas seperti membersihkan kelas	1	2	3	4
2	Aktivitas luar kelas seperti perlombaan, perayaan dan lainnya	1	2	3	4
3	Organisasi kesiswaan dan/atau kepanitiaan	1	2	3	4
4	Penyelesaian tugas belajar	1	2	3	4

7. Prestasi siswa/kelompok di sekolah anda atas pengetahuan yang dimiliki

No	Tingkat	Frekuensi			
		1	2	3	4
1	Tingkat Kabupaten	1	2	3	4
2	Tingkat Propinsi	1	2	3	4
3	Tingkat Nasional	1	2	3	4
4	Tingkat Internasional	1	2	3	4

8. Prestasi siswa/kelompok di sekolah anda atas karya yang dihasilkan seperti mesin, lukisan, prakarya dan lainnya

No	Tingkat	Frekuensi			
		1	2	3	4
1	Tingkat Kabupaten	1	2	3	4
2	Tingkat Propinsi	1	2	3	4
3	Tingkat Nasional	1	2	3	4
4	Tingkat Internasional	1	2	3	4

9. Prestasi siswa/kelompok di sekolah anda atas ketrampilan yang ditunjukkan seperti debat, menyanyi, olahraga dan lainnya

No	Tingkat	Frekuensi			
		1	2	3	4
1	Tingkat Kabupaten	1	2	3	4
2	Tingkat Propinsi	1	2	3	4
3	Tingkat Nasional	1	2	3	4
4	Tingkat Internasional	1	2	3	4

10. Jenis perangkat kurikulum yang tersedia dan tersosialisasikan di sekolah anda

No	Perangkat	Ketersediaan		Guru	Tendik	Siswa	Orang Tua	Komite
		Ada	Tidak					
1	Pedoman Kurikulum	Ada	Tidak					
2	Pedoman Muatan Lokal	Ada	Tidak					
3	Pedoman Kegiatan Ektrakurikuler	Ada	Tidak					
4	Pedoman Pembelajaran	Ada	Tidak					
5	Pedoman Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik	Ada	Tidak					
6	Pedoman Sistem Kredit Semester	Ada	Tidak					
7	Pedoman Bimbingan dan Konseling	Ada	Tidak					
8	Pedoman Evaluasi Kurikulum	Ada	Tidak					
9	Pedoman Pendampingan Pelaksanaan Kurikulum	Ada	Tidak					
10	Pedoman Pendidikan Kepra mukaan	Ada	Tidak					

11. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam mengembangkan kurikulum di sekolah anda

No	Perangkat	Bukti (SK Team)	Tahap Keterlibatan					
			Kehadiran	Berita Acara	Notulen	Analisis	Penetapan	Penyusunan
1	Kepala Sekolah							
2	Guru (Kelas/Mata Pelajaran)							
3	Konselor (Guru BK)							
4	Pengawas							
5	Narasumber							
6	Komite							

7	Penyelenggara lembaga pendidikan							
8	Dinas Pendidikan							
9	Tokoh masyarakat							
10	Dunia Industri Dunia Usaha							

12. Kerangka dasar penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di sekolah anda

No	Komponen	Ketersediaan	
1	Visi	Ada	Tidak
2	Misi	Ada	Tidak
3	Tujuan	Ada	Tidak
4	Muatan Kurikuler	Ada	Tidak
5	Beban Belajar Siswa dan Guru	Ada	Tidak
6	Kalender Pendidikan	Ada	Tidak
7	Silabus	Ada	Tidak
8	Rencana Pelaksanaan Pembelajaran	Ada	Tidak

13. Kegiatan pengembangan diri ekstrakurikuler yang disediakan oleh sekolah anda

No	Kegiatan	Ektrakurikuler		
1	Kepramukaan	Wajib	Pilihan	Tidak ada
2	Latihan Kepemimpinan Siswa	Wajib	Pilihan	Tidak ada
3	Palang Merah Remaja	Wajib	Pilihan	Tidak ada
4	Usaha Kesehatan Sekolah	Wajib	Pilihan	Tidak ada
5	Pasukan Pengibar Bendera	Wajib	Pilihan	Tidak ada
6	Pengembangan Bakat Olahraga	Wajib	Pilihan	Tidak ada
7	Seni Dan Budaya	Wajib	Pilihan	Tidak ada
8	Pencinta Alam	Wajib	Pilihan	Tidak ada
9	Jurnalistik	Wajib	Pilihan	Tidak ada
10	Teater	Wajib	Pilihan	Tidak ada
11	Lainnya	Wajib	Pilihan	Tidak ada

B. PROSES PEMBELAJARAN

1. Bentuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun guru di sekolah anda
 - a. Per Mata Pelajaran
 - b. Per Tema
 - c. Per Pertemuan
 - d. Per KD

2. Waktu pemeriksaan RPP di sekolah anda

No	Pelaksana	Tidak pernah	Tiap hari efektif	Tiap pekan	Tiap bulan	Tiap semester	Lainnya
1	Kepala Sekolah						
2	Pengawas Sekolah						

3. Tahapan penyusunan RPP yang dilakukan di sekolah anda

No	Tahapan	Jawaban			
1	Pemetaan KI-KD dalam dan lintas mapel	1	2	3	4
2	Penyesuaian antara KI-KD dengan indikator	1	2	3	4
3	Penyesuaian antara indikator dengan materi	1	2	3	4
4	Penyesuaian antara indikator, materi dengan langkah pembelajaran	1	2	3	4

4. Pola penyusun RPP oleh guru di sekolah anda
 - a. Individu
 - b. Kerjasama Kelompok Mapel
 - c. Kerjasama Antar Kelompok Mapel
 - d. Bersama KKG/MGMP
 - e. Konsultan

5. Aktifitas yang dilakukan guru di sekolah anda saat membuka pembelajaran
 Arti angka adalah 1 tidak pernah; 2 jarang; 3 sering; 4 selalu

No	Aktifitas	Frekuensi			
1	Mengajak siswa melaksanakan piket secara bergantian	1	2	3	4
2	Melakukan olah fisik sebelum memulai hari pembelajaran pada hari-hari tertentu bersama siswa	1	2	3	4
3	Melakukan kegiatan positif secara rutin sesuai dengan potensi dan hobi yang dimiliki siswa	1	2	3	4
4	Meminta seorang siswa memimpin salam hormat kepada guru	1	2	3	4

No	Aktifitas	Frekuensi			
		1	2	3	4
5	Mengajak siswa membaca buku selain buku mata pelajaran selama 15 menit setiap hari	1	2	3	4
6	Menganjurkan siswa menabung dalam berbagai bentuk (buku tabungan, celengan, dan lainnya)	1	2	3	4
7	Menyesuaikan pengaturan tempat duduk siswa dan sumber daya lain yang sesuai	1	2	3	4
8	Memulai proses pembelajaran sesuai waktu yang dijadwalkan	1	2	3	4
9	Menjelaskan silabus mata pelajaran pada tiap awal semester kepada siswa	1	2	3	4
10	Menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan sesuai silabus	1	2	3	4
11	Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai	1	2	3	4
12	Mendiskusikan kompetensi sebelumnya berkaitan dengan kompetensi yang akan dipelajari dan dikembangkan	1	2	3	4
13	Memotivasi siswa untuk mengaplikasikan kompetensi yang akan dicapai dalam kehidupan sehari-hari	1	2	3	4
14	Menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan	1	2	3	4

6. Aktifitas yang dilakukan guru di sekolah anda saat melaksanakan pembelajaran

Arti angka adalah 1 tidak pernah; 2 jarang; 3 sering; 4 selalu

No	Kegiatan Pembelajaran	Frekuensi			
		1	2	3	4
1	Mengajak siswa untuk mengamati atau melakukan identifikasi	1	2	3	4
2	Mengajukan masalah yang akan dipecahkan	1	2	3	4
3	Mengajukan proyek yang akan dikerjakan siswa	1	2	3	4
4	Membantu siswa untuk menjelaskan dan membagi tugas yang akan dilakukan	1	2	3	4
5	Memperagakan ketrampilan atau menyajikan informasi tahap demi tahap	1	2	3	4
6	Mendorong siswa untuk bertanya dan menyampaikan pendapat	1	2	3	4
7	Memberikan latihan terbimbing	1	2	3	4
8	Memeriksa dan memberikan masukan terhadap kemampuan siswa	1	2	3	4
9	Mempersiapkan latihan kepada siswa untuk menerapkan konsep yang dipelajari pada kehidupan sehari-hari	1	2	3	4
10	Membantu siswa membentuk kelompok	1	2	3	4
11	Membimbing kelompok-kelompok belajar saat mengerjakan tugas	1	2	3	4
12	Mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai	1	2	3	4
13	Mendorong siswa melaksanakan eksperimen	1	2	3	4

14	Mendorong siswa untuk mendapat penjelasan pemecahan masalah.	1	2	3	4
15	Mendorong siswa untuk memanfaatkan sumber belajar yang ada di sekolah maupun di luar sekolah	1	2	3	4
16	Mendorong siswa untuk memanfaatkan nara sumber yang ada di luar sekolah	1	2	3	4
17	Memotivasi siswa untuk mengasosiasi (menalar) dan menyimpulkan	1	2	3	4
18	Membantu siswa dalam merencanakan karya yang sesuai	1	2	3	4
19	Membantu siswa dalam menyiapkan karya yang sesuai	1	2	3	4
20	Membantu siswa melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka	1	2	3	4
21	Mendorong siswa untuk menghargai pendapat orang lain;	1	2	3	4

7. Media belajar yang digunakan di sekolah anda.

Arti angka adalah; 1 tidak pernah; 2 jarang; 3 sering; 4 selalu.

No	Media	Frekuensi			
1	Audio : Kaset audio, siaran radio, CD, telepon	1	2	3	4
2	Cetak : Buku pelajaran, modul, brosur, leaflet, gambar	1	2	3	4
3	Audio-cetak : Kaset audio yang dilengkapi bahan tertulis	1	2	3	4
4	Proyeksi visual diam : Overhead transparansi (OHT), Film bingkai	1	2	3	4
5	Proyeksi audio visual diam : Film bingkai (slide) bersuara	1	2	3	4
6	Visual gerak : Film bisu	1	2	3	4
7	Audio visual gerak : Audio Visual gerak, film gerak bersuara, video/VCD, televisi	1	2	3	4
8	Objek fisik : Benda nyata, model, specimen	1	2	3	4
9	Manusia dan lingkungan : Guru, Pustakawan, Laboran	1	2	3	4
10	Komputer : CAI (dengan bantuan computer) dan CBI (menggunakan computer)	1	2	3	4

8. Sumber belajar yang digunakan di sekolah anda.

Arti angka adalah 1 tidak pernah; 2 jarang; 3 sering; 4 selalu

No	Sumber	Frekuensi			
1	Sumber belajar cetak: buku, majalah, ensiklopedi, brosur, koran, poster, dan denah	1	2	3	4
2	Sumber belajar non cetak: film, slide, video, model, boneka, dan audio kaset.	1	2	3	4

3	Sumber belajar yang berupa fasilitas: auditorium, perpustakaan, studio dan lapangan olahraga.	1	2	3	4
4	Sumber belajar yang berupa kegiatan: wawancara, kerja kelompok, observasi, simulasi, dan permainan.	1	2	3	4
5	Sumber belajar yang berupa lingkungan : taman dan terminal.	1	2	3	4

9. Aktifitas yang dilakukan guru di sekolah anda untuk memperbaiki proses pembelajaran.

Arti angka adalah 1 tidak pernah; 2 jarang; 3 sering; 4 selalu

No	Aktifitas	Frekuensi			
1	Melakukan remedial untuk peserta didik yang belum tuntas belajar	1	2	3	4
2	Melakukan pengayaan untuk peserta didik yang sudah tuntas belajar lebih dulu	1	2	3	4
3	Melakukan refleksi dan umpan balik terhadap proses pembelajaran dan memperbaiki pembelajaran	1	2	3	4
4	Menganalisis daya serap peserta didik dan memperbaiki pembelajaran	1	2	3	4
5	Mengecek gaya belajar peserta didik dan menyesuaikan pembelajaran	1	2	3	4
6	Menyesuaikan materi pelajaran dengan kecepatan dan kemampuan belajar siswa	1	2	3	4
7	Mempersiapkan pembelajaran yang lebih baik melalui KKG/MGMP/komunikasi sejawat	1	2	3	4

10. Aktifitas yang dilakukan guru di sekolah anda saat menutup pembelajaran.

Arti angka adalah 1 tidak pernah; 2 jarang; 3 sering; 4 selalu

No	Aktifitas	Frekuensi			
1	Melakukan refleksi atau evaluasi bersama siswa terhadap penyelidikan mereka	1	2	3	4
2	Mengevaluasi seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh bersama siswa	1	2	3	4
3	Memberi penghargaan atas upaya atau hasil belajar individu maupun kelompok	1	2	3	4
4	Membantu siswa menemukan manfaat dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung	1	2	3	4

13. Bentuk dokumen pengawasan proses pembelajaran yang ada di sekolah anda

No	Bentuk Pengawasan	Bentuk Dokumentasi			
		Lembar Kerja	Laporan	Dokumen elektronik	Lainnya
1	Pemantauan				
2	Supervisi				
3	Evaluasi				

14. Periode pengawasan proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah anda

No	Bentuk Pengawasan	1 Bulan	3 Bulan	Semester	1 Tahun	Tidak periodik	Tidak Ada
1	Pemantauan						
2	Supervisi						
3	Evaluasi						

C. PENILAIAN PEMBELAJARAN

- Langkah yang dilakukan guru di sekolah anda dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar. Petunjuk arti angka adalah 1 tidak pernah; 2 jarang; 3 sering; 4 selalu

No	Langkah	Frekuensi			
		1	2	3	4
1	Menetapkan tujuan penilaian.	1	2	3	4
2	Menyusun kisi-kisi ujian.	1	2	3	4
3	Mengembangkan (menulis, menelaah, dan merevisi) instrumen dan pedoman penilaian.	1	2	3	4
4	Melakukan analisis kualitas instrumen.	1	2	3	4
5	Melaksanakan penilaian.	1	2	3	4
6	Mengolah (mensor dan menilai) dan menentukan kelulusan siswa.	1	2	3	4
7	Melaporkan.	1	2	3	4
8	Memanfaatkan hasil penilaian.	1	2	3	4

- Cakupan teknik penilaian yang ada dalam pedoman penilaian pendidikan yang disusun sekolah anda.

No	Teknik Penilaian	Prosedur	Kriteria	Dasar Penilaian	Instrumen	Cara Hitung
1	Observasi					
2	Penilaian diri					
3	Penilaian antar siswa					
4	Jurnal					
5	Instrumen tes tulis					
6	Instrumen tes lisan					
7	Instrumen penugasan					
8	Tes praktik					
9	Projek					
10	Penilaian portofolio					

3. Pertimbangan penentuan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) di sekolah anda.

Arti angka adalah 1 tidak ada; 2 kurang dari 50%; 3 antara 51-85%; 4 > 85%

No	Unsur	Tingkat Pertimbangan			
		1	2	3	4
1	Karakteristik siswa	1	2	3	4
2	Karakteristik mata pelajaran	1	2	3	4
3	Kondisi satuan pendidikan	1	2	3	4
4	Analisis hasil penilaian	1	2	3	4

4. Kesesuaian penilaian kompetensi sikap siswa di sekolah anda berdasarkan karakteristik kompetensi dasar

Arti angka adalah 1 tidak ada; 2 kurang dari 50%; 3 antara 51-85%; 4 > 85%

No	Kompetensi	Tingkat Kesesuaian			
		1	2	3	4
1	Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut	1	2	3	4
2	Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur	1	2	3	4
3	Menghayati dan mengamalkan perilaku disiplin	1	2	3	4
4	Menghayati dan mengamalkan perilaku santun	1	2	3	4
5	Menghayati dan mengamalkan perilaku peduli	1	2	3	4
6	Menghayati dan mengamalkan perilaku bertanggungjawab	1	2	3	4
7	Menghayati dan mengamalkan perilaku responsif	1	2	3	4
8	Menghayati dan mengamalkan perilaku proaktif	1	2	3	4

5. Bentuk laporan penilaian hasil belajar yang disusun oleh guru di sekolah anda

No.	Bentuk laporan nilai	Nilai	Deskripsi
1	Nilai Sikap		
2	Nilai Pengetahuan		
3	Nilai Keterampilan		

6. Waktu penyampaian laporan hasil ujian kepada orang tua di sekolah anda

No	Jenis Ujian	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	Tidak periodik	Tidak pernah
1	Ulangan Akhir Semester (UAS)						
2	Ulangan Kenaikan Kelas (UKK)						
3	Ujian Akhir (US/UN)						

7. Waktu penyampaian rekapitulasi laporan hasil ujian oleh sekolah anda kepada pemerintah daerah

	Jenis Ujian	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	Tidak periodik	Tidak pernah
1	Ulangan Akhir Semester (UAS)						
2	Ulangan Kenaikan Kelas (UKK)						
3	Ujian Akhir (US/UN)						

D. PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1. Pihak yang dilibatkan dalam penyusunan perencanaan sekolah anda.

No	Hal	Ketersediaan	Pihak yang dilibatkan					
			Kepala	Guru	Tendik	Siswa	Orang Tua	Komite
1	Visi	Ada Tidak						
2	Misi	Ada Tidak						
3	Tujuan Sekolah	Ada Tidak						
4	Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM)	Ada Tidak						
5	Rencana Kerja Tahunan (RKT)	Ada Tidak						

2. Pihak yang disosialisasikan mengenai perencanaan sekolah anda

No	Hal	Sosialisasi				
		Guru	Tendik	Siswa	Orang Tua	Komite
1	Visi					
2	Misi					
3	Tujuan Sekolah					
4	Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM)					
5	Rencana Kerja Tahunan (RKT)					

3. Periode evaluasi terhadap dokumen perencanaan anda

No	Hal	Periode					
		1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	Tidak tetap	Tidak pernah
1	Visi						
2	Misi						
3	Tujuan Sekolah						
4	Rencana jangka menengah (RKS)						
5	Rencana tahunan (RKAS)						

4. Pedoman yang dimiliki dan disosialisasikan oleh sekolah anda

No	Pedoman Sekolah	Ketersediaan		Guru	Tendik	Siswa	Ortu	Komite
		Ada	Tidak					
1	kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP);	Ada	Tidak					
2	kalender pendidikan/akademik;	Ada	Tidak					
3	struktur organisasi sekolah/madrasah;	Ada	Tidak					
4	pembagian tugas di antara guru;	Ada	Tidak					
5	pembagian tugas di antara tenaga kependidikan;	Ada	Tidak					
6	peraturan akademik;	Ada	Tidak					
7	tata tertib sekolah/madrasah;	Ada	Tidak					
8	kode etik sekolah/madrasah;	Ada	Tidak					
9	biaya operasional sekolah/madrasah	Ada	Tidak					
10	pedoman sekolah aman	Ada	Tidak					

5. Waktu pelaksanaan evaluasi pedoman sekolah anda

No	Pedoman Sekolah	Per 6 bulan	Per Tahun	Lebih dari setahun	Tidak pernah
1	kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP);				
2	kalender pendidikan/akademik;				
3	struktur organisasi sekolah/madrasah;				
4	pembagian tugas di antara guru;				
5	pembagian tugas di antara tenaga kependidikan;				
6	peraturan akademik;				
7	tata tertib sekolah/madrasah;				
8	kode etik sekolah/madrasah;				
9	biaya operasional sekolah/madrasah				

6. Pelibatan peran serta masyarakat dan kemitraan dalam pengelolaan pendidikan di sekolah anda.

Arti angka adalah 1 tidak pernah; 2 jarang; 3 sering; 4 selalu

No	Lembaga	Frekuensi			
		1	2	3	4
1	Pendidikan	1	2	3	4
2	Kesehatan	1	2	3	4
3	Kepolisian	1	2	3	4
4	Keagamaan dan kemasyarakatan	1	2	3	4
5	Dunia Usaha	1	2	3	4
6	Pengembangan minat dan bakat	1	2	3	4
7	Kepolisian/TNI/Hukum lainnya	1	2	3	4
8	Budaya dan Pariwisata	1	2	3	4
9	Keuangan	1	2	3	4
10	Lingkungan	1	2	3	4
11	Perhubungan	1	2	3	4
12	Lainnya	1	2	3	4

7. Periode sekolah anda melakukan evaluasi diri sekolah terhadap Standar Nasional

Pendidikan

No	Komponen	Semester	Per Tahun	2-4 Tahun	>4 Tahun
1	Standar Kompetensi Lulusan				
2	Standar Isi				
3	Standar Proses				
4	Standar Penilaian				
5	Standar Pendidik dan Tenaga				
6	Standar Sarana Prasarana				
7	Standar Pembiayaan				
8	Standar Pengelolaan				

8. Aturan yang dimuat berdasarkan jenis dokumen yang dimiliki sekolah anda.

No	Aktifitas	KTSP	Peraturan Akademik	Tata Tertib	RKT
1	Persyaratan minimal kehadiran siswa untuk mengikuti pelajaran dan tugas dari guru				
2	Ketentuan mengenai ulangan, remedial, ujian, kenaikan kelas, dan kelulusan				
3	Ketentuan hak menggunakan fasilitas belajar, laboratorium, perpustakaan dan buku				
4	Ketentuan layanan konsultasi kepada guru mata pelajaran, wali kelas, dan konselor				
5	Pelaksanaan ibadah bersama sesuai agama dan kepercayaannya di sekolah maupun bersama masyarakat				
6	Perayaan hari besar keagamaan dengan kegiatan yang sederhana dan hikmat				
7	Upacara bendera setiap hari Senin dengan mengenakan seragam atau pakaian yang sesuai				
8	Upacara bendera pada pembukaan masa orientasi				
9	Pengenalan beragam keunikan potensi daerah asal siswa melalui berbagai media dan kegiatan				
10	Perayaan hari besar nasional dengan menghayati pemikiran dan semangat yang melandasinya				
11	Bersalaman, tersenyum dan menyapa di komunitas sekolah				
12	Guru dan tenaga kependidikan datang lebih awal untuk menyambut kedatangan siswa				
13	Salam hormat kepada guru sebelum pembelajaran dimulai dipimpin oleh seorang siswa secara bergantian				
14	Menjenguk warga sekolah yang sedang mengalami musibah, seperti sakit, kematian, dan				
15	Membiasakan belajar kelompok di sekolah/rumah untuk yang diketahui oleh guru				
16	Membiasakan siswa saling membantu bila ada siswa yang sedang mengalami musibah atau				
17	Kerja bakti membersihkan lingkungan berkelompok lintas kelas dan berbagi tugas				
18	Penggunaan sumber daya sekolah (air, listrik, telepon, dsb) secara efisien				
19	Pembangunan budaya siswa untuk selalu menjaga kebersihan di kelas dan lingkungan				
20	Penerapan antri				

No	Aktifitas	KTSP	Peraturan Akademik	Tata Tertib	RKT
21	Pelaksanaan piket kebersihan secara beregu dan bergantian regu				
22	Perawatan tanaman di lingkungan sekolah, bergilir antar kelas.				
23	Pelaksanaan kegiatan bank sampah bekerja sama dengan dinas kebersihan setempat.				
24	Penggunaan 15 menit sebelum hari pembelajaran untuk membaca buku selain buku mata pelajaran				
25	Kegiatan olah fisik sebelum memulai hari pembelajaran pada hari-hari tertentu				
26	Menabung dalam berbagai bentuk (rekening bank, celengan, dan lainnya).				
27	Budaya bertanya dan mengajukan pertanyaan kritis dengan mengangkat tangan sebagai isyarat				
28	Pembiasaan berlatih menjadi pemimpin				
29	Pelaksanaan kegiatan positif secara berkala sesuai dengan potensi dirinya				
30	Pameran karya siswa dengan mengundang orangtua dan masyarakat untuk memberi				
31	Kegiatan kerelawanan oleh siswa dalam memecahkan masalah yang ada di lingkungan				
32	Pelibatan masyarakat dari berbagai profesi untuk berbagi ilmu dan pengalaman kepada siswa				
33	Larangan melakukan kekerasan dalam bentuk apapun				

9. Pelatihan dan pengembangan yang sering diikuti oleh pendidik dan tenaga kependidikan sekolah anda.

Petunjuk arti angka adalah 1 tidak pernah; 2 jarang; 3 sering; 4 selalu

No	Aktifitas	Frekuensi			
1	Penyusunan KTSP	1	2	3	4
2	Penyusunan Rencana Program Pembelajaran	1	2	3	4
3	Pengelolaan Kelas	1	2	3	4
4	Penilaian Pendidikan	1	2	3	4
5	Keteladanan sebagai pendidik dan tenaga kependidikan	1	2	3	4
6	Kepemimpinan di kelas	1	2	3	4
7	Kewirausahaan	1	2	3	4

8	Membangun sekolah aman	1	2	3	4
9	Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan	1	2	3	4
10	Supervisi	1	2	3	4
11	Manajerial	1	2	3	4

10. Aktifitas pendukung pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah anda.

Petunjuk arti angka adalah 1 tidak pernah; 2 jarang; 3 sering; 4 selalu

No	Aktifitas	Frekuensi			
1	Pelaksanaan ibadah bersama sesuai agama dan kepercayaannya di sekolah maupun bersama masyarakat	1	2	3	4
2	Perayaan hari besar keagamaan dengan kegiatan yang sederhana dan hikmat	1	2	3	4
3	Upacara bendera setiap hari Senin dengan mengenakan seragam atau pakaian yang sesuai	1	2	3	4
4	Upacara bendera pada pembukaan masa orientasi	1	2	3	4
5	Pengenalan beragam keunikan potensi daerah asal siswa melalui berbagai media dan kegiatan	1	2	3	4
6	Perayaan hari besar nasional dengan menghayati pemikiran dan semangat yang melandasinya	1	2	3	4
7	Bersalaman, tersenyum dan menyapa di komunitas sekolah	1	2	3	4
8	Guru dan tenaga kependidikan datang lebih awal untuk menyambut kedatangan siswa	1	2	3	4
9	Menjenguk warga sekolah yang sedang mengalami musibah, seperti sakit, kematian, dan lainnya	1	2	3	4
10	Membiasakan siswa saling membantu bila ada siswa yang sedang mengalami musibah atau kesusahan	1	2	3	4
11	Kerja bakti membersihkan lingkungan berkelompok lintas kelas dan berbagi tugas	1	2	3	4
12	Penggunaan sumber daya sekolah (air, listrik, telepon, dsb) secara efisien	1	2	3	4
13	Penerapan antri	1	2	3	4
14	Perawatan tanaman di lingkungan sekolah, bergilir antar kelas.	1	2	3	4
15	Mengumpulkan buku bacaan selain pelajaran dari sumbangan orangtua	1	2	3	4
16	Pelaksanaan kegiatan bank sampah bekerja sama dengan dinas kebersihan setempat.	1	2	3	4
17	Pembiasaan berlatih menjadi pemimpin	1	2	3	4
18	Pameran karya siswa dengan mengundang orangtua dan masyarakat untuk memberi apresiasi	1	2	3	4

19	Kegiatan kerelawanan oleh siswa dalam memecahkan masalah yang ada di lingkungan sekitar	1	2	3	4
20	Pelibatan masyarakat dari berbagai profesi untuk berbagi ilmu dan pengalaman kepada siswa	1	2	3	4

E. SARANA DAN PRASARANA

1. Kondisi lahan sekolah anda

Angka 1 tidak terpenuhi; 2 < 50% terpenuhi; 3 antara 51-85% terpenuhi; 4 > 85% terpenuhi

No	Persyaratan	Tingkat Pemenuhan			
		1	2	3	4
1	Terhindar dari potensi bahaya	1	2	3	4
2	Tersedia akses keselamatan	1	2	3	4
3	Terhindar dari pencemaran air	1	2	3	4
4	Terhindar dari kebisingan	1	2	3	4
5	Terhindar dari pencemaran udara	1	2	3	4

2. Kondisi bangunan sekolah anda dari segi keselamatan

Angka 1 tidak terpenuhi; 2 < 50% terpenuhi; 3 antara 51-85% terpenuhi; 4 > 85% terpenuhi

No	Persyaratan	Tingkat Pemenuhan			
		1	2	3	4
1	Konstruksi stabil	1	2	3	4
2	Konstruksi kukuh	1	2	3	4
3	Perangkat penangkul kebakaran	1	2	3	4
4	Fasilitas ramah anak	1	2	3	4
5	Penangkal petir	1	2	3	4

3. Kondisi bangunan sekolah anda dari segi kesehatan

Angka 1 tidak terpenuhi; 2 < 50% terpenuhi; 3 antara 51-85% terpenuhi; 4 > 85% terpenuhi

No	Persyaratan	Tingkat Pemenuhan			
		1	2	3	4
1	Ventilasi udara	1	2	3	4
2	Pencahayaan	1	2	3	4
3	Sanitasi	1	2	3	4
4	Tempat sampah	1	2	3	4
5	Bahan bangunan yang aman	1	2	3	4

4. Periode pelaksanaan pemeliharaan bangunan sekolah anda

No	Pemeliharaan	< 5 Tahun	5 Tahun	6 Tahun	7 Tahun	> 7 Tahun
1	Pengecatan ulang					
2	Perbaikan jendela dan pintu					
3	Perbaikan lantai					
4	Perbaikan penutup atap					
5	Perbaikan plafon					
6	Perbaikan instalasi air					
7	Perbaikan listrik					

5. Kondisi sarana pendukung proses pembelajaran sekolah anda

Angka 1 tidak terpenuhi; 2 < 50% terpenuhi; 3 antara 51-85% terpenuhi; 4 > 85% terpenuhi

No	Persyaratan	Tingkat Pemenuhan			
		1	2	3	4
1	Ruang sirkulasi terawat dengan baik, bersih dan nyaman	1	2	3	4
2	Area baca yang nyaman di ruang sirkulasi	1	2	3	4
3	Ruang UKS memiliki informasi tentang kesehatan	1	2	3	4
4	Ruangan kantin bersih	1	2	3	4
5	Ruangan kantin memiliki sanitasi yang baik	1	2	3	4
6	Kantin menyediakan makanan yang sehat dan bergizi	1	2	3	4
7	Kantin memiliki informasi tentang gizi seimbang/makanan sehat	1	2	3	4
8	Tempat parkir memiliki sistem pengamanan	1	2	3	4
9	Terdapat rambu-rambu parkir dalam tempat parkir	1	2	3	4
10	Memiliki petugas khusus untuk menjaga tempat parkir	1	2	3	4

**MASTER PLAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KABUPATEN PESISIR BARAT
TAHUN 2017-2025**

(RINGKASAN EKSEKUTIF)

A. PENDAHULUAN

Secara filosofis tanggungjawab pendidikan melekat pada keluarga, masyarakat dan pemerintah. Dalam konteks rumah tangga negara pendidikan merupakan hak setiap warga negara, maka di dalamnya mengandung makna bahwa negara berkewajiban memberikan layanan pendidikan kepada warganya. Karena itu pengelolaan sistem pembangunan pendidikan harus didesain dan dilaksanakan secara bermutu, efektif dan efisien. Pelayanan pendidikan harus berorientasi pada upaya peningkatan akses pelayanan yang seluas-luasnya bagi warga masyarakat. Dalam konteks inilah Pemerintah Kabupaten Pesisir barat memiliki kewajiban dan tugas dalam memberikan pelayanan pembangunan pendidikan bagi warganya sebagai hak warga yang harus dipenuhi dalam pelayanan pemerintahan.

Demikian pula bahwa pembangunan pendidikan di Kabupaten Pesisir barat merupakan fondasi untuk melaksanakan pembangunan dalam berbagai bidang lainnya mengingat secara hakiki upaya pembangunan pendidikan adalah untuk membangun potensi manusianya yang kelak akan menjadi pelaku pembangunan diberbagai bidang pembangunan lainnya. Dalam setiap upaya pembangunan, penting untuk senantiasa mempertimbangkan karakteristik dan potensi setempat. Dalam kontek ini, masyarakat Kabupaten

Pesisir barat yang mayoritas suku Lampung memiliki potensi, budaya dan karakteristik tersendiri.

Secara sosiologis-antropologis falsafah kehidupan masyarakat Lampung yang telah diakui mengandung makna yang mendalam adalah *Piil pesenggiri, Bumi Nengah Nyapur, Sakai Sambayan dan Beguwai Jejama*. Dalam kaitan ini filosofis tersebut harus dijadikan pedoman dalam mengimplementasikan setiap rencana pembangunan termasuk dibidang pendidikan. *Piil Pesenggiri* mengandung makna Kehormatan. *Bumi Nengah Nyapur* mengandung makna bahwa masyarakat Lampung senang bergaul. *Sakai Sambayan* yaitu sikap masyarakat Lampung yang senang membantu satu sama lain dalam masyarakat. *Beguwai Jejama* memiliki makna bahwa masyarakat Pesisir barat senang bekerja sama dalam membangun Pesisir barat. Sebagai sebuah upaya untuk mewujudkan falsafah tersebut maka ditempuh pendekatan *social cultural heritage approach*.

Melalui pendekatan ini diharapkan akan lahir peran aktif masyarakat dalam pembangunan pendidikan yang digulirkan pemerintah. Apa yang tersurat dan tersirat dalam pasal 31 UUD 1945 diperjelas dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa "*pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,*

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab'.

Filosofis dalam penyusunan *Master Plan* Sekolah menengah pertama dijiwai oleh cita-cita luhur sebagaimana rumusan yang termaktub dalam amanat konsitusi tersebut. *Master Plan* Sekolah menengah pertama ini sebagai acuan/pedoman bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan dalam rangka pembangunan manusia yang berilmu, berpengetahuan, mampu membangun dan menguasai teknologi, serta berdaya saing, yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dokumen tersebut dapat menjadi arah kebijakan dan rencana implementasi bidang pendidikan di Kabupaten Pesisir barat.

B. MASALAH YANG PERLU DIBENAH

1. Pendidikan Formal

Sebagai gambaran umum data menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Sekolah pada usia SMP (13-15 Tahun) mengalami peningkatan yang dapat dilihat dari jumlah siswa sekolah menengah pertama dari tahun 2014-2016 secara berturut-turut yaitu 6040, 6047 dan 6092. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya pendidikan di Pesisir Barat di usia tersebut semakin tinggi.

Sedangkan sebagai gambaran umum data menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Sekolah pada usia MTs (13-15 Tahun) dapat dilihat dari jumlah siswa Madrasah Tsanawiyah tahun 2016 yaitu 2403. Hal ini menunjukkan

bahwa kesadaran akan pentingnya pendidikan di Pesisir Barat di usia tersebut tinggi.

Persoalan lain adalah masih ditemukan ketimpangan dari mutu pendidikan antara lain: (1) masih tingginya jumlah ruang kelas yang rusak SMP/MTs di Kabupaten Pesisir barat, (2) Pengadaan, distribusi, penertiban, perbaikan, dan pemeliharaan tanah, gedung, perabot dan alat peraga sekolah yang bervariasi, tidak berdasarkan standarisasi; (3) Masih lemahnya manajemen aset oleh pemerintah daerah sehingga masih banyak fasilitas pendidikan yang belum memiliki bukti hukum; (4) Masih banyaknya sekolah yang kekurangan buku paket dan alat peraga edukatif sehingga menyulitkan guru dalam melaksanakan pembelajaran; (5) Masih lemahnya sistem manajemen SDM guru dan tenaga pengelola kependidikan, terutama dalam pola rekrutmen, seleksi, penempatan dan pendistribusian, pembinaan karier, kesejahteraan dan remunerasi, serta pemberhentian tenaga guru, kepala sekolah, pengawas sekolah dan tenaga kependidikan lainnya yang sering keliru; (6) Masih belum meratanya distribusi guru SMP/MTs di wilayah Kabupaten Pesisir barat ; (7) Masih kurangnya guru untuk beberapa mata pelajaran ; (8) Masih rendahnya tingkat kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan lainnya; (9) Kurikulum sekolah menengah pertama yang terlalu teoritis, kurang praktis, kurang kontekstual, sehingga kurang memberikan makna yang berarti bagi bekal kehidupan murid di masa depan, baik yang berkenaan dengan nilai-nilai religius, bekal kecakapan hidup (*life skills*), tata pergaulan, budi-pekerti, seni budaya lokal, kesehatan dan lingkungan hidup,

serta aspek-aspek pembentuk karakter bangsa sering terabaikan; (10) Masih sulitnya mengembangkan Sekolah Kejuruan di daerah yang berorientasi pada potensi daerah setempat untuk memenuhi peluang pasar kerja tingkat daerah, nasional maupun untuk pasar kerja internasional; (11) Masih tingginya angka putus sekolah pada beberapa kecamatan yang tingkat geografisnya sulit untuk dijangkau, sehingga turut menyebabkan perilaku destruktif dan gangguan keamanan dan ketertiban; (12) Masih belum difahaminya tentang perlunya layanan pendidikan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus, baik bagi anak karena ketunaan, kenakalan, maupun kebutuhan khusus lainnya; (13) Masih berkembang anggapan bahwa anak luar biasa merupakan anak 'sakit' sehingga pemberian layanan pendidikan masih menggunakan pendekatan medis, bukan melalui pendekatan pendidikan kekhususan; (14) Masih rendahnya perhatian masyarakat dan pemerintah terhadap pentingnya kelembagaan pendidikan keagamaan, karena masih tumpang tindih kewenangan dengan instansi vertikal Departemen Agama. Akibatnya, perkembangan jumlah dan kualitas lembaga-lembaga pendidikan keagamaan, khususnya di jalur nonformal masih merana; (15) Pembiayaan dan anggaran penyelenggaraan satuan pendidikan masih didasarkan pada asumsi-asumsi teoritis, tidak didasarkan pada perhitungan satuan biaya operasional (SBO) secara faktual; (16) Mekanisme sistem penganggaran pun tidak didasarkan pada sistem pemetaan alokasi (*budget mapping allocation*) untuk kebutuhan setiap penyelenggaraan satuan program pendidikan. Sekalipun sudah dibantu

dengan adanya BOS, masih tetap saja belum dapat mengangkat persoalan-persoalan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan; (17) Masih lemahnya kemampuan administratif dan manajerial para pengelola satuan pendidikan (kepala sekolah, tata usaha sekolah, pengawas sekolah, dan komite sekolah); (18) Partisipasi dunia usaha terhadap pembiayaan program-program pendidikan yang disalurkan melalui pemerintah masih rendah. Partisipasi yang baru dilakukan hanya disalurkan sendiri terhadap lembaga-lembaga 'binaan' dunia usaha itu sendiri.

2. Pendidikan Nonformal (PNF)

Berkenaan dengan problema pendidikan di jalur pendidikan nonformal di Kabupaten Pesisir barat sampai Tahun 2017 masih ditemukan gambaran bahwa: (1) Eksistensi PNF masih dianggap belum mendapat perhatian yang profesional dari pemerintah maupun masyarakat dalam sistem pembangunan daerah, baik berkenaan dengan peraturan perundangan maupun dukungan anggaran; (2) Upaya memformalkan pendidikan kesetaraan (Paket A, B dan C) dengan pola pembelajaran, penyelenggaraan ujian yang harus menunggu waktu ujian dengan sertifikasi/ijasah yang mengikuti pola pendidikan formal, turut merugikan dan menyurutkan minat masyarakat untuk mengikuti program pendidikan kesetaraan; (3) Kurikulum dan proses pembelajaran keaksaraan masih belum benar-benar berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, sehingga hasil pembelajaran yang diberikan pada warga belajar belum fungsional dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat; (4) Masih terbatasnya jumlah dan

mutu tenaga profesional pada instansi PNF mulai tingkat kabupaten sampai ke tingkat desa dalam mengelola, mengembangkan dan melembagakan PNF;

(5) Masih terbatasnya sarana dan prasarana edukatif PNF baik yang menunjang penyelenggaraan maupun proses pembelajaran PNF dalam rangka memperluas kesempatan, peningkatan mutu dan relevansi hasil program PNF dengan kebutuhan pembangunan daerah; (6) Terselenggaranya kegiatan PNF di lapangan masih mengandalkan tenaga sukarela yang tidak ada kaitan struktural dengan pemerintah sehingga tidak ada jaminan kesinambungan pelaksanaan program PNF; (7) Perhatian dan pengembangan pendidikan kesetaraan gender, pemberdayaan wanita dan sebagai ibu rumah tangga yang turut menopang ekonomi keluarga, dan kader-kader wanita pelayan pembangunan masyarakat di pesedaan, masih relatif sangat rendah; Pada beberapa daerah tertentu di Kabupaten Pesisir barat, masih ada budaya yang berpandangan bahwa perempuan tidak diwajibkan untuk sekolah lebih tinggi dibanding laki-laki. Hal tersebut menyebabkan satu kesenjangan tingkat pendidikan antara laki-laki dengan perempuan; (8) Masih rendahnya jumlah, sebaran pelayanan perpustakaan masyarakat, taman bacaan masyarakat, dan pusat-pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) sebagai media dan sumber belajar dan pembelajaran masyarakat; (9) Masih rendahnya pelayanan pendidikan kepemudaan, baik yang menyangkut pelayanan pendidikan kepribadian, budi pekerti, kecakapan hidup, maupun yang bersifat kebangsaan.

3. Pendidikan Informal

Pada jalur pendidikan informal pun pada umumnya masyarakat belum begitu memahami tentang eksistensi pendidikan informal yang telah dijamin oleh undang-undang, sehingga layanan pendidikan informal masih dianggap tidak penting bagi pendidikan anak. Di samping itu, pemerintah pun, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun pemerintah kabupaten belum dapat merumuskan peraturan perundang-undangan termasuk pedoman penyelenggaraan pendidikan informal bagi masyarakat. Sehingga, kecenderungan pendidikan informal yang berkembang sekarang ini lebih mirip layanan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh keluarga. Merujuk gambaran persoalan-persoalan seperti diungkapkan di muka, dapat disimpulkan bahwa pokok permasalahan pendidikan di Kabupaten Pesisir barat masih dihadapkan pada rendahnya APK/APM/AMH pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan, termasuk sebarannya yang masih bervariasi di antara masing-masing wilayah kecamatan sehingga pencapaian target wajar dikdas 9 tahun dihadapkan pada kondisi yang amat variatif. Permasalahan lainnya, masih rendahnya mutu hasil pendidikan pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Persoalan lainnya adalah keterbatasan akses masyarakat karena persoalan kemampuan ekonomi, budaya maupun geografis. Dalam upaya memberikan pelayanan pendidikan yang semakin menjangkau maka pembebasan biaya sekolah kepada setiap warga usia sekolah (khususnya usia wajib belajar) amat diperlukan baik pada sekolah formal maupun nonformal. Peningkatan layanan pendidikan kesetaraan (Paket A dan B) untuk anak usia wajib belajar harus diupayakan secara konsisten.

Perumusan dan pengembangan prosedur operasional standar penerapan kurikulum berbasis budaya daerah dan kearifan lokal, budi pekerti, kecakapan hidup dan jiwa entrepreneur, teknologi dasar, serta lingkungan hidup yang sesuai dengan karakteristik jalur, jenis dan jenjang satuan pendidikan pada setiap wilayah. Di samping itu, perlu upaya mengembangkan jaringan kemitraan dengan lembaga-lembaga pemerintah, perguruan tinggi, dunia perusahaan, pesantren, dan atau komunitas masyarakat lainnya dalam rangka pendalaman penerapan kurikulum berbasis budaya daerah dan kearifan lokal, budi pekerti, kecakapan hidup dan jiwa entrepreneur, teknologi dasar, olah raga dan seni, serta lingkungan hidup yang sesuai dengan karakteristik jalur, jenis dan jenjang satuan pendidikan. Kedepan perlu segera dirintis pengembangan sekolah-sekolah unggulan/percontohan/model yang berbasis pada budaya daerah dan kearifan lokal, budi pekerti, kecakapan hidup teknologi dasar yang sesuai dengan karakteristik jalur, jenis dan jenjang satuan pendidikan.

C. AGENDA PENDIDIKAN TAHUN 2017-2025

Untuk menyusun agenda pembangunan pendidikan yang dituangkan dalam prioritas program diperlukan kesepahaman tentang substansi, proses dan konteks kelembagaan pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengurusnya. Secara substantif, pembangunan sekolah menengah pertama di Kabupaten Pesisir barat akan berkenaan dengan tugas-tugas pengelolaan dalam bidang:

- 1) Pengembangan dan implementasi kurikulum;

- 2) Pengelolaan peserta didik dasar;
- 3) Pengelolaan ketenagaan;
- 4) Pengelolaan tanah, bangunan/gedung/sarana/prasarana dan fasilitas serta sumber belajar;
- 5) Pengelolaan anggaran dan pembiayaan sekolah menengah pertama;
- 6) Pengelolaan kerjasama kelembagaan sekolah menengah pertama dengan masyarakat;
- 7) Pengelolaan bidang-bidang khusus lainnya yang sesuai dengan jenis dan karakteristik kelembagaan sekolah menengah pertama.

Pemahaman tentang proses-proses sekolah menengah pertama di Kabupaten Pesisir barat akan berkenaan dengan serangkaian prosedur manajerial, antara lain:

- 1) Proses pembuatan keputusan yang dituangkan dalam bentuk-bentuk produk kebijakan;
- 2) Proses perencanaan yang disertai dengan dokumen-dokumen rencana dan program;
- 3) Pengorganisasian dan mengkomunikasikan program-program sekolah menengah pertama;

- 4) Pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program sekolah menengah pertama;
- 5) Pelaporan dan tindak lanjut dari setiap pencapaian program sekolah menengah pertama.

Jenis kelembagaan satuan pendidikan akan lebih variasi lagi apabila dilihat secara faktual diselenggarakan pada jalur pendidikan nonformal, terutama bila melihat eksistensi pendidikan berkelanjutan, seperti halnya pusat-pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pesantren-pesantren yang secara nyata telah lebih dahulu melaksanakan program-program pendidikan nonformal keagamaan, baik secara individu maupun kelompok.

Di samping itu, kelembagaan lain yang secara eksis telah menggali, melestarikan, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai sosial budaya melalui pendidikan nonformal ialah lembaga-lembaga atau kelompok kelompok kesenian dan kebudayaan, seperti halnya padepokan seni budaya, lingkungan seni budaya daerah, taman/cagar budaya, sejarah dan kepurbakalaan, dan jenis-jenis kelembagaan lainnya yang bergerak dalam penggalan, pelestarian dan pengembangan nilai-nilai kebudayaan masyarakat daerah.

Merujuk agenda Pembangunan Nasional sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pendidikan Nasional, maka agenda pembangunan pendidikan di Kabupaten Pesisir barat ditetapkan dalam lima

tujuan strategi, yaitu (1) terjaminnya kepastian memperoleh layanan sekolah menengah pertama ; (2) tersedianya sistem tata kelola sekolah menengah pertama yang handal ; (3) tersedia dan terjangkau layanan sekolah menengah pertama berbasis IPTEK dan IMTAQ yang berkualitas nasional, berkesetaraan, dan relevan, dengan kebutuhan masyarakat; dan (4) terwujudnya kesejahteraan dan profesionalisme guru sekolah menengah pertama ; (5) meningkatnya IPM Kabupaten Pesisir barat.

D. REKOMENDASI

Master Plan Sekolah menengah pertama ini hanyalah gambaran dari suatu keinginan, cita-cita dan harapan yang dikemas dalam bentuk rencana jangka panjang. *Master Plan* Sekolah menengah pertama ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan arah bagi para pengelola sekolah menengah pertama dalam melaksanakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Pesisir barat, baik pengelola pada tingkat satuan pendidikan, maupun pengelola pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait dalam Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Pesisir barat.

Namun sebaliknya, *Master Plan* Sekolah menengah pertama ini akan menjadi sebuah dokumen yang tidak akan memberikan makna apa-apa, jika tidak ditindaklanjuti dengan pelaksanaannya. Kebijakan dan program sebagaimana terurai dalam Tabel 11 merupakan bidang garapan yang perlu dilaksanakan dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Pesisir barat. Dalam pelaksanaannya akan banyak dipengaruhi oleh tarik-

menarik dan konfigurasi sistem pembagian kekuasaan dan kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Lampung, dan pemerintah Kabupaten Pesisir barat. Ada bidang garapan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, ada bidang garapan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, dan ada bidang garapan yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah Kabupaten Pesisir barat.

Namun demikian, bagi masyarakat Kabupaten Pesisir barat, tidak terlalu mempersoalkan bidang garapan yang menjadi kewenangan untuk melaksanakannya, yang paling penting ialah seluruh bidang garapan pendidikan dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Tim Perumus memandang perlu memberikan rekomendasi, bahwa:

1. Kebijakan dan program, merupakan bidang garapan yang perlu dilaksanakan dalam pembangunan sekolah menengah pertama dan kebudayaan di Kabupaten Pesisir barat. Dalam pelaksanaannya akan banyak dipengaruhi oleh tarik-menarik dan konfigurasi sistem pembagian kekuasaan dan kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Lampung , dan pemerintah Kabupaten Pesisir barat. Ada bidang garapan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, ada bidang garapan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, dan ada bidang garapan yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah Kabupaten Pesisir barat. Namun demikian, bagi masyarakat Kabupaten Pesisir barat, tidak terlalu mempersoalkan bidang garapan

yang menjadi kewenangan untuk melaksanakannya, yang paling penting ialah seluruh bidang garapan sekolah menengah pertama dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya.

2. Diperlukan keputusan dan keberanian politik dari Pemerintah Daerah untuk menjadikan *Master Plan* Sekolah menengah pertama ini sebagai produk kebijakan yang mempunyai ketetapan hukum yang mengikat bagi seluruh aparatur pengelola, pelaksana, masyarakat dan stakeholder sekolah menengah pertama di Kabupaten Pesisir barat. Oleh karena itu, *Master Plan* Sekolah menengah pertama ini semestinya segera ditindaklanjuti menjadi Peraturan Daerah atau serendah-rendahnya ditetapkan sebagai Peraturan Bupati.
3. Namun demikian, sebagaimana pernyataan pada butir pertama di atas, konfigurasi politik pemerintahan akan berpengaruh pada adanya sejumlah bidang garapan, terutama dengan masuknya bidang kesenian dan kebudayaan ke dalam satu naungan pengelolaan di bawah SKPD Pendidikan dan Kebudayaan, sekaligus merupakan langkah maju dalam pembaharuan pembangunan sekolah menengah pertama. Kesenian dan kebudayaan daerah akan semakin maju dan berkembang, seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan bersatunya kembali bidang kesenian dan kebudayaan, akan mencegah aset kesenian dan kebudayaan milik masyarakat dan bangsa diakui negara lain. Oleh karena itu, Bapeda (sebagai pihak perencana), SKPD Pengelola Pendidikan/Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (sebagai pengelola), dan

Dewan Pendidikan (sebagai representasi masyarakat dan stakeholders), agar segera berkoordinasi dengan 'duduk satu meja' untuk membahas berbagai penyesuaian, dan menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) atau Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup), yang kemudian dibahas bersama DPRD; Siapa pun yang menjadi pimpinan perencana di Bappeda, siapa pun yang menjadi pimpinan di SKPD pengelola pendidikan, dan siapa pun yang menjadi pimpinan Dewan Pendidikan, senantiasa mempunyai gerakan yang sama terhadap misi yang tertuang dalam *Master Plan* Sekolah menengah pertama; Dengan demikian, tidak ada lagi istilah 'ganti pimpinan' ganti kebijakan, atau sistem dan kebijakan sudah ditata dan dilaksanakan dengan baik malah berantakan kembali akibat berubahnya kebijakan pimpinan baru.

4. Setelah *Master Plan* Sekolah menengah pertama ini mempunyai ketetapan hukum, pihak SKPD Pengelola Pendidikan berkoordinasi kembali dengan pihak Bappeda dan Dewan Pendidikan untuk melakukan peninjauan ulang terhadap rencana-rencana strategis yang telah dibuatnya, dan kemudian menata ulang rencana strategisnya dengan merujuk pada *Master Plan* Sekolah menengah pertama;
5. Setelah melakukan penyesuaian terhadap rencana strategis pada SKPD pengelola pendidikan, kemudian harus segera pula disosialisasikan dan dipublikasikan kepada seluruh pengelola satuan pendidikan (baik formal maupun nonformal, lembaga-lembaga keswadayaan masyarakat

pengelola kelembagaan satuan pendidikan, dan komunitas-komunitas stakeholders pendidikan di Kabupaten Pesisir barat;

6. Pihak Bappeda sebagai instansi perencana masih mempunyai kewajiban untuk pengamanan dan pengendalian *Master Plan* Sekolah menengah pertama, melalui penyusunan dan penyiapan perangkat sistem pendukung. Oleh karena itu, pihak Bappeda seharusnya menyiapkan pula Prosedur Operasional Standar (norma, instrument, dan prosedur) tata kelola setiap butir program yang termaktub dalam rumusan *Master Plan* Sekolah menengah pertama tersebut
7. Komitmen bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Pesisir barat untuk menumbuhkan kekuatan kolektif (*collective power*) dengan senantiasa menjadikan *Master Plan* Sekolah menengah pertama sebagai rujukan utama dalam merumuskan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi program-program strategis pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan posisi, peran dan kewenangannya.

Demikian sebuah refleksi yang dapat Tim Penulis sampaikan, mudah-mudahan sekecil apa pun naskah ini kami buat, merupakan sumbangan terbesar kami, sebagai salah satu perwujudan partisipasi kami dalam membangun pendidikan di Kabupaten Pesisir barat.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak seluruh warga negara Indonesia dan pelaksanaannya diatur oleh Undang-Undang (UU). Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Pasal 31 yang menyatakan bahwa (1) setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; (2) setiap warga negara wajib mengikuti sekolah menengah pertama dan pemerintah wajib membiayainya; (3) pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka menghidupkan kecerdasan bangsa; (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; serta (5) pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Sejalan dengan pasal 31, pasal 28 C ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Selanjutnya melalui UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SisDikNas) semakin memperkuat dasar hukum pendidikan nasional Indonesia. UU SisDikNas tersebut menyatakan bahwa fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Hanya dengan pendidikan yang berkualitas akan dihasilkan insan cendekia berkualitas yang akan berkontribusi besar terhadap kemajuan bangsa.

Cita-cita luhur untuk membangun masyarakat Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing Internasional telah diupayakan oleh pemerintah, salah satunya dengan rancangan program pembangunan jangka panjang. Dewasa ini rencana pembangunan nasional telah memasuki periode 2017-2020 yang difokuskan pada peningkatan daya saing regional khususnya pada tingkat ASEAN dengan didasarkan pada standar *benchmarking* yang objektif dan realistis. Harapan Indonesia pada akhir periode ini sudah bisa menjadi titik pusat gravitasi sosial ASEAN sebagai sebuah entitas sosio kultural termasuk didalamnya menjadi acuan pendidikan nasional yang berkualitas. Untuk meningkatkan daya saing bangsa dan untuk mencapai target pembangunan nasional di periode 2020-2025, pemerintah telah mencanangkan pencapaian nilai kompetitif secara

internasional pada bidang pendidikan. Berbagai program pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat tentunya harus bersinergi dengan keberhasilan pendidikan pada level daerah baik tingkat provinsi, kota, dan kabupaten. Tolak ukur keberhasilan berada pada bagaimana cara untuk mengejewantahkan berbagai kebijakan strategis di bidang pendidikan baik pada saat proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi yang berkesinambungan sesuai dengan kondisi daerah yang ada agar tercapai kondisi yang dicita-citakan sehingga terwujud insan cerdas Indonesia yang mampu berkompetitif baik pada tingkat lokal, regional, dan global.

Penjelasan akan upaya-upaya pemerintah dan kekuatan hukum yang mengatur kebijakan pendidikan di Indonesia menyiratkan akan betapa pentingnya peran pendidikan dalam membangun peradaban bangsa. Seyogyanya, pendidikan menjadi pilar utama dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsa yang sejahtera dan berkeadilan. Berhasilnya cita-cita pendidikan nasional sangat ditentukan oleh keberhasilan pendidikan mulai dari sekolah menengah pertama ditingkat provinsi, kota, dan kabupaten.

Sekolah menengah pertama merupakan salah satu bagian penting dalam pendidikan nasional. Masa-masa tersebut merupakan masa keemasan bagi pertumbuhan anak, baik fisik maupun psikisnya.

Oleh karenanya, dimasa sekolah menengah pertama, perlu diupayakan kepada anak agar dapat leluasa untuk menerima pengetahuannya dengan sebaik-sebaiknya dan sebenar-benarnya. Lingkungan sekolah adalah tempat yang sangat berpengaruh terhadap potensi perkembangan belajar anak

sekolah menengah pertama ke ranah yang lebih baik seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah terhadap tujuan pendidikan di sekolah menengah pertama maupun di sekolah lanjutan dapat terwujud. Sekolah menengah pertama yang baik akan menentukan pendidikan pada level menengah dan pendidikan tinggi. Selanjutnya, majunya pendidikan dasar baik ditingkat kabupaten, kota, dan provinsi akan menjadi bagian yang integral dan berkontribusi besar terhadap pendidikan nasional di Indonesia.

Kabupaten Pesisir Barat merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Lampung dengan luas area 2.907,23 km² dan jumlah total penduduk hingga tahun 2017 mencapai 155.497 jiwa yang terbagi atas 81.495 jiwa laki-laki dan 74.002 jiwa perempuan. Selanjutnya diantara jumlah total penduduk di Kabupaten Pesisir barat, jumlah penduduk yang berusia 10-14 tahun berjumlah 14.533 dimana idealnya jumlah ini merupakan penduduk yang harus mengikuti pendidikan sekolah menengah pertama atau sederajat di Kabupaten pesisir barat.

Pemerintah melalui Kepres No. 5 Tahun 2006 telah mendorong percepatan penuntasan wajar dikdas 9 tahun dan pemberantasan buta aksara. Menurut Profil Kabupaten Pesisir barat Tahun 2017, Kabupaten Pesisir barat telah berhasil melaksanakan perluasan dan pemerataan kesempatan belajar sekolah menengah pertama melalui program wajib belajar 9 tahun. Di samping pemerataan kesempatan pendidikan, perlu ditinjau sisi lain dari sekolah menengah pertama di Kabupaten Pesisir barat seperti mutu sekolah menengah pertama, ketersediaan sarana prasarana

penunjang sekolah menengah pertama, ketersediaan guru dan staf, kualitas guru sekolah menengah pertama, implementasi kurikulum sekolah menengah pertama, profil lulusan, dan sebagainya. Keberhasilan sekolah menengah pertama tentunya akan sangat ditentukan oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam terkait berbagai sisi penunjang sekolah menengah pertama demi tercapainya sekolah menengah pertama Kabupaten Pesisir barat yang berkarakter, unggul, dan berdaya saing.

Untuk memberikan arahan yang jelas dalam mengatasi permasalahan dan mengeksplorasi potensi sekolah menengah pertama di Kabupaten Pesisir barat, maka dipandang perlu menyusun *Master Plan* Sekolah menengah pertama. Rancangan *Master Plan* dibuat dengan memperhatikan visi dan misi Kabupaten Pesisir barat dan Kebijakan Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang yang menekankan pada tiga pilar yaitu: (1) Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan; (2) Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing; (3) Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik.

Adapun visi pendidikan Kabupaten Pesisir Barat adalah Menuju Kota Modern Berbasis Lingkungan. Pembangunan dan pelaksanaan program pendidikan dasar di Kabupaten Lampung Barat periode 2017-2025 diharapkan dapat menghasilkan insan-insan cerdas dan berkarakter. Agar tujuan Penyusunan *Master Plan* dapat dicapai dengan efektif maka pengembangan program perlu didasarkan pada persoalan-persoalan

prioritas yang secara substantif memiliki peluang lebih besar untuk berkembang baik dari aspek kuantitas maupun kualitasnya. Oleh karena itu, dalam upaya pencapaian visi Kabupaten Pesisir barat (*Pesisir barat Sejahtera dan Berdaya Saing Berlandaskan Iman dan Taqwa*) dipandang perlu mengembangkan program-program yang bersifat inovatif. Dengan demikian, perlu disusunnya kerangka program sekolah menengah pertama yang utuh dan rinci dalam bentuk *Master Plan* Pendidikan Kabupaten Pesisir barat periode 2017 - 2025.

1.2. Tujuan

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka *Master Plan* Pendidikan Dasar Kabupaten Pesisir barat secara khusus bertujuan, sebagai berikut:

- a. Menyusun dokumen Rencana Induk (*Master Plan*) Pendidikan Dasar Kabupaten pesisir barat Tahun 2017-2025 sebagai pedoman pengembangan sekolah menengah pertama di Kabupaten Pesisir barat.
- b. Memberikan pedoman dan arah dalam meningkatkan koordinasi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait dalam Pembangunan Pendidikan.

1.3. Sasaran dan Manfaat Penyusunan *Master Plan* Pendidikan

Sasaran dari penyusunan Buku *Master Plan* Sekolah menengah pertama di Kabupaten Pesisir barat ini adalah

- a Mengetahui mutu dan relevansi sekolah menengah pertama di Kabupaten Pesisir barat

- b Mengetahui berbagai potensi dan sarana pendukung upaya peningkatan sekolah menengah pertama di Kabupaten Pesisir barat
- c Mengetahui faktor-faktor penghambat upaya peningkatan sekolah menengah pertama di Kabupaten Pesisir barat
- d Mengetahui permasalahan prioritas yang akan dicarikan solusinya berkaitan dengan upaya peningkatan sekolah menengah pertama di Kabupaten Pesisir barat
- e Adanya rumusan kebijakan strategis yang dapat dijadikan sebagai solusi alternatif dalam upaya peningkatan sekolah menengah pertama di Kabupaten Pesisir barat
- f Mendeskripsikan kebutuhan-kebutuhan nyata bagi sekolah menengah pertama di Kabupaten Pesisir barat
- g Mendeskripsikan pemerataan dan perluasan sekolah menengah pertama di seluruh wilayah bagian Kabupaten Pesisir barat
- h Mendeskripsikan pemberdayaan peran serta orang tua dan masyarakat dan/atau komite sekolah.

1.4. Keluaran yang Diharapkan

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan penyusunan *Master Plan* Sekolah menengah pertama di Kabupaten Pesisir barat ini, ialah tersusunnya dokumen perencanaan sekolah menengah pertama untuk tahun 2017-2025, yang berisi:

- a. Gambaran permasalahan,tantangan, dan potensi pembangunan sekolah menengah pertama di Kabupaten Pesisir barat hingga tahun 2025
- b. Sasaran manajemen pembangunan sekolah menengah pertama di Kabupaten Pesisir barat hingga tahun 2025
- c. Kebijakan strategis dan arah pembangunan sekolah menengah pertama di Kabupaten Pesisir barat sampai Tahun 2025
- d. Program-program prioritas yang perlu dikembangan untuk peningkatan mutu sekolah menengah pertama di Kabupaten Pesisir barat sampai Tahun 2025.

1.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan penyusunan *Master Plan* Sekolah menengah pertama di Kabupaten Pesisir barat ini meliputi:

1. Analisis tentang kondisi riil perkembangan dan mutu sekolah menengah pertama di Kabupaten Pesisir barat hingga tahun 2017, yang mencakup: (a) profil dan kualitas lulusan, (b) ketersediaan dan kualitas guru sekolah menengah pertama, (c) analisis ketersediaan , (d) ketersediaan sarana prasarana penunjang sekolah menengah pertama, (e) analisis pemerataan kesempatan sekolah menengah pertama
2. Analisis tentang tujuan dan sasaran pembangunan pendidikan dasar di Kabupaten Pesisir barat sampai Tahun 2025

3. Analisis tentang kebijakan strategis dan arah pembangunan sekolah menengah pertama di Kabupaten Pesisir barat hingga tahun 2025
4. Analisis program-program prioritas yang perlu dikembangkan untuk peningkatan mutu sekolah menengah pertama di Kabupaten Pesisir barat hingga tahun 2025.

1.6. Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan Nasional

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa fungsi pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak erta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mewujudkan fungsi dan tujuan tersebut, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembangunan pendidikan nasional ke depan didasarkan pada paradigma membangun manusia Indonesia seutuhnya agar memiliki kapasitas mengaktualisasikan potensi kemanusiaan secara optimal. Tiga hal mendasar potensi kemanusiaan yang perlu dikembangkan, yaitu (1) *afektif* (sikap) yang tercermin pada kualitas keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; (2) *kognitif* (kecerdasan intelektual) yang tercermin pada

kapasitas pikir dan daya intelektualitas untuk menggali dan mengembangkan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (3) *psikomotorik* (keterampilan praktis) yang tercermin pada kemampuan mengembangkan keterampilan dan kompetensi kinestetik.

Untuk mewujudkan pembangunan pendidikan nasional Indonesia yang berkualitas, Departemen Pendidikan Nasional mencanangkan Visi Pendidikan Nasional yaitu "Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah".

Dari Visi yang telah dicanangkan kemudian dibuat beberapa Misi Pendidikan Nasional yang harus dicapai dalam beberapa tahun kedepan yaitu: (a) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; (b) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; (c) meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral; (d) meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan (e) memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan

pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Tujuan strategis yang ingin dicapai oleh Kemdikbud melalui visi pembangunan pendidikan sebagaimana dijelaskan di atas adalah: (a) ketersediaan dan keterjangkauan layanan PAUD berkualitas; (b) ketersediaan, keterjangkauan dan terjaminnya kepastian memperoleh layanan dasar berkualitas; (c) ketersediaan dan keterjangkauan layanan menengah yang berkualitas dan relevan; (d) ketersediaan dan keterjangkauan layanan tinggi berkualitas, relevan dan berdaya saing internasional; (e) ketersediaan dan keterjangkauan layanan orang dewasa berkelanjutan; dan (f) ketersediaan system tata kelola yang handal. Tujuan strategis inilah yang perlu dijabarkan lebih lanjut dalam *Master Plan* Sekolah menengah pertama Kabupaten Pesisir barat sesuai kondisi yang ada di kota ini.

Berdasarkan Visi, Misi, dan Tujuan Pendidikan Nasional, kemudian dapat diperoleh tiga kunci arah penting pendidikan Indonesia yang harus dijadikan orientasi utama untuk menjawab masalah dan tantangan Indonesia ke depan, yaitu pembentukan akhlak atau karakter bangsa, pengembangan ipteks (ilmu pengetahuan teknologi dan seni), dan penyiapan tenaga kerja berbasis sumber daya alam Indonesia.

1.7. Landasan Hukum

Master Plan Sekolah menengah pertama Kabupaten Pesisir barat disusun atas dasar hukum yang kuat. Dasar hukum di samping

memberi aspek legal juga memberikan gambaran tentang komponen apa saja yang harus dipersiapkan dan dikembangkan sesuai dengan standar nasional, regional maupun lokal yang berlaku. Landasan hukum penyusunan *Master Plan* Sekolah menengah pertama Kabupaten Pesisir barat Menuju Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
4. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
6. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
7. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
8. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
9. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
10. UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025
11. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
12. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom;
13. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 tentang Standar isi untuk Satuan Sekolah menengah pertama dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Sekolah menengah pertama dan Menengah;
16. Perda Kabupaten Pesisir barat tentang Sekolah menengah pertama.

1.8. Metode Penyusunan *Master Plan* Sekolah menengah pertama

Kegiatan penyusunan *Master Plan* Sekolah menengah pertama di Kabupaten Pesisir barat ini terdiri dari empat tahap, yakni pengumpulan data, penghimpunan data, analisa data, dan penyimpulan hasil kajian yang akhirnya bermuara pada perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan *Master Plan* sekolah menengah pertama di Kabupaten Pesisir barat.

Jenis data dalam kajian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer kajian terkait dengan data-data yang terfokus pada informasi mengenai kondisi *Master Plan* sekolah menengah pertama di Kabupaten Pesisir barat saat ini serta berbagai faktor penunjang dan berbagai faktor yang menjadi kendala upaya peningkatan *Master Plan* sekolah menengah pertama di Kabupaten Pesisir barat. Sedangkan data sekundernya adalah berupa data atau informasi pendukung yang dapat dijadikan sebagai pengayaan materi atau fokus kajian.

Pengumpulan data primer dilakukan secara langsung kepada beberapa dinas instansi terkait di wilayah Kabupaten Pesisir Barat. Pengumpulan Data Sekunder dilakukan melalui pengumpulan data yang terdapat pada buku, laporan-laporan, jurnal ilmiah ataupun sumber kepustakaan lainnya yang diperoleh dari instansi terkait maupun sumber pustaka lainnya. Data primer dalam hal ini diperlukan untuk mendalami problematika pendidikan hingga mendapatkan langkah solutif yang terbaik dalam kerangka menyusun Rencana Induk Pembangunan (RIP) bidang pendidikan.

BAB II

KONSEP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pada dasarnya konsep atau tinjauan teoritis tentang penyelenggaraan pendidikan meliputi 9 (sembilan) aspek yaitu (1) Dasar, Tujuan, Standar Kompetensi, (2) Kurikulum, (3) Peserta Didik, (4) Ketenagaan, (5) Sarana dan Prasarana, (6) Organisasi Pembiayaan, (8) Manajemen, (9) Peran Serta Masyarakat.

2.1 Dasar Hukum, Tujuan dan Standar Kompetensi

2.1.1 Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar.

- g. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa.
- h. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 054/U/1993 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.
- i. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.
- j. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 055/U/1994 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0386/U/1993 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pendidik di Sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- k. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0126/U/1994 tentang Kurikulum Luar Biasa
- l. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0131/U/1994 tentang Program Paket A dan Paket B
- m. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0296/U/1996 tentang Penugasan Pendidik Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- n. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 020/U/1998 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.
- o. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal

Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah

- p. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 055/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga.

2.1.2 Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan

Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) memiliki tujuan untuk memberi bekal kemampuan dasar yang merupakan perluasan serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di sekolah dasar, untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat dan warga Negara sesuai dengan perkembangannya, serta mempersiapkan peserta didik untuk hidup dalam masyarakat, dan/atau mengikuti pendidikan menengah.

2.1.3 Standar Kompetensi Peserta Didik

Secara umum, standar minimal pendidikan mensyaratkan bahwa peserta didik untuk tingkat sekolah menengah pertama diharapkan memiliki:

- a. Akhlak dan Budi Pekerti yang Luhur
- b. Memiliki sikap, perilaku, dan kemampuan dasar yang optimal sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya
- c. Mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya

- d. Pengetahuan dan keterampilan dasar sesuai dengan kurikulum yang berlaku
- e. Kesehatan dan kebugaran, apresiasi seni, dan dasar-dasar olahraga sesuai dengan bakat dan minatnya
- f. Kemampuan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

2.2 Kurikulum

Pengertian kurikulum secara resmi adalah pengertian yang tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I mengenai Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 19 maupun Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005 Bab I ayat 1 pasal 13 menyatakan bahwa kurikulum diartikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang diinginkan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dari pengertian ini jelas bahwa kurikulum dianggap sebagai dasar bagi pengajar untuk mengembangkan proses belajar di sekolah.

Selain itu juga dalam pasal 36 ayat 2 menyatakan bahwa kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Pengembangan kurikulum secara diversifikasi dimaksudkan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan pada satuan pendidikan dengan kondisi dan kekhasan potensi yang ada di daerah. Jadi, kurikulum yang dicantumkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tersebut adalah gabungan

antara kutub mengajar pendidik, dan kutub belajar peserta didik, walaupun dalam kenyataan jelas tujuannya saling melengkapi. Pengertian kurikulum tersebut akan membawa konsekuensi pada pengembangan dokumen kurikulum, sejak berlakunya PP No. 32 Tahun 2013 kurikulum untuk masing-masing sekolah disesuaikan dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Komponen kurikulum yang demikian menempatkan peserta didik dalam posisi yang sangat penting. Dalam komponen pengalaman belajar, aktivitas peserta didik sebagai pelaku belajar dijadikan dasar. Apa yang dirumuskan dalam tujuan dirancang agar dapat dicapai melalui aktivitas peserta didik.

Peran pendidik sebagai pengembang kurikulum jauh lebih jelas. Pendidik harus membuat keputusan mengenai berbagai hal secara profesional sehingga proses belajar peserta didik dapat terlaksana secara maksimum. Untuk itu, pendidik harus membuat keputusan mengenai alokasi waktu yang ditentukan, strategi dan metode mengajar yang digunakan sehingga proses bantuan terhadap kegiatan belajar peserta didik dapat diberikan secara maksimal.

Selain metode mengajar dan alat evaluasi, pendidik harus pula menentukan sumber belajar yang akan digunakan peserta didik. Hal ini memberi keleluasaan bagi pendidik untuk menyesuaikan kondisi sekolah dan peserta didik di sekolahnya dengan ketersediaan sumber belajar yang ada. Artinya, pendidik tidak saja memiliki keleluasaan untuk memanfaatkan sumber-sumber belajar yang tersedia di lingkungan sosial, budaya, dan alam

tetapi juga dalam menentukan sumber belajar tradisional seperti buku pelajaran bagi peserta didik dan buku-buku sumber bagi pendidik. Posisi penting yang dipunyai pendidik memberikan tuntutan profesional baru bagi pendidik. Posisi penting pendidik tersebut tidak saja menggambarkan orientasi baru dalam aspek teknis kurikulum tetapi orientasi baru dalam cara kurikulum menjawab kemajemukan masyarakat Indonesia.

Dengan posisi penting itu pendidik dapat menyelesaikan proses pendidikan dengan apa yang dimiliki peserta didik dan kondisi eksternal peserta didik sehingga keberadaan sekolah dalam suatu lingkungan sosial budaya tidak lagi dirasakan sebagai suatu yang asing.

Muatan lokal dapat berupa bahan kajian/pelajaran atau mata pelajaran yang diadakan oleh sekolah atau daerah yang bersangkutan, misalnya kesenian, kerajinan, berkebun, bahasa daerah dan sebagainya sesuai dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan.

Kurikulum sekolah pada saat ini lebih maju dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya, karena dalam kurikulum sekolah memiliki kadar kelenturan yang lebih besar dibandingkan dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Pemberian porsi kurikulum kepada masing-masing, pada tahap selanjutnya merupakan salah satu upaya perwujudan desentralisasi dalam dunia pendidikan. Selain itu, daerah/sekolah berwenang untuk menjabarkan kurikulum yang berlaku secara nasional. Untuk itulah pentingnya pendidik dalam mengembangkan kurikulum harus mengacu pada standar nasional pendidikan.

Kurikulum secara umum berisikan susunan program pengajaran, materi pelajaran, strategi belajar-mengajar, bahasa pengantar, penilaian dan bimbingan belajar.

2.2.1 Strategi Belajar Mengajar

a. Lama Pendidikan

Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) berlangsung selama tiga tahun yang dibagi ke dalam sistem kelas sehingga terdapat kelas VII sampai kelas IX.

b. Alokasi waktu

Dalam penyelenggaraan pendidikan digunakan sistem semester, yang membagi waktu belajar satu tahun menjadi dua semester. Jumlah waktu belajar setiap tahun ajaran untuk sekolah menengah pertama yaitu sebanyak 1680 jam/tahun atau 42 jam/minggu. Satu jam pelajaran adalah 45 menit, tersebut di dalamnya waktu bagi penyelenggaraan penilaian kemajuan dan hasil belajar peserta didik.

c. Sistem Pengajaran

Sistem pengajaran pada tingkat SMP yaitu:

1. Kegiatan belajar mengajar diarahkan untuk mengembangkan kemampuan psikis, fisik dan kemampuan penyesuaian social peserta didik secara utuh
2. Pada tingkat SMP dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau

memasuki kehidupan dalam masyarakat atau lapangan kerja, perlu disesuaikan pengembangan sikap bertanggung jawab, berani berpendapat dan kemandirian dalam mengambil keputusan

3. Penyajian pelajaran memanfaatkan berbagai sarana penunjang disekolah seperti perpustakaan, alat peraga, lingkungan alam dan budaya serta narasumber dalam masyarakat
4. Menggunakan sistem pendidik kelas dan untuk mata pelajaran tertentu juga dimungkinkan menggunakan sistem pendidik mata pelajaran sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pembelajaran.

Aktivitas peserta didik terdiri atas aktivitas nyata antara lain menulis kalimat, membuat produk dan sebagainya dan aktivitas tersembunyi yang tidak dapat diamati antara lain berfikir dan tanggapan terhadap pengalaman. Aktivitas ini meliputi 3 ranah:

- a) Kognitif, yaitu proses mengetahui dan berfikir.
- b) Afektif atau perasaan dan emosi
- c) Psikomotor yaitu keterampilan.

Hasil kegiatan belajar mengajar (KBM) yang diharapkan (*outcome*) merupakan tujuan pendidikan, antara lain aktifitas pengembangan:

- 1) Pengetahuan (*knowledge*)
- 2) Keterampilan (*tool skill development*)
- 3) Proses berfikir (*thinking process/cognitive skills*)
- 4) Belajar mandiri (*self direction*)
- 5) Sikap sosial (*social effectiveness*)

6) Sikap positif dan ingat terhadap pendidikan (*positive attitudes and interest*).

d. Bahasa Pengantar

Bahasa pengantar dalam penyelenggaraan pembelajaran menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Daerah dapat digunakan untuk muatan lokal dan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan di sekolah dan sejauh diperlukan, sedangkan bahasa asing dapat digunakan sebagai media komunikasi di sekolah yang mampu dan memerlukannya.

e. Penilaian

Untuk mengetahui tingkat kemajuan dan keberhasilan belajar peserta didik dilakukan penilaian hasil belajar secara berkelanjutan melalui ulangan/ujian harian dan tugas-tugas mingguan, bulanan, maupun penilaian akhir tahun pelajaran, serta penilaian pada akhir satuan pendidikan. Penilaian dengan menggunakan standar nasional dapat dilakukan dalam rangka mengetahui gambaran mutu hasil belajar peserta didik. Beberapa jenis penilaian yaitu:

1. Evaluasi formatif

Evaluasi formatif merupakan evaluasi yang bertujuan untuk memantau kemajuan belajar peserta pendidikan dan pelatihan pada tahap tertentu selama proses belajar berlangsung. Evaluasi formatif berfungsi sebagai umpan balik (feed back) terhadap pembelajaran. Evaluasi formatif dapat dilaksanakan dalam beberapa bentuk, antara

lain: *pre test* (tes awal) bertujuan untuk mengukur minat dan sikap peserta pendidikan dan pelatihan. *Placement test* (tes penempatan) bertujuan untuk menentukan pilihan bidang keahlian atau program keahlian. Sedangkan tes diagnostik adalah tes untuk mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik.

2. Evaluasi Sumatif

Pada dasarnya evaluasi sumatif dilaksanakan pada akhir satuan waktu (semester) program pendidikan dan pelatihan. Evaluasi ini digunakan untuk menilai keaktifan seluruh program pendidikan dan pelatihan, evaluasi sumatif adalah pengukuran penilaian ketuntasan pencapaian hasil belajar peserta pendidikan dan pelatihan. Berdasarkan waktu pelaksanaannya, evaluasi sumatif dilaksanakan dalam bentuk :

a) Sumatif akhir kompetensi/sub kompetensi

Tes sumatif akhir kompetensi/sub kompetensi dilakukan untuk mengukur dan menilai setiap kompetensi/sub kompetensi yang telah dipelajari oleh setiap peserta pendidikan dan pelatihan secara utuh pada semester gasal. Hasil tes ini dicatat dalam kartu hasil studi (KHS) atau dalam bentuk lainnya seperti laporan pendidikan (rapor).

b) Sumatif akhir tahun pelajaran

Tes sumatif akhir tahun pembelajaran dilakukan untuk mengukur dan menilai setiap kompetensi/sub kompetensi yang telah

dipelajari dan dicapai oleh peserta pendidikan atau pelatihan pada semester genap. Hasil tes ini dicatat dalam KHS dan dilaporkan dalam bentuk rapor. Bersama-sama hasil percobaan nilai belajar lainnya hasil tes akhir tahun pelajaran diformasikan untuk menerbitkan paspor kompetensi kejuruan (*skill passport*) yang disahkan oleh *quality control* (QC).

c) Sumatif akhir tahun pendidikan

Tes sumatif akhir tahun pendidikan dilakukan dalam bentuk ujian akhir sekolah yang penyelenggaraannya dibuat sendiri.

d) Bimbingan Belajar

Untuk mencapai kemampuan dan standar minimal yang ditetapkan sesuai kurikulum yang berlaku serta membantu mengatasi kesulitan belajar, dapat dilaksanakan bimbingan belajar kepada peserta didik melalui program perbaikan oleh pendidik kelas atau pendidik khusus (bila dimungkinkan). Bimbingan belajar dapat juga diberikan kepada peserta didik yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa.

2.3. Peserta Didik

Peserta didik merupakan satu komponen terpenting yang harus diperhitungkan dalam penyelenggaraan program pendidikan, karena program-program pendidikan yang dikembangkan sesungguhnya untuk memenuhi kebutuhan belajar anak didik. Hal sederhana yang sering muncul berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan pada komponen anak didik

adalah masalah pemeratan kesempatan dalam mendapatkan pelayanan pendidikan sebagai salah satu tujuan yang harus dicapai. Namun demikian bukan berarti tidak terdapat masalah dalam hal ini, dengan populasi penduduk yang besar dibanding dengan kemampuan pemerintah yang terbatas, maka upaya pemerataan pendidikan ini sering harus berhadapan dengan masalah efisiensi pendidikan, sehingga secara sepintas keduanya seolah-olah tidak dapat berjalan seiring, atau dengan kata lain upaya memperluas pendidikan akan terhalang oleh upaya efisiensi pendidikan dan sebaliknya usaha mempertinggi efisiensi akan mengorbankan upaya memperluas pemerataan pendidikan.

2.4. Ketenagaan

2.4.1 Tenaga Pendidik

Kualitas program pendidikan akan sangat tergantung pada kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang dimiliki, baik yang menyangkut pimpinan, tenaga pendidik serta SDM lainnya yang langsung ataupun tidak langsung berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan. Persyaratan tenaga pendidikan diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah maupun Keputusan Menteri.

2.4.2 Tenaga Kependidikan Bukan Pendidik

Yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah sumber daya manusia (SDM) di sekolah yang tidak terlibat secara langsung dalam

pelaksanaan KBM tetapi sangat mendukung keberhasilannya dalam kegiatan administrasi sekolah. Adapun jenis tenaga kependidikan meliputi:

- 1) Kepala Sub bagian Tata Usaha bertugas membantu kepala sekolah dalam kelancaran kegiatan administrasi (urusan surat menyurat, ketata-usahaan) sekolah yang berkaitan dengan KBM
- 2) Pelaksanaan kegiatan kepegawaian bertugas membantu kepala Subbagian tata usaha dalam kegiatan atau kelancaran kepegawaian, baik tenaga pendidik maupun bukan pendidik yang bertugas di sekolah
- 3) Pelaksana urusan keuangan bertugas membantu mengelola keuangan sekolah
- 4) Pelaksanaan urusan perlengkapan/logistik bertugas untuk membantu mengelola perlengkapan/logistik sekolah
- 5) Pelaksana sekretariat dan kepesertadidikan membantu Kepala Subbagian Tata Usaha dalam mengelola sekretariat dan ke peserta Penjaga sekolah bertugas memelihara dan memperbaiki fasilitas sekolah berupa bangunan, kelistrikan, peralatan praktek dan lainnya.

2.5 Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana pendidikan adalah kelengkapan dan peralatan yang secara langsung dipergunakan untuk menunjang dalam proses belajar mengajar. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam pembelajaran. Disamping itu diharapkan tersedianya alat atau fasilitas belajar yang memadai secara

kualitatif, kuantitatif dan relevan dengan kebutuhan juga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk proses belajar mengajar oleh peserta didik maupun pengajar.

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana dan sarana seperti perabot (meja, kursi), peralatan pendidikan, buku dan sumber pembelajaran lainnya, perlengkapan lainnya, lahan, ruang belajar, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, perpustakaan, laboratorium, tempat bermain/fasilitas olah raga, tempat upacara, ruang kegiatan peserta didik, ruang ibadah, instalasi daya dan jasa serta ruang atau tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

2.6 Organisasi Sekolah

Sekolah merupakan suatu organisasi kerja yang diselenggarakan secara sengaja, sistematis dan terarah. Sebagai suatu organisasi kerja pada dasarnya merupakan total sistem yang mengemban volume kerja sebagai konsekuensi dari suatu tujuan yang hendak dicapai.

Pembagian kerja dalam bentuk pembedangan kerja melalui unit kerja harus mampu menempuh seluruh volume kerja yang ada di lingkungan sekolah. Hubungan kerja antar unit kerja dalam suatu organisasi disebut hubungan kerja intern. Di lingkungan sekolah berarti pembedangan dan pembagian kerja sebagai kegiatan pengendalian yang memungkinkan terjalinnya kerjasama antara Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Wali

Kelas, Pendidik, Tenaga non Kependidikan maupun Peserta Didik. Pengorganisasian seperti ini mengandung makna bahwa setiap personal harus jelas dari siapa perintah atau pekerjaan diterimanya dan kepada siapa mempertanggung jawabkannya setelah dilaksanakan pekerjaan tersebut.

Organisasi sekolah akan berfungsi dengan baik bilamana disusun pola yang memungkinkan kerjasama antar setiap unit kerja dan setiap personal di lingkungan tersebut. Dalam hubungan ini peranan manajemen administratif melalui tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, kontrol dan evaluasi serta komunikasi yang dikembangkan oleh pimpinan sebagai administrator mewujudkan kerja yang efektif dan terarah pada suatu tujuan tertentu dan ini akan berhasil bilamana ditunjang dengan struktur organisasi yang memungkinkan berlangsungnya kerjasama antar unit kerja dan antar personal.

Pengembangan organisasi sekolah akan berjalan baik jika kepala sekolah sebagai pimpinan juga bertindak sebagai manajer yang profesional, sehingga tercipta pola hubungan yang saling terbuka dan mengedepankan kerjasama fungsional.

2.7 Pembiayaan Sekolah

Pembiayaan sekolah merupakan salah satu penunjang penting dalam kegiatan pendidikan. Pembiayaan pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata saja tetapi menjadi tanggung jawab masyarakat, karena dalam penyelenggaraan pendidikan tidak semua beban dapat ditanggulangi

oleh pemerintah. Anggaran/pembiayaan untuk penyelenggaraan pendidikan berasal dari Pemerintah Pusat, Propinsi ataupun Kabupaten yang mutlak setiap saat dan digunakan untuk pembiayaan gaji tenaga pengajar dan tunjangan lainnya, pengadaan sarana dan prasarana, gedung, dan lainnya sedangkan yang berasal dari partisipasi masyarakat digunakan sebagai penunjang kegiatan pendidikan.

a. Sumber Pembiayaan

Untuk mendukung kelancaran kegiatan sekolah terdapat beberapa sumber pembiayaan antara lain:

- 1) Pemerintah (Pemerintah Pusat, Propinsi ataupun Kabupaten) yang wajib menyediakan anggaran rutin dan pembangunan sekolah negeri dan memberikan subsidi kepada sekolah swasta
- 2) Masyarakat termasuk didalamnya dana dari orang tua peserta didik dan dunia usaha
- 3) Sumber lain, yang berasal dari hibah, pinjaman, dari donator, dan dana unit produksi sekolah.

b. Komponen yang dibiayai

- 1) Satuan Biaya
- 2) Penentuan Biaya
- 3) Pengelolaan Biaya
- 4) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS)
- 5) Pemeriksaan Pembiayaan
- 6) Pelaporan Pembiayaan.

2.8 Manajemen Sekolah

- a. Setiap Sekolah menerapkan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Dalam sistem ini kepala sekolah bersama dewan pendidik dan warga belajar lainnya secara mandiri, transparan, dan bertanggung jawab melaksanakan program sekolah untuk mencapai visi dan misi serta target mutu yang diamanatkan oleh masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan terhadap pendidikan di sekolah yang bersangkutan.
- b. Dalam hubungan dengan manajemen sekolah, setiap sekolah:
 - Merumuskan visi dan misi yang jelas serta terarah sesuai dengan visi dan misi dan standar mutu pendidikan nasional
 - Merencanakan program sekolah
 - Melaksanakan program yang telah ditetapkan
 - Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program
 - Menyusun laporan dan mengevaluasi keberhasilan program
 - Merumuskan program baru sebagai kelanjutan dari program yang telah dilaksanakan.
- c. Pengawasan dan pengendalian mutu pelaksanaan kegiatan di sekolah telah dilakukan secara internal dan eksternal secara transparan dengan prinsip akuntabilitas publik.
- d. Evaluasi pelaksanaan program sekolah, evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas penyelenggara pendidikan, pelaksanaan kurikulum, dan penilaian kinerja sekolah

sebagai suatu kesatuan secara menyeluruh. Pada waktu-waktu tertentu dilakukan penilaian input, proses, output, dan outcome pendidikan serta manajemen sekolah sebagai bagian dari kegiatan akreditasi sekolah.

Sekolah sebagai satuan pendidikan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan bagi peserta didik mempunyai peranan kunci untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional umumnya dan tujuan pendidikan dasar khususnya. Agar peranan ini dapat terlaksana secara efektif dan efisien, maka manajemen yang professional mutlak diperlukan. Manajemen atau pengelolaan merupakan suatu instrument untuk mengoptimalisasikan berfungsinya komponen-komponen dari suatu sistem secara terencana, terorganisir, terarah, terkoordinir, terkontrol atau terkendali serta terevaluasi efektivitasnya dan efisiensinya.

Jadi manajemen pada sekolah dimaksudkan agar komponen-komponen sistem persekolahan dapat berfungsi secara optimal untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Maka dari itu melihat efektivitas dan efisiensi pendidikan yang dilaksanakannya menjadi penting. Masalah efisiensi dan efektivitas pengelolaan ini merupakan masalah yang sangat penting karena sumberdaya untuk pembangunan pendidikan sangat terbatas, sementara masalah yang dihadapi semakin rumit dan kompleks.

Dilihat dari struktur pengelolaannya, sekolah dasar dan menengah dikelola oleh Dinas Pendidikan Nasional beserta jajarannya. Secara mikro, yaitu pada tingkat satuan pendidikan atau sekolah, dikelola oleh Kepala

Sekolah. Gambaran tentang struktur pengelolaan sekolah tersebut menunjukkan bahwa betapa kompleksnya masalah manajemen/pengelolaan sekolah tersebut.

2.9 Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan pendidikan agar kondisi sekolah dapat memenuhi standar minimal dan peningkatan mutu pendidikan dapat dicapai.

Dalam penyelenggaraan pendidikan sekolah di era otonomi daerah sekarang ini, peran masyarakat sangat diperlukan keterlibatannya. Hal ini sejalan dengan tujuan UU No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkembangkan prakarsa dan kreativitas, dan meningkatkan peran serta masyarakat termasuk perhimpunan dan peningkatan sumber dana dalam penyelenggaraan pendidikan.

Selain itu juga seperti yang tercantum dalam UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 55 ayat 1 yaitu masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial dan budaya untuk kepentingan masyarakat dan juga dikuatkan oleh PP No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok organisasi atau Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM) dan dunia usaha (swasta). Peran serta perseorangan, kelompok dan dunia usaha (swasta) dalam pendidikan akan lebih efektif karena secara langsung dapat dinikmati oleh masyarakat itu sendiri, meskipun ada kecenderungan peran serta tersebut terbatas pada lingkup daerah kabupaten dan kota yang bersangkutan.

Dalam konteks desentralisasi pendidikan era otonomi daerah, masyarakat mempunyai fungsi kesejajaran dengan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan. Karena itu keterlibatan dan partisipasi masyarakat secara penuh harus dimaksimalkan, baik dalam perencanaan, pengelolaan, pengembangan maupun pengawasan proses KBM di sekolah. Pada setiap sekolah dapat dibentuk organisasi seperti BP3/Badan Peran Serta Masyarakat/Komite Sekolah/Dewan Sekolah atau organisasi dengan nama lain, bertujuan:

- a. Membantu kelancaran penyelenggaraan pendidikan di sekolah
- b. Memelihara, meningkatkan dan mengembangkan sekolah
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Secara institusi, Komite Sekolah merupakan wahana untuk mengakomodir dan mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Para pihak yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan pendidikan harus dapat menginisiasi setiap persoalan pendidikan yang sedang dan akan terjadi, dengan mencari solusi penyelesaiannya.

Masyarakat pada umumnya telah merindukan sekolah-sekolah bermutu, yang bisa menghasilkan lulusan yang berkualitas, sehingga dapat bersaing dengan sekolah-sekolah lain. Menciptakan sekolah bermutu tidak mudah, namun demikian jika semua elemen masyarakat mendukung sepenuhnya untuk terciptanya sekolah tersebut, maka sangat memungkinkan impian itu dapat diwujudkan dan menjadi sekolah pilihan utama bagi masyarakat.

BAB III

KARAKTERISTIK WILAYAH DAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN PESISIR BARAT

3.1. Kondisi Umum Wilayah Kabupaten Pesisir Barat

3.1.1. Administrasi Pemerintahan Daerah

Sesuai dengan UU No 17 Tahun 2014, pemerintah daerah merupakan koordinator semua instansi sektoral dan kepala daerah yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Pembinaan dan pengembangan wilayahnya. Pembinaan dan pengembangan tersebut mencakup segala bidang kehidupan dan bidang pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Pesisir Barat sebagai kesatuan wilayah pemerintahan, telah memiliki arah dan tujuan tertentu yang harus dicapai melalui pembangunan terpadu, termasuk dibidang pendidikan. Hal itu berarti bahwa rencana pembangunan pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat tidaklah berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan kabupaten maupun provinsi secara keseluruhan. Oleh karena itu, segala usaha dan kegiatan pembinaan dan pengembangan dibidang pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat harus berada dibawah koordinasi atau sepengetahuan pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keserasian dan keterkaitannya dengan sektor lain dalam

rangka mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Kabupaten Pesisir Barat terdiri dari 11 (Sebelas) kecamatan, yakni: (1) Lemong, (2) Pesisir Utara, (3) Pulau Pisang, (4) Karya Penggawa, (5) Way Krui, (6) Pesisir Tengah, (7) Krui Selatan, (8) Pesisir Selatan, (9) Ngambur, (10) Bengkunt, dan (11) Bengkunt Belimbing.

3.1.2. Demografi

Berdasarkan UUD 1945, pendidikan diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang salah satu tujuannya adalah meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan penduduk secara optimal. Dengan demikian, penduduk baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok masyarakat merupakan sasaran kegiatan pembangunan pendidikan. Oleh karena itu, aspek-aspek kependudukan, dinamika penduduk dan masalah yang ditemui dalam masyarakat akan sangat mempengaruhi pendidikan.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Pesisir Barat (2016), Kabupaten Pesisir Barat dihuni jumlah total penduduk hingga tahun 2016 mencapai 155.497 jiwa yang terbagi atas 81.495 jiwa laki-laki dan 74.002 jiwa perempuan. Pada tahun 2014 (Sensus Penduduk 2014) penduduk Kabupaten Pesisir Barat adalah sebanyak 148.412 jiwa, tahun 2015 jumlah penduduk meningkat menjadi 149.480, pada tahun 2016 jumlah penduduk bertambah menjadi 155.497. Ini menunjukkan ada tren peningkatan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Lampung Barat antara tahun 2014-

2016. Laju pertumbuhan jumlah penduduk ini disebabkan faktor kelahiran yang cukup signifikan di Kabupaten Pesisir Barat.

Jika dilihat dari sebaran umur penduduk maka dapat dikelompokkan yaitu kelompok umur 0-4 tahun, 5-9 tahun, 10-14 tahun, 15-19 tahun, 20-24 tahun, 25-29 tahun, 30-34 tahun, 35-39 tahun, 40-44 tahun, 45-49 tahun, 50-54 tahun, 55-59 tahun, 60-64 tahun, 65-69 tahun, 70-74 tahun dan 75+ tahun. Seperti halnya Sensus Penduduk 2014, komposisi penduduk menurut kelompok umur dari hasil Sensus Penduduk 2015 tidak jauh berbeda, dimana penduduk banyak mengelompok pada kelompok umur 0-4 tahun dan 5-9 tahun. Dengan demikian dapat diduga bahwa angka kelahiran di Kabupaten Pesisir Barat terbilang tinggi. Jika dilihat dari sebaran usia wajib belajar pendidikan dasar maka di peroleh bahwa jumlah angka kelahiran di Kabupaten Pesisir Barat cukup besar sehingga hal ini juga perlu di pertimbangkan untuk menyusun rencana pendidikan dasar di Kabupaten Pesisir Barat.

Tabel 1 Jumlah Penduduk Provinsi Lampung Menurut Kelompok Umur Tahun 2016

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	380.269	358.534	738.803
2	05-Sep	377.555	355.127	732.682
3	Okt-14	394.779	373.394	768.173
4	15-19	356.165	328.328	684.493
5	20-24	333.838	322.273	656.111
6	25-29	348.630	333.194	681.824

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
7	30-34	338.364	319.999	658.363
8	35-39	301.363	284.379	585.742
9	40-44	263.323	247.760	511.083
10	45-49	224.107	216.634	440.741
11	50-54	185.449	163.443	348.892
12	55-59	138.714	115.078	253.792
13	60-64	90.035	87.911	177.946
14	65-69	68.834	67.487	136.321
15	70-74	51.852	54.736	106.588
16	75-79	30.378	30.780	61.158
17	80-84	19.782	19.682	39.464
18	85-89	8.319	7.046	15.365
19	90-94	3.254	3.704	6.958
20	95+	1.612	2.294	3.906
Jumlah		3.916.622	3.691.783	7.608.405

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Sensus 2010

3.2. Kondisi Pendidikan Dasar Kabupaten Pesisir Barat

3.2.1. Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA)

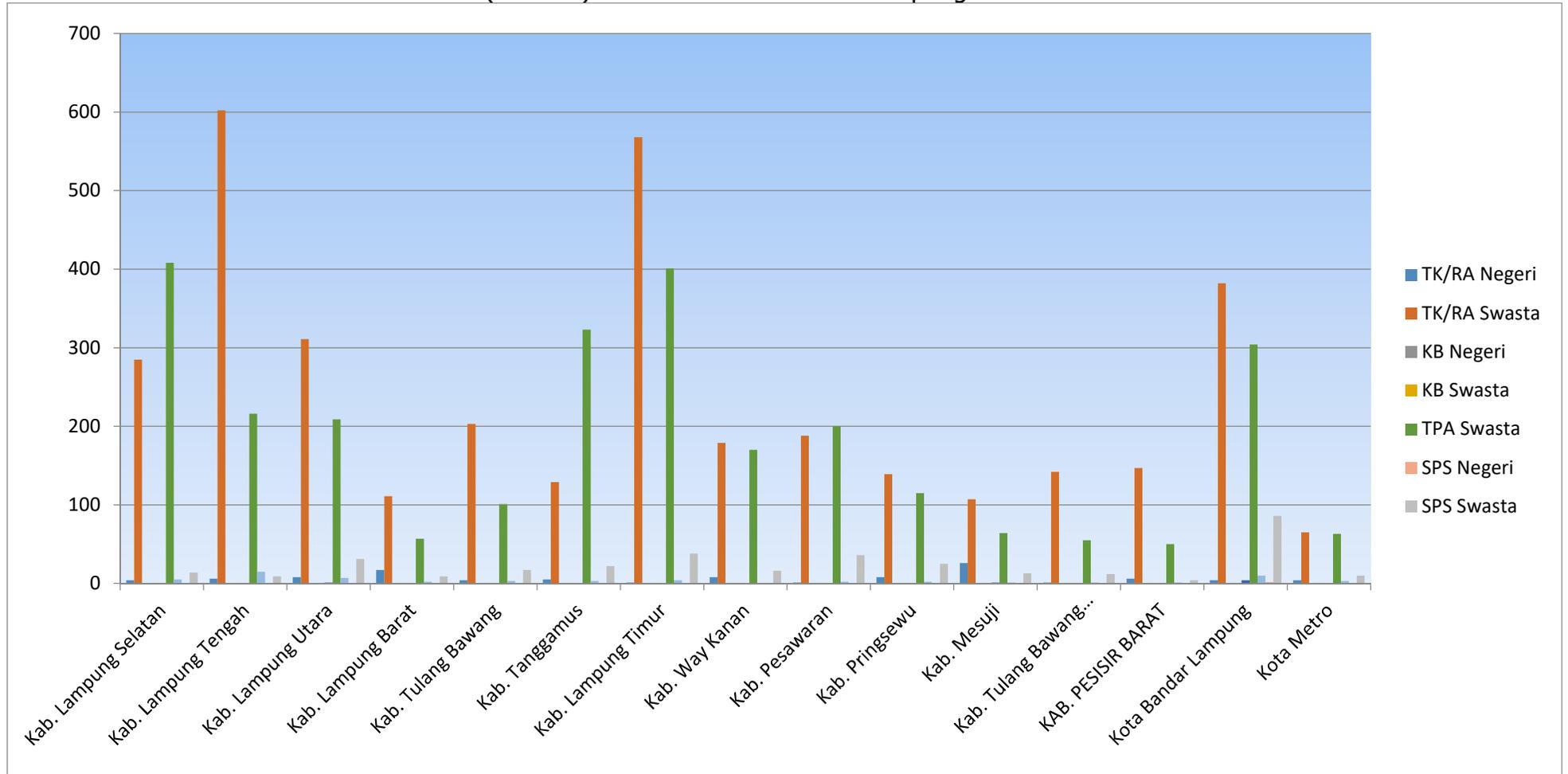
Provinsi Lampung memiliki 6.806 sekolahsatuan Pendidikan (sekolah) Anak Usia Dini, yang terdiri dari TK/RA Negeri sebanyak 103 sekolah dan Swasta sebanyak 2,3.558 sekolah , KB Negeri sebanyak 6 sekolah dan KB Swasta sebanyak 2.736 sekolah, TPA Swasta sebanyak 59 TPA, serta Sekolah SPS Negeri sebanyak 2 dan Swasta sebanyak 342 Sekolah yang tersebar di 15 Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung. Dimana Kabupaten Lampung Timur merupakan kabupaten dengan jumlah sekolah terbanyak untuk tingkat PAUD yaitu sebanyak 1.012 sekolah yang terdiri dari TK/RA Negeri sebanyak 1 sekolah dan TK/RA Swasta sebanyak 568 Sekolah, KB Swasta sebanyak 401 Sekolah, TPA Swasta sebanyak 4 TPA, serta SPS Swasta sebanyak 38 Sekolah. Selain itu, Kota Metro adalah Kota dengan jumlah sekolah tingkat Satuan Pendidikan (Sekolah) Anak Usia Dini paling sedikit yaitu hanya 145 sekolah yang terdiri dari TK/RA Negeri sebanyak 4 dan Swasta sebanyak 45 sekolah, KB Swasta sebanyak 63 sekolah, TPA Swasta sebanyak 3 TPA serta SPS Swasta sebanyak 10 sekolah. Sedangkan untuk Kabupaten Pesisir barat sendiri merupakan Kabupaten dengan jumlah sekolah Tingkat satuan Pendidikan (sekolah) Anak Usia Dini sedikit keempat dengan jumlah sekolah sebanyak 208 sekolah yang terdiri dari TK/RA Negeri sebanyak 6 sekolah dan TK/RA Swasta sebanyak 147 sekolah, KB Swasta sebanyak 50 sekolah, TPA Swasta sebanyak 1 TPA, serta SPS Swasta sebanyak 4 Sekolah.

Tabel 2 Jumlah Data Satuan Pendidikan (Sekolah) Anak Usia Dini Provinsi Lampung

No.	KABUPATEN/KOTA	TK/RA			KB			TPA			SPS			TOTAL
		N	S	JML	N	S	JML	N	S	JML	N	S	JML	
	TOTAL	103	3,558	3,661	6	2,736	2,742	0	59	59	2	342	344	6,806
1	Kab. Lampung Selatan	4	285	289	0	408	408	0	5	5	0	14	14	716
2	Kab. Lampung Tengah	6	602	608	0	216	216	0	15	15	0	9	9	848
3	Kab. Lampung Utara	8	311	319	1	209	210	0	7	7	0	31	31	567
4	Kab. Lampung Barat	17	111	128	0	57	57	0	2	2	0	9	9	196
5	Kab. Tulang Bawang	4	203	207	0	101	101	0	3	3	0	17	17	328
6	Kab. Tanggamus	5	129	134	0	323	323	0	3	3	0	22	22	482
7	Kab. Lampung Timur	1	568	569	0	401	401	0	4	4	0	38	38	1,012
8	Kab. Way Kanan	8	179	187	0	170	170	0	0	0	0	16	16	373
9	Kab. Pesawaran	1	188	189	0	200	200	0	2	2	0	36	36	427
10	Kab. Pringsewu	8	139	147	0	115	115	0	2	2	0	25	25	289
11	Kab. Mesuji	26	107	133	1	64	65	0	1	1	0	13	13	212
12	Kab. Tulang Bawang Barat	1	142	143	0	55	55	0	1	1	0	12	12	211
13	Kab. Pesisir Barat	6	147	153	0	50	50	0	1	1	0	4	4	208
14	Kota Bandar Lampung	4	382	386	4	304	308	0	10	10	2	86	88	792
15	Kota Metro	4	65	69	0	63	63	0	3	3	0	10	10	145

Sumber data : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016

Gambar 1. Jumlah Data Satuan Pendidikan (Sekolah) Anak Usia Dini Provinsi Lampung 2016



Jumlah Data Satuan Pendidikan (Sekolah) Anak Usia Dini Kabupaten Pesisir Barat Per Kecamatan

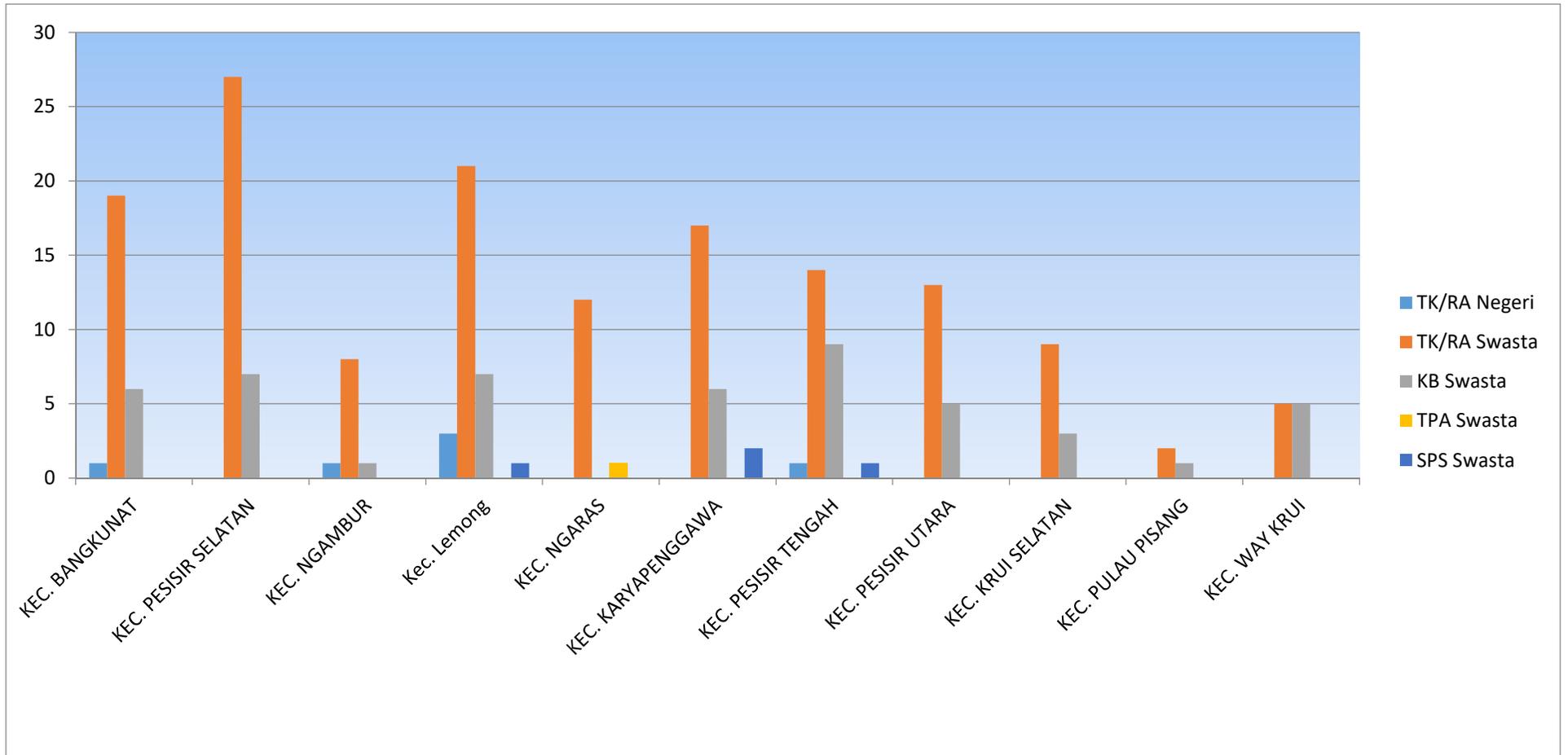
Kabupaten Pesisir Barat Barat memiliki 208 Sekolah untuk tingkat Satuan Pendidikan (Sekolah) Anak Usia Dini yang terdiri dari TK/RA negeri sebanyak 6 sekolah dan TK/RA Swasta sebanyak 147 sekolah, KB Swasta sebanyak 50 sekolah, TPA Swasta sebanyak 1 TPA, serta SPS Swasta sebanyak 4 Sekolah yang tersebar di 11 Kecamatan. Dimana kecamatan Pesisir Selatan merupakan kecamatan dengan jumlah Sekolah untuk tingkat Satuan Pendidikan (Sekolah) Anak Usia Dini terbanyak di Kabupaten Pesisir Barat yaitu TK/RA Swasta sebanyak 27 sekolah, serta KB Swasta sebanyak 7 sekolah. Sedangkan untuk kecamatan dengan jumlah Sekolah untuk tingkat Satuan Pendidikan (Sekolah) Anak Usia Dini yang sedikit adalah Kecamatan Pulau Pisang 3 sekolah. Kecamatan Pulau Pisang dengan jumlah sekolah sebanyak 3 sekolah yang terdiri dari TK/RA Swasta 2 sekolah dan KB Swasta 2 sekolah.

Tabel 3 Jumlah Data Satuan Pendidikan (Sekolah) Anak Usia Dini Kabupaten Pesisir Barat Per Kecamatan

No.	KECAMATAN	TK/RA			KB			TPA			SPS			TOTAL
		N	S	JML	N	S	JML	N	S	JML	N	S	JML	
	TOTAL	6	147	153	0	50	50	0	1	1	0	4	4	208
1	Kec. Bangkunat	1	19	20	0	6	6	0	0	0	0	0	0	26
2	Kec. Pesisir Selatan	0	27	27	0	7	7	0	0	0	0	0	0	34
3	Kec. Ngambur	1	8	9	0	1	1	0	0	0	0	0	0	10
4	Kec. Lemong	3	21	24	0	7	7	0	0	0	0	1	1	32
5	Kec. Ngaras	0	12	12	0	0	0	0	1	1	0	0	0	13
6	Kec. Karya penggawa	0	17	17	0	6	6	0	0	0	0	2	2	25
7	Kec. Pesisir Tengah	1	14	15	0	9	9	0	0	0	0	1	1	25
8	Kec. Pesisir Utara	0	13	13	0	5	5	0	0	0	0	0	0	18
9	Kec. Krui Selatan	0	9	9	0	3	3	0	0	0	0	0	0	12
10	Kec. Pulau Pisang	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3
11	Kec. Way Krui	0	5	5	0	5	5	0	0	0	0	0	0	10

Sumber data : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016

Gambar 2. Jumlah Data Satuan Pendidikan (Sekolah) Anak Usia Dini Kabupaten Pesisir Barat Per Kecamatan



3.2.2. Jumlah Data Satuan Pendidikan (Sekolah) Dasar Dan Menengah Provinsi Lampung

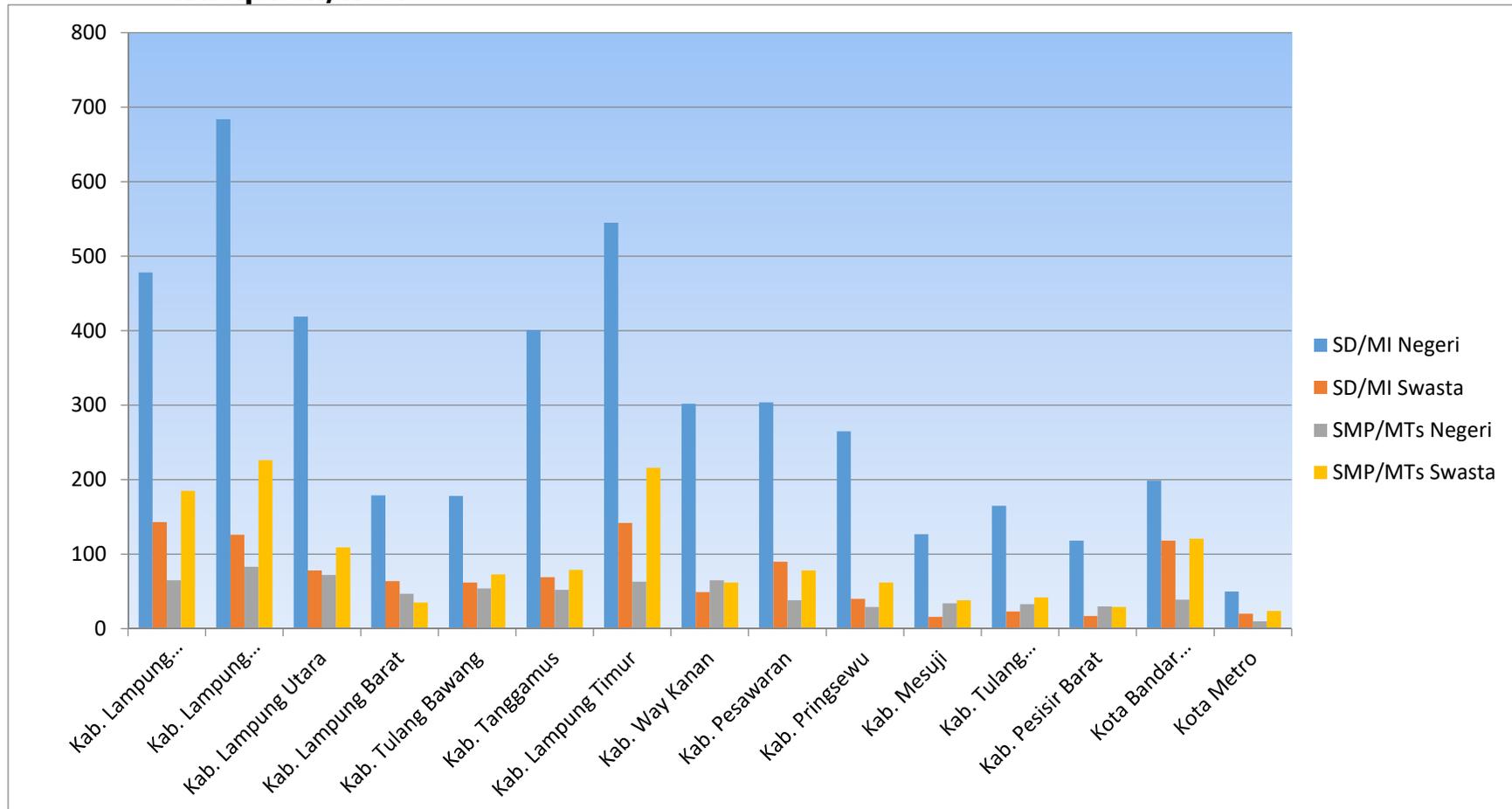
Provinsi Lampung memiliki 7.564 Sekolah Dasar dan Menengah yang terdiri dari SD/MI Negeri sebanyak 4.414 sekolah dan SD/MI Swasta sebanyak 1.057 sekolah, serta SMP/MTs Negeri sebanyak 714 sekolah dan SMP/MTs Swasta sebanyak 1.379 sekolah yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Dimana Kabupaten Lampung Tengah merupakan kabupaten dengan jumlah sekolah dasar dan menengah terbanyak di Provinsi Lampung yaitu sekolah yang terdiri dari SD/MI Negeri sebanyak 684 sekolah dan SD/MI Swasta sebanyak 126 sekolah serta SMP/MTs Negeri sebanyak 83 dan SMP/MTs Swasta sebanyak 226 Sekolah. Selain itu Kota Metro merupakan Kota di Provinsi Lampung dengan jumlah sekolah dasar dan menengah paling sedikit yaitu 104 sekolah yang terdiri dari SD/MI Negeri sebanyak 50 sekolah dan SD/MI Swasta sebanyak 20 Sekolah serta SMP/MTs Negeri sebanyak 10 sekolah dan SMP/MTs Swasta sebanyak 24 Sekolah. Sedangkan untuk Kabupaten Pesisir Barat kabupaten kedua jumlah sekolah dasar dan menengah yang sedikit dari 15 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung yaitu 194 sekolah yang terdiri dari SD/MI Negeri sebanyak 118 sekolah dan SD/MI Swasta Sebanyak 17 serta SMP/MTs Negeri sebanyak 30 Sekolah dan SMP/MTs Swasta sebanyak 29 Sekolah.

Tabel 4. Jumlah Data Satuan Pendidikan (Sekolah) Dasar Dan Menengah Provinsi Lampung Per Kabupaten/Kota

No.	KABUPATEN/KOTA	SD Sederajat			SMP Sederajat			TOTAL
		N	S	JML	N	S	JML	
	TOTAL	4,414	1,057	5,471	714	1,379	2,093	7,564
1	Kab. Lampung Selatan	478	143	621	65	185	250	871
2	Kab. Lampung Tengah	684	126	810	83	226	309	1119
3	Kab. Lampung Utara	419	78	497	72	109	181	678
4	Kab. Lampung Barat	179	64	243	47	35	82	325
5	Kab. Tulang Bawang	178	62	240	54	73	127	367
6	Kab. Tanggamus	401	69	470	52	79	131	601
7	Kab. Lampung Timur	545	142	687	63	216	279	966
8	Kab. Way Kanan	302	49	351	65	62	127	478
9	Kab. Pesawaran	304	90	394	38	78	116	510
10	Kab. Pringsewu	265	40	305	29	62	91	396
11	Kab. Mesuji	127	16	143	34	38	72	215
12	Kab. Tulang Bawang Barat	165	23	188	33	42	75	263
13	Kab. Pesisir Barat	118	17	135	30	29	59	194
14	Kota Bandar Lampung	199	118	317	39	121	160	477
15	Kota Metro	50	20	70	10	24	34	104

Sumber Data : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016

Gambar 3. Jumlah Data Satuan Pendidikan (Sekolah) Dasar Dan Menengah Provinsi Lampung Per Kabupaten/Kota



Jumlah Data Satuan Pendidikan (Sekolah) Dasar Dan Menengah Kabupaten Pesisir Barat Per Kecamatan.

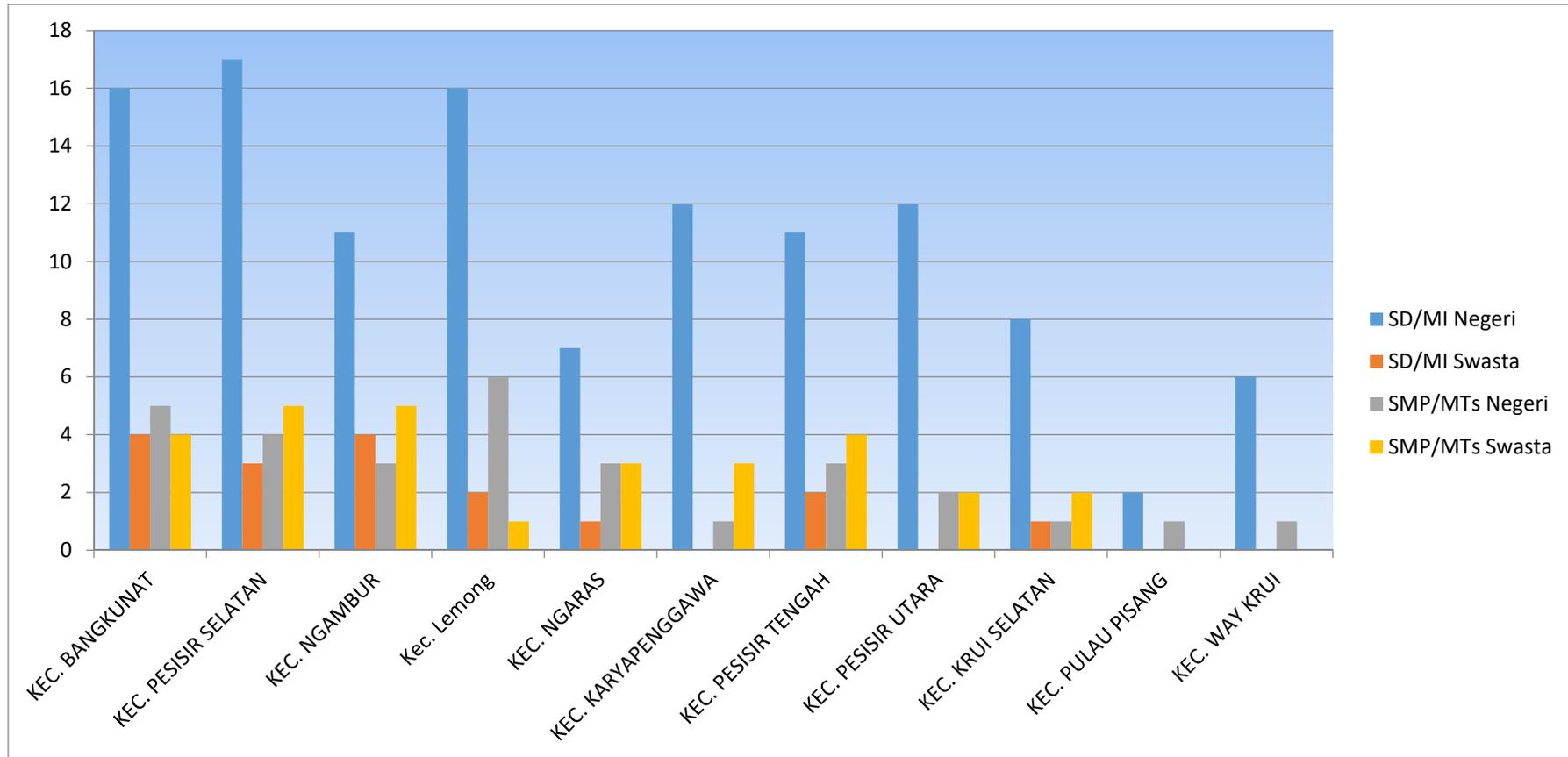
Kabupaten Pesisir Barat memiliki 194 Satuan Pendidikan (Sekolah) Dasar Dan Menengah baik Negeri Maupun Swasta yang terdiri dari SD/MI Negeri sebanyak 118 sekolah dan SD/MI Swasta Sebanyak 17 serta SMP/MTs Negeri sebanyak 30 Sekolah dan SMP/MTs Swasta sebanyak 29 Sekolah yang tersebar di 11 Kecamatan di kabupaten Pesisir Barat. Dimana Kecamatan Bengkunt dan Kecamatan Pesisir Selatan merupakan kecamatan dengan jumlah sekolah dasar dan menengah terbanyak di Kabupaten Pesisir Barat yaitu sebanyak 29 Sekolah yang terdiri dari SD/MI Negeri sebanyak 16 sekolah dan SD/MI Swasta 4 Sekolah serta SMP/MTs Negeri sebanyak 5 sekolah dan SMP/MTs Swasta 4 Sekolah dari Kecamatan Bengkunt dan untuk Kecamatan Pesisir Selatan terdiri dari SD/MI Negeri sebanyak 17 sekolah dan SD/MI Swasta 3 Sekolah serta SMP/MTs Negeri sebanyak 4 sekolah dan SMP/MTs Swasta 5 Sekolah. Sedangkan untuk kecamatan dengan jumlah sekolah dasar dan menengah yang sedikit adalah Kecamatan Pulau Pisang. Kecamatan Pulau Pisang dengan jumlah sekolah dasar dan menengah sebanyak 3 yang terdiri dari SD/MI Negeri sebanyak 2 sekolah serta SMP/MTs Negeri sebanyak 1 Sekolah.

Tabel 5. Jumlah Data Satuan Pendidikan (Sekolah) Dasar Dan Menengah Kabupaten Pesisir Barat Per Kecamatan.

No.	KECAMATAN	SD Sederajat			SMP Sederajat			TOTAL
		N	S	JML	N	S	JML	
	TOTAL	118	17	135	30	29	59	194
1	KEC. BANGKUNAT	16	4	20	5	4	9	29
2	KEC. PESISIR SELATAN	17	3	20	4	5	9	29
3	KEC. NGAMBUR	11	4	15	3	5	8	23
4	KEC. Lemong	16	2	18	6	1	7	25
5	KEC. NGARAS	7	1	8	3	3	6	14
6	KEC. KARYAPENGGAWA	12	0	12	1	3	4	16
7	KEC. PESISIR TENGAH	11	2	13	3	4	7	20
8	KEC. PESISIR UTARA	12	0	12	2	2	4	16
9	KEC. KRUI SELATAN	8	1	9	1	2	3	12
10	KEC. PULAU PISANG	2	0	2	1	0	1	3
11	KEC. WAY KRUI	6	0	6	1	0	1	7

Sumber data : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016

Gambar 4. Jumlah Data Satuan Pendidikan (Sekolah) Dasar Dan Menengah Kabupaten Pesisir Barat Per Kecamatan.



3.2.3. Jumlah Data Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Provinsi Lampung Per Kabupaten

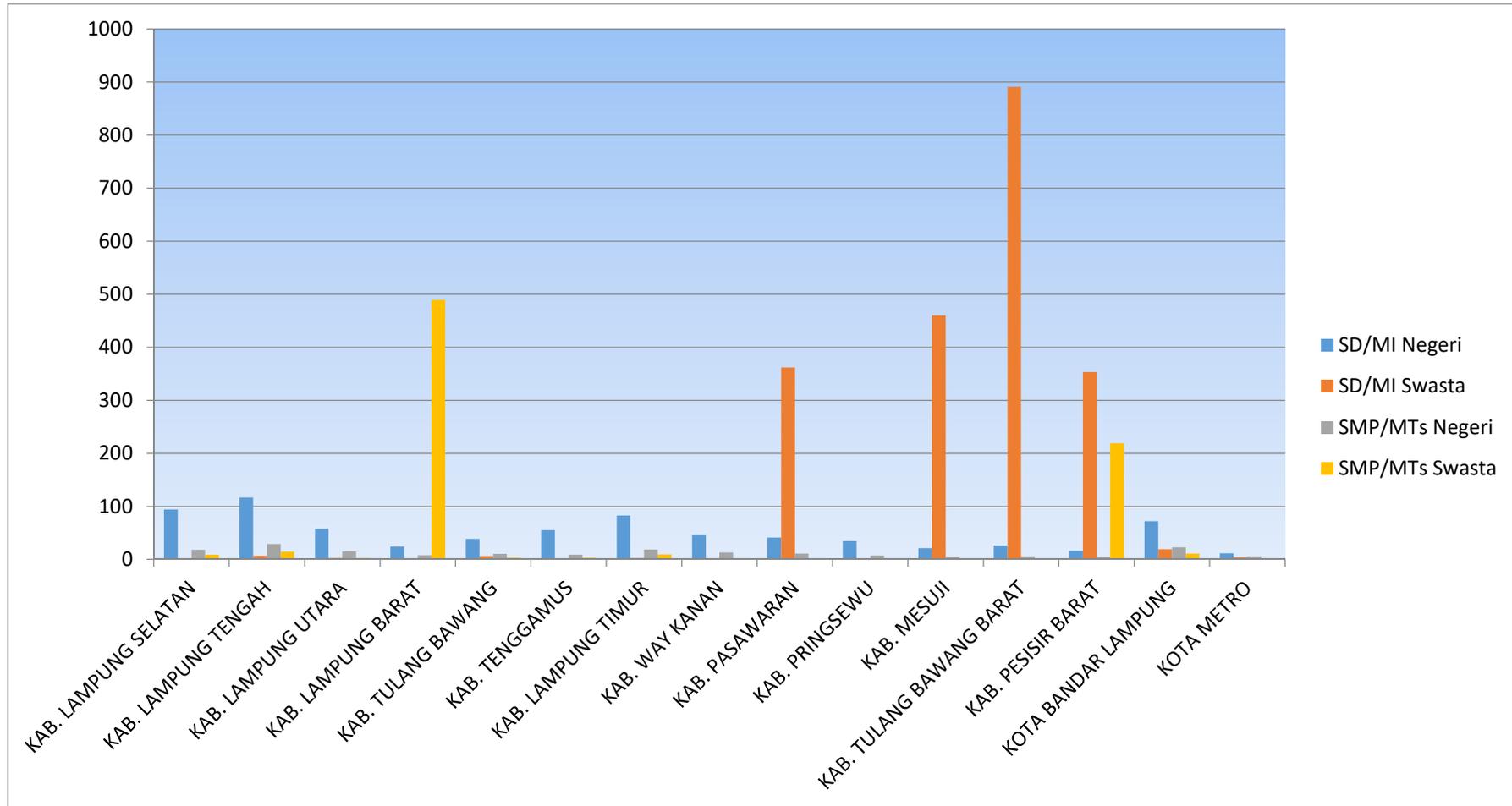
Provinsi Lampung memiliki Peserta Didik sebanyak 318.457 pada sekolah Menengah pertama baik swasta maupun negeri yang tersebar di 15 kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Dimana Kota bandar Lampung merupakan kabupaten dengan jumlah peserta didik terbanyak yaitu 46.639. Kabupaten Pesisir Barat merupakan kabupaten ketiga belas dengan jumlah peserta didik sekolah menengah pertama sebanyak 6.317 peserta. Dimana jumlah tersebut merupakan jumlah angkatan peserta didik yang paling rendah dibandingkan dengan 14 kabupaten/ kota yang berada di provinsi Lampung. Dengan adanya fakta tersebut maka dapat disimpulkan pula partisipasi sekolah menengah pertama di kabupaten pesisir barat rendah, dan diperlukan adanya terobosan untuk mendorong angka tersebut untuk terus naik sehingga berujung pada tingginya tingkat peserta didik sekolah menengah pertama di kabupaten pesisir barat dan dapat bersaing dengan kabupaten lain di Lampung bahkan di Indonesia.

Tabel 6. Jumlah Data Peserta Didik Provinsi Lampung Per Kabupaten

No	Provinsi	Tingkat/Grade VII		Tingkat/Grade VIII		Tingkat/Grade IX		Jumlah
	Province	Jml/No.	%	Jml/No.	%	Jml/No.	%	Total
1	Kab. Lampung Selatan	11,627	34.67	11,136	33.21	10,769	32.12	33,532
2	Kab. Lampung Tengah	15,837	33.88	15,709	33.61	15,194	32.51	46,74
3	Kab. Lampung Utara	8,284	34.12	8,152	33.58	7,841	32.30	24,277
4	Kab. Pesisir barat	3,725	35.45	3,467	33.00	3,315	31.55	10,507
5	Kab. Tulang Bawang	5,592	34.41	5,378	33.10	5,28	32.49	16,25
6	Kab. Tanggamus	6,624	34.65	6,331	33.12	6,16	32.23	19,115
7	Kab. Lampung Timur	12,54	33.42	12,693	33.83	12,29	32.75	37,523
8	Kab. Way Kanan	5,739	34.04	5,615	33.31	5,505	32.65	16,859
9	Kab. Pesawaran	5,232	34.52	5,023	33.14	4,9	32.33	15,155
10	Kab. Pringsewu	5,793	33.36	5,78	33.28	5,794	33.36	17,367
11	Kab. Mesuji	2,606	34.79	2,467	32.93	2,418	32.28	7,491
12	Kab. Tulang Bawang Barat	3,817	34.55	3,659	33.12	3,572	32.33	11,048
13	Kab. Pesisir Barat	2,226	35.24	2,085	33.01	2,006	31.76	6,317
14	Kota Bandar Lampung	15,988	34.28	15,589	33.42	15,062	32.29	46,639
15	Kota Metro	3,305	34.29	3,249	33.71	3,083	31.99	9,637
	Prov. Lampung	108,935	34.21	106,333	33.39	103,189	32.40	318,457

Sumber : Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2016

Gambar 5. Jumlah Data Peserta Didik Provinsi Lampung Per Kabupaten



Jumlah Data Peserta Didik Per Kabupaten Pesisir Barat Per Kecamatan

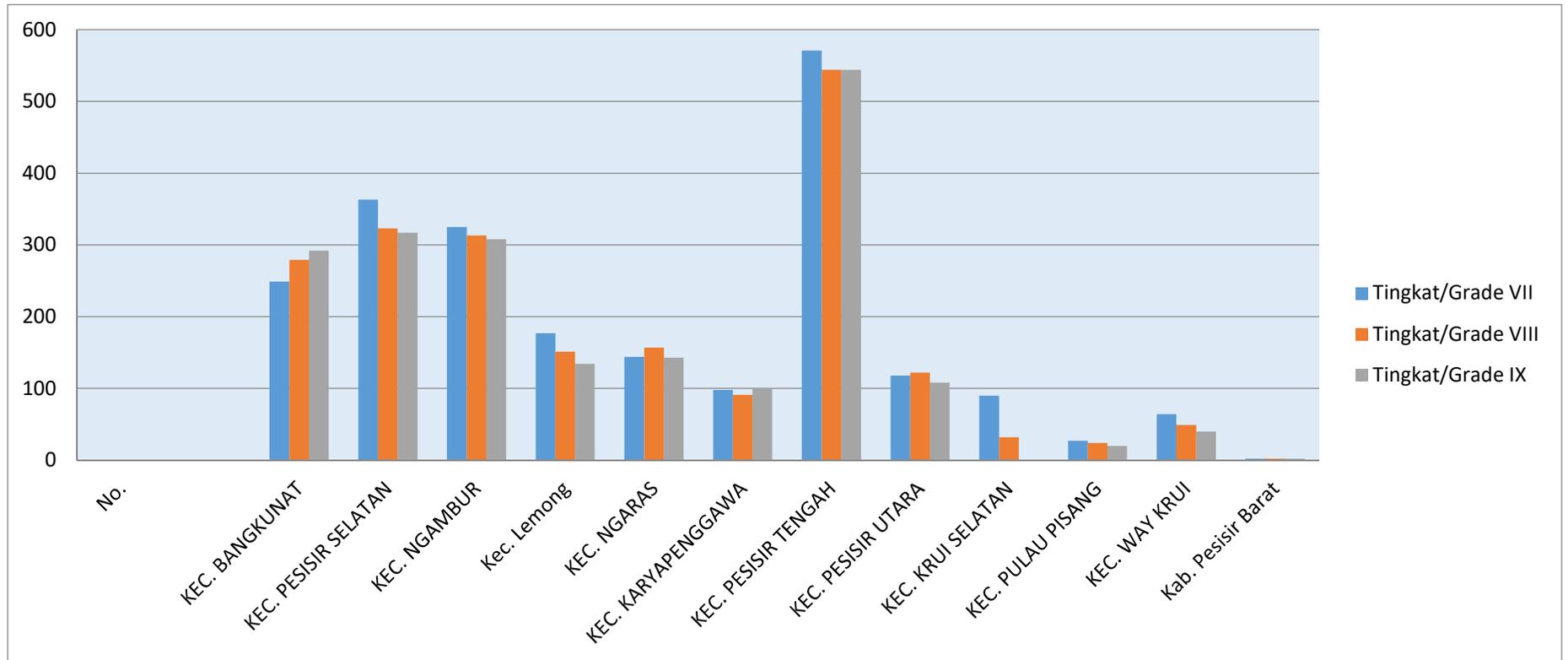
Kabupaten Pesisir Barat memiliki peserta didik 6.317 peserta didik SMP/MTs yang tersebar di 11 kecamatan di kabupaten Pesisir Barat. Dimana Kecamatan Pesisir Tengah adalah kecamatan dengan jumlah peserta didik sekolah menengah pertama paling banyak yaitu peserta didik yang terdiri dari 1.659 peserta didik. Sedangkan Kecamatan Pulau Pisang merupakan kecamatan dengan peserta didik paling sekolah menengah pertama sedikit yaitu 71 peserta didik.

Tabel 7. Jumlah Data Peserta Didik Per Kabupaten Pesisir Barat Per Kecamatan

No.	Provinsi	Tingkat/Grade VII		Tingkat/Grade VIII		Tingkat/Grade IX		Jumlah
	Province	Jml/No.	%	Jml/No.	%	Jml/No.	%	Total
1	Kec. Bangkumat	249	30.37	279	34.02	292	35.61	820
2	Kec. Pesisir Selatan	363	36.19	323	32.20	317	31.61	1,003
3	Kec. Ngambur	325	34.36	313	33.09	308	32.56	946
4	Kec. Lemong	177	38.31	151	32.68	134	29.00	462
5	Kec. Ngaras	144	32.43	157	35.36	143	32.21	444
6	Kec. Karya penggawa	98	33.91	91	31.49	100	34.60	289
7	Kec. Pesisir Tengah	571	34.42	544	32.79	544	32.79	1,659
8	Kec. Pesisir Utara	118	33.91	122	35.06	108	31.03	348
9	Kec. Krui Selatan	90	73.77	32	26.23	0	0.00	122
10	Kec. Pulau Pisang	27	38.03	24	33.80	20	28.17	71
11	Kec. Way Krui	64	41.83	49	32.03	40	26.14	153
Kab. Pesisir Barat		2,226	35.24	2,085	33.01	2,006	31.76	6,317

Sumber : kementerian pendidikan dan kebudayaan republik indonesia tahun 2016

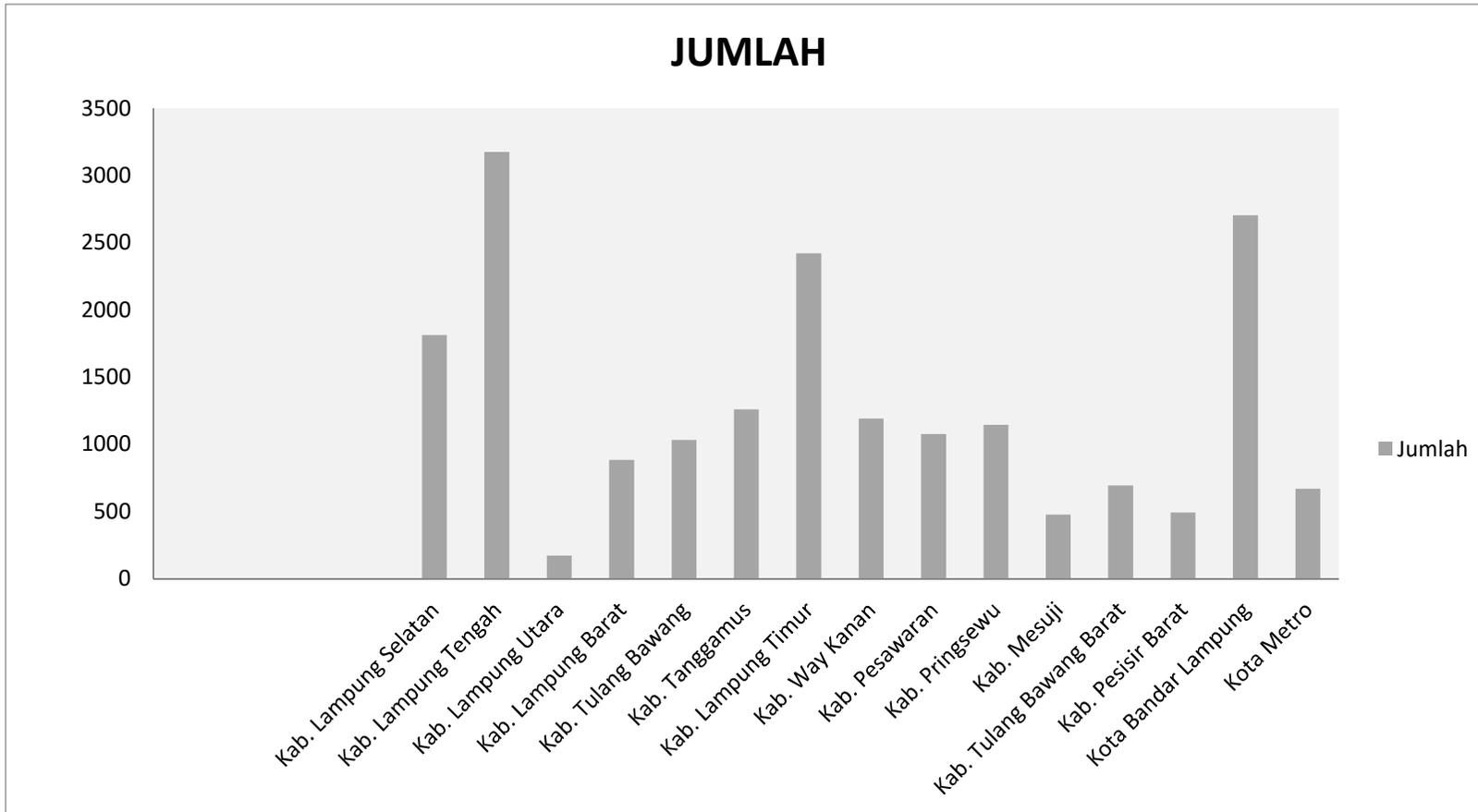
Gambar 6. Jumlah Data Peserta Didik Per Kabupaten Pesisir Barat Per Kecamatan



3.2.4 Jumlah Data Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (PTK) Provinsi Lampung Per Kabupaten

Provinsi Lampung memiliki Tenaga Kependidikan (PTK) 20.755. provinsi lampung sendiri terdiri dari 15 kabupaten/ kota dimana PTK terbanyak berada di kota Bandar Lampung dengan jumlah PTK 2.705 dan kabupaten/ kota dengan jumlah PTK terendah adalah di lampung utara yaitu sejumlah 476 PTK. Sedangkan pesisir barat berada di jumlah PTK terendah ketiga dengan 493 PTK. Sedangkan kabupaten lainnya seperti lampung selatan 1.812 PTK, lampung tengah 3.175 PTK, lampung barat 883 PTK, tulang bawang 1.033 PTK, tanggamus 1.259 PTK, lampung timur 2.422 PTK, way kanan 1.191 PTK, pesawaran 1.076 PTK, pringsewu 1.146 PTK, tulang bawang barat 493 PTK dan yang terakhir kota metro memiliki 670 PTK.

Gambar 7. Jumlah Data Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (PTK) Provinsi Lampung Per Kabupaten



Jumlah Data Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (PTK) Kabupaten Pesisir Barat Per Kecamatan

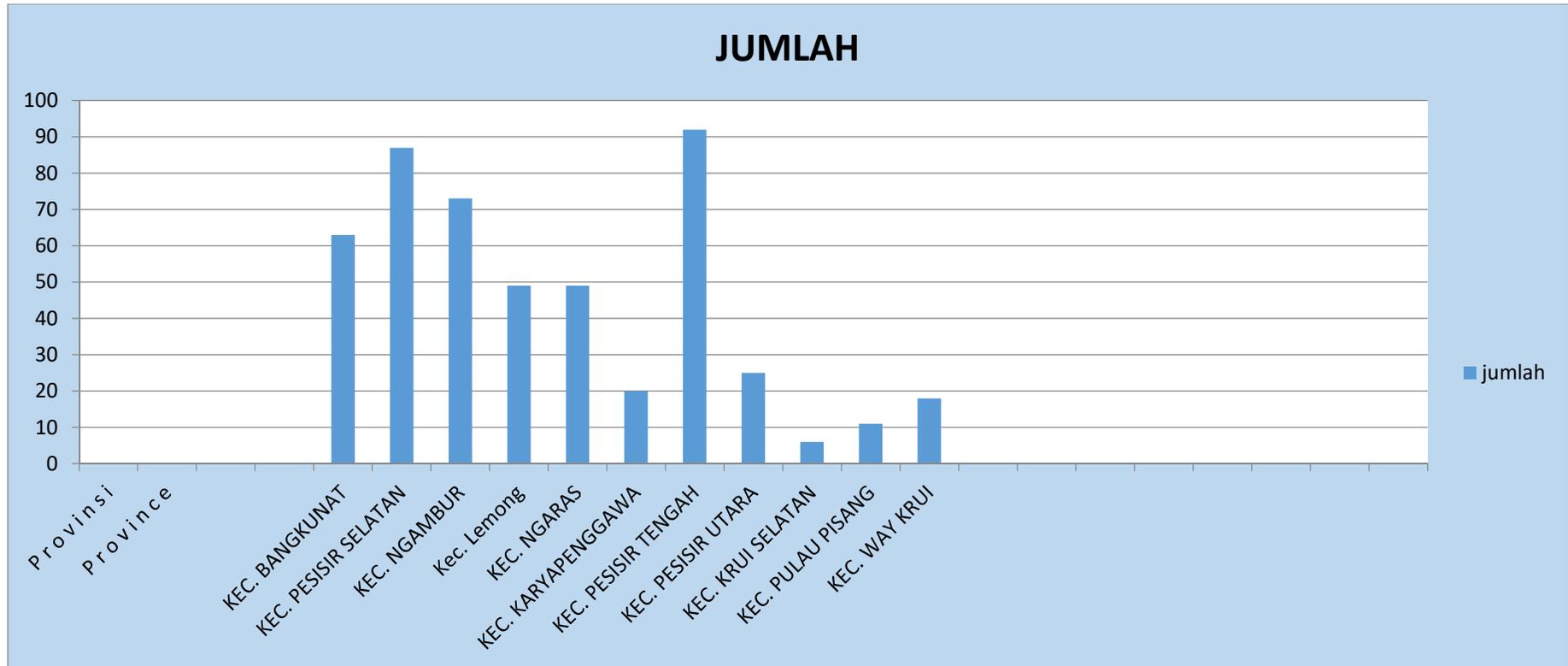
Kabupaten Pesisir barat memiliki 493 PTK. Dimana Kecamatan pasar tengah memiliki jumlah PTK paling banyak yaitu sejumlah 92 PTK, sedangkan kecamatan kroi selatan memiliki jumlah PTK paling rendah dari kesebelas kecamatan yang ada dipesisir barat yaitu sejumlah 6 PTK. Dan kecamatana yang lain seperti kecamatan bengkumat 63 PTK, pesisir selatan 87, ngambur 73 PTK, lemong 49 PTK, ngaras 49 PTK, karyapenggawa 40 PTK, pesisir utara 25 PTK, pulau pisang 11 PTK, dan terakhir kecamatan way kroi 18 PTK.

TABEL 8 JUMLAH PTK KABUPATEN PESISIR BARAT PER KECAMATAN

no.	Provinsi	Tetap /Full-time			Tidak Tetap /Part-time				Jumlah
	Province	PNS	Yayasan	Subjml.	Guru	Guru	GTT	Subjml.	Total
					Bantu	Honda			
		CS	Private	Sub Tot.	ATCG	ATLG	PTT	Sub Tot.	
1	KEC. BANGKUNAT	14	0	14	0	49	0	49	63
2	KEC. PESISIR SELATAN	47	1	48	0	29	10	39	87
3	KEC. NGAMBUR	24	11	35	0	38	0	38	73
4	Kec. Lemong	19	0	19	0	30	0	30	49
5	KEC. NGARAS	11	0	11	0	38	0	38	49
6	KEC. KARYAPENGGAWA	17	0	17	0	3	0	3	20
7	KEC. PESISIR TENGAH	72	0	72	0	20	0	20	92
8	KEC. PESISIR UTARA	13	0	13	0	12	0	12	25
9	KEC. KRUI SELATAN	1	5	6	0	0	0	0	6
10	KEC. PULAU PISANG	4	0	4	0	7	0	7	11
11	KEC. WAY KRUI	18	0	18	0	0	0	0	18
Kab. Pesisir Barat		240	17	257	0	226	10	236	493

Sumber : Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2017

GAMBAR 8 GRAFIK JUMLAH PTK KABUPATEN PESISIR BARAT PER KECAMATAN



3.3. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Pesisir barat

3.3.1. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Murni adalah Proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. Angka Partisipasi Murni berguna untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu.

Rumus Menghitung APM :

$$\text{APM SD 7 – 12 Tahun} = \frac{\text{Jumlah Penduduk SD Usia 7 – 12 Tahun Yang Masih Bersekolah}}{\text{Jumlah Penduduk SD Usia 7 – 12 Tahun}} \times 100\%$$

$$\text{APM SMP 13 – 15 Th} = \frac{\text{Jumlah Penduduk SMP Usia 13 – 15 Tahun Yang Masih Bersekolah}}{\text{Jumlah Penduduk SMP Usia 13 – 15 Tahun}} \times 100\%$$

Angka Partisipasi Kasar adalah Proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Sejak tahun 2007 Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. APK berguna Untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. APK yang tinggi

menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.

Berikut adalah Tabel data APM dan APK menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Pesisir barat :

Tabel 9 Angka Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat

Jenjang Pendidikan	APM (%)	APK (%)
SD/MI	97,66	109,38
SMP/MTs	84,44	94,01

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir barat, 2016

Berdasarkan Tabel 9 pada jenjang pendidikan SD/MI memiliki APM 97,66% yang menunjukkan bahwa banyak anak usia sekolah tingkat SD/MI yang bersekolah di Kabupaten Pesisir Barat. Sedangkan APK pada jenjang pendidikan SD/MI juga sangat tinggi dengan APK lebih dari 100 %, yaitu 109,38 % yang menandakan bahwa banyaknya siswa yang sekolah di Pesisir barat. Hal ini dapat dimungkinkan karena adanya siswa

yang berasal dari luar Kabupaten Pesisir Barat atau adanya siswa yang belum memasuki usia jenjang SD/MI namun sudah bersekolah di SD/MI.

Selanjutnya pada jenjang pendidikan SMP/MTs memiliki APM 84,44 % yang menunjukkan bahwa banyak anak usia sekolah tingkat SMP/MTs yang bersekolah di Kabupaten Pesisir barat sedangkan APK pada jenjang pendidikan SMP/MTs juga sangat tinggi dengan APK 94,01 % yang menandakan bahwa banyaknya siswa yang bersekolah di Pesisir Barat. Selain itu, dapat dilihat dari Tabel 9 bahwa baik APM maupun APK dari jenjang pendidikan SD/MI ke SMP/MTs selalu mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan banyaknya siswa yang bersekolah dijenjang pendidikan SMP/MTs dibandingkan jenjang pendidikan SD/MI.

Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan SD/MI lebih tinggi dibandingkan APM pada jenjang pendidikan SMP/MTs yaitu 97,66% berbanding 84,44%. Hal ini menunjukkan bahwa lebih banyak anak usia sekolah pada jenjang SD/MI yang bersekolah di Kabupaten Pesisir Barat Sedangkan APK pada jenjang pendidikan SD/MI juga lebih tinggi dibandingkan APK pada jenjang pendidikan SMP/MTs yaitu 109,38 berbanding 94,01.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

4.1 Visi dan Misi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Pesisir Barat

Untuk merumuskan visi dan misi pendidikan sekolah menengah pertama Kabupaten Pesisir Barat, diperlukan analisis mendalam terkait rencana strategis pendidikan nasional, tantangan pembangunan pendidikan di era globalisasi, dan capaian kinerja pendidikan. Perumusan visi dan misi pendidikan sekolah menengah pertama Pesisir Barat dilakukan dengan memperhatikan visi dan misi pendidikan nasional, pemerintah daerah provinsi Lampung, pendidikan provinsi Lampung, pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat, dan pendidikan Kabupaten Pesisir Barat. Perumusan visi pendidikan sekolah menengah pertama Pesisir Barat pada dasarnya harus (a) mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat; (b) merupakan arah dan fokus strategi yang ingin diwujudkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat; (c) sebagai orientasi masa depan seluruh jajaran organisasi Kabupaten Pesisir Barat; (d) diharapkan mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran organisasi Kabupaten Pesisir Barat; (e) membentuk satu ikatan dan menjamin kesinambungan kepemimpinan Kabupaten Pesisir Barat;

4.1.1 Visi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Pesisir Barat

Sejalan dengan visi pendidikan nasional 2025 yakni menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/ Insan Paripurna) dan visi pendidikan kabupaten Pesisir Barat yakni terwujudnya terwujudnya insan yang cerdas, terampil dan berakhlak mulia serta berwawasan lingkungan, maka visi pembangunan pendidikan sekolah menengah pertama Kabupaten Pesisir Barat menuju 2025 yang relevan adalah:

"Menghasilkan Insan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 yang Cerdas dan Berakhlak Mulia serta Berwawasan Lingkungan".

Untuk lebih memperjelas arah yang dituju, maka perlu diuraikan makna dari visi Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat tersebut sebagai berikut: (a) terwujudnya mutu pendidikan sekarang akan menjamin terwujudnya SDM yang cerdas, unggul, berdaya saing, dan berakhlak mulia, (b) kedepan yang diinginkan, mewujudkan pendidikan yang bermutu di semua jenjang dan jalur pendidikan, (c) untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing, perlu memberdayakan organisasi dan *stakeholder* pendidikan dalam peran serta pengelolaan pendidikan, (d) Untuk mewujudkan mutu pendidikan bermutu dan berdaya saing, para *stakeholders* harus mampu berkreatif, inovatif dalam menghadapi tantangan yang menghambat terwujudnya mutu pendidikan.

Visi yang dimaksud merupakan hasil integrasi dari beberapa kata esensial yang menggambarkan arahan pembangunan pendidikan sekolah menengah pertama Kabupaten Pesisir Barat yakni kualitas produk dan penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah pertama yang diharapkan.

Tujuan penyelenggaraan pendidikan adalah untuk menghasilkan produk pendidikan yang sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Produk yang diharapkan dari penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah pertama Kabupaten Pesisir Barat adalah dihasilkannya insan cerdas yang berakhlak mulia. Mutu pendidikan di Indonesia, menurut pendapat sebagian pengamat pendidikan kita, tidak meningkat, bahkan cenderung menurun. Salah satu indikatornya adalah menurunnya sikap dan perilaku moral para lulusan pendidikan kita yang semakin hari cenderung semakin jauh dari tatanan nilai-nilai moral yang dikehendaki. Untuk mengantisipasi persoalan semacam itu pendidikan kita perlu diperhatikan dengan serius, misalnya dengan direkonstruksi ulang agar dapat menghasilkan lulusan yang lebih berkualitas dan siap menghadapi "dunia" masa depan yang penuh dengan problema dan tantangan serta dapat menghasilkan lulusan yang memiliki sikap dan perilaku moral yang mulia (Marzuki, 2008).

Salah satu upaya untuk mewujudkan pendidikan seperti di atas, para peserta didik (siswa dan mahasiswa) harus dibekali dengan pendidikan khusus yang membawa misi pokok dalam pembinaan akhlak mulia. Pendidikan seperti ini dapat memberi arah kepada para peserta didik setelah menerima berbagai ilmu maupun pengetahuan dalam bidang studi (jurusan) masing-masing, sehingga mereka dapat mengamalkannya di tengah-tengah masyarakat dengan tetap berpatokan pada nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang universal.

Keluarnya Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), yakni UU No. 20 Tahun 2003, menegaskan kembali fungsi dan tujuan pendidikan nasional kita. Pada pasal 3 UU ini ditegaskan, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dengan demikian, mata pelajaran Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan mengemban misi yang amat mulia dalam pembangunan bangsa ini. Tentu saja semua mata pelajaran selain dua mata pelajaran itu juga bersama-sama memiliki misi tersebut secara terintegratif.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk perbaikan pendidikan adalah membangun kultur akhlak mulia di kalangan siswa. Kultur akhlak mulia dapat diartikan sebagai kualitas kehidupan yang tumbuh dan berkembang berdasarkan spirit dan nilai-nilai akhlak mulia yang menghiasi sikap dan perilaku manusia dalam pengabdian hidupnya sehari-hari. Pengabdian ini tercermin dalam dua hubungan manusia, yakni hubungan dengan Sang Pencipta, dan hubungan dengan sesama manusia, bahkan dalam berhubungan dengan alam sekitarnya.

Konsep Akhlak Mulia

Secara etimologis, kata akhlak berasal dari bahasa Arab al-akhlaq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Sinonim dari kata akhlak ini adalah etika dan moral. Sedangkan secara terminologis, akhlak berarti keadaan gerak jiwa yang mendorong ke arah melakukan perbuatan dengan tidak menghajatkan pikiran. Akhlak sebagai suatu sifat yang tetap pada jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak membutuhkan kepada pikiran.

Mengkaji dan mendalami konsep akhlak bukanlah yang terpenting, tetapi merupakan sarana yang dapat mengantarkan seseorang pada pengamalan akhlak mulia. Dengan pemahaman yang jelas tentang konsep akhlak, seseorang akan memiliki pijakan dan pedoman untuk mengarahkan tingkah lakunya sehari-hari, sehingga ia memahami apakah yang dilakukan benar atau tidak, termasuk akhlak mulia atau akhlak tercela.

Kecenderungan manusia pada kebaikan terbukti dalam kesamaan konsep pokok akhlak pada setiap peradaban dan zaman. Perbedaan perilaku pada bentuk dan penerapan yang dibenarkan ajaran agama merupakan hal yang baik. Tidak ada peradaban yang menganggap baik seperti tindak kebohongan, penindasan, keangkuhan, dan kekerasan. Sebaliknya tidak ada peradaban yang menolak keharusan menghormati kedua orangtua, keadilan, kejujuran, dan pemaaf sebagai hal yang baik. Namun demikian, kebaikan yang hakiki tidak dapat diperoleh melalui pencarian manusia dengan akalnyanya saja. Akhlak telah melekat dalam diri manusia secara fitriah. Dengan kemampuan fitriah ini ternyata manusia mampu membedakan batas kebaikan dan keburukan, dan mampu membedakan mana yang tidak bermanfaat dan mana yang tidak berbahaya.

Ruang lingkup akhlak mulia, secara umum akhlak dibagi menjadi dua, yaitu akhlak mulia dan akhlak tercela (buruk). Akhlak mulia adalah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sedang akhlak tercela adalah akhlak yang harus kita jauhi dan jangan sampai kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Menurut Islam ruang lingkup akhlak dibagi menjadi dua bagian, yaitu akhlak terhadap Tuhan dan akhlak terhadap makhluk. Akhlak terhadap makhluk masih dirinci lagi menjadi beberapa macam, seperti akhlak terhadap sesama manusia, akhlak terhadap makhluk hidup selain manusia (seperti tumbuhan dan binatang), serta akhlak terhadap benda mati.

Pembentukan Kultur Akhlak Mulia

Kata kultur terambil dari kata berbahasa Inggris, *culture*, yang berarti kesopanan, kebudayaan, atau pemeliharaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kultur juga diartikan sama, yakni kebudayaan, pemeliharaan, atau pembudidayaan. Kata kultur sekarang mulai banyak dipakai untuk menyebut budaya atau kebiasaan yang terjadi, sehingga dikenal istilah kultur sekolah, kultur kantor, kultur masyarakat, dan lain sebagainya.

Untuk lebih memahami makna kultur dan sekaligus pembentukan kultur, perlu dijelaskan satu makna tentang kultur sekolah. Kultur Sekolah adalah tradisi sekolah yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan spirit dan nilai-nilai yang dianut sekolah. Tradisi itu mewarnai kualitas kehidupan sebuah sekolah. Oleh karena itu, nilai-nilai yang ditunjukkan dari yang paling sederhana, misalnya cara mengatur parkir kendaraan guru, siswa, dan tamu, memasang hiasan di dinding- dinding ruangan, sampai persoalan-persoalan menentukan seperti kebersihan kamar kecil, cara guru dalam pembelajaran di ruang-ruang kelas, cara kepala sekolah memimpin pertemuan bersama staf, merupakan bagian integral dari sebuah kultur sekolah.

Dengan demikian kultur merupakan kebiasaan atau tradisi yang sarat dengan nilai-nilai tertentu yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai aspek kehidupan. Kultur dapat dibentuk dan dikembangkan oleh siapa pun dan di mana pun.

Pembentukan kultur akhlak mulia berarti upaya untuk menumbuhkan-kembangkan tradisi atau kebiasaan di suatu tempat yang diisi oleh nilai-nilai akhlak mulia.

Michele Borba dalam bukunya yang berjudul *Building Moral Intelligence: The Seven Essential Virtues That Kids to Do The Right Thing* (Membangun Kecerdasan Moral: Tujuh Kebajikan Utama Agar Anak Bermoral Tinggi) juga menawarkan pola atau model untuk pembudayaan akhlak mulia. Michele Borba menggunakan istilah membangun kecerdasan moral. Kecerdasan moral, menurut Michele Borba (2008: 4), adalah kemampuan seseorang untuk memahami hal yang benar dan yang salah, yakni memiliki keyakinan etika yang kuat dan bertindak berdasarkan keyakinan tersebut, sehingga ia bersikap benar dan terhormat. Hal ini adalah sifat-sifat utama yang dapat mengantarkan seseorang menjadi baik hati, berkarakter kuat, dan menjadi warga negara yang baik.

Bagaimana cara menumbuhkan karakter yang baik dalam diri anak-anak disimpulkannya menjadi tujuh cara yang harus dilakukan anak untuk menumbuhkan kebajikan utama (karakter yang baik), yaitu empati, hati nurani, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan hati, toleransi, dan keadilan. Ketujuh macam kebajikan inilah yang dapat membentuk manusia berkualitas di mana pun dan kapan pun. Meskipun sasaran buku ini adalah anak-anak, namun bukan berarti tidak berlaku untuk orang dewasa, termasuk para siswa di SD. Dengan kata lain tujuh kebajikan yang

ditawarkan oleh Michele Borba ini berlaku untuk siapa pun dalam rangka membangun kecerdasan moralnya.

Insan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Berkarakter Mulia

Pendidikan sekolah menengah pertama yang berkarakter mengacu suatu sistem pendidikan yang menanamkan nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Adapun karakter-karakter mulia yang ingin ditanamkan pada peserta didik pada tingkat pendidikan sekolah menengah pertama meliputi: cinta kepada Allah dan ciptaan-Nya (alam dengan isinya), tanggung jawab, jujur, hormat dan santun, kasih sayang, peduli, dan kerjasama, percaya diri, kreatif, kerja keras, dan pantang menyerah, keadilan dan kepemimpinan; baik dan rendah hati, toleransi, cinta damai, cinta persatuan, dapat dipercaya, rasa hormat dan perhatian, peduli, jujur, tanggung jawab; kewarganegaraan, ketulusan, berani, tekun, disiplin, visioner, adil, dan punya integritas.

Karakter merupakan bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, watak. Adapun berkarakter adalah berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, dan berwatak". Karakter mengacu kepada serangkaian sikap (*attitudes*), perilaku (*behaviors*), motivasi (*motivations*), dan keterampilan (*skills*).

Karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti "*to mark*" atau menandai dan memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku, sehingga orang yang tidak jujur, kejam, rakus dan perilaku jelek lainnya dikatakan orang berkarakter jelek. Sebaliknya, orang yang perilakunya sesuai dengan kaidah moral disebut dengan berkarakter mulia.

Karakter mulia berarti individu memiliki pengetahuan tentang potensi dirinya, yang ditandai dengan nilai-nilai seperti reflektif, percaya diri, rasional, logis, kritis, analitis, kreatif dan inovatif, mandiri, hidup sehat, bertanggung jawab, cinta ilmu, sabar, berhati-hati, rela berkorban, pemberani, dapat dipercaya, jujur, menepati janji, adil, rendah hati, malu berbuat salah, pemaaf, berhati lembut, setia, bekerja keras, tekun, ulet/gigih, teliti, berinisiatif, berpikir positif, disiplin, antisipatif, inisiatif, visioner, bersahaja, bersemangat, dinamis, hemat/efisien, menghargai waktu, pengabdian/dedikatif, pengendalian diri, produktif, ramah, cinta keindahan (estetis), sportif, tabah, terbuka, tertib. Karakteristik adalah realisasi perkembangan positif sebagai individu (intelektual, emosional, sosial, etika, dan perilaku).

Individu yang berkarakter baik atau unggul adalah seseorang yang berusaha melakukan hal-hal yang terbaik terhadap Tuhan YME, dirinya, sesama, lingkungan, bangsa dan negara serta dunia internasional pada umumnya dengan mengoptimalkan potensi (pengetahuan) dirinya dan disertai dengan kesadaran, emosi dan motivasinya (perasaannya).

Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai "*the deliberate use of all dimensions of school life to foster optimal character development*". Dalam pendidikan karakter di sekolah, semua komponen (pemangku pendidikan) harus dilibatkan, termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, penanganan atau pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan ko-kurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, dan ethos kerja seluruh warga sekolah atau lingkungan. Di samping itu, pendidikan karakter dimaknai sebagai suatu perilaku warga sekolah yang dalam menyelenggarakan pendidikan harus berkarakter.

Menurut David Elkind & Freddy Sweet (2004), pendidikan karakter dimaknai sebagai berikut: karakter adalah segala sesuatu yang dilakukan guru, yang mampu mempengaruhi karakter peserta didik. Guru membantu membentuk watak peserta didik. Hal ini mencakup keteladanan bagaimana perilaku guru, cara guru berbicara atau menyampaikan materi, bagaimana guru bertoleransi, dan berbagai hal terkait lainnya.

Menurut T. Ramli (2003), pendidikan karakter memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak.

Tujuannya adalah membentuk pribadi anak, supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat, dan warga negara yang baik. Adapun kriteria manusia yang baik, warga masyarakat yang baik, dan warga negara yang baik bagi suatu masyarakat atau bangsa, secara umum adalah nilai-nilai sosial tertentu, yang banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan bangsanya. Oleh karena itu, hakikat dari pendidikan karakter dalam konteks pendidikan di Indonesia adalah pendidikan nilai, yakni pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia sendiri, dalam rangka membina kepribadian generasi muda.

Pendidikan karakter berpijak dari karakter dasar manusia, yang bersumber dari nilai moral universal (bersifat absolut) yang bersumber dari agama yang juga disebut sebagai the golden rule. Pendidikan karakter dapat memiliki tujuan yang pasti, apabila berpijak dari nilai-nilai karakter dasar tersebut. Dewasa ini banyak pihak menuntut peningkatan intensitas dan kualitas pelaksanaan pendidikan karakter pada lembaga pendidikan formal. Tuntutan tersebut didasarkan pada fenomena sosial yang berkembang, yakni meningkatnya kenakalan remaja dalam masyarakat, seperti perkelahian massal dan berbagai kasus dekadensi moral lainnya. Bahkan di kota-kota besar tertentu, gejala tersebut telah sampai pada taraf yang sangat meresahkan. Oleh karena itu, lembaga pendidikan formal sebagai wadah resmi pembinaan generasi muda diharapkan dapat meningkatkan peranannya dalam pembentukan

kepribadian peserta didik melalui peningkatan intensitas dan kualitas pendidikan karakter.

Para pakar pendidikan pada umumnya sependapat tentang pentingnya upaya peningkatan pendidikan karakter pada jalur pendidikan formal. Namun demikian, ada perbedaan-perbedaan pendapat di antara mereka tentang pendekatan dan modus pendidikannya. Berhubungan dengan pendekatan, sebagian pakar menyarankan penggunaan pendekatan-pendekatan pendidikan moral yang dikembangkan di negara-negara barat, seperti: pendekatan perkembangan moral kognitif, pendekatan analisis nilai, dan pendekatan klarifikasi nilai. Sebagian yang lain menyarankan penggunaan pendekatan tradisional, yakni melalui penanaman nilai-nilai sosial tertentu dalam diri peserta didik.

Berdasarkan *grand design* yang dikembangkan Kemendiknas (2010), secara psikologis dan sosial kultural pembentukan karakter dalam diri individu merupakan fungsi dari seluruh potensi individu manusia (kognitif, afektif, konatif, dan psikomotorik) dalam konteks interaksi sosial kultural (dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat) dan berlangsung sepanjang hayat. Setelah kita amati, nampak jelas bahwa masalah yang serius dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan di berbagai jenjang pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Dan hal itulah yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan yang menghambat penyediaan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan keterampilan untuk memenuhi pembangunan

bangsa di berbagai bidang. Kualitas pendidikan Indonesia yang rendah itu juga ditunjukkan data Balitbang (2003) bahwa dari 146.052 SD di Indonesia ternyata hanya delapan sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori *The Primary Years Program* (PYP).

Dari 20.918 SMP di Indonesia ternyata juga hanya delapan sekolah yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori *The Middle Years Program* (MYP). Penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia antara lain adalah masalah efektifitas, efisiensi dan standarisasi pengajaran. Hal tersebut masih menjadi masalah pendidikan di Indonesia pada umumnya. Adapun permasalahan khusus dalam dunia pendidikan yaitu: rendahnya sarana fisik, rendahnya kualitas guru, rendahnya kesejahteraan guru, rendahnya prestasi siswa, rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, mahalnya biaya pendidikan.

Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Berdaya Saing

Kualitas penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah pertama merupakan faktor penting yang harus segera direalisasikan demi terwujudnya insan cendekia yang berdaya saing global. Kualitas pendidikan sekolah menengah pertama Kabupaten Pesisir Barat yang diharapkan adalah terwujudnya pendidikan sekolah menengah pertama yang berkarakter dan berdaya saing. Dewasa ini, entah disadari atau sekadar latah, hampir dalam setiap wacana mutu pendidikan kita muncul gagasan tentang pentingnya daya saing. "Mewujudkan bangsa yang

berdaya saing” malah menjadi misi kedua dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Atas dasar itu, Kemdikbud merumuskan visi Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang 2005-2025, “Menghasilkan insan Indonesia cerdas dan kompetitif”. Istilah daya saing sejatinya berusaha mengekstrapolasi konsep-konsep seleksi alam (*natural selection* dan *survival of the fittest*). Paham ini kemudian melahirkan “ideologi kekuatan” yang sebelum Perang Dunia II memacu perlombaan senjata dan perkembangan kapitalisme sebagai upaya bangsa-bangsa untuk sintas dalam alam yang konkuren.

Sekarang, istilah daya saing seperti jadi obsesi dalam merespons globalisasi. Globalisasi telah menjadikan dunia sebagai arena dan pasar terbuka yang dalam perspektif konkurensi ditafsir seolah hanya untuk bertarung dan saling mengalahkan. Padahal, sebenarnya globalisasi juga membuka peluang “bersulang” atau berbagi dan saling bekerja sama atas dasar mutualisme, kesederajatan, dan saling percaya. Bagi Pemerintah Indonesia, sebagaimana tertera dalam RPJPN, berdaya saing tinggi adalah kunci tercapainya kemajuan dan kemakmuran bangsa. Pembangunan sumber daya manusia harus diarahkan pada pengembangan kemampuan kompetitif yang tinggi (tentunya) menurut ukuran-ukuran global. Hanya dengan daya saing tinggi Indonesia akan siap dan mampu bertahan menghadapi tantangan-tantangan global.

Pemahaman mengenai pentingnya daya saing bangsa, muncul dan berkembang seiring dengan semakin berkembangnya globalisasi dan

perdagangan dunia. Berkaitan dengan itu, Hatten dan Resenthal (2000:5) menyatakan bahwa penguasaan bidang ilmu dan teknologi dalam kadar yang memadai sangat diperlukan agar masyarakat dapat meningkatkan kemampuan kreativitas, pengembangan, dan penerapan iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi) sebagai tuntutan yang mutlak dalam kehidupan global. Menurut Harrison dan Huntington (Subandowo, 2009:109), era globalisasi telah merubah paradigma yang sangat besar dalam sektor produktivitas yang menyangkut kekayaan suatu negara. Pada masa lampau kekayaan suatu negara dipandang berkait erat dengan sumber-sumber kekayaan alam yang dimiliki. Akan tetapi untuk ukuran sekarang, kekayaan suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia yang mampu mengubah sumber-sumber daya alam itu menjadi produk atau jasa yang berharga berdasarkan ilmu pengetahuan, investasi, gagasan, dan inovasi. Banyak sumber daya alam atau eksternal yang dulu menguntungkan suatu negara kini telah hilang karena arus perkembangan globalisasi.

Konteks baru dalam peningkatan daya saing antarbangsa dewasa ini adalah kebutuhan untuk mengetahui segala perubahan. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan penguasaan yang memadai bidang ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, tidak heran jika berbagai bangsa dapat kita saksikan sangat antusias berlomba dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan, termasuk menciptakan, mengembangkan, dan menggunakannya dalam rangka mencapai kesuksesan yang kompetitif.

Bagi suatu bangsa maupun organisasi bisnis, penguasaan ilmu pengetahuan baru sangat penting artinya untuk dapat berpartisipasi dalam era global. Pihak yang pantas menjadi pemenang dalam persaingan global adalah mereka yang mengetahui (knowing) bagaimana cara bertahan hidup dan mengetahui bagaimana mengembangkan kemampuan berorganisasi (Hatten dan Rosenthtal, 2000:7). Dalam kaitan ini, pendidikan merupakan unsur penting yang harus mendapat prioritas utama. Dalam kerangka itulah, pendidikan diharapkan dapat memberi sumbangan bagi perkembangan seutuhnya setiap orang, baik jiwa, raga, inteligensi, kepekaan, estetika, tanggung jawab, dan nilai-nilai spiritual.

Melalui pendidikan, setiap orang hendaknya dapat diberdayakan untuk berpikir mandiri dan kritis. Dalam dunia yang terus berubah dan diwarnai oleh inovasi sosial dan ekonomi, pendidikan tampak sebagai salah satu kekuatan pendorong untuk meningkatkan kualitas imajinasi dan kreativitas sebagai ungkapan dari kebebasan manusia dan standarisasi tingkah laku perorangan. Kesempatan atau peluang perlu diberikan kepada generasi muda untuk melakukan percobaan dan menemukan sesuatu yang baru (UNESCO, 1996:94).

4.1.2 Misi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Pesisir Barat

Misi pendidikan sekolah menengah pertama yang dirumuskan harus memberikan pelayanan yang menyakinkan masyarakat, memiliki

daya saing, dan memberikan manfaat sesuai kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan. Adapun misi pendidikan sekolah menengah pertama Kabupaten Pesisir Barat adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan, perluasan akses dan pelayanan pendidikan
- b. Mewujudkan masyarakat gemar bekerja dan berusaha
- c. Mewujudkan pelestarian nilai-nilai seni dan budaya
- d. Akselerasi Peningkatan mutu dan daya saing pendidikan sekolah menengah pertama berbasis IPTEK dan IMTAQ;
- e. Meningkatkan jaminan perolehan layanan pendidikan sekolah menengah pertama yang berkualitas;
- f. Akselerasi peningkatan kualitas tata kelola, manajemen, layanan pendidikan sekolah menengah pertama yang ramah, transparan, dan akuntabel;
- g. Percepatan peningkatan keterjangkauan layanan pendidikan berkualitas;
- h. Penerapan nilai-nilai agama, budaya dan karakter bangsa pada pendidikan sekolah menengah pertama Kabupaten Pesisir Barat;
- i. Peningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan guru sekolah dasar.

4.1.3 Tujuan dan Sasaran Strategis

Untuk merealisasikan visi dan misi Pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat, perlu dirumuskan tujuan dan sasaran-sasaran strategis tahun 2015-

2025 yang lebih jelas menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi.

A. Tujuan Strategis

Tujuan strategis yang hendak dicapai hingga tahun 2015-2025 dirumuskan berdasarkan jenjang layanan pendidikan dan sistem tata kelola yang diperlukan untuk menghasilkan layanan pendidikan sekolah menengah pertama yang berkualitas nasional 2025.

Adapun tujuan strategis tersebut adalah sebagai berikut:

- TS-1** Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan sekolah menengah pertama
- TS-2** Tersedianya sistem tata kelola pendidikan sekolah menengah pertama yang handal
- TS-3** Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan sekolah menengah pertama berbasis IPTEK dan IMTAQ yang berkualitas nasional, berkesetaraan, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat
- TS-4** Terwujudnya kesejahteraan dan profesionalisme guru sekolah dasar
- TS-5** Meningkatnya IPM Kabupaten Pesisir Barat

Keterangan: TS = Tujuan Strategis

Indeks Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat IPM adalah indeks ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kemajuan suatu daerah dilihat dari pembangunan sumber daya manusia yang dicerminkan dari suatu ukuran standar sebagai berikut :

1. Indeks atau Angka Harapan Hidup (*Life Expectancy*)
2. Indeks pendidikan yang dihitung dari Angka Melek Huruf (*Adult Literacy Rate*) dan Rata-rata Lama Sekolah (*Means Years of Schooling*).
3. Indeks daya Beli (*Adjust Real per Capital*).

IPM merupakan salah satu parameter untuk mengetahui capaian kinerja pembangunan suatu daerah, secara aplikatif telah menjadi landasan konseptual bagi daerah guna mengapresiasi berhasil atau tidaknya pembangunan yang dilakukan di daerah.

Berdasarkan realitas pemahaman tersebut, maka pemerintah daerah saat ini sangat *Concern* terhadap pencapaian IPM. Dengan memperhatikan situasi dan kondisi IPM Kabupaten Pesisir Barat saat ini, perlu dilakukan upaya-upaya strategis dalam rangka mengakselerasi pencapaian IPM bidang pendidikan tahun 2025. Mengingat tujuan pembangunan pendidikan Kabupaten Pesisir Barat yang sangat mengharapkan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pada bidang pendidikan, maka dengan adanya anggaran 20% yang telah disediakan perlu dirumuskan untuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bidang pendidikan.

Tujuan disusunnya Perencanaan dan Strategi Akselerasi Pencapaian IPM Bidang Pendidikan, adalah untuk :

1. Memberikan gambaran tentang kondisi umum capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Bidang Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat.
2. Melakukan analisis potensi dan permasalahan pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat, dikaitkan dengan capaian Angka Melek Huruf dan rata-rata Lama Sekolah, sebagai bahan penyusunan Perencanaan dan Strategi Akselerasi Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia di Bidang Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat.
3. Menggambarkan peran dan keterkaitan profil pendidikan sekolah menengah pertama di Kabupaten Pesisir Barat terhadap indeks IPM.
4. Penguatan peran pendidikan sekolah menengah pertama di Pesisir Barat dalam kontribusinya terhadap indeks IPM.

Analisis Pendidikan Dalam Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pesisir Barat

Berdasarkan analisis kondisi dan situasi dengan melihat profil atau gambaran umum tentang pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat, maka dapat dilakukan analisis terhadap kekuatan, kelemahan, tantangan dan

peluang pendidikan, yang mana diperlukan sebagai landasan dalam menentukan strategi pembangunan pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat.

Kekuatan Pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat

- a. Tingkat Kualitas pendidikan di Pesisir Barat yang memiliki kontribusi strategis di tingkat provinsi.
- b. Potensi peserta didik, tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana.
- c. Anggaran pendidikan yang tinggi atau $\geq 20\%$.
- d. Tingginya minat dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di semua tingkat pendidikan.
- e. Adanya kesadaran aparaturnya Kabupaten Pesisir Barat terhadap pentingnya pendidikan bagi pembangunan sumber daya manusia.
- f. Adanya peraturan daerah Kabupaten Pesisir Barat yang dapat menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat.
- g. Adanya komitmen pemerintah daerah Pesisir Barat memberikan sekolah gratis wajib belajar 12 Tahun.

Kelemahan Pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat

- a. Masih banyak kerusakan infrastruktur pendidikan sekolah menengah pertama khususnya di daerah terpencil dan pedalaman.
- b. Keadaan geografis dan penyebaran penduduk yang tidak merata.

- c. Kurang baiknya penyebaran guru, serta tidak meratanya sarana dan prasarana di Kabupaten Pesisir Barat.
- d. Relevansi pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja masih rendah, sehingga lulusan masih belum siap kerja.
- e. Belum optimalnya pemanfaatan PKBM yang ada.

Tantangan Pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat

- a. Banyaknya masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dan memiliki anak yang sedang bersekolah.
- b. Sikap *skeptis* masyarakat terhadap program pemerintah.
- c. Kurang percaya terhadap kemampuan pemerintah untuk menjamin pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Pesisir Barat.
- d. Banyaknya masyarakat usia produktif yang belum melek huruf.
- e. Sikap apatis masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan angka melek huruf di kabupaten Pesisir Barat.
- f. Sikap masyarakat yang "*Sekolah negeri minded*" mempengaruhi upaya peningkatan angka partisipasi.
- g. Banyaknya warga di Kabupaten Pesisir Barat yang tergolong miskin, yang menyekolahkan anak-anaknya sehingga menjadi beban pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
- h. Kabupaten Pesisir Barat masih tergolong kabupaten yang tertinggal.

Peluang Pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat.

- a. Semakin tingginya perhatian *stakeholder* pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat.
- b. Kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap partisipasi pendidikan bagi anak usia sekolah.
- c. Adanya kesepakatan bersama pemerintah Kabupaten Pesisir Barat untuk menyelenggarakan pendidikan gratis wajib belajar 12 tahun.
- d. Perhatian dan kontribusi masyarakat terhadap biaya pendidikan di sekolah sudah cukup tinggi.
- e. Pemerintah pusat dan provinsi masih memberikan bantuan biaya pendidikan yang cukup tinggi bagi pembangunan pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat.
- f. Masyarakat semakin kritis dan sadar mutu, sehingga muncul lembaga pendidikan swasta yang berkualitas sebagai mitra pemerintah.

B. Sasaran Strategis

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis pembangunan pendidikan diperlukan sejumlah indikator sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai setiap kurun waktu. Indikator tersebut merupakan ukuran keberhasilan dari pelaksanaan *Master Plan* Pendidikan Sekolah Menengah Pertama secara keseluruhan. Adapun rumusan sasaran strategis dan kebijakan strategis dikategorikan ke dalam tiga kelompok berikut:

a. Equity in the Distribution of Educational Services

Terjaminnya pemerataan dan perluasan kesempatan mengikuti pendidikan sekolah menengah pertama.

b. Educational Relevance and Quality Assurance

Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan.

c. Governance, Accountability, and Public Imaging

Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik Indikator ketercapaian dari setiap rumusan sasaran strategis dirangkum dalam beberapa tabel berikut:

Tabel 10 Indikator Sasaran Strategis

a. Indikator sasaran strategis untuk mencapai TS-1

Sasaran Strategis	Baseline 2016	2017-2019	2020-2025
APM SD/MI/Paket A	97,66%	Minimal 100%	Minimal 100%
APK SD/MI/Paket A	109,38%	Minimal 100%	Minimal 100%
APM SMP/MTs/Paket B	84,44%	Minimal 105%	Minimal 115%
APK SMP/MTs/Paket B	94,01%	Minimal 90%	Minimal 100%

b. Indikator sasaran strategis untuk mencapai TS-2

Sasaran Strategis	Baseline 2016	2017-2019	2020-2025
Audit laporan keuangan	Wajar Dengan Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Skor Laporan Akuntabilitas Kinerja	Minimal 87	Minimal 90	Minimal 90

c. Indikator sasaran strategis untuk mencapai **TS-3**

Sasaran Strategis	Baseline 2016	2017-2019	2020-2025
Satuan pendidikan anak usia dini formal menerapkan sistem pembelajaran yang membangun karakter (kejujuran, kepedulian, tanggung jawab dan toleransi) dan menyenangkan bagi anak	70%	90%	100%
Tersedianya sarana multimedia dan TIK lengkap penunjang pembelajaran di SD/MI dan SMP/MTs	80%	100%	100%
Rintisan sekolah dasar gratis dalam mendukung wajib belajar 12 tahun	70%	90%	100%
Menyelenggarakan standarpelayanan minimal SPM pendidikan sekolah menengah pertama yakni: menyediakan buku teks bagi para pelajar; menyediakan 100 buku pengayaan dan 10 buku referensi bagi sekolah dasar, serta 200 buku pengayaan dan 20 buku referensi bagi sekolah menengah pertama, dan; mengakomodir tidak lebih dari 32 murid per-kelas untuk tingkat SD/MI, dan 36 murid per kelas untuk tingkat SMP/MTs.	80%	100%	100%
Terbentuknya unit penelitian dan evaluasi pendidikan sekolah menengah pertama untuk pendidikan berbasis penelitian (<i>reseach-based education</i>)	60%	80%	100%

d. Indikator sasaran strategis untuk mencapai **TS-4**

Sasaran Strategis	Baseline 2016	2017-2019	2020-2025
Tunjangan sertifikasi guru sekolah menengah pertama	90%	100%	100%
Penguasaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran	80%	90%	100%

Penguasaan kompetensi professional guru: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, ▪ Penguasaan terhadap stuktur dan metodologi keilmuannya 	80%	90%	100%
Penguasaan kompetensi pedagogi guru <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemahaman guru terhadap peserta didik, ▪ Perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya 	90%	100%	100%
Penguasaan kompetensi kepribadian guru: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Keterlibatan guru dalam acara keagamaan di sekolah ▪ Keterlibatan guru dalam pembinaan kegiatan siswa ▪ Kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia 	90%	100%	100%
Penguasaan kompetensi sosial guru: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Keterlibatan guru dalam kegiatan sosial masyarakat ▪ Keterlibatan guru dalam komite sekolah dan koordinasi wali murid 	90%	100%	100%

BAB V

STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN SMP TAHUN 2017-2025

Berdasarkan analisis visi, misi, dan tujuan strategis pembangunan pendidikan yang dirumuskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat dengan tetap memperhatikan kesepakatan internasional mengenai pengembangan pendidikan, khususnya gerakan pendidikan untuk semua (*Education For All Movement*) dan hasil evaluasi capaian pembangunan pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat, maka dirumuskan beberapa strategi dan arah kebijakan pembangunan Pendidikan SMP tahun 2017-2025. Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan SMP tahun 2017-2025 dirumuskan untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggaraan Pendidikan SMP berikut cara-cara yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis.

Program-program yang dirumuskan harus cukup efektif untuk mencapai sasaran Pendidikan SMP selama kurun waktu 10 tahun. Telaah terhadap sasaran-sasaran strategis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya akan terlihat adanya sejumlah komponen yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan layanan pendidikan berkualitas 2025. Kebutuhan tersebut mencakup pembelajaran dan penilaian (*learning and assessment*), pendidik dan tenaga kependidikan (*educators and educational staff*), pendanaan pendidikan (*educational funding*), sarana dan prasarana (*infrastructure*), dan tata kelola (*management system*).

5.1 Strategi Pencapaian Tujuan

Strategi merupakan suatu bentuk atau rencana yang sistematis yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh. Tiap strategi menjelaskan komponen-komponen penyelenggaraan layanan pendidikan yang harus disediakan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis dari tiap tujuan strategis. Komponen-komponen tersebut meliputi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, sistem pembelajaran, data dan informasi, dana, serta sistem dan prosedur yang bermutu. Strategi yang baik disusun berdasarkan kemampuan internal dan kelemahan suatu institusi, antisipasi terhadap perubahan dalam lingkungan, serta berbagai ancaman yang mungkin dari luar. Dalam pemilihan strategi juga mempertimbangkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dan institusi, kesenjangan antarwilayah, gender, serta antar unit satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dan masyarakat. Keseluruhan faktor eksternal perlu dipertimbangkan agar strategi-strategi yang dikembangkan dapat secara efektif diterapkan untuk mencapai tujuan pendidikan.

5.1.1. Strategi Pencapaian Tujuan Strategis 1 (TS 1)

Tujuan strategis TS-1, yaitu terjaminnya kepastian memperoleh layanan Pendidikan SMP, dicapai dengan menggunakan strategi sebagai berikut:

- 1) Perumusan peraturan daerah (PERDA) wajib belajar dikdas bagi masyarakat Pesisir Barat
- 2) Pemberian beasiswa Pendidikan SMP bagi masyarakat Pesisir Barat
- 3) Penyuluhan sadar Pendidikan SMP secara masif bagi masyarakat Pesisir Barat
- 4) Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan Pendidikan SMP berkualitas
- 5) Penyediaan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran Pendidikan SMP non formal berkualitas
- 6) Peningkatan kesadaran masyarakat yang mendukung terwujudnya harmonisasi antara sekolah dan masyarakat
- 7) Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, data dan informasi berbasis riset, dan standar mutu pendidikan keaksaraan fungsional, pendidikan kecakapan hidup, *parenting education* serta;
- 8) Penyediaan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem *community learning* yang profesional.

5.1.2. Strategi Pencapaian Tujuan Strategis 2 (TS-2)

Tujuan strategis TS-2, yaitu tersedianya sistem tata kelola Pendidikan SMP yang handal, dicapai dengan menggunakan strategi sebagai berikut:

- 1) Penguatan garis haluan dan langkah kerja dan sistem kelembagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat
- 2) Penguatan sistem penganggaran dan perencanaan Pendidikan SMP di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat
- 3) Penguatan sistem pendataan SDM Pendidikan SMP dan keadaan sosial ekonomi masyarakat di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat
- 4) Penguatan fungsi pengontrolan internal (*internal controlling system*) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat.

5.1.3. Strategi Pencapaian Tujuan Strategi 3 (TS-3)

Tujuan strategis TS-3, yaitu tersedia dan terjangkau layanan Pendidikan SMP berbasis IPTEK dan IMTAQ yang berkualitas nasional, berkesetaraan, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, dicapai dengan menggunakan strategi sebagai berikut:

- (1) Penyediaan sarana prasarana lengkap pendukung penyelenggaraan Pendidikan SMP
- (2) Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi siswa SMP/MTs
- (3) Pembangunan fasilitas peribadatan bagi seluruh dan SMP/MTs
- (4) Pemberian beasiswa sekolah lanjut bagi guru-guru Pendidikan SMP.

5.1.4. Strategi Pencapaian Tujuan Strategis 4 (TS-4)

Tujuan strategis TS-4, yaitu terwujudnya kesejahteraan dan profesionalisme guru SMP, dicapai dengan menggunakan strategi sebagai berikut:

- 1) Pemberian insentif bagi guru berprestasi
- 2) Penyediaan sarana prasarana pendidikan
- 3) Peningkatan kapasitas/konten keilmuan guru dengan pelatihan/bimbingan teknis bagi guru SMP
- 4) Pelatihan pengelolaan kelas secara berkala bagi guru
- 5) Penyediaan klinik konsultasi guru Pendidikan SMP
- 6) Penguatan program *lesson study* bagi guru-guru Pendidikan SMP ke luar daerah.

5.1.5 Strategi Pencapaian Tujuan Strategis 5 (TS-5)

Tujuan strategis TS-5, yaitu Meningkatkan IPM Kabupaten Pesisir Barat, dicapai dengan menggunakan strategi sebagai berikut:

1. Pemerataan dan Perluasan Akses.
2. Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing.
3. Penguatan tata kelola dan pencitraan *public*.

5.2. Strategi Umum

Dari seluruh strategi pencapaian pembangunan Pendidikan SMP dapat dikelompokkan ke dalam strategi umum beberapa komponen sistem pendidikan sebagai berikut:

5.2.1 Komponen Pembelajaran dan Penilaian

Rumusan strategi umum pencapaian Pendidikan SMP untuk komponen pembelajaran dan penilaian adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan sistem pembelajaran dan penilaian (*learning and assessment system*) pada satuan Pendidikan SMP yang berkualitas sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan
2. Penyediaan data dan informasi serta akreditasi Pendidikan SMP yang handal.

5.2.2 Komponen Pendanaan

Rumusan strategi umum pencapaian Pendidikan SMP untuk komponen pendanaan adalah sebagai berikut:

1. Pemberian subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan Pendidikan SMP berkualitas yang merata diseluruh kecamatan
2. Pemberian subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran yang berkualitas.

5.2.3 Komponen Sarana dan Prasarana

Rumusan strategi umum pencapaian pendidikan dasar untuk komponen sarana dan prasarana adalah penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan SMP berkualitas di Kabupaten Pesisir Barat.

5.2.4 Komponen Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Rumusan strategi umum pencapaian Pendidikan SMP untuk komponen pendidik dan tenaga kependidikan adalah sebagai berikut:

1. Perekrutan pendidik dan tenaga pendidik pada jenjang Pendidikan SMP yang berkualitas.
2. Penyediaan manajemen satuan Pendidikan SMP yang berkualitas.

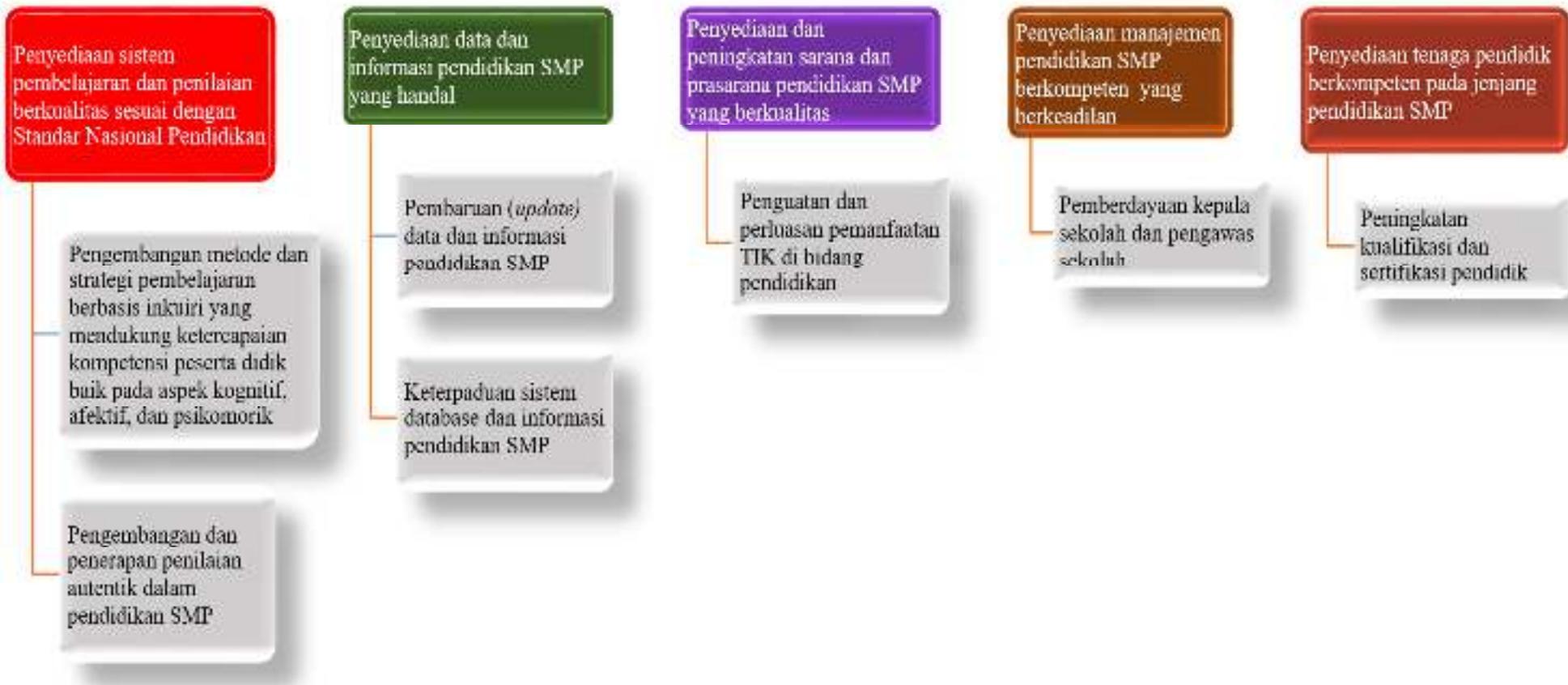
5.2.5 Komponen Tata Kelola

Rumusan strategi umum pencapaian Pendidikan SMP untuk komponen tata kelola adalah sebagai berikut:

1. Penataan struktur organisasi untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran strategis Pendidikan SMP berkualitas
2. Penguatan akuntabilitas sistem keuangan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat
3. Penguatan akuntabilitas pengelolaan aset milik negara di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat
4. Penguatan akuntabilitas sistem pengawasan internal di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat.

5.3. Arah Kebijakan

Arah kebijakan dibuat dengan memperhatikan strategi umum pembangunan Pendidikan SMP Kabupaten Pesisir Barat 2017-2025. Hubungan strategi umum dan arah kebijakan Pendidikan SMP adalah sebagai berikut.



Gambar 9. Hubungan Strategi Umum dan Arah Kebijakan Pendidikan SMP 2017-2025

5.3.1. Penerapan Metodologi Pendidikan Akhlak Mulia dan Berkarakter

Sistem pembelajaran saat ini dipandang belum secara efektif membangun peserta didik memiliki akhlak mulia dan karakter bangsa. Hal ini ditunjukkan dengan terjadinya degradasi moral seperti penyalahgunaan narkoba, radikalisme pelajar, pornografi dan pornoaksi, plagiarisme, dan menurunnya nilai kebanggaan berbangsa dan bernegara. Kebijakan untuk menanggulangi masalah ini antara lain adalah sebagai berikut:

- (1) Menanamkan pendidikan moral yang mengintegrasikan muatan agama, budi pekerti, kebanggaan warga negara, peduli kebersihan, peduli lingkungan, dan peduli ketertiban dalam penyelenggaraan pendidikan;
- (2) Mengembangkan kurikulum pendidikan yang memberikan muatan *soft skills* yang meningkatkan akhlak mulia dan menumbuhkan karakter berbangsa dan bernegara;
- (3) Menumbuhkan budaya peduli kebersihan, peduli lingkungan, dan peduli ketertiban melalui pembelajaran aktif di lapangan;
- (4) Penilaian prestasi keteladanan peserta didik yang mempertimbangkan aspek akhlak mulia dan karakter berbangsa dan bernegara;
- (5) Melakukan kajian dan penyempurnaan kurikulum pendidikan dan pelatihan agar lebih berorientasi pada pembentukan kreativitas dan kewirausahaan peserta didik sedini mungkin.

5.3.2. Keterpaduan Sistem Evaluasi Pendidikan

Meningkatnya partisipasi pendidikan belum sepenuhnya diikuti dengan system evaluasi pendidikan yang terpercaya. Salah satu indikatornya dapat dilihat dari indeks integritas sekolah. Untuk meningkatkan nilai indeks integritas sekolah, diperlukan kebijakan antara lain sebagai berikut:

- (1) Penyelenggaraan dan pengawasan Ujian Sekolah jenjang Pendidikan SMP yang kredibel dan berintegritas;
- (2) Penyempurnaan substansi Ujian Sekolah yang mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik meliputi aspek penilaian kognitif, afektif dan psikomotor;
- (3) Penyempurnaan sistem pemrosesan hasil Ujian Sekolah;
- (4) Penyusunan sistem yang menjamin keterpaduan hasil Ujian Sekolah dengan Ujian Nasional.

5.3.3. Penguatan dan Perluasan Pemanfaatan TIK di Pendidikan SMP

Pendayagunaan TIK diyakini dapat menunjang upaya peningkatan dan pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan, serta tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik terhadap pendidikan. Penerapan TIK untuk pendidikan dasar oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat dapat memperluas keterjangkauan pendidikan dasar, serta sekaligus penguatan tata kelola.

Kebutuhan akan penguasaan dan penerapan IPTEK dalam rangka menghadapi tuntutan global berdampak pada semakin meningkatnya peranan TIK dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam bidang pendidikan, meningkatnya kebutuhan untuk berbagi informasi dan pengetahuan dengan memanfaatkan TIK, serta perkembangan internet yang menghilangkan batas wilayah dan waktu untuk melakukan komunikasi dan akses terhadap informasi. Kondisi di atas menuntut diberlakukannya kebijakan di bidang TIK.

Penguatan pemanfaatan TIK untuk *e-learning*, e-management dan *e-administration* dilakukan antara lain melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana TIK serta muatan pembelajaran berbasis TIK untuk penguatan dan perluasan e-pembelajaran pada jenjang Pendidikan SMP;
- (2) Pengembangan e-manajemen, e-pelaporan, dan e-layanan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola dan layanan publik.
- (3) Pengembangan sistem pengelolaan pengetahuan untuk mempermudah dalam berbagi informasi dan pengetahuan antar peserta didik dan tenaga pendidik;
- (4) Pengembangan pusat sumber belajar berbasis TIK pada Pendidikan SMP;

- (5) Peningkatan kemampuan SDM untuk mendukung pendayagunaan TIK di SMP.

5.3.4. Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah

Selain tenaga pendidik, kepala sekolah dan pengawas sekolah memegang peranan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Permasalahan yang dihadapi kepala sekolah adalah lemahnya kompetensi manajerial, sedangkan yang dihadapi pengawas sekolah adalah lemahnya kompetensi kepengawasan.

Secara khusus, kepala SMP menghadapi permasalahan tingginya beban kerja karena tidak mempunyai tenaga administrasi sekolah. Pemberdayaan kepala sekolah dan pengawas sekolah dilakukan antara lain melalui kebijakan- kebijakan sebagai berikut:

- (1) Pemberian beasiswa S-2 bagi kepala sekolah dan pengawas sekolah;
- (2) Penyelenggaraan diklat manajemen dan kepemimpinan yang berkualitas untuk kepala sekolah dan diklat pengawasan yang berkualitas bagi pengawas sekolah;
- (3) Revitalisasi organisasi profesi tenaga kependidikan MKKS/MKPS;
- (4) Menyediakan tenaga administrasi sekolah di setiap SMP.

5.3.5. Peningkatan Kualifikasi dan Sertifikasi Pendidik

Undang-Undang RI No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen menempatkan guru dan dosen sebagai profesi. Guru harus memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S-1/D-4 dan bersertifikat pendidik, sedangkan dosen harus memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S-2/S-3 dan bersertifikat pendidik.

Pemerintah harus menyelesaikan peningkatan kualifikasi dan sertifikasi pendidik selambat-lambatnya pada akhir tahun 2014. Untuk mencapai target tersebut, pada tahun 2010-2014 Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat akan mempertahankan kebijakan-kebijakan peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru yang antara lain adalah sebagai berikut:

- (1) Peningkatan sistem rekrutmen guru berkualifikasi S1/D4 yang berkompeten;
- (2) Pemberian beasiswa untuk meningkatkan kualifikasi guru menjadi S-1/D-4 dan peningkatan kualifikasi dosen menjadi S-2/S-3;
- (3) Peningkatan pembinaan profesionalisme guru berkelanjutan melalui kegiatan KKG/MGMP.

5.3.6.Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan inti dari berbagai program prioritas guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Reformasi birokrasi sangat diperlukan sejalan dengan tanggung jawab yang semakin besar karena harus mengelola anggaran pendidikan sebesar

20% dari APBN/APBD. Reformasi birokrasi dilaksanakan antara lain melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

- (1) Restrukturisasi organisasi yang mendukung visi dan misi Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat, khususnya terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan SMP;
- (2) Penyempurnaan tata laksana;
- (3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- (4) Pengembangan sistem pengukuran dan remunerasi berbasis kinerja;
- (5) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

5.4. Sasaran Strategis, Kebijakan Strategis, Program Prioritas serta Tahapan Pencapaian Tahunan Selama Tahun 2017-2025

Sasaran strategis, kebijakan strategis, program prioritas serta tahapan pencapaian setiap tahun selama tahun 2017-2025, dapat dilihat seperti pada Tabel berikut ini :

Tabel 11. Tujuan Strategi dan Program Pengembangan Pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat 2017-2025

No	Tujuan	Strategi	Program	Sasaran
1	Terjaminnya kepastian memperoleh layanan Pendidikan SMP	1. Perumusan peraturan daerah (PERDA) wajib belajar dikdas bagi masyarakat Pesisir Barat.	1. Perumusan peraturan daerah (PERDA) wajib belajar dikdas 2. Sosialisasi peraturan daerah (PERDA) wajib belajar dikdas 3. Penerapan peraturan daerah (PERDA) wajib belajar dikdas	Masyarakat Pesisir Barat
		2. Pemberian beasiswa Pendidikan SMP bagi masyarakat Pesisir Barat	1. Penyediaan Beasiswa. 2. Pembinaan Siswa berprestasi dikdas. 3. Pemberia bantuan belajar.	Siswa Sekolah dikdas
		3. Penyuluhan sadar Pendidikan SMP secara masif bagi masyarakat Pesisir Barat	1. Penyuluhan sadar Pendidikan SMP 2. Sosialisasi pentingnya dikdas	Siswa Sekolah Dikdas dan Masyarakat

No	Tujuan	Strategi	Program	Sasaran
		4. Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan Pendidikan SMP berkualitas.	1. Memberikan subsidi dana Pendidikan SMP. 2. Memberikan keterjangkauan layanan Pendidikan SMP	Siswa Sekolah Dikdas
		5. Penyediaan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran Pendidikan SMP non formal berkualitas	1. Menyediakan subsidi pembiayaan Pendidikan SMP non formal 2. Menerapkan sistem pembelajaran Pendidikan SMP non formal berkualitas	Masyarakat Pesisir Barat
		6. Peningkatan kesadaran masyarakat yang mendukung terwujudnya harmonisasi antara sekolah dan masyarakat	1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dikdas 2. Mewujudkan harmonisasi antara sekolah dan masyarakat	Sekolah Dikdas dan Masyarakat

No	Tujuan	Strategi	Program	Sasaran
		7. Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, data dan informasi berbasis riset, dan standar mutu pendidikan keaksaraan fungsional, pendidikan kecakapan hidup, <i>parenting education</i> serta;	1. Menyediakan pengembangan sistem pembelajaran, data dan informasi berbasis riset. 2. Melakukan peningkatan standar mutu pendidikan keaksaraan fungsional, pendidikan kecakapan hidup, <i>parenting education</i>	Sekolah dikdas
		8. Penyediaan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem <i>community learning</i> yang profesional.	1. Menyediakan subsidi pembiayaan Dikdas. 2. Menerapkan sistem <i>community learning</i> yang profesional.	Siswa Dikdas
2	Tersedianya sistem tata kelola Pendidikan SMP yang handal	1. Penguatan garis haluan dan langkah kerja dan sistem kelembagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat	1. Melakukan penguatan garis haluan. 2. Melakukan langkah kerja dan sistem kelembagaan	Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat

No	Tujuan	Strategi	Program	Sasaran
		2. Penguatan sistem penganggaran dan perencanaan Pendidikan SMP di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat.	1. Melakukan Penguatan sistem penganggaran. 2. Melakukan perencanaan Pendidikan SMP	Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat
		3. Penguatan sistem pendataan SDM Pendidikan SMP dan keadaan sosial ekonomi masyarakat di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat	1. Melakukan Penguatan sistem pendataan SDM Pendidikan SMP. 2. Melakukan Penguatan sistem pendataan keadaan sosial ekonomi masyarakat	Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat
		4. Penguatan fungsi pengontrolan internal (<i>internal controlling system</i>) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat.	1. Melakukan penguatan fungsi pengontrolan internal (<i>internal controlling system</i>)	Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat

No	Tujuan	Strategi	Program	Sasaran
3	Tersedia dan terjangkau layanan Pendidikan SMP berbasis IPTEK dan IMTAQ yang berkualitas nasional, berkesetaraan, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat	1. Penyediaan sarana prasarana lengkap pendukung penyelenggaraan Pendidikan SMP	1. Menyediakan sarana prasarana pendukung penyelenggara Dikdas. 2. Mengawasi penggunaan sarana prasarana pendukung penyelenggara Dikdas.	Sekolah Dikdas
		2. Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi siswa SMP/MTs	1. Memberikan bantuan biaya pendidikan bagi siswa SMP/MTs. 2. Memberikan Beasiswa bagi siswa dikdas yang berprestasi	Siswa Dikdas
		3. Pembangunan fasilitas peribadatan bagi seluruh SMP/MTs	1. Membangun fasilitas peribadatan bagi seluruh SMP/MTs 2. Merenovasi fasilitas peribadatan bagi seluruh SMP/MTs	Sekolah Dikdas
		4. Pemberian beasiswa sekolah lanjut bagi guru-guru Pendidikan SMP.	1. Memberikan Pemberian beasiswa sekolah lanjut bagi guru-guru Pendidikan SMP	Guru Dikdas

No	Tujuan	Strategi	Program	Sasaran
4	Terwujudnya kesejahteraan dan profesionalisme guru SMP	1. Pemberian insentif bagi guru berprestasi	1. Program guru berprestasi tahunan Se-Pesisir Barat 2. Pekan Ilmiah guru	Guru SMP
		2. Penyediaan sarana prasarana pendidikan	1. Pembelian sarana dan prasarana SMP 2. Renovasi gedung sekolah yang rusak 3. Penyediaan sarana dan prasarana sekolah	SMP
		3. Peningkatan kapasitas/konten keilmuan guru dengan pelatihan/bimbingan teknis bagi guru SMP	1. Memberikan pelatihan teknis bagi guru SMP 2. Memberikan bimbingan teknis bagi guru SMP	Guru SMP
		4. Pelatihan pengelolaan kelas secara berkala bagi guru	1. Pelatihan pengelolaan kelas bagi guru 2. Worksop-workshop bagi guru Pendidikan SMP 3. Seminar kependidikan bagi guru SMP	Guru SMP

No	Tujuan	Strategi	Program	Sasaran
		5. Penyediaan klinik konsultasi guru Pendidikan SMP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun klinik konsultasi guru. 2. Mensosialisasikan Klinik konsultasi guru. 3. Melayani konsultasi guru SMP 	Guru SMP
		6. Penguatan program <i>lesson study</i> bagi guru-guru Pendidikan SMP ke luar daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan dana bagi guru untuk melakukan <i>lesson study</i> bagi guru-guru Pendidikan SMP. 2. Memperkuat program <i>lesson study</i> bagi guru-guru Pendidikan SMP ke luar daerah 	Guru SMP

No	Tujuan	Strategi	Program	Sasaran
5	Meningkatnya IPM Pesisir Barat	1. Pemerataan dan Perluasan Akses.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stimulan dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan PADU 2. Mendorong peran serta masyarakat dalam pendidikan PADU 3. Bantuan biaya operasional Pendidikan SMP. 4. Pengadaan perpustakaan sekolah 5. Rehabilitasi ruang kelas 6. Pembangunan USB dan RKB Pendidikan SMP terutama SMP. 7. Penyelenggaraan kelas layanan khusus di SMP 	SMP

No	Tujuan	Strategi	Program	Sasaran
		2. Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan model pendidikan PADU 2. Peningkatan kapasitas institusi dan sumber daya penyelenggara pendidikan PADU. 3. Pengembangan tenaga pendidik dan tenaga Kependidikan PADU. 4. Pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, dan sistem penilaian Pendidikan SMP. 5. Pengembangan profesi tenaga Pendidikan SMP. 6. Perbaikan sarana dan bahan ajar Pendidikan SMP. 	SMP

No	Tujuan	Strategi	Program	Sasaran
		3. Penguatan tata kelola dan pencitraan <i>public</i> .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Pendidikan PADU. 2. Pengembangan kapasitas dewan pendidikan dan komite sekolah. 3. Pengembangan EMIS. 	Masyarakat dan SMP